



# KILASAN KINERJA 2018 KEMENDIKBUD

(NOVEMBER 2017 - NOVEMBER 2018)

Kerja Kita **Prestasi Bangsa**



**KILASAN KINERJA 2018  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN**

## Kilasan Kinerja 2018

### Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

#### Pelindung:

Didik Suhardi | didik.suhardi@kemdikbud.go.id

#### Penanggung Jawab:

Hendarman | hendarman@kemdikbud.go.id

#### Pengarah Materi:

Kholid Fathoni | kholid.fathoni@kemdikbud.go.id

Kurniawan | kurniawan@kemdikbud.go.id

Rusprita Putri Utami | rusprita.utami@kemdikbud.go.id

Diana Damey | diana.damey@kemdikbud.go.id

#### Kontributor artikel:

Seluruh unit utama Kemendikbud

#### Chief Editor

Soeparto

Ananto Kusuma Seta

Arie Budhiman

Nasrullah

#### Editor:

Annisa | Dwi Astuti annisa.astuti01@kemdikbud.go.id

De Rizky Kurniawan | derizkyk@gmail.com

Dwiyani Widhiharsi Kusuma Putri | dwiyani.widhiharsi@kemdikbud.go.id

Gigih Anggana Yuda | gigih.yuda@kemdikbud.go.id

Ian Lapoh Morda Rumbai Simarmata | ian.Lapoh@kemdikbud.go.id

Kosasih Ali Abu Bakar | kosasih.ali@kemdikbud.go.id

Marista Rita Sinaga | marista.sinaga@kemendikbud.go.id

Miftahusururi | miftahusururi@kemdikbud.go.id

Namira Assagaf | namira.assagaf01@kemdikbud.go.id

Yulaika Ernawati | yulaika.ernawati@kemdibud.go.id

Dr. Luh Anik Mayani | annie\_mayani@yahoo.com

#### Editor Foto, Desain Sampul, dan Tata Letak

Prista Rediza redizaredi@gmail.com

Muhammad Abdurrahman Aditama aditamasoeharso2@gmail.com

#### Sekretariat:

Ana Arham | ana.arham07@kemdikbud.go.id

Yuliah Suwarni | yuliah.suwarni@kemdikbud.go.id

#### Kuangan:

Diana Damey | diana.damey@kemdikbud.go.id

Rika Hidayat | rika.hidayat@kemdikbud.go.id

#### Diterbitkan oleh:

Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat – 10270

**KILASAN KINERJA 2018 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**ISBN 978-602-73386-6-1**

#### TAKRIF:

SILA HUBUNGI SURAT ELEKTRONIK DI ATAS

UNTUK MENDISKUSIKAN ISI BUKU INI LEBIH LANJUT



**Assalamu’alaikum Wr. Wb.,**

**Namo Buddhaya,**

**Om Swastiastu,**

**Shalom,**

SeTahun telah berlalu sejak diterbitkannya Buku Kilasan Kinerja Kemendikbud Tahun 2017 lalu. Sama seperti tiga Tahun sebelumnya, buku ini mengangkat kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), khususnya selama periode November 2017 hingga Oktober 2018. Memperkuat pendidikan dan memajukan kebudayaan masih menjadi fokus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun ini, sesuai dengan tema yang diangkat pada Rembuk Nasional dan Pendidikan dan Kebudayaan pada awal 2018 ini.

Sesuai dengan tema tersebut juga, saya berharap buku ini bisa berperan sebagai sumber informasi dan refleksi bagi kinerja Kemendikbud seTahun ke belakang. Hasil kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari hasil kerja kita bersama, termasuk Anda, yang melahirkan karya dan prestasi bagi bangsa ini. Begitu banyak hal juga yang dapat kita jadikan sebagai inspirasi hingga pelajaran dalam ikhtiar kita menciptakan ekosistem pendidikan dan kebudayaan bagi manusia Indonesia yang lebih baik.

Terima kasih. Selamat membaca dan menikmati kerja kita bersama ini.

Selamat membaca.

**Wassalamu’alaikum Wr. Wb.,**

**Namo Buddhaya,**

**Om Swastiastu,**

**Shalom**

Jakarta, Oktober 2018

Muhadjir Effendy

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



## PEMERATAAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN

01 | Program Indonesia Pintar:  
Perluasan Kesempatan Belajar  
Anak Usia Sekolah

11 | Upaya Peningkatan  
Kualitas Pendidikan  
Melalui UN dan USBN

05 | Zonasi Sebagai Strategi  
Pembangunan Pendidikan  
yang Terintegrasi

16 | Penyediaan dan Pengendalian  
Buku Pendidikan yang Bermutu,  
Murah, dan Merata

21 | Pembangunan Sarana  
dan Prasarana Pendidikan

25 | Penguatan Pendidikan Karakter  
Sebagai Ruh Pendidikan Bangsa

## REVITALISASI VOKASI, DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

71 | Kebijakan Kemitraan Antara  
Lembaga Pendidikan Vokasi  
dan Industri

81 | Keahlian Ganda Sebagai  
Langkah Strategis Pemenuhan  
Guru Produktif di SMK

86 | Peningkatan Kompetensi Guru  
Sebagai Bagian Program  
Revitalisasi SMK

89 | Program Pendidikan Kecakapan  
Kerja di Banyuwangi

## Kerja Kita **Prestasi Bangsa**

33 | Rumah Peradaban Sebagai  
Media Pembelajaran Perajut  
Tenun Kebangsaan

39 | Pengembangan  
Budaya Baca

41 | Bahan Bacaan Pengayaan  
Pelajaran Bahasa Indonesia

45 | Tol Langit, Bantuan TIK, dan Pelatihan  
Sekolah Pada Daerah 3T :  
Upaya kemendikbud Menciptakan  
Pendidikan yang Demokratis  
Adil dan Merata

52 | Pengembangan Model  
Layanan Kurikulum Tingkat  
Satuan Pendidikan di  
Papua dan Papua Barat

57 | Penguatan Bela Negara  
Dalam Implementasi  
Kurikulum Pendidikan

62 | Akreditasi :  
Dari *Compliance*  
Ke *Performance*

67 | Penciptaan Tradisi Prestasi,  
Penanaman Budi Pekerti  
dan Cinta Tanah Air

93 | pembentukan Guru Profesional  
Melalui Sertifikasi Guru Dalam  
Jabatan

97 | Program Perlindungan Guru  
Direktorat Jenderal Guru  
dan Tenaga Kependidikan Tahun  
2018

100 | Pertukaran Kepala Sekolah dan  
Kemitraan Guru Sebagai Upaya  
Mengurangi Kesenjangan Kualitas  
Pendidikan Antar Daerah

106 | Program Pendidikan dan Pelatihan  
(DIKLAT) Berjenjang Bagi Guru dan Tenaga  
Kependidikan (GTK) Pendidikan Anak  
Usia Dini (PAUD)

110 | Apresiasi GTK  
PAUD dan DIKMAS

113 | Pemilihan Guru dan Tenaga  
Kependidikan Berprestasi dan  
Berdedikasi

## APRESIASI GURU, LAHIRKAN PRESTASI BANGSA

## KUALITAS PEMBELAJARAN



## PENDIDIKAN USIA DINI, CIKAL BAKAL GENERASI EMAS

- 116 | PAUD : Investasi Masa Depan
- 118 | Peningkatan Mutu PAUD dan Target Nawacita
- 120 | Komitmen Indonesia Hebat Lewat PAUD HI
- 124 | Penguatan PAUD Daerah Pinggiran Melalui Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T
- 125 | 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Nutrisi, dan Stimulasi
- 128 | Pelibatan Keluarga Efektif Kendalikan Perilaku Siswa

## PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA MELALUI GENERASI TERAMPIL

- 160 | SKB Kota Sukabumi: Mendulang Prestasi, Memperkuat Jati Diri
- 162 | Gerakan Literasi Nasional
- 165 | Wilayah Terbina Penggunaan Bahasa di Ruang Publik
- 168 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Program Beasiswa Unggulan
- 170 | Pengentaskan Kemiskinan Melalui Wirausaha
- 172 | Sensor Mandiri Wujud Kepribadian Bangsa
- 180 | Lema Dalam Kamus dan Pengembangan Istilah

## Kerja Kita **Prestasi Bangsa**

- 132 | Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)
- 133 | Penetapan Warisan Budaya Tak Benda
- 134 | Registrasi Nasional Cagar Budaya
- 136 | Belajar Bersama Maestro 2018
- 138 | Revitalisasi Desa Adat
- 140 | Lawatan Sejarah Nasional
- 142 | Pameran Besar Seni Rupa
- 145 | Fasilitas Komunitas Budaya
- 147 | Indonesiana
- 149 | Gerakan Seniman Masuk Sekolah
- 151 | Seniman Mengajar
- 154 | Kongres Kebudayaan Indonesia 2018

## MAJUKAN KEBUDAYAAN MEMPERKUAT IDENTITAS BANGSA

- 182 | Pemetaan Bahasa Sebagai Upaya Perlindungan Khazanah Bahasa Daerah Indonesia
- 185 | Hari Film Nasional 2018
- 187 | Fasilitasi Pengembangan Perfilman
- 190 | Akreditasi Sebagai Penjaminan Mutu Pendidikan
- 194 | Duta Rumah Belajar: Ambassador Provinsi Dalam Pemanfaatan TIK Untuk Pembelajaran
- 196 | Pengiriman Tenaga Pengajar Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) Sebagai Wujud Diplomasi Bahasa
- 199 | Restorasi Film Pagar kawat Berduri

## TINGKATKAN TATA KELOLA, HADIRKAN LAYANAN PRIMA

- 202 | Peran Pemerintah Dalam RNPk 2018
- 208 | Neraca Pendidikan Daerah (NPD)
- 216 | Pelayanan Publik yang Responsif Melalui Unit Layanan Terpadu (ULT)
- 225 | Perkuat Dari Dalam Untuk Cegah korupsi
- 230 | Lima Tahun Berturut-turut Dengan Predikat WTP
- 232 | Peningkatan Akuntabilitas Dalam Pengadaan Langsung
- 237 | Rencana Pembangunan Pusat Asesmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 239 | Darmasiswa
- 241 | *One Single Submission* (OSS)
- 244 | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
- 247 | Sistem Informasi Pemantauan dan Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (SIPERPU)
- 250 | Aplikasi Naskah Dinas Elektronik: Inovasi Untuk Birokrasi yang Lebih Baik
- 257 | Kerja Kita Prestasi Bangsa: Menuju *Smart ASN*
- 258 | Penilaian Kinerja Secara Daring dan *Mobile Android*
- 259 | Kilas Kinerja 2018 Biro Sumber Daya Manusia
- 263 | PKTBT Berbasis *E-Learning*: Sahabat Calon PNS Milenial yang Profesional
- 266 | SIMDIKLAT: E-Layanan Prima Untuk Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 268 | Habitasi dan Magang CPNS
- 272 | Program Magang Bagi PNS Baru di Luar Negeri
- 274 | SEAMEO Indonesia
- 276 | TV Edukasi versi Bergerak: Komitmen Kemendikbud Untuk Kemudahan Akses Konten Pendidikan
- 278 | Penanganan Gempa Nusa Tenggara Barat
- 283 | Penanganan Gempa Nusa Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong





# MENGUATKAN PENDIDIKAN, MEMAJUKAN KEBUDAYAAN

Pada Tahun ke-empat pemerintahan Kabinet Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla ini, Kemendikbud senantiasa melanjutkan dan meningkatkan ikhtiar kita bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan. Setelah pada Tahun pertama pemerintah menyiapkan fondasi yang menyokong pewujudan cita-cita, dilanjutkan dengan mempercepat langkah dan bekerja secara nyata mewujudkan cita-cita pada Tahun kedua, lalu pada Tahun ke-tiga pemerintah berjanji pemerataan hasil-hasil pembangunan, hasil kerja bersama kita, pada Tahun ke-empat ini kita semua dapat menyaksikan seluruh usaha dan kerja kita tersebut menjadi bagian dari prestasi bangsa Indonesia ini.

Selama empat Tahun ini, Kemendikbud senantiasa mengimplementasikan Nawacita dalam program kerja, termasuk program prioritas Kemendikbud. Program Prioritas tersebut antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan, serta Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Demi menghadirkan layanan terbaik, Kemendikbud telah mengembangkan layanan PIP sesuai perkembangan zaman. Kebaharuan tersebut antara lain, untuk

memperoleh manfaat PIP berupa uang tunai, siswa tidak lagi harus antri di teller bank. Siswa juga dapat dengan mudah mengambil dana PIP dengan menggunakan KIP-ATM pada ATM terdekat milik bank penyalur PIP yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.

Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan masih menjadi fokus Kemendikbud demi menyambut persaingan global dan revolusi industri 4.0. PPK tetap menjadi fokus Kementerian demi melahirkan bangsa yang cerdas dan berkarakter. Beberapa upaya dan program dilakukan agar PPK dan praktik baiknya tidak hanya sekedar dikenal, namun juga diimplementasikan di seluruh penjuru Indonesia.

Tahun 2018 ini juga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melanjutkan upaya pemerataan pendidikan yang salah satunya dilakukan melalui implementasi sistem zonasi. Sistem zonasi yang diterapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru ini diharapkan dapat menghadirkan layanan pendidikan yang tidak hanya merata dari segi kualitas, namun juga akses. Pemerataan akses dan kualitas juga dilakukan dengan berbagai upaya melalui berbagai program, baik di bidang pendidikan dan kebudayaan. Beberapa

program seperti Seniman Mengajar dan Belajar Bersama Maestro juga merupakan upaya dan solusi untuk menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan bersamaan. Sebagai kelanjutan dari diterbitkan Undang-Undang Pemajuan Budaya di Tahun 2017 juga telah dilakukan Indonesiana dan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, di samping program bidang kebudayaan lainnya.

Beranjak dari kesadaran bahwa penguatan internal merupakan salah satu kunci untuk mengoptimalkan kinerja Kemendikbud demi melaksanakan tugas dan fungsinya, berbagai program terus dilaksanakan oleh Kemendikbud. Penghargaan Pengelolaan Kepegawaian Terbaik dari BKN

Berbagai inovasi dan kebaruan yang dilakukan pada Tahun 2018 adalah Penilaian Kinerja Berbasis Android, PKTBT Berbasis e-Learning: Sahabat Calon PNS Milenial yang Profesional, SIMDIKLAT: e-Layanan Prima untuk Peserta Pelatihan, serta dilakukannya Tour of Duty dan Tour of Area, Habitua-si dan Magang CPNS, dan Magang PNS Baru di Luar Negeri sebagai upaya peningkatan kualitas aparat Kemendikbud.





## PROGRAM INDONESIA PINTAR



Program Indonesia Pintar dimulai tahun 2015 sampai bulan Agustus 2018 telah disalurkan dana seluruhnya sebesar **Rp.35.740.676.660.000.-**

### REALISASI PENYALURAN KIP SISWA JENJANG SD (dalam juta)



### REALISASI PENYALURAN KIP SISWA JENJANG SMP (dalam juta)



### REALISASI PENYALURAN KIP SISWA JENJANG SMA (dalam juta)



### REALISASI PENYALURAN KIP JENJANG SMK (dalam juta)



## REVITALISASI SMK



## PEMBENAHAN KUALITAS GURU



Tunjangan 2018  
- Tunjangan profesi guru non-PNS: 210.269 guru  
- Tunjangan Khusus Guru Non-PNS: 23.751 guru

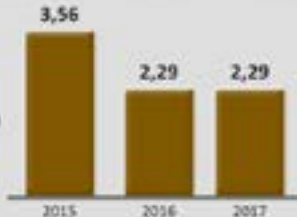
Tahun 2015 buta aksara di Indonesia sebanyak 5,9 juta jiwa dan pada tahun 2018 sebanyak 3,3 juta orang

## PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

Target hingga tahun 2019 menurunnya jumlah buta aksara di beberapa daerah kantong buta aksara



Angka Buta Aksara nasional terus menurun



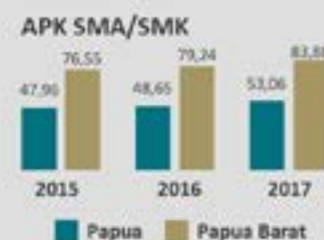
## PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)

Indeks Penerapan Nilai Utama PPK Berdasarkan Hasil Survei Pemangku Kepentingan



Grafik Perkembangan Penyebaran PPK (2015-2018)

## PEMBANGUNAN PAPUA & PAPUA BARAT



## UJIAN NASIONAL

### PESERTA UN BERBASIS KOMPUTER (UNBK)



tahun 2018  
**8,1 Juta** 100 Ribu  
Peserta UNBK dan UNBK Terpadu

## REALISASI UNDANG-UNDANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN



Koleksi museum yang dikelola  
**106.624** Karya seni



Cagar budaya yang diregistrasi  
**78.884** Cagar budaya



Karya seni yang dikelola  
**2.925** Koleksi



Karya budaya yang diinventarisasi  
**3.027** Koleksi



Warisan budaya nasional dan dunia yang dikelola  
**320** Warisan budaya



Desa adat yang direvitalisasi  
**441** Desa adat



Cagar budaya yang dikelola  
**3.027** Cagar budaya

## PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES KEBUDAYAAN



**2.194** Orang

Jumlah pengunjung Galeri Nasional



**973.274** Orang

Jumlah pengunjung Museum Nasional



**1.242** Sekolah

Jumlah sekolah yang menerima fasilitasi alat-alat kesenian



**360.440** Orang\*

Jumlah orang yang mengakses cagar budaya



**126.432** Orang\*

Jumlah orang yang terlibat dalam pelestarian nilai/budaya



**1.074** Komunitas

Jumlah komunitas budaya yang menerima fasilitas

\*data sampai tahun 2017

## PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI KEBUDAYAAN (I/II)

Sejak tahun 2014 s/d 2018



**Kemah Budaya Nasional**

5 Lokasi  
5.000 Orang



**Persemaian Nilai Budaya**  
(Melalui media inspiratif)  
101 Lokasi

65.650 Guru  
65.650 Siswa



**828** Belajar Bersama Maestro



**54.200** Seniman Masuk Sekolah

## PENGEMBANGAN BAHASA



Dapat diakses di  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

- Jumlah lema 110.173 lema terdiri dari 128.786 makna.
- mencapai lebih dari 26.474.348 pencarian kata (per 24 oktober 2018)



**478** Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) telah dikirim ke luar negeri sarana diplomasi untuk mengembangkan dan membina hubungan baik antarbangsa dan antarnegara.

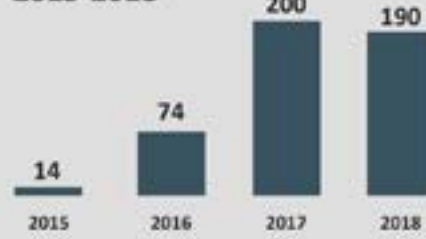


**668** bahasa daerah teridentifikasi



**546** buku cerita rakyat

### Pengiriman Pengajar BIPA 2015-2018



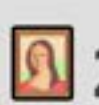
## EUROPEAN ARTS FESTIVAL 2017

meningkatkan branding Indonesia lewat rangkaian program kebudayaan di Eropa; diantaranya :



**95**

Pertunjukan musik



**20**

Pameran



**34**

Apresiasi karya sastra



**71**

Pertunjukan Tari dan Teater



**9**

Konferensi



**18**

Pemutaran film



**570.000** pengunjung

## PEMBENTUKAN PLATFORM INDONESIA

- Pada 2018 telah terselenggara berbagai festival kebudayaan di



**18 Kabupaten/ Kota di 8 kawasan se-Indonesia**

- Pada 2019 ditargetkan akan melibatkan



**30 Kabupaten/ Kota di 15 kawasan se-Indonesia**



## PROGRAM INDONESIA PINTAR: PERLUASAN KESEMPATAN BELAJAR ANAK USIA SEKOLAH

***Sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan layanan pendidikan, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak usia sekolah yang berusia 6 sampai dengan 21 Tahun.***



HINGGA saat ini, disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Angka partisipasi kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi, secara umum lebih tinggi jika dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung, yang ditanggung oleh siswa.

Biaya langsung siswa antara lain berupa iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis. Sementara itu, biaya tidak langsung yang ditanggung oleh siswa berupa biaya transportasi, uang saku, dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (*drop out*) sehingga berpengaruh terhadap APK.

Kondisi tersebut melahirkan pemikiran bahwa peningkatan akses masyarakat miskin pada layanan pendidikan merupakan salah satu kunci jawaban untuk mengurangi kesenjangan di masyarakat. Oleh karena itu, Kemendikbud terus mempercepat terwujudnya pendidikan yang merata melalui berbagai program dan kebijakan yang menjadi sasaran prioritas nasional, salah satunya adalah PIP.

PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan. PIP lahir dengan bertolak dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan PIP. Berangkat dari instruksi presiden

ini, Kemendikbud melaksanakan PIP dengan tujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 Tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*).

*“Kita ingin anak-anak semua belajar yang baik. Tugas murid adalah belajar. Oleh sebab itu, belajarlah yang baik dan jangan lupa juga berdoa dan berolahraga.”*

pesan Presiden RI, Joko Widodo, di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, Kamis, 31 Agustus 2017, sebagaimana dikutip dalam berita berjudul “Tahun ini Kemendikbud Berikan Bantuan Program Indonesia Pintar kepada 13.847 Siswa di Kota Sukabumi” yang dipublikasikan di laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id) tanggal 1 September 2017.

### Penyaluran PIP

Penyaluran dana PIP dalam kurun waktu dua Tahun, yaitu Tahun 2017 sampai bulan Agustus 2018 menunjukkan capaian yang signifikan. Pada Tahun 2017 telah disalurkan seluruh dana mencapai 100%, yaitu sebesar Rp9.464.037.550.000,00 dengan sasaran penerima sebanyak 18.248.287 siswa. Sementara itu, sampai dengan bulan Agustus 2018, telah disalurkan dana sebesar Rp6.524.521.700.000,00 (68%) dari anggaran sebesar Rp9.653.641.800.000,00 dengan sasaran 11.856.201 siswa. Data penyaluran tertera pada tabel berikut ini.



SEKOLAH	ALOKASI	PENYALURAN	%	PENCAIRAN	%
SD	10.360.614	10.362.746	100	9.043.677	87
	4.212.276.300.000	4.212.276.300.000	100	3.711.466.350.000	88
SMP	4.369.968	4.485.492	103	3.774.904	84
	2.697.206.250.000	2.697.206.250.000	100	2.314.810.500.000	86
SMA	1.375.458	1.520.422	111	1.362.153	90
	1.241.865.000.000	1.241.865.000.000	100	1.126.340.000.000	91
SMK	1.879.617	1.879.627	100	1.578.965	84
	1.312.690.000.000	1.312.690.000.000	100	1.121.267.500.000	85
JUMLAH	17.985.657	18.248.287	101	15.759.699	86
	9.464.037.550.000	9.464.037.550.000	100	8.273.884.350.000	87

Penyaluran Dana PIP Tahun 2017

SEKOLAH	SASARAAN/ALOKASI	PENYALURAN	%	PENCAIRAN	%
SD	10.360.614	6.212.724	60	5.918.981	95
	4.212.276.300.000	2.532.772.575.000	60	2.413.415.475.000	95
SMP	4.369.968	3.121.120	71	2.715.612	87
	2.737.210.000.000	1.910.891.625.000	70	1.668.373.500.000	87
SMA	1.367.559	1.013.005	74	877.406	87
	1.174.988.500.000	836.933.500.000	71	710.652.500.000	85
SMK	1.829.167	1.509.352	83	1.140.840	76
	1.529.167.000.000	1.243.924.000.000	81	911.884.000.000	73
JUMLAH	17.927.308	11.856.201	66	10.652.839	90
	9.653.641.800.000	6.524.521.700.000	68	5.704.325.475.000	87

Penyaluran Dana PIP Sampai Agustus 2018

Sementara itu, dalam rangka mempermudah operasional di lapangan, Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam peraturan ini, dijelaskan mengenai beberapa hal yang mempermudah seluruh pemangku kepentingan, mulai tata cara pengajuan, tata cara memperoleh manfaat PIP, hingga penggunaan dana PIP.

Dari sisi layanan, Kemendikbud telah mengembangkan layanan sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, untuk memperoleh manfaat PIP berupa uang tunai, siswa tidak lagi harus antri di teller bank. Mereka dapat dengan mudah mengambil dana PIP dengan menggunakan KIP-ATM ke ATM terdekat, milik bank penyalur PIP yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.



Penyerahan KIP di Provinsi Sumatera Selatan

*“KIP-ATM ini dapat memudahkan siswa dalam mencairkan dan menggunakan dana PIP untuk kepentingan sekolah. Mereka bisa langsung ke ATM untuk ambil dana manfaatnya,”*

tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip dalam berita berjudul “Kemendikbud Berikan Kartu Indonesia Pintar

dalam Bentuk Kartu ATM” yang dipublikasikan harian Kompas pada Kamis, 3 Agustus 2017.

Kemudahan KIP-ATM tersebut diawali dengan aktivasi rekening Simpanan Pelajar di bank penyalur. Adapun syarat-syaratnya, yaitu:

1. Membawa surat keterangan kepala sekolah/lembaga;
2. Membawa KIP/kartu pelajar/kartu tanda penduduk/kartu keluarga/surat keterangan dari kepala desa atau lurah untuk siswa SMA/Paket C atau SMK;
3. Membawa KTP orang tua dan kartu keluarga untuk siswa

SD/Paket A atau SMP/Paket B dengan didampingi orang tua/wali. Bagi orang tua/wali yang tidak memiliki KTP/KK dapat diganti dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah. Apabila orang tua/wali tidak bisa mendampingi siswa pada saat aktivasi, pendampingan dapat diwakili oleh kepala sekolah dengan membawa KTP dan SK pengangkatan kepala sekolah yang masih berlaku

4. Mengisi formulir pembukaan/aktivasi rekening tabungan



Simpanan Pelajar di bank penyalur. Melalui kemudahan layanan tersebut, para penerima manfaat dapat memastikan diri memperoleh dana PIP secara lebih efektif dan efisien.

### Membantu Siswa Miskin

Aser Simamora, Kepala Sekolah SMK Sasmita, Pamulang, Tangerang Selatan, mengatakan bahwa PIP sangat membantu siswa di SMK Sasmita. “PIP sangat bermanfaat bagi anak-anak. Kebetulan kita dapat sekitar 100 anak. Mereka dari keluarga rentan miskin dan miskin,” ujar Aser di ruang guru SMK Sasmita, Rabu, 12 September 2018.

Dana PIP juga mendorong siswa untuk lebih rajin ke sekolah dan giat belajar. “Setelah menerima PIP, kelihatannya semangat anak beda dengan sebelumnya. Datangnya lebih pagi,” tambah Aser.

Pendapat Kepala Sekolah SMK Sasmita itu diamini Ambarwati, siswi kelas 12 Jurusan Administrasi Perkantoran, SMK Sasmita. “Ada dong, sudah pasti. Karena kita dapat bantuan, dan yang namanya dapat bantuan harus digunakan dengan baik,” ujar siswi yang orang tuanya bekerja sebagai pedagang sayur ini.

Hal senada disampaikan oleh Latifah Luna Rahel, siswi kelas 6 di SDN Pamulang 01, Pamulang, Tangerang Selatan. Menurutnya, setelah mendapat PIP ia lebih giat belajar dan berhasil meraih ranking 5 di kelas.

Dana PIP yang diterima Ambar dan Luna digunakan untuk keperluan sekolah seperti membayar ujian, praktik, daftar ulang, juga membeli baju dan tas sekolah. “Dana PIP untuk keperluan sekolah seperti beli baju sekolah dan tas sekolah,” ujar Luna, di SDN Pamulang 01, Rabu, 12 September 2018. Siswi yang orang tuanya bekerja sebagai tukang ojek ini berharap dapat terus memperoleh PIP.

Pernyataan Luna itu diperkuat oleh Asih Nurmayanti dan Nani Sumarni, guru SDN Pamulang 01, Pamulang, Tangerang Selatan. Menurut mereka PIP sangat membantu anak didiknya. “Cuma kadang yang mampu dapat, sementara yang nggak

mampu malah nanya ‘Kok saya nggak dapat, bagaimana caranya?’,” ujar kedua guru ini dengan sedih di ruang guru SDN Pamulang 01, Rabu, 12 September 2018.

Berkaitan dengan keluhan dua guru tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad, pernah menyampaikan bahwa sekolah dapat menggunakan Format Usulan Sekolah (FUS) untuk mengajukan siswa yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. Pernyataan Hamid ini dapat ditelusuri dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. ■



Para siswa penerima KIP di Asmat, Papua

## ZONASI SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN YANG TERINTEGRASI

***Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk menjamin proses penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan Pendidikan (Pasal 2 ayat 1 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018). Kebijakan pengelolaan pendidikan berbasis zonasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.***

Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan, ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; dan ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Tiga dekade sebelumnya, pemerintah telah memberikan perhatian pada kebijakan nasional pembangunan pendidikan yang berbasis pada pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara. Salah satunya dengan kebijakan nasional wajib belajar 6 Tahun (1984), kemudian diperluas dengan wajib belajar 9 Tahun (1994) dan wajib belajar 12 Tahun (2012). Sampai saat ini, selama hampir 33 Tahun kebijakan pemerataan pendidikan sudah menampilkan hasil yang positif meskipun belum bisa dianggap optimal karena masih

ada sebagian warga negara yang belum tersentuh wajib belajar yang menjadi haknya.

Langkah-langkah strategis mengintegrasikan kebijakan-kebijakan implementasi untuk mendorong percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Pemetaan wilayah dalam zona-zona wilayah yang heterogen diperlukan untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan sesuai dengan prioritas pembangunan di zona tersebut. Kebijakan zonasi akan mewujudkan pendidikan berkualitas dan berkuantitas yang merata dan menyeluruh.

Zonasi merupakan proses pembentukan zona-zona atau wilayah. Zona dapat dibedakan menjadi dua macam berdasarkan jenis basisnya. Pertama, berdasarkan basis batas administrasi seperti nasional, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan yang sangat berimpitan dengan kewenangan yang melekat pada zona administrasi. Kedua, berdasarkan basis tema/substansi, seperti zona

pelayanan, tutupan lahan (zona hutan, permukiman, daerah aliran sungai dan lain-lain), pendidikan dalam hal ini merupakan salah satu zona pelayanan terhadap warga negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan tentang zonasi melalui kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Kebijakan ini sebagai langkah awal kebijakan pengelolaan pendidikan berbasis zonasi yang sudah mulai dilaksanakan sejak Tahun 2017 dan akan terus disempurnakan pada Tahun-Tahun selanjutnya. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mencapai pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Program PPDB sebagai langkah awal menuju zonasi dalam konsepnya bukanlah sebagai suatu sistem yang menjawab pertanyaan bagaimana menerima peserta didik baru, tetapi penekanan bagaimana peserta didik tersebar dan ada pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.

Adapun sasaran utama kebijakan zonasi ini adalah peserta didik pada khususnya dan anak usia sekolah pada umumnya. Apabila peserta didik yang beraktivitas pada satuan pendidikan tertentu sebagai sasaran zonasi, secara konsep (tujuan), satuan pendidikan sebagai pusat layanan pendidikan bagi semua warga negara adalah tempat untuk mendapat layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan berkeadilan sehingga semua warga negara memiliki kompetensi yang berkualitas pada satu sisi. Pada sisi yang lain, satuan pendidikan merupakan pengelolaan proses belajar mengajar agar tercapai mutu pendidikan yang diinginkan. Namun, secara faktual kondisi satuan pendidikan yang ada belum merata, baik kualitas maupun kuantitas dalam pengelolaan dan pelayanannya kepada setiap warga negara. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan strategi untuk meratakan satuan pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam pengelolaan dan pelayanannya kepada setiap warga negara.

Guna memastikan anak-anak atau peserta didik terlayani dengan baik dan benar, diperlukan mekanisme yang terintegrasi dalam pengelolaan pendidikan, baik secara vertikal, horizontal, maupun pembangunan. Integrasi vertikal merujuk pada kesesuaian kewenangan pengelolaan satuan pendidikan kabupaten/kota serta provinsi dan pusat. Selain itu, integrasi vertikal juga

membutuhkan kesinambungan peserta didik tersebut, mulai dari jenjang pendidikan dini hingga pendidikan menengah. Integrasi horizontal merujuk pada kapasitas muatan substansi pendidikan yang disesuaikan dengan standar-standar pendidikan yang telah digariskan secara nasional (Delapan Standar Nasional Pendidikan). Adapun Integrasi pembangunan dapat dijabarkan sebagai strategi percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan.

Tahapan untuk mencapai pendidikan yang merata, berkualitas dan berkeadilan dengan menyusun tiga tahapan analisis yang saling terkait dalam penyusunan zona dan pengelolaan pendidikan berbasis zona. Tiga tahapan yang dimaksud adalah tahap klasifikasi, peningkatan kapasitas, pemantauan. Tahap klasifikasi adalah tahap klasifikasi nominasi dengan nilai akreditasi sebagai indikator skala nasional serta ujian nasional (UN), ujian kompetensi guru (UKG), dan penjaminan mutu pendidikan (PMP) sebagai indikator kontrol. Tahap peningkatan kapasitas merupakan tahap penentuan sekolah nominasi dan identifikasi perlakuan (dukungan sarana dan prasarana atau dukungan kompetensi guru berdasarkan indikator-indikator yang relevan). Tahap pemantauan adalah pemantauan wilayah-wilayah zona melalui optimalisasi kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), dan musyawarah kerja kepala sekolah

(MKKS) dengan sekolah pusat zona sebagai basis kelompok atau zona.

Nominasi pusat zona adalah satuan pendidikan (SMA) yang terklasifikasi secara khusus sebagai satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar (rombel) dan rasio siswa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan satuan pendidikan yang memiliki nilai akreditasi A dan/atau B, hasil UN, nilai PMP, serta UKG di atas rata-rata nasional.

Dalam penentuan sekolah untuk masuk sebagai nominasi pusat zona dengan memperhatikan empat Indikator Nasional (akreditasi, UN, PMP, dan UKG), yang keempat faktor tersebut merupakan indikator evaluasi hasil capaian pengelolaan/pembinaan/pembelajaran pendidikan yang diberikan setiap Tahun di tingkat peserta didik hingga sekolah (manajemen). Hasil akreditasi merupakan evaluasi lima Tahunan, UN dan PMP evaluasi Tahunan, sedangkan UKG merupakan evaluasi tiga Tahunan yang berfungsi sebagai kontrol Tahunan dan tiga Tahunan sebelum dilakukan evaluasi lima Tahunan. Adapun satuan pendidikan SMA dijadikan prioritas pusat zona karena SMA lebih memiliki jangkauan pelayanan dan pembinaan yang lebih luas dibandingkan SMP ataupun SD. Berbeda dengan SMK yang memiliki karakteristik tersendiri di dalam zonasi (zonasi khusus).

Berdasarkan klasifikasi tersebut, dari total 13.804 SMA, baik negeri maupun swasta, satuan pendidikan yang memenuhi klasifikasi sebagai pusat zona adalah 2.916 (21,12%). Adapun untuk nominasi tambahan merupakan tambahan pilihan jika di daerah tersebut terlalu sedikit sekolah

yang masuk dalam pilihan nominasi pusat zona. nominasi tambahan ditentukan dengan kriteria bahwa satuan pendidikan tersebut pernah berstatus terakreditasi (perlu adanya pemutakhiran akreditasi kembali) dengan jumlah satuan pendidikan 1.513 (10,96%), tetapi hasil nilai UN, PMP dan UKG di

atas rata-rata nasional. Untuk tahap pertama atau sementara (belum terkonsolidasi dengan data yang ada di kabupaten/kota dan provinsi) dibangun 2.580 zona dari 2.916 satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta yang masuk dalam nominasi.

Tabel Jumlah sementara Satuan Pendidikan SMA, menurut Klasifikasi Nominasi Pusat Zona Tiap Provinsi. (kondisi zonasi akhir November 2018).

No	Wilayah	Σ SMA	Σ Nominasi		Σ Nominasi Tambahan		Σ Zonasi
			Jumlah	%	Jumlah	%	
	Nasional	13.804	2.916	21,12	1.513	10,96	2.580
1	Prov. D.K.I. Jakarta	495	211	42,63	82	16,57	37
2	Prov. Jawa Barat	1.634	257	15,73	288	17,63	266
3	Prov. Jawa Tengah	866	456	52,66	84	9,70	330
4	Prov. D.I. Yogyakarta	165	95	57,58	11	6,67	54
5	Prov. Jawa Timur	1.545	547	35,40	83	5,37	327
6	Prov. Aceh	526	29	5,51	19	3,61	37
7	Prov. Sumatera Utara	1.083	192	17,73	86	7,94	114
8	Prov. Sumatera Barat	325	142	43,69	11	3,38	123
9	Prov. Riau	447	104	23,27	47	10,51	144
10	Prov. Jambi	231	42	18,18	9	3,90	5
11	Prov. Sumatera Selatan	596	68	11,41	46	7,72	70
12	Prov. Lampung	496	91	18,35	23	4,64	77
13	Prov. Kalimantan Barat	441	56	12,70	42	9,52	72
14	Prov. Kalimantan Tengah	241	24	9,96	8	3,32	30
15	Prov. Kalimantan Selatan	193	57	29,53	33	17,10	73
16	Prov. Kalimantan Timur	218	39	17,89	53	24,31	65
17	Prov. Sulawesi Utara	226	17	7,52	5	2,21	19
18	Prov. Sulawesi Tengah	217	19	8,76	12	5,53	23
19	Prov. Sulawesi Selatan	589	72	12,22	22	3,74	72
20	Prov. Sulawesi Tenggara	293	49	16,72	77	26,28	81
21	Prov. Maluku	280	18	6,43	126	45,00	90
22	Prov. Bali	160	52	32,50	45	28,13	65
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	323	29	8,98	4	1,24	32
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	542	20	3,69	89	16,42	80
25	Prov. Papua	232	5	2,16	49	21,12	34
26	Prov. Bengkulu	140	28	20,00	2	1,43	28
27	Prov. Maluku Utara	203	15	7,39	54	26,60	46
28	Prov. Banten	549	93	16,94	42	7,65	56
29	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	70	30	42,86	4	5,71	31
30	Prov. Gorontalo	64	6	9,38	1	1,56	6
31	Prov. Kepulauan Riau	142	38	26,76	11	7,75	41
32	Prov. Papua Barat	122	6	4,92	34	27,87	36
33	Prov. Sulawesi Barat	89	2	2,25	8	8,99	7
34	Prov. Kalimantan Utara	61	7	11,48	3	4,92	9





Berdasarkan pola sebaran tersebut, hanya 21,12% sekolah (2.916) yang menjadi nominasi pusat zona dari 13.804 satuan pendidikan SMA. Pulau Jawa memiliki nominasi pusat zona yang paling banyak dibandingkan pulau lain. Berdasarkan klasifikasi

yang ada, satuan pendidikan SMA yang memenuhi klasifikasi jumlahnya tidak banyak atau hanya kurang lebih seperlima dari SMA secara nasional.

Berdasarkan data tersebut, satuan pendidikan atau sekolah menjadi hal yang sangat penting.

Sekolah merupakan titik fungsi pelayanan sehingga dalam pelaksanaan zonasi yang dilihat adalah sebaran penduduk atau peserta didik. Peserta didik harus memiliki akses yang mudah untuk memperoleh pendidikan di sekolah terdekat (radius). Titik

sentral pendidikan terdekat yang ditentukan adalah SMA. Satuan pendidikan SMA ini akan memiliki turunan di bawahnya, yakni SMP dan SD terdekat yang selanjutnya akan menjadi satu zonasi tertentu.

Langkah pertama dalam pembangunan zonasi adalah

menentukan SMA sebagai titik sentral yang dilihat dari indikator akreditasi, hasil UN, UKG, dan PMP. Selanjutnya, setelah terpilih nominasi SMA sebagai titik sentral, jumlah zonasi dalam satu wilayah kabupaten/kota bisa ditentukan. Zona yang terbentuk ini

akan menjadi acuan pembangunan PAUD Dikmas, SD, SMP, SMA, dan SMK yang terintegrasi dan disesuaikan dengan prioritas masing-masing zona. Zona SMA yang ditentukan oleh sistem berbasis Data Pokok Pendidikan (Dapodik) ini dapat dikoreksi kembali dengan



alasan geografi oleh kabupaten/kota yang bersangkutan dengan persetujuan dari provinsi. Pada tahap berikutnya, penentuan zonasi SMP dan SD akan mengikuti pola yang sama dengan penentuan zona SMA.

Gambar berikut merupakan contoh pembangunan zonasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pusat nominasi zona sudah ditentukan berdasarkan kabupaten dan kota yang ada. Penambahan nominasi pusat zona dapat ditentukan melalui koordinasi kabupaten, kota, dan provinsi. Selanjutnya, penentuan keanggotaan satuan pendidikan yang ada di masing-masing zona dan mengevaluasinya dengan baik di masing-masing zona. Jika dilihat di Kota Yogyakarta saja, gambar akan tampak seperti berikut dan jika hanya dilihat pada satu zona dengan nominasi pusat zona 3422 (SMAN 3 Yogyakarta).

Gambar tersebut menggambarkan contoh salah satu zona (SMA Negeri 3 Yogyakarta sebagai titik pusatnya) dengan beberapa SMA, SMP, dan SD yang berada di zona yang bersangkutan. Data diperoleh data warehouse yang bersumber dari dapodik. Dengan zona seperti ini bisa diketahui kondisi umum pendidikan, indikator, sarana prasarana, termasuk kemungkinan resource sharing antarjenjang dalam suatu zona dan sebagainya. Dengan demikian, akan didapatkan informasi yang tepat dan kebijakan penting yang perlu diambil dalam percepatan pembangunan pendidikan.

Apabila zonasi dilakukan dengan tahapan yang benar, akan

mendatangkan manfaat dalam pemerataan pendidikan. Zonasi sebagai strategi pembangunan pendidikan yang terintegrasi memiliki tujuan memberikan pemerataan pendidikan kepada setiap warga negara dengan kualitas dan kuantitas yang sama. Guna mencapai kualitas dan kuantitas yang diharapkan, ada tiga entitas pendidikan yang perlu diperhatikan, yaitu peserta didik, guru, serta sarana dan prasarana. Entitas-entitas tersebut kemudian dibagi dalam tiga tahap, yakni persebaran peserta didik, peningkatan kapasitas guru, dan pemantauan sarana dan prasarana pendidikan. Zonasi guru seperti yang dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan dapat digunakan untuk menentukan pendistribusian peserta didik.

Persebaran peserta didik dilakukan dengan PPDB dalam zonasi yang sudah ditentukan. Setiap peserta didik terdekat harus mendapatkan akses untuk melanjutkan ke sekolah terdekat. Domisili peserta didik dari sekolah dan alamat di kartu keluarga adalah salah satu yang akan menentukan kelanjutan pendidikan peserta didik ke sekolah yang bersangkutan.

Adapun peningkatan mutu dilihat dengan hasil akreditasi sekolah (Delapan Standar Nasional Pendidikan) dan kontrol hasil proses belajar mengajar peserta didik dalam evaluasi tiga Tahun, yakni hasil UN untuk entitas peserta didik atau evaluasi Tahunan manajemen proses belajar mengajar Tahunan untuk sekolah serta indikator kontrol lain, yakni

hasil UKG dan PMP. Dari indikator tersebut dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitas dukungan sarana dan prasarana, serta kompetensi guru dalam proses evaluasi pengelolaan pendidikan tingkat sekolah, kota/kabupaten, provinsi, dan nasional.

Melalui kebijakan zonasi, pemerintah akan melaksanakan program pendidikan sesuai kebutuhan yang berbeda di tiap-tiap zona. Kebijakan tersebut dapat digunakan untuk menentukan apakah perlu melengkapi sarana dan prasarana dan/atau meningkatkan kompetensi guru dan/atau optimalisasi peningkatan kualitas lainnya. Kebijakan zonasi perlu dukungan KKG/MGPM/MKKS yang ada di setiap zonasi. Apabila melihat roh zonasi adalah Pasal 31 UUD 1945, Kemendikbud berharap pelaksanaan kebijakan zonasi akan mampu menjawab upaya pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan. ■

# UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI UN DAN USBN

Ujian Nasional (UN) diselenggarakan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Selain itu, salah satu kegunaan hasil UN adalah untuk melakukan pemetaan tingkat pencapaian hasil belajar siswa pada semua mata pelajaran yang diujikan, pada tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten/kota, provinsi, bahkan nasional. Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas diperlukan adanya penilaian pendidikan yang valid, dapat dipercaya (credible), dapat diterima (acceptable), dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable).

Pelaksanaan UN Tahun 2017 dan 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018

tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah. Dalam implementasinya, pelaksanaan UN 2018 mengacu pada Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0044/P/BSNP/XI/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018; pelaksanaan UN 2017 mengacu pada Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0043/P/BSNP/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017.

Perubahan penyelenggaraan UN Tahun Pelajaran 2017/2018 jika dibandingkan dengan UN Tahun Pelajaran 2016/2017 adalah (1) perluasan jangkauan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hingga ke pendidikan kesetaraan, (2) penerapan soal model penalaran dalam UN, (3) penerapan soal isian singkat untuk mata pelajaran Matematika pada jenjang SMA/MA, SMK, dan Program Paket C, (4) peningkatan

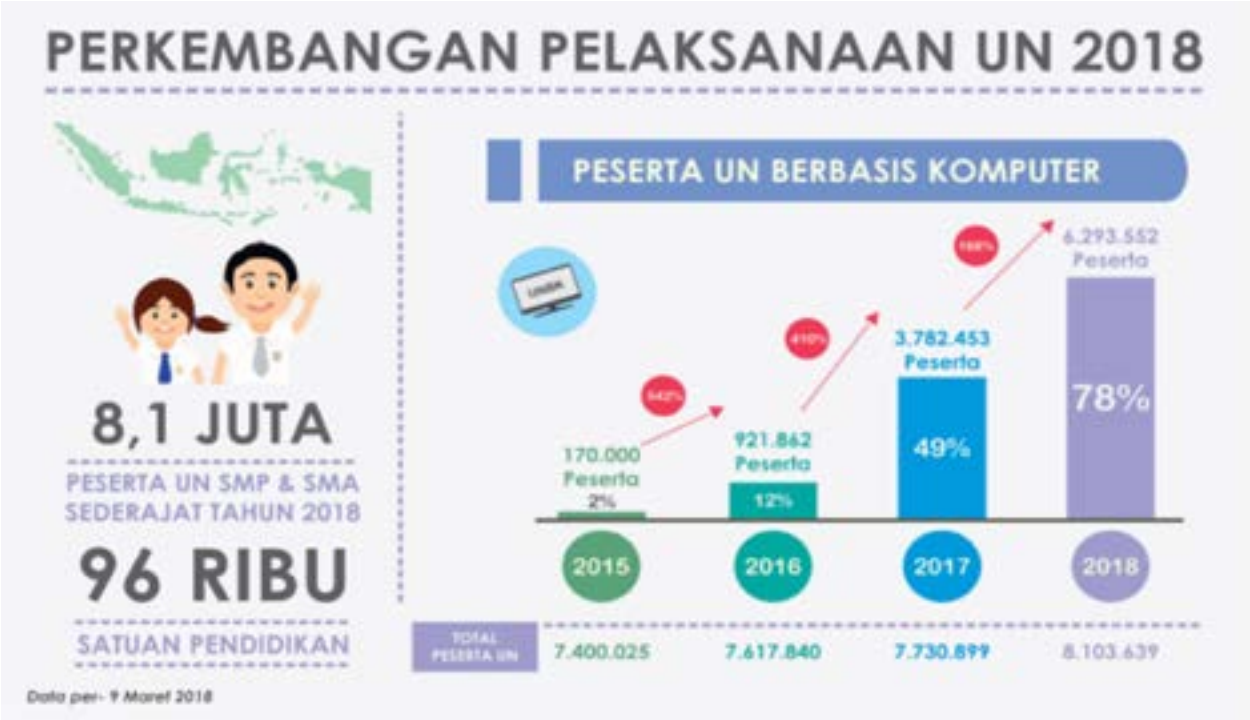
peran LPMP dalam pelaksanaan UN, dan (5) metode sosialisasi UN.

## UNBK

Kebijakan UNBK dirintis pada Tahun 2014 dan dilaksanakan secara masal dan bertahap mulai Tahun 2015. Pada Tahun 2017 dan 2018, UNBK telah menjadi moda utama dalam pelaksanaan UN yang dilakukan oleh pemerintah. Penetapan satuan pendidikan pelaksana UNBK dilakukan oleh Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Kriteria yang dijadikan dasar penetapan satuan pendidikan pelaksana UNBK adalah telah terakreditasi, tersedia sejumlah komputer dan server sesuai dengan kebutuhan, server yang memadai dilengkapi dengan UPS, jaringan lokal (LAN) dengan media kabel, koneksi internet dengan kecepatan yang memadai, serta asupan listrik yang memadai. Pada Tahun 2018 telah terjadi lonjakan yang signifikan bagi satuan pendidikan pelaksana UNBK sebagaimana dipaparkan pada Tabel 1 berikut.

PESERTA						SEKOLAH					
JENJANG	JUMLAH PESERTA	UNBK	% UNBK	UNKP	% UNKP	JENJANG	JUMLAH PESERTA	UNBK	% UNBK	UNKP	% UNKP
SMP	3,288,190	2,005,390	61%	1,282,800	39%	SMP	38,705	18,202	47%	20,503	53%
MTs	1,008,367	689,302	68%	319,065	32%	MTs	17,014	10,407	61%	6,607	39%
SMP/MTS	4,296,557	2,694,692	63%	1,601,865	37%	SMP/MTS	55,719	28,609	51%	27,110	49%
SMA	1,533,938	1,393,666	91%	138,272	9%	SMA	13,211	11,353	86%	1,858	14%
MA	449,639	418,899	93%	32,731	7%	MA	7,932	7,000	88%	932	12%
SMA/MA	1,983,568	1,812,565	91%	171,003	9%	SMA/MA	21,143	18,353	87%	2,790	13%
SMK	1,485,302	1,459,062	98%	26,240	2%	SMK	13,054	12,495	96%	559	4%
FORMAL	7,765,427	5,966,319	77%	1,799,108	23%	FORMAL	89,916	59,457	66%	30,459	34%
PAKET B	122,165	117,098	96%	4,467	4%	PAKET B	4,982	4,798	96%	184	4%
PAKET C	216,047	209,535	97%	6,512	3%	PAKET C	3,058	4,890	97%	168	3%
NON FORMAL	338,212	327,233	97%	10,979	3%	NON FORMAL	5,964	5,662	95%	302	3%
TOTAL	8,103,639	6,293,552	78%	1,810,087	22%	TOTAL	95,780	65,119	68%	30,661	32%

Peserta dan Satuan Pendidikan Pelaksana UNBK



Meningkatnya satuan pendidikan pelaksana UNBK sebagaimana dipaparkan pada Tabel 1 disebabkan di antaranya oleh penerapan prinsip berbagi sumber daya (resource sharing), terutama penggunaan fasilitas komputer. Mekanisme berbagi sumber daya dapat dilakukan lintas jenjang SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK atau lintas jalur pada pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Karena mulai Tahun 2018,

UN dijadwalkan pada tanggal yang berbeda untuk jenjang dan jalur yang berbeda. Penetapan sekolah dalam menerapkan prinsip berbagi sumber diatur dan dikoordinasikan oleh dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Adapun biaya yang timbul dari pelaksanaan berbagi sumber daya menjadi tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan yang menumpang dan satuan pendidikan pelaksana UNBK, dengan

mengacu kepada ketentuan biaya yang berlaku dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

Setiap pelaksanaan UNBK, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama pejabat Balitbang, direktorat terkait, dan BSNP selalu melakukan pemantauan di berbagai daerah. Pada Tahun 2018, misalnya, Mendikbud melakukan pemantauan UNBK di

Manggarai Barat (4 April 2018) dan Mimika Papua (23-24 April 2018). Dari hasil pemantauan tersebut, ditemukan beberapa praktik baik dalam pelaksanaan UNBK. Di SMPIT Permata Mimika, Papua, misalnya, terpampang spanduk dengan tulisan “Harap Senang Ada Ujian. Selamat Menempuh USBN dan UNBK.” Pesan ini sangat berbeda dengan pesan di sebagian besar sekolah lainnya. Biasanya pesan yang ditulis adalah “Harap Tenang. Ada Ujian Nasional”.

Menurut Kepala SMPIT Permata, melalui pesan tersebut pihak sekolah ingin mengubah cara berpikir siswa.

*“Selama ini, UN dikaitkan dengan suasana yang mencemaskan bahkan menegangkan sehingga semua usaha difokuskan pada ujian. Di SMPIT Permata, kami ingin membuat anak-anak senang karena ujian merupakan bagian dari proses pendidikan yang mesti dilalui.”*

tuturnya.

Sementara itu, rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan UNBK Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 20 April 2018 menunjukkan secara umum bahwa pelaksanaan UNBK 2018 berjalan lebih lancar dan tertib jika dibandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya. Kendati

demikian, masih ada kendala teknis seperti pemadaman listrik, keterlambatan pengunduhan rilis token, keterbatasan infrastruktur dan jaringan internet, serta pe-laden atau server yang tiba-tiba tidak berfungsi. Masalah tersebut dapat diatasi oleh panitia, terutama proktor, teknisi, dan petugas meja bantu (*helpdesk*) terkait.

Selain itu, pelaksanaan UNBK memiliki beberapa kelebihan jika dibanding dengan ujian berbasis kertas dan pensil. Dengan UNBK pelaksanaan ujian menjadi lebih berintegritas sebab sangat kecil kemungkinan terjadi kebocoran soal, keterlambatan soal, soal tertukar, dan ketidakjelasan hasil cetak soal. Hasil UN dapat diolah dan diumumkan lebih cepat, pelaksanaan UN dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun dengan jadwal yang lebih fleksibel, serta memudahkan dalam pengamanan dan penyediaan logistik. Secara singkat, dengan UNBK, pelaksanaan dan hasil UN menjadi lebih dapat dipercaya, dapat diterima, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Soal Model Penalaran

Soal model penalaran juga disebut dengan soal model *higher order thinking skills* (HOTS), yaitu soal yang memerlukan kemampuan berpikir yang tidak hanya sekadar mengingat (*recall*), menyatakan kembali (*restate*), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan (*recite*). Soal model HOTS mengukur kemampuan siswa dalam hal (1) transfer satu konsep ke konsep lainnya; (2) memproses dan menerapkan informasi;

(3) mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda; (4) menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah; dan (5) menelaah ide dan informasi secara kritis.

Telah menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, asesmen nasional diarahkan kepada model asesmen yang menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tujuan soal model HOTS dalam asesmen adalah untuk mendorong siswa melakukan penalaran tingkat tinggi sehingga tidak terpaku pada satu pola jawaban yang dihasilkan dari proses menghafal dengan tanpa memahami konsep keilmuan. HOTS merupakan salah satu tuntutan keterampilan berpikir dalam pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif.

Ada beberapa prinsip penyusunan soal yang mengarah kepada HOTS, yaitu (1) mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek mengingat dan memahami; (2) berbasis permasalahan kontekstual; dan (3) memiliki stimulus menarik. Kontekstual artinya soal harus menggunakan konteks kehidupan nyata. Penyajian kasus dari kehidupan nyata memungkinkan peserta didik melakukan proses penelaahan berbagai informasi. Stimulus yang menarik dapat berupa beberapa informasi dapat berupa gambar, grafik, tabel, wacana, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus. Stimulus hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis,



menyimpulkan, atau menciptakan. Namun, kemampuan guru-guru dalam menyusun soal model HOTS masih perlu ditingkatkan.

Berikut ini contoh soal model penalaran pada mata pelajaran Matematika SMA/MA.

*Dalam suatu kelas terdapat 22 siswa. Guru mengadakan ulangan matematika. Hasil ulangan siswa diperoleh rata-rata 5 dan jangkauan 4. Bila nilai seorang siswa yang paling rendah dan nilai seorang siswa yang paling tinggi tidak disertakan, nilai rata-rata berubah menjadi 4,9. Nilai siswa yang paling rendah dan paling tinggi tersebut berturut-turut adalah ....*

- A. 2 dan 6
- B. 3 dan 7
- C. 4 dan 8
- D. 5 dan 9
- E. 6 dan 10

Kunci: C

Sejalan dengan penggunaan soal model HOTS ini, penskoran jawaban soal dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan soal. Soal dengan tingkat kesulitan yang tinggi diberi bobot yang lebih besar. Dengan demikian, akan ada faktor pembeda antara siswa yang mampu menjawab soal model HOTS dan siswa yang hanya mampu menjawab soal yang mudah atau sedang.

Penyelarasan antara proses pembelajaran dan penilaian dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan. Semangat yang ada di dalam Kurikulum 2013 berkaitan dengan ranah kognitif adalah meningkatkan daya nalar

siswa, termasuk berpikir kritis dan analitis.

Ekosistem dalam implementasi sistem pendidikan berbasis standar melibatkan berbagai komponen. BSNP yang mengembangkan standar, Puskurbuk bertanggung jawab terhadap pengembangan dan implementasi kurikulum, dan Puspendik bertanggung jawab terhadap penilaian pendidikan. Ketiga komponen ini perlu berkoordinasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

USBN

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar. USBN mulai dilaksanakan pada Tahun 2017 dan diperluas pada Tahun 2018.

Pelaksanaan USBN pada Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah. Mulai Tahun 2018, pelaksanaan USBN mengacu pada Peraturan BSNP Nomor 0045/BSNP/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018.

Istilah berstandar nasional dalam USBN dimaksudkan untuk beberapa hal sebagai berikut. (1) Soal USBN disusun berdasarkan

kisi-kisi yang berlaku secara nasional. Kisi-kisi dikembangkan berdasarkan standar isi yang diturunkan menjadi kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum yang diterapkan; (2) Soal USBN memiliki soal dari pusat sebanyak 20--25 persen, kecuali untuk mata pelajaran yang ditetapkan di dalam POS USBN; dan (3) USBN dilaksanakan dengan mengacu kepada Prosedur Operasional Standar (POS) USBN yang ditetapkan BSNP

Tujuan USBN adalah untuk mengukur capaian kompetensi siswa yang dilakukan satuan pendidikan mencakup seluruh mata pelajaran dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar. USBN sebagai subsistem penilaian dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi salah satu tolok ukur pencapaian Standar Nasional Pendidikan dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, USBN juga bertujuan untuk meningkatkan mutu penilaian oleh satuan pendidikan dan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melakukan penilaian, khususnya kemampuan pengembangan soal ujian.

Hasil USBN digunakan sebagai salah satu kriteria kelulusan, dasar pemetaan, pembinaan, dan pemberian bantuan pada satuan pendidikan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, pelaksanaan USBN juga dimaksudkan untuk memperkuat peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam pengembangan



Kepala Balitbang Totok Suprayitno berfoto bersama siswa setelah pelaksanaan UN

dan perakitan naskah soal.

UN dan USBN pada prinsipnya mengukur Standar Kompetensi Lulusan.

Salah satu indikator kualitas pendidikan nasional adalah penguatan sistem penilaian. Oleh karena itu, berikut ini beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Rekomendasi 1: Ujian Nasional sebagai Pengendali Mutu (Quality Control, QC)

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melanjutkan kebijakan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) yang berbasis pada Standar Kompetensi Lulusan sebagai alat pengendali mutu lulusan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Rekomendasi 2: Ujian Nasional untuk Sertifikasi

Pemerintah menggunakan hasil Ujian Nasional untuk sertifikasi lulusan sebagai bukti dan pengakuan pencapaian kompetensi

lulusan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang bersifat nasional

Rekomendasi 3: Ujian Nasional untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan secara sungguh-sungguh menggunakan analisis terhadap hasil Ujian Nasional untuk melakukan berbagai intervensi kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah.

Rekomendasi 4: Ujian Nasional sebagai Dasar Seleksi

Dalam rangka menjamin keadilan, pemerataan, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, pemerintah menggunakan hasil Ujian Nasional sebagai dasar pertimbangan penerimaan peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi.

Rekomendasi 5: Penjaminan Mutu untuk Ketuntasan Belajar

Pemerintah melakukan secara

sungguh-sungguh proses penjaminan mutu satuan pendidikan melalui penguatan proses belajar-mengajar berbasis ketuntasan belajar (mastery learning) disertai penilaian hasil belajar di kelas secara berkelanjutan oleh guru.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, perlu dilakukan penyebarluasan informasi kebijakan nasional terkait UN dan USBN secara tepat, akurat, dan menyeluruh. Dengan demikian, pemangku kepentingan dan masyarakat luas memahami dengan benar filosofi, fungsi, dan manfaat UN dan USBN bagi peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Selain itu, juga perlu disusun peta jalan (road map) dan langkah-langkah terencana menuju terwujudnya sistem UN yang dapat dipercaya, dapat diterima, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak. ■



# PENYEDIAAN DAN PENGENDALIAN BUKU YANG BERMUTU, MURAH, DAN MERATA

Peradaban bangsa perlu dibangun dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Buku sendiri merupakan sarana yang efektif dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat, baik kecerdasan intelektual, emosi, kinestetik, maupun spiritual. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama melalui pendidikan menjadi sangat strategis mengingat perekonomian masyarakat saat ini yang belum sepenuhnya menjadikan buku sebagai kebutuhan pokok.

Buku, sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia, perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendorong masyarakat untuk berperan lebih besar dalam tingkat global. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata. Untuk itu, diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis,

menyeluruh, dan terpadu.

Buku merupakan produk kultural dari karya dan kreasi penulis. Agar dapat diakses oleh pembaca atau penggunaannya, buku sangat bergantung pada dunia industri perbukuan yang di dalamnya terdiri atas penerbit, percetakan, distributor, dan toko buku. Di sisi lain, dalam mendukung penyediaan buku yang bermutu, murah, dan merata, pemerintah juga perlu meningkatkan minat baca masyarakat, melindungi hak cipta penulis dari pembajakan, menyediakan kemudahan fiskal, kredit, dan insentif bagi industri perbukuan, menjamin kemudahan distribusi buku ke seluruh wilayah Indonesia, menghidupkan toko-toko buku di daerah, memperbaiki dan memperluas jaringan perpustakaan, menyiapkan sumber daya manusia yang terampil sehingga mampu berkecimpung dalam sektor perbukuan.

Kemauan dan kemampuan masyarakat untuk membaca haruslah didukung oleh ketersediaan buku cetak maupun buku digital (*e-books*) dan buku audio (*audio-book*), serta kemudahannya untuk diakses. Kedudukan buku yang sangat penting bagi pencerdasan kehidupan bangsa merupakan modal dasar bagi terciptanya perubahan masyarakat ke arah

peningkatan kesejahteraan, keadilan, kemanusiaan, dan spiritual keagamaan masyarakatnya.

## Permasalahan dan Tantangan Pengelolaan Buku

Berbagai permasalahan dan tantangan tata kelola buku saat ini, di antaranya pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif; masih adanya buku yang beredar di tengah masyarakat yang tidak menjunjung nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945; belum optimalnya perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku perbukuan; dan belum adanya kerangka hukum yang mengatur mengenai perbukuan secara menyeluruh dalam mewujudkan buku bermutu, murah, dan merata bagi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan tata kelola perbukuan melalui sistem perbukuan secara terpadu, sistematis dan komprehensif mutlak diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai jembatan menuju tercapainya kecerdasan bangsa.

Pengaturan tata kelola buku mencakup seluruh pelaku

perbukuan, yaitu penulis, penerjemah, dan penyadur; pengolah naskah buku yang terdiri atas editor, desainer, ilustrator, pencetak, dan pengembang buku elektronik; serta penerbit, distributor, dan toko buku. Dari tingkat sasaran usia pembaca dan tanggung jawab, juga diatur mengenai bentuk, jenis, dan isi buku; hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku perbukuan, serta wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemerolehan naskah buku, penerbitan, percetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan.

## Regulasi Tata Kelola Buku

UNESCO sebagai sebuah badan di bawah PBB juga telah menegaskan perlunya sebuah negara memiliki kebijakan perbukuan nasional yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan buku. Kebijakan perbukuan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh sebuah negara untuk menjadikan buku dapat diperoleh dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan tanpa diskriminasi.

Dari sisi regulasi, saat ini telah dikeluarkan UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana terakhir diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2015, Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan

oleh Satuan Pendidikan, dan Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, buku dibedakan atas buku pendidikan dan buku umum. Buku pendidikan terdiri atas buku teks pelajaran dan buku nonteks pelajaran. Buku teks pelajaran terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping, sedangkan buku nonteks pelajaran meliputi buku pengayaan yang berupa buku fiksi atau nonfiksi, buku pedoman, buku referensi, kamus, ensiklopedia dan sejenisnya. Buku nonteks pelajaran berfungsi untuk memperkaya wawasan dan batin serta menambah wawasan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi di era globalisasi ini.

Buku teks utama merupakan buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh pemerintah pusat tanpa dipungut biaya dan/atau dengan harga murah dan ekonomis melalui penetapan harga eceran tertinggi (HET). Buku teks pendamping merupakan buku pelajaran yang disusun oleh masyarakat berdasarkan kurikulum yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah pusat.

Pemerintah berkomitmen dalam menyediakan buku teks utama yang bermutu dan merata untuk setiap mata pelajaran dan tema pembelajaran pada setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan. Dengan adanya komitmen itu, diharapkan peserta didik dapat belajar maksimal untuk

mencapai kompetensi yang tuntutan dalam kurikulum; pendidik dapat menyiapkan rancangan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan didukung sumber belajar yang memadai; orang tua dan masyarakat dapat mengakses buku secara mudah dan murah; percetakan dapat memasarkan dan mencetak buku pendidikan ataupun buku umum lainnya; dan penerbit dapat menyediakan buku teks pendamping, buku nonteks pelajaran, ataupun buku umum lainnya.

Struktur Kurikulum 2013 saat ini memuat bahan kajian/mata pelajaran yang wajib diberikan kepada semua peserta didik (disebut dengan mata pelajaran kelompok A dan B) pada pendidikan dasar dan menengah serta bahan kajian/mata pelajaran peminatan (mata pelajaran kelompok C) yang dipilih oleh peserta didik berdasarkan bakat, minat, dan kemampuannya sesuai dengan kapasitas satuan pendidikan di pendidikan menengah. Untuk mata pelajaran wajib, pemerintah telah menerbitkan dan menetapkan buku teks utama yang dapat diakses secara gratis melalui <http://buku.kemdikbud.go.id>, sedangkan untuk daftar judul buku-buku teks pendamping dan buku-buku nonteks pelajaran yang disediakan oleh masyarakat dan/atau pemerintah dan telah ditetapkan kelayakannya untuk mendukung proses pembelajaran dapat dilihat pada website yang sama. Sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi, buku-buku tersebut telah disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 24 Tahun



2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, dalam program ke depannya, pemerintah perlu menyiapkan seluruh buku teks utama untuk mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan pada setiap jenjang, jalur, jenis, dan tingkatan pendidikan di PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selain itu, pemerintah juga perlu memfasilitasi dan melaksanakan pengendalian mutu buku-buku pendidikan lainnya seperti buku teks pendamping, buku nonteks pelajaran, dan buku muatan lokal yang disediakan oleh masyarakat, penerbit atau lembaga pemerintah lainnya di pusat dan daerah, seperti yang digambarkan dalam diagram berikut.



Manfaat Penyediaan dan Pengendalian Mutu Buku

Buku pendidikan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta memenuhi norma positif yang berlaku di masyarakat, antara lain tidak mengandung unsur

pornografi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias gender, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya, serta layak digunakan di satuan pendidikan dari segi isi, penyajian, kebahasaan, dan kegrafikaan. Oleh karena itu, semua buku pendidikan, yaitu buku teks utama,

buku teks pendamping, buku nonteks pelajaran, dan buku pendidikan lainnya harus dinyatakan layak digunakan dalam proses pembelajaran melalui proses penilaian dan/atau penelaahan oleh pemerintah, seperti yang tergambar dalam diagram berikut.



Dengan terselenggaranya sistem perbukuan yang sehat, program dan kebijakan penyediaan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata untuk PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal dapat diwujudkan seperti yang tergambar dalam diagram berikut.

Penyediaan dan pengendalian mutu buku melalui penilaian/penelaahan buku pendidikan dilaksanakan Pusat Kurikulum dan Perbukuan sebagai salah upaya perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana yang strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional dalam proses







Membaca buku tanpa mengenal tempat

pembelajaran yang meliputi buku perpustakaan dan buku teks pelajaran.

Penyediaan dan pengendalian mutu buku pendidikan yang memenuhi kaidah dan standar mutu buku bermanfaat bagi para tenaga pendidik dan kependidikan, penerbit buku, dan terutama kepada peserta didik, serta pelaku perbukuan lainnya dan masyarakat secara umum. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Buku-buku nonteks pelajaran akan membantu membentuk watak bangsa yang bermartabat, mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Kedua, mendukung tercapainya standar kompetensi tiap mata pelajaran. Buku-buku pendidikan yang bermutu akan mendukung ketercapaian pemahaman materi pelajaran.

Ketiga, meningkatkan kuantitas dan kualitas koleksi perpustakaan, baik di perpustakaan sekolah maupun di perpustakaan umum/perpustakaan daerah/taman bacaan dengan buku-buku pendidikan yang bermutu.

Keempat, meningkatkan minat dan kegemaran membaca. Perlu ada upaya-upaya untuk meningkatkan minat dan kegemaran membaca pada siswa dan guru serta masyarakat umum.

Dapat disimpulkan bahwa

buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global. Untuk menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata, diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu, terutama yang berkaitan dengan penyediaan atau pemerolehan naskah, penerbitan atau pengolahan naskah yang bermutu, pencetakan, dan pendistribusian buku cetak dan buku elektronik/digital secara mudah dan merata, serta peningkatan kapasitas pelaku perbukuan dalam mendukung penyediaan buku murah. ■



Pembangunan perpustakaan di SMPN 3 Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan

## PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan merupakan komponen penting dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan pendidikan, seperti adanya ketersediaan lahan untuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, dan juga peralatan penunjang yang mendukung ruang laboratorium. Semuanya menunjang peningkatan akses dan mutu pendidikan.

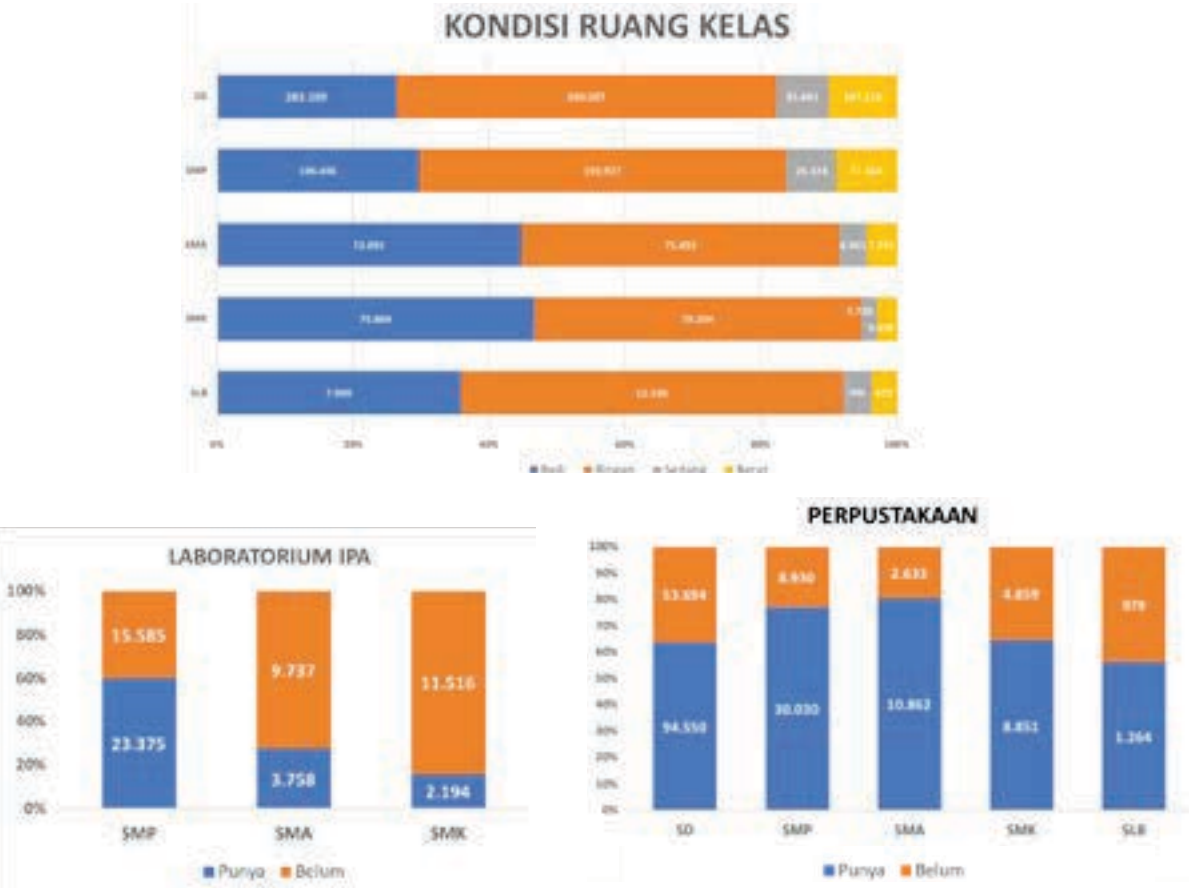
Sampai Tahun 2018, masih terdapat banyak kekurangan sarana dan prasarana pendidikan. Tidak sedikit pula sarpras dalam kondisi rusak dengan berbagai

kategori kerusakan, seperti rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Kemudian, perlu menjadi perhatian pula bahwa kondisi geografis Indonesia yang mempunyai tingkat kesulitan keterjangkaunnya, yaitu Daerah 3T. Hal ini mempunyai pengaruh terhadap kebijakan pembangunan sarana dan prasarana.

Pembangunan sarana dan prasarana sangat diperhatikan Mendikbud, terutama di daerah yang sulit. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/3/2018) menyatakan sebagai berikut.

*“Kesulitan akses transportasi dan area pegunungan menjadi kendala pembangunan sarana pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Seperti di Papua itu, antara distrik satu dan distrik lain, antarkabupaten itu semuanya tidak bisa dijangkau lewat darat. Seperti di Pegunungan Bintang itu, ada 34 distrik dan yang bisa dilalui dengan darat hanya 5, sementara sisanya naik pesawat.”*





Lokus yang menjadi sasaran pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan ditentukan berdasarkan data yang terdapat di Dapodik agar tepat sasaran melalui berbagai program berikut ini.

**1. Unit Sekolah Baru:** Pembangunan USB penting guna memperluas akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah terutama pada daerah tertinggal, terpencil, dan daerah perkotaan yang mengalami pertumbuhan penduduk tinggi. Dampak pembangunan USB pada daerah tertinggal dan terpencil adalah lokasi sekolah lebih mudah dijangkau. Dengan demikian, kesempatan masyarakat untuk bersekolah lebih mudah. Hal ini berdampak pada peningkatan APK daerah setempat.

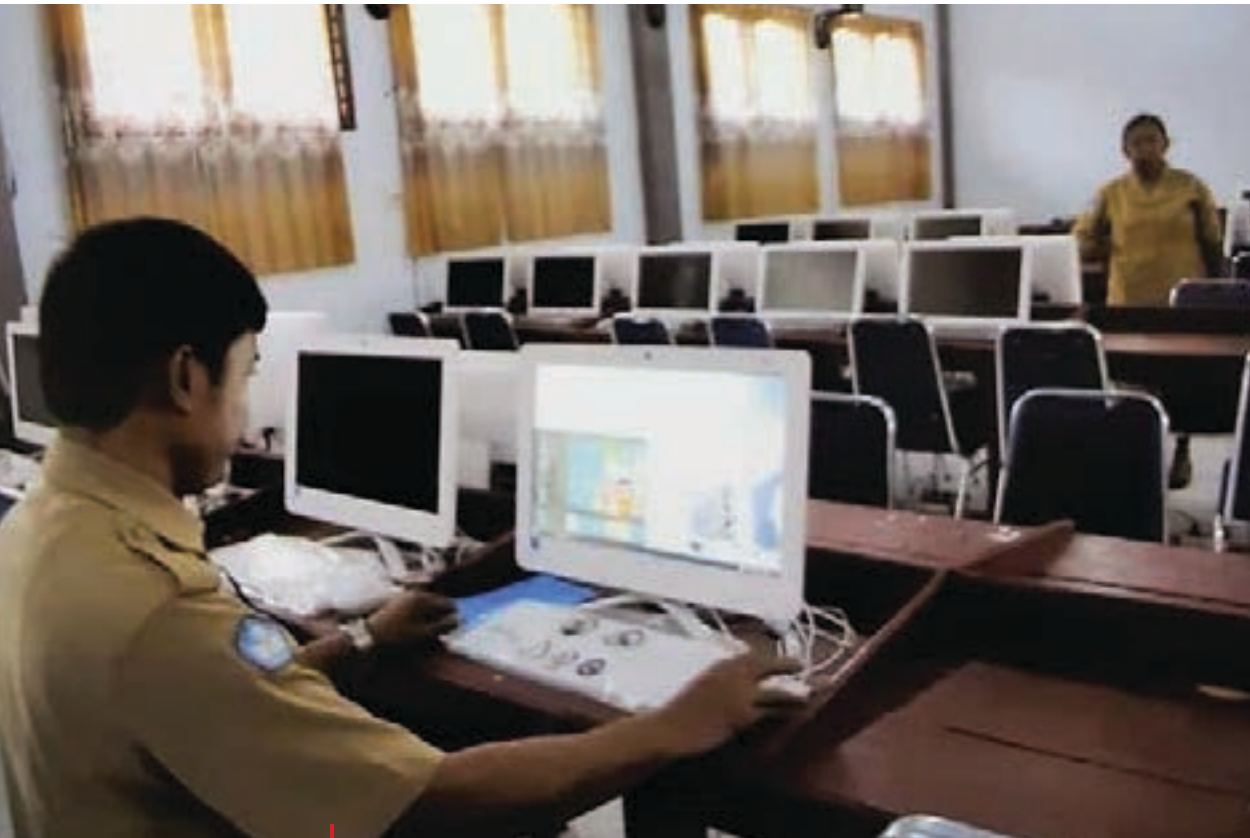
**2. Ruang Kelas Baru:** Pembangunan RKB diharapkan bisa menambah daya tampung pada satuan pendidikan yang jumlah rombongan belajarnya berlebih. Melalui pembangunan RKB, tidak lagi terdapat kelas bergantian pagi dan siang. Selain itu, pembangunan RKB dapat pula menambah daya tampung bagi sekolah bersangkutan, terutama pada kawasan padat

penduduk dengan potensi usia sekolah yang juga tinggi. Dampak dari pembangunan RKB adalah meningkatnya daya tampung satuan pendidikan sehingga jumlah rombongan belajar berbanding lurus dengan jumlah ruang kelas yang tersedia. Selain itu, sekolah tertentu dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat sekitar.

**3. Rehabilitasi Ruang Kelas:** Rehabilitasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, kenyamanan dan keamanan belajar siswa lebih terjamin dan ruang kelas dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Pembangunan perpustakaan menjadi penting sebagai tempat untuk memperoleh sumber belajar lainnya.”

**4. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktik:** Sarana dan prasarana ini berfungsi untuk menambah fasilitas penunjang lainnya sehingga siswa dapat melakukan pembelajaran melalui praktikum/eksperimen di laboratorium dalam rangka menanamkan



Peralatan TIK SMAN 4 Kota Jayapura

pola pikir logis melalui kegiatan eksperimen.

Sementara itu, pembangunan sarpras berdasarkan kekhususan seperti: (i) pembangunan asrama siswa guna menampung siswa SLB dengan kondisi tertentu karena ketiadaan asrama menjadikan mereka tidak mendapat akses pendidikan; (ii) SD SMP Satu Atap dimaksudkan untuk memberikan akses pendidikan jenjang SMP bagi lulusan SD yang jauh dari lokasi SMP yang sudah ada; (iii) kegiatan vokasi SMK dapat meningkatkan relevansi lulusan SMK dengan dunia kerja sehingga tingkat penyerapan lulusasn SMK pada dunia usaha dan dunia industri semakin tinggi.

Pembangunan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan oleh sekolah sehingga semua warga sekolah

merasa begembira ketika mendapatkan bantuan sarana dan prasarana tersebut. Hal ini diketahui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui pemantauan (*monitoring*) dengan pengajuan pertanyaan atau pengisian lembar kuesioner. Secara umum, aparat sekolah mengatakan bahwa pembangunan dan penyediaan sarpras sesuai dengan jadwal, tidak ada penyimpangan, dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana terserap sesuai dengan alokasi, dan panitia melaporkan hasil kerja baik. Adapun hasil pembangunan sarana dan prasarana dalam dua Tahun terakhir (Tahun 2017 sampai Agustus 2018) tertera pada tabel berikut ini.



Program dan Kegiatan Sarana dan Prasarana Tahun 2017-2018

Program/Kegiatan	2017		2018 (s.d. Agustus)	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	202	200	109	87
SD	10	11	15	15
SMP	50	50	30	30
SMA	70	70	18	18
SMK	61	61	26	10
SLB (PKLK)	11	8	20	14
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	2.654	2.650	4.076	2.229
SD	200	200	312	119
SMP	300	300	500	194
SMA	1.000	1.024	1.624	1.332
SMK	1.029	1.000	1.500	460
SLB (PKLK)	125	126	140	124
Rehabilitasi Ruang belajar	40.249	41.708	20.757	7.729
SD	14.518	15.480	6.049	588
SMP	16.315	17.129	10.000	3.815
SMA	5.598	5.281	2.500	2.212
SMK	3.314	3.314	2.000	1.055
SLB (PKLK)	504	504	208	59
Pembangunan Perpustakaan	1.311	1.353	3.725	631
SD	390	424	2.000	-
SMP	350	350	600	-
SMA	351	351	750	475
SMK	200	208	200	7
SLB (PKLK)	20	20	175	149
Pembangunan Ruang Praktik/Laboratorium	2.189	2.158	5.072	736
SMP	440	440	618	-
SMA	450	467	656	517
SMK	1.299	1.251	3.778	219
SLB (PKLK)	-	-	-	-
Sekolah yang di Revitalisasi/ Renovasi	305	316	1.091	532
SD	84	101	50	2
SMP	100	101	445	425
SMA	110	103	591	100
PKLK	11	11	5	5
Sekolah Asrama yang Dibangun (SMP)	10	10	-	-
Pembangunan Asrama Siswa (PKLK)	3	3	18	12
Pembangunan SD-SMP Satap	50	50	25	25
SMK Kelautan dan Pariwisata	50	50	90	87
SMK Pertanian	100	100	160	160
Pengembangan Teaching Factory dan Techno Park	220	220	500	228
SMK yang Bekerja Sama dengan Dunia Industri	1.540	1.540	315	119
SMK yang Melakukan Penyeragaman Kejuruan	1.280	1.280	-	-

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan menjadi kegiatan prioritas. Namun, rencana pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana tersebut belum dapat dilakukan secara optimal dan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan. Hal itu terjadi tidak saja karena keterbatasan anggaran, tetapi juga upaya pemeliharaan perlu terus ditingkatkan di level sekolah. Bila saja upaya pemeliharaan sarana dapat dilakukan secara lebih serius, rutin, dan maksimal, sarana bisa lebih terkendali tingkat kebergunaannya, artinya tidak cepat rusak sehingga tidak perlu banyak anggaran untuk program rehabilitasi.

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi warga negara untuk mengikuti pendidikan sebagai implementasi dari kebijakan pemerataan pendidikan. Di samping itu, pembangunan juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya pembangunan unit sekolah baru, tambahan ruang kelas baru, dan direhabilitasinya ruang kelas yang rusak tersebut dapat menambah rombongan belajar dan kenyamanan belajar. Demikian pula dengan dilakukannya pembangunan perpustakaan, laboratorium, disediakannya peralatan pendidikan, buku-buku, dan berbagai alat peraga akan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Oleh karena itu, setiap Tahun pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Data kebutuhan dan kerusakan ruang kelas ataupun ruang-ruang penunjang lain dapat diketahui. Namun, sampai saat ini belum seluruh kebutuhan sarana dan prasarana tersebut terpenuhi. Dalam kondisi keuangan negara yang terbatas, diperlukan adanya skala prioritas. ■



## PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI RUH PENDIDIKAN BANGSA

*Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan komitmen Kemendikbud untuk menunaikan Nawacita ke-8 dan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)*

*Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya, inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya, nation character building Bung Karno*

Sejak awal, Bung Karno selaku Bapak Proklamator Indonesia telah menunjukkan betapa pentingnya Pendidikan Karakter untuk bangsa ini. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara yang pernah berpesan tentang pentingnya budi pekerti/karakter dalam pendidikan. Menurut Ki Hadjar, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Pendapat Ki Hadjar Dewantara ini sangat menarik karena memuat tiga komponen yang selama ini dianggap penting dalam dunia pendidikan, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik.

Dengan menyadari hal itu, pemerintah Indonesia memasukkan ketiga komponen itu dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada perkembangannya, pendidikan karakter menjadi pusat perhatian pemerintah. Presiden Jokowi merumuskan Nawacita ke-8, yaitu : Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai



patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Nawacita kedelapan ini kemudian ditindaklanjuti dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Pendidikan Karakter pun semakin menjadi prioritas pemerintah setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Dalam Pasal 1 Ayat 1 peraturan ini disebutkan bahwa PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Dalam peraturan presiden tersebut disebutkan tiga tujuan PPK sebagaimana dalam Pasal 2 yaitu, tujuan pertama adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Tujuan kedua adalah mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Tujuan ketiga

adalah merevitalisasi sekaligus memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, serta lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Adapun pada Pasal 5 ditetapkan prinsip dalam pelaksanaan PPK., yaitu pertama, berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu; kedua, keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada tiap-tiap lingkungan pendidikan; dan ketiga, berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal, seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan PKLK, dapat dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, di dalam dan/atau di luar lingkungan satuan pendidikan formal. Hal ini sejalan sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017.

Sebagai bentuk perwujudan Perpres tentang PPK, terbitlah Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan Formal. Pada Permendikbud ini, disebutkan terdapat 5 nilai utama karakter yang saling berkaitan, yaitu religisitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas.



Lima Nilai Utama Penguatan Pendidikan Karakter

Kelima nilai utama karakter tersebut diimplementasikan berdasarkan substansi dan aktivitas: (1) Memperkuat jejaring tri pusat pendidikan, (2) Sekolah menjadi sentral, (3) Pendekatan implementasi, (4)

Individualisasi anak, (5) Keseimbangan pembelajaran, (6) Peran kepala sekolah, (7) Peran guru masa kini, (8) Komite sekolah, dan (9) Keteladanan dan Pembiasaan sebagaimana dijelaskan dalam bagan di bawah ini.



Pada implementasinya, terdapat tantangan yang dihadapi dalam penguatan Pendidikan Karakter. Selain tantangan di atas, tantangan revolusi industri 4.0 dan tantangan revolusi digital memberikan dampak positif maupun negatif bagi bangsa ini. PPK menjadi hal yang sangat relevan untuk menangkal dan melindungi

anak-anak Indonesia dari konten negatif seperti radikalisme, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, pornografi, dan perilaku penyimpangan sosial lainnya.

Untuk mengoptimalkan implementasi PPK dan guna menghadapi tantangan implementasi PPK, Kemendikbud menerbitkan Surat Keputusan Menteri

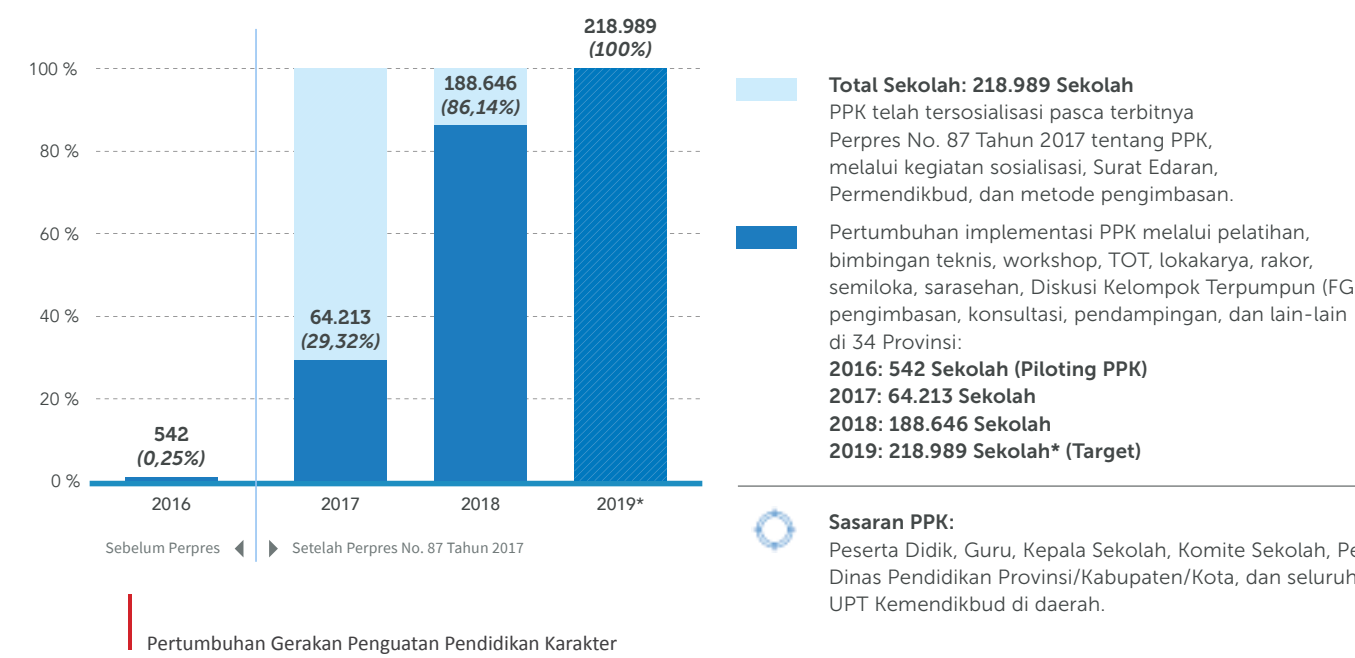




Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 269/P/2018 Tentang Tim Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter. Di dalam Tim Implementasi PPK ini terdapat 4 bidang yang memiliki tugas untuk mengoptimalkan implementasi PPK, yaitu Bidang Kajian dan Pengembangan, Bidang Pelatihan, Bidang Sosialisasi, Publikasi, dan Hubungan antar Lembaga, serta

Bidang Monitoring dan Evaluasi. Dalam perkembangannya, gerakan PPK terus ditumbuhkan melalui berbagai kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, TOT, lokakarya, rakor, semiloka, sarasehan, diskusi kelompok terpusat (FGD), pengimbasan, konsultasi, pendampingan dan lain-lain.

Grafik Perkembangan PPK (2015-2018)



Sebagai kebijakan prioritas, PPK didukung oleh seluruh unit utama di lingkungan Kemendikbud. Dukungan unit-unit utama dalam implementasi PPK antara lain sebagai berikut.

Unit Utama	Kegiatan
Ditjen Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"><li>Gerakan Seniman Masuk Sekolah</li><li>Belajar Bersama Maestro</li><li>Pendidikan Karakter Berbasis Musik</li><li>Pameran Seni Rupa Nusantara</li><li>Internalisasi Nilai Tradisi Melalui Permainan Tradisional dan Cerita Rakyat</li><li>Seniman Mengajar di Daerah 3T</li><li>Pekan Budaya Indonesia</li><li>Pameran Seni Rupa</li><li>Pameran Warisan Budaya Daerah</li><li>Konser Akbar Indonesia Raya Tiga Stanza</li><li>Pentas Ekspresi Seniman Jalanan</li><li>Festival Ramadhan Fair &amp; Iftar Budaya</li></ul>
Sekretariat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"><li>Konferensi Pers Perayaan Hari Film Nasional</li><li>Lokakarya Pengembangan Perfilman</li><li>Peringatan Hari Film Nasional</li><li>Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>Peringatan Hari Pendidikan Nasional</li><li>Pesta Pendidikan dan Kebudayaan</li></ul>
Ditjen PAUD dan Dikmas	<ul style="list-style-type: none"><li>Festival dan Kreativitas Anak Usia Dini</li><li>Peringatan Hari Aksara Internasional</li><li>Dialog Interaktif Gerakan Perempuan</li><li>Cinta Pendidikan</li></ul>
Ditjen Dikdasmen	<ul style="list-style-type: none"><li>Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia SLB</li><li>Lomba Keterampilan Siswa Nasional</li><li>Apresiasi Sekolah Sehat Tingkat Nasional</li><li>Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)</li><li>Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI)</li><li>Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia</li><li>Sosialisasi Peraturan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP)</li><li>Lomba Kompetensi Siswa</li><li>Pameran Produk Inovasi LKS SMK</li><li>Ujian Praktik Kejuruan</li></ul>
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	<ul style="list-style-type: none"><li>Festival Bahasa Ibu</li><li>Penghargaan Anugerah Literasi Prioritas</li><li>Bincang-bincang Kebangsaan: Merawat Kebinekaan Melalui Bahasa dan Sastra</li></ul>
Badan Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"><li>Peringatan Hari Buku Nasional</li><li>Kajian Pengembangan Grand Design Penguatan Pendidikan Karakter</li><li>Kajian Radikalisme di Lingkungan Pendidikan</li></ul>
Ditjen GTK	<ul style="list-style-type: none"><li>Lokakarya Peningkatan Literasi di Daerah 3T</li></ul>

Dukungan Unit Utama Kemendikbud dalam Penguatan Pendidikan Karakter



Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit utama beserta direktorat yang terkait bersama-sama dengan seluruh ekosistem pendidikan, semakin mengukuhkan bahwa PPK menjadi arus utama penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bahwa “Gerakan PPK sebagai fondasi dan roh utama pendidikan,” sebagaimana dikutip dalam sebuah berita berjudul “Penguatan Pendidikan Karakter Jadi Pintu Masuk Pembinaan Pendidikan Nasional” yang dipublikasikan di laman kemdikbud.go.id tanggal 17 Juli 2017.

Menteri menambahkan bahwa PPK merupakan gerakan pendidikan, seluruh ekosistem pendidikan, mulai orang tua, siswa, guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, komite sekolah, pejabat dinas pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta

seluruh lapisan masyarakat harus terlibat secara aktif.

Sejalan dengan semangat pelibatan masyarakat dalam Implementasi PPK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga membangun jejaring kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga. Kementerian dan lembaga yang bekerjasama dengan Kemendikbud di antaranya: Wahana Visi Indonesia untuk implementasi PPK kontekstual di daerah 3T, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) untuk penguatan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 1945, Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di satuan pendidikan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kemristekdikti, Kemenag, Kemdagri tentang Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi.

Penandatanganan Nota kesepahaman kerja sama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dan Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia, Rais Abin.



Rakornas Implementasi Pendidikan Antikorupsi antara KPK Bersama 4 Kementerian yaitu, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama

Selain kementerian dan lembaga, pemerintah daerah juga telah mendukung secara aktif implementasi PPK dalam bentuk perumusan kebijakan sesuai dengan konteks kearifan lokal daerah masing-masing. Beberapa kebijakan daerah terkait PPK antara lain:

Dukungan Pemerintah Daerah dalam Bentuk Kebijakan terkait Penguatan Pendidikan Karakter

No	Kota/Kabupaten	Provinsi	Kebijakan Daerah terkait PPK
1	Kota Bandung	Jawa Barat	Bandung Masagi
2	Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat	Tujuh Poe Atikan
3	Kabupaten Bandung	Jawa Barat	Sabilulungan
4	Kabupaten Solok	Sumatera Barat	Sekolah Umum Berbasis Pesantren
5	Kabupaten Pekalongan	Jawa Tengah	Inovasi
6	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	Banyuwangi Bahagia
7	Kabupaten Klungkung	Bali	Tirta Yatra
8	Kabupaten Manggarai Timur	NTT	Lonto Leok
9	Kabupaten Poso	Sulawesi Tengah	Harmoni
10	Kabupaten Sikka	NTT	Kulababong



No	Kota/Kabupaten	Provinsi	Kebijakan Daerah terkait PPK
11	Kabupaten Halmahera Utara	Maluku Utara	Harmoni Hibualamo
12	Kabupaten Singkawang	Kalimantan Barat	Sekolah Harmoni Hijau
13	Kabupaten Keerom	Papua	Wamepyun (Kasih)
14	Kota Ternate	Maluku Utara	Dodara Ngofa
15	Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat	Sekolah Hijau
16	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	Khatulistiwa Bersinar
17	Kabupaten Landak	Kalimantan Barat	Sekolah Harmoni Hijau
18	Kabupaten Nias	Sumatera Utara	Famaeri
19	Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	Sepuluh Pembiasaan Akhlak Mulia di Sekolah
20	Kabupaten Boven Digul	Papua	Mindiptana
21	Kabupaten Lembata	NTT	Gerakan Maju Pendidikan
22	Kabupaten Bangka	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Smart School
23	Kota Medan	Sumatera Utara	Program Sekolah Berbasis Karakter dan Literasi
24	Kabupaetn Lamongan	Jawa Timur	Gerakan 1821

Sebagai penutup, implementasi PPK banyak memberikan manfaat. Hal ini dirasakan oleh berbagai unsur, baik siswa, guru, kepala sekolah, orangtua, maupun masyarakat yang ditunjukkan dalam testimoni sebagai berikut.

*“Saya acung jempol terhadap kekompakan dan kerjasama antara Kepala Sekolah dan guru-guru. Sekolah dapat meraih prestasi berkat kekompakan Kepala Sekolah, guru, dan warga sekolah lainnya. Tanpa itu, mustahil prestasi dapat diraih.”* – Drs. Ujang Nurjaman, M.Pd, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kota Serang.

*“Tidak akan ada artinya bila peserta didik mempunyai prestasi tinggi dan berhasil dalam karirnya jika tidak memiliki karakter terpuji.”* – Dwi Atmi Sutarini, Kepala Sekolah SDN Ungaran 1 Yogyakarta.

*“Penguatan Pendidikan Karakter di SMPN 38 Medan menurut saya sangat baik sekali. Dengan penerapan PPK, siswa/siswi lebih berkarakter. Sebagai guru kita harus memberikan keteladanan yang baik kepada murid-murid dalam menambah proses kualitas*

*pendidikan karakter yang lebih baik, kaerna gerakan revolusi mental adalah tanggung jawab kita semua.”* – Guru SMPN 38 Medan.

*“Penguatan Pendidikan Karakter yang diterapkan oleh SDN Sumbawa Besar telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perspektif, sikap, dan perilaku putra-putra saya. Kini anak-anak kami menjadi pribadi yang lebih menghargai waktu, lebih mengapresiasi nilai-nilai luhur sebuah persahabatan dengan temannya, dan lebih perhatian kepada orang tuanya.”* – Ikhsan Safitri, Orang Tua Siswa SDN 2 Sumbawa Besar.

*“Saya menjadi gemar membaca karena terbiasa melakukan kegiatan literasi, banyak lagu-lagu nasional yang saya hafal karena sering diajak guru menyanyikan lagu nasional. Saya juga terlatih mandiri, bertanggung jawab, menghargai pendapat orang lain melalui diskusi, terbiasa membuang sampah pada tempatnya, terbiasa memelihara tanaman dan bunga-bunga, terbiasa mengucapkan salam dengan guru dan teman-teman, terbiasa disiplin karena di sekolah kegiatan belajar berjalan tepat waktu.”* – Ananda Putri, Siswi Kelas VII-3 SMPN 3 Palangka Raya. ■

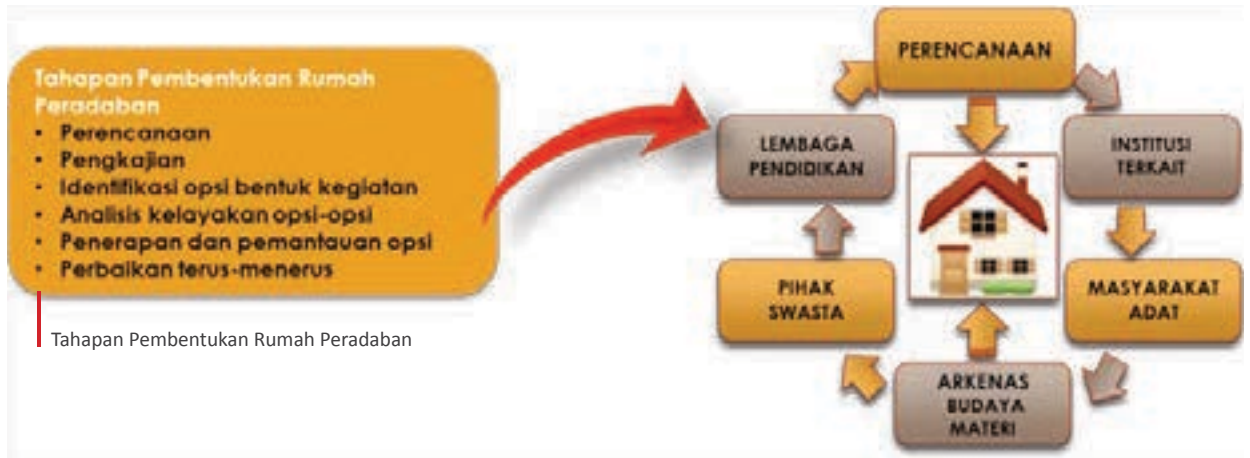
# RUMAH PERADABAN SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PERAJUT TENUN KEBANGSAAN

Sebagai penyiap kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan arkeologi, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki visi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemahaman dan pembelajaran nilai-nilai peradaban masa lalu. Sebagai akar budaya bangsa, nilai-nilai itu akan memberikan penguatan karakter dan pemahaman kebinekaan bangsa Indonesia. Dalam upaya mendukung Nawacita sebagai program unggulan pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Puslit Arkenas mengimplementasikan visinya dalam bentuk Rumah Peradaban. Program ini merupakan suatu bentuk mediasi interaksi dan sarana edukasi dalam memasyarakatkan hasil penelitian arkeologi untuk memberikan pemahaman sejarah dan nilai-nilai budaya masa lampau. Rumah Peradaban berkaitan dengan upaya melakukan revolusi karakter bangsa (Cita ke-8) dan memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Cita ke-9).

Misi Puslit Arkenas untuk menjadikan penelitian arkeologi bermanfaat bagi kepentingan bangsa dicapai dengan upaya-upaya pencerdasan bangsa melalui pemberian pemahaman dan pembelajaran mengenai nilai-nilai peradaban masa lampau. Pembelajaran dan

pemahaman mengenai nilai-nilai masa lampau dinilai secara ideologi dapat memperkuat karakter bangsa. Contohnya, dari penelitian arkeologi mengenai cara pembangunan candi-candi megah di Indonesia, tersirat nilai gotong royong masyarakat Indonesia pada masa itu.

Arkeologi mempunyai informasi sangat potensial dalam membangun memori kebangsaan yang memuat nilai-nilai budaya masa lalu bagi masyarakat dalam menghadapi masalah aktual dan globalisasi menyangkut kesinambungan budaya dan peradaban. Melalui arkeologi diharapkan masyarakat dapat melek budaya, tumbuh semangat kebangsaannya, cerdas, paham kebinekaan, dan menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan budaya yang berkepribadian Indonesia. Dengan program Rumah Peradaban, diharapkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan secara simultan oleh Puslit Arkenas dan 10 UPT-nya (Balai Arkeologi) yang tersebar di seluruh Indonesia tidak hanya dapat dimaknai di lingkungan akademis, tetapi masyarakat umum juga dapat memaknai nilai-nilai budayanya sebagai fondasi dalam membangun insan yang berkarakter.





Nilai pluralisme yang tecermin dari situs arkeologi yang memiliki keragaman budaya agama dan adat, tetapi dapat terpadu harmonis dan pembelajaran lainnya dapat diperoleh dari penelitian arkeologi di situs arkeologi di Indonesia. Nilai-nilai seperti itulah yang berusaha digali oleh Puslit Arkenas melalui penelitian arkeologi sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan kebudayaan nasional dengan cara memberikan pembelajaran dan pemahaman mengenai nilai budaya ke masyarakat.

Untuk memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai budaya masa lampau kepada masyarakat Indonesia serta dalam mewujudkan penelitian arkeologi yang dapat bermanfaat bagi kepentingan bangsa, Puslit Arkenas menghadirkan program Rumah Peradaban. Rumah Peradaban adalah sebuah program Puslit Arkenas dalam mendukung program Nawacita milik pemerintah. Dengan adanya program Rumah Peradaban ini, diharapkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan secara simultan oleh Puslit Arkenas tidak hanya dapat dimaknai di lingkungan akademis, tetapi masyarakat umum juga dapat memaknai hasil-hasil penelitian tersebut.

Rumah Peradaban memiliki semboyan “Mengungkap, Memaknai, Mencintai”. Arti dari semboyan tersebut terlihat pada Gambar 3. Rumah Peradaban dimaksudkan sebagai media interaksi dan sarana edukasi

antara hasil penelitian arkeologi dan masyarakat umum. Pemasyarakatan hasil penelitian arkeologi juga dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai sejarah dan nilai-nilai budaya masa lampau dalam upaya mencerdaskan bangsa, penumbuhan semangat kebangsaan, dan sebagai sumber inspirasi bagi pengembangan budaya berkepribadian untuk membangun insan berkarakter, serta dapat lebih mengenalkan dan mendekatkan arkeologi kepada masyarakat.

Pada Tahun 2016, tercatat terdapat 1.100 sekolah dan 23.282 siswa yang mengikuti kegiatan Rumah Peradaban. Untuk Tahun 2017, Puslit Arkenas menargetkan 1.337 sekolah dan 30.382 siswa yang akan berpartisipasi dalam kegiatan Rumah Peradaban. Keluaran (output) dari program Rumah Peradaban ini adalah disdik (destinasi pendidikan), buku pengayaan, dan peraga pendidikan. Adapun bentuk kegiatan Rumah Peradaban juga bermacam-macam, antara lain field-school arkeologi, menerbitkan buku pengayaan, workshop, seminar, pameran, sosialisasi, diskusi kelompok terpumpun (DKT/FGD), penyuluhan, penelitian partisipatoris, film dokumenter situs arkeologi, dan aplikasi ponsel pintar.



Implementasi Rumah Peradaban



**SEMBOYAN RUMAH PERADABAN**

**MENGUNGKAP**

**Penelitian Kebudayaan**  
Kebudayaan atau keragaman adalah karakter mendasar yang selalu mengisi ruang dan waktu keindonesiaan kita. Penelitian kebudayaan menjadi salah satu prioritas ke-9 dan Nawacita (1340).

**Penelitian Arkeologi Maritim**  
Kebudayaan laut di antara pulau-pulau telah mempersiapkan kekayaan Nusantara. Melalui kajian Arkeologi Maritim, dapat diketahui barang-barang yang telah menyatukan bangsa sebagai kesatuan (17.500 pulau).

**Penelitian Wilayah Perbatasan**  
Penelitian arkeologi wilayah perbatasan bertujuan memahami proses penghunian Nusantara dalam konteks regional-global, interaksi kultural yang terjadi dengan pihak luar, serta proses adaptasi penghuninya terhadap lingkungan perbatasan, sehingga menciptakan budaya khas penghuni dengan budaya luar seiring perjalanan waktu.

**MEMAKNAI**

- Mengetahui kehidupan multikulturalisme
- Mengetahui nilai-nilai yang membentuk karakter keindonesiaan
- Mengetahui budaya maritim
- Mengetahui ulang budaya antarbangsa
- Mengajukan kebanggaan masyarakat dan pengayaan wawasan Nusantara di daerah perbatasan

**MENCINTAI**

- Fieldschool arkeologi bagi siswa sekolah
- Penerbitan buku pengayaan bagi siswa sekolah
- Pembuatan alat peraga (posting artefak) untuk didistribusikan ke sekolah
- Workshop dan seminar arkeologi
- Pameran arkeologi
- Pemutaran film dokumenter dengan melibatkan masyarakat di sekitar situs
- Sosialisasi, FGD, dan penyuluhan
- Penelitian partisipatoris dengan melibatkan masyarakat setempat
- Aplikasi ponsel pintar

Semboyan Rumah Peradaban



No	Lokasi	Pelaksana
1	Gua Harimau, OKU, Sumatera Selatan	Puslit Arkenas
2	Penanggungan, Jawa Timur	Puslit Arkenas
3	Plawangan, Rembang, Jawa Tengah	Puslit Arkenas
4	Sriwijaya, Sumatera Selatan	Puslit Arkenas
5	Tambora, NTB	Puslit Arkenas
6	Kerawang, Jawa Barat	Puslit Arkenas
7	Jatiluwhi, Bali	Puslit Arkenas
8	Natuna, Kepulauan Riau	Puslit Arkenas
9	Loyang Medale, Takengon, Aceh Tengah	Balai Arkeologi Sumatra Utara
10	Gayo, Aceh Tengah	Balai Arkeologi Sumatra Utara
11	Pangkal Pinang, Babel	Balai Arkeologi Sumatra Selatan
12	Pasemah, Pagar Alam, Sumatera Selatan	Balai Arkeologi Sumatra Selatan
13	Fieldschool di Pasemah, Sumatera Selatan	Balai Arkeologi Sumatra Selatan
14	Pandeglang, Banten	Balai Arkeologi Jawa Barat
15	Yogya, DIY	Balai Arkeologi DIY
16	Gilimanuk, Bali	Balai Arkeologi Bali
17	Pawan, Kalimantan Barat	Balai Arkeologi Kalimantan Selatan
18	Workshop batik, Banua Kayong, Ketapang, Kalbar	Balai Arkeologi Kalimantan Selatan
19	Jelajah S. Pawan, Banua Kayong, Ketapang, Kalbar	Balai Arkeologi Kalimantan Selatan
20	Workshop fotografi, Banua Kayong, Ketapang, Kalbar	Balai Arkeologi Kalimantan Selatan
21	FGD, Banua Kayong, Ketapang, Kalbar	Balai Arkeologi Kalimantan Selatan
22	Diskusi Budaya, Banua Kayong, Ketapang, Kalbar	Balai Arkeologi Kalimantan Selatan
23	Pameran Batik, Banua Kayong, Ketapang, Kalbar	Balai Arkeologi Kalimantan Selatan
24	Situs Oranye, Pengaron, Banjar, Kalsel	Balai Arkeologi Kalimantan Selatan
25	Matuluntung, Minahasa, Sulut	Balai Arkeologi Sulawesi Utara
26	Lapangan Terbang, Kendari, Sultra	Balai Arkeologi Sulawesi Selatan
27	Bahari, Ambon	Balai Arkeologi Ambon
28	Papua	Balai Arkeologi Papua

Lokasi Rumah Peradaban di Seluruh Indonesia

Dalam program Rumah Peradaban untuk Tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 28 kegiatan yang terbagi dalam beberapa wilayah, seperti di Gayo (Aceh Tengah), Natuna (Kepulauan Riau), Pangkal Pinang (Bangka-Belitung), Pagaralam, Sriwijaya, dan Gua Harimau-OKU (Sumatera Selatan), Pandeglang (Banten), Kerawang (Jawa Barat), Plawangan-Rembang (Jawa Tengah), Yogyakarta (DIY), Penanggungan (Jawa Timur), Gilimanuk dan Jatiluwhi (Bali), Tambora (NTB), Ketapang (Kalimantan Barat), Oranye-Pengaron (Banjar, Kalimantan Selatan), Matuluntung-Minahasa (Sulawesi Tengah), Kendari (Sulawesi Tenggara), Bahari (Ambon), dan Papua.

Berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Rumah Peradaban yang dilaksanakan pada Tahun

2017 ini sebanyak 75 % (21 kegiatan) telah memberikan hasil dari jumlah peserta/pengunjung, sedangkan dari sisanya sebanyak 7 kegiatan belum didapatkan informasi datanya (Tambora, Karawang, Natuna, Yogyakarta, Ketapang, Ambon, dan Papua). Adapun jumlah peserta/pengunjung yang sudah diperoleh mencapai 5.016 orang yang terdiri atas 685 pengunjung umum, 601 mahasiswa, 1.927 siswa SMU, 960 siswa SMP, 489 siswa SD, dan 54 orang guru pendamping.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi para peserta, dilakukan jajak pendapat terhadap dua sampel kegiatan Rumah Peradaban, yaitu di Jati Luwih (Bali) dan Karawang (Jawa Barat). Jumlah formulir yang disebar-



sebanyak 188 lembar. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan terkait dengan (1) apakah menyukai pelajaran sejarah; (2) apakah mengetahui ilmu arkeologi; (3) apakah kegiatan Rumah Peradaban bermanfaat baginya; (4) apakah kegiatan ini menambah pengetahuannya tentang budaya Indonesia dan pendidikan karakter bangsa; dan (5) apakah perlu peran pemda dalam mengembangkan Rumah Peradaban sebagai destinasi arkeologi, literasi, dan buku pengayaan. Ada tiga pilihan untuk lembar jawaban, yaitu setuju, ragu, dan tidak setuju. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 97% responden baik yang di

Kadi Luwih maupun di Karawang menjawab positif tentang kegiatan. Secara garis besar bahwa banyak para responden mempunyai minat mempelajari sejarah, mendapatkan manfaat terhadap kegiatan Rumah Peradaban, mendapatkan tambahan pengetahuan tentang budaya Indonesia dan pendidikan karakter bangsa, pentingnya peran pemda untuk ikut berpartisipasi dalam menunjang kegiatan Rumah Peradaban. Ada satu hal yang menarik disampaikan oleh responden, yaitu bahwa setengah dari mereka memahami arkeologi.





NO	PERTANYAAN	KARAWANG (188/100%)			KADI LUWIH (130/100%)		
		SETUJU	RAGU	TIDAK SETUJU	SETUJU	RAGU	TIDAK SETUJU
1.	Saya suka pelajaran sejarah	150 (78,8 %)	37 (19,7 %)	1 (1,5%)	108 (83,1%)	22 (16,9%)	0 (0%)
2.	Saya mengetahui ilmu arkeologi	80 (42,5 %)	105 (55,8 %)	3 (1,7%)	55 (42,3%)	72 (55,4 %)	3 (2,3%)
3.	Kegiatan Rumah Peradaban sangat bermanfaat bagi saya	179 (95,2 %)	8 (4,3 %)	1 (0,5%)	103 (79,2%)	26 (20%)	1 (0,8%)
4.	Arkeologi menambah pengetahuan saya tentang budaya Indonesia dan pendidikan karakter bangsa	177 (94,2 %)	11 (5,8%)	0(0%)	108 (83,1%)	22 (16,9%)	0(0%)
5.	Sangat diperlukan partisipasi pemda dalam menunjangpengembangan Rumah Peradaban sebagai destinasi arkeologi, literasi, dan buku pengayaan	168 (89,4 %)	19 (10,1 %)	1 (0,5%)	94 (72,3%)	36 (27,7%)	0 (0%)

Hasil Jajak Pendapat tentang Rumah Peradaban di Kadi Luwih dan Kerawang

Selain itu, pada Tahun 2017 ini telah diterbitkan pula buku-buku pengayaan sebagai bahan literasi untuk anak didik. Ada sekitar 11 buku pengayaan yang dikeluarkan, yaitu dari Puslit Arkenas (8 judul), Balai Arkeologi Jawa Barat (1 judul), Balai Arkeologi Sulawesi Utara (1 judul), dan Balai Arkeologi Sumatera Utara (1 judul).

Program-program tersebut diharapkan dapat memasyarakatkan penelitian arkeologi dan masyarakat

dapat memahami nilai-nilai penting kebudayaan masa lampau. Bentuk-bentuk kegiatan yang beragam juga diharapkan dapat membantu memudahkan dan sebagai pembelajaran untuk masyarakat dalam memahami nilai penting budaya masa lampau yang diketahui melalui sebuah penelitian arkeologi yang ke depannya diharapkan pula dapat membentuk sebuah karakter bangsa dan membangun kebudayaan nasional. ■



Kegiatan *Fieldschool* arkeologi bagi siswa sekolah

## PENGEMBANGAN BUDAYA BACA

Program pengembangan budaya baca menjadi salah satu prioritas program pada program pendidikan nonformal (PNF) karena merupakan kelanjutan dari program keaksaraan dasar. Pengembangan budaya baca di Indonesia dilakukan melalui lembaga dan kegiatan Taman Bacaan

Masyarakat (TBM). Sampai dengan Tahun 2017 jumlah lembaga dan layanan TBM di Indonesia mencapai 4.027 titik layanan yang terdiri atas 2.279 (54 %) layanan budaya baca di lembaga TBM dan 1.928 (46 %) titik layanan pengembangan budaya baca di lembaga PKBM.

Partisipasi negara dalam mengembangkan budaya baca melalui layanan TBM dilakukan melalui pemberian bantuan anggaran untuk pengembangan kelembagaan serta pengembangan program pendidikan.

No	Jenis TBM	Jumlah Titik	%	Karakteristik
1.	TBM Milik Masyarakat	2.279	54.04	Gerakan untuk membangun literasi masyarakat berbasis inisiatif per orangan atau kelompok di suatu kawasan dan membentuk komunitas
2.	TBM di SKB dan PKBM	1.928	45.72	Layanan Pengembangan keaksaraan dan budaya baca masyarakat berbasis program dan anggaran pemerintah
3.	TBM di Ruang Publik	10	0,18	Layanan penyediaan buku referensi dan sumber belajar untuk mendorong budaya baca masyarakat perkotaan dan membangun jejaring komunitas masyarakat membaca di satu wilayah
Jumlah		4.729	100.00	

Penguatan TBM 2018

Jenis Bantuan	Tahun			
	2016	2017	2018	Total
Rintisan TBM	-	-	20	140
Penguatan TBM	80	40	100	220
TBM Ruang Publik	-	-	10	10
Rintisan TBM Kreatif Rekreatif	-	-	10	10
Kampung Literasi	31	60	10	101
Residensi Pegiat Literasi	-	-	8	8

### a. Rintisan TBM di SKB

Satuan pendidikan nonformal milik pemerintah (negeri) dinamakan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Jumlah SKB yang berstatus satuan PNF sampai dengan Tahun 2018 adalah 305 SKB. Program utama SKB adalah sama dengan

pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), yaitu (1) pendidikan keaksaraan dan budaya baca dan (2) pendidikan keaksaraan dan pendidikan berkelanjutan. Layanan TBM di SKB diharapkan dapat berkembang menjadi

pendorong pengembangan kegiatan literasi berbasis kawasan yang disebut Kampung Literasi. Kenyataannya, sampai dengan sekarang, peran TBM di SKB masih sebatas pada penyediaan buku referensi dan sumber belajar.





### b. Pengembangan TBM Ruang Publik

Pengembangan TBM di ruang publik sangat strategis untuk menumbuhkan iklim keberaksaraan masyarakat kota dan dapat berimbas pada

pengembangan literasi berbasis kawasan dengan cara membangun jaringan dan komunitas literasi bagi semua tingkatan sosial ekonomi masyarakat. Sampai saat

ini program ini masih terkendala kesiapan pengelola dan kurangnya fasilitasi dari pemilik atau pengelola ruang publik, seperti mal, bandara, dan pasar.

### c. Pengembangan TBM Kreatif & Rekreatif

Untuk mendorong pengembangan literasi berbasis potensi lokal masyarakat dan mengacu pada enam komponen literasi dasar, Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan meluncurkan program dan penghargaan bagi pengelola TBM yang kreatif dan bisa berkembang menjadi areal rekreasi masyarakat yang disebut

dengan TBM Kreatif dan Rekreatif. Tahun 2018 sudah ada sekitar .. titik layanan.

### d. Pengembangan Kampung Literasi

Bagi penggerak layanan TBM yang kreatif Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan sejak Tahun 2016 telah mendorong dan memfasilitasi lembaga TBM untuk membangun literasi masyarakat

berbasis kawasan yang disebut Kampung Literasi. Selama periode 2015--2017 sudah ada sepuluh Kampung Literasi yang berkembang di berbagai komunitas masyarakat. Layanan yang

dilaksanakan antara lain wisata literasi, pelayanan sumber belajar, dan pengembangan budaya baca masyarakat melalui kegiatan lomba, bedah buku, dan kegiatan lainnya.

### e. Residensi pegiat literasi di SPNF

Pengembangan lebih lanjut dari program Kampung Literasi adalah pemagangan bagi para calon pegiat literasi dari berbagai wilayah di Kampung Literasi yang disebut Residensi Pegiat Literasi. Kegiatan ini baru dilaksanakan mulai Tahun 2018 di delapan titik Kampung Literasi. Materi yang disajikan selama kegiatan

residensi adalah (1) manajemen TBM, (2) kesukarelawanan, (3) teknis pengelolaan kegiatan keberkasaraan dan (4) membangun jaringan kemitraan.

Strategi lain yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Paud dan Dikmas bersama Forum Taman Bacaan Masyarakat adalah pengembangan portal Donasi

Buku Online. Kegiatan ini telah mendapat sambutan dari Presiden RI dengan memberikan fasilitas pengiriman buku gratis dari dan ke seluruh Indonesia bagi semua anggota Donasi Buku Online pada tanggal 17 setiap bulan. Jumlah peserta donasi buku daring tersebut sudah lebih dari 1.500 pegiat literasi. ■

## BAHAN BACAAN PENGAYAAN PELAJARAN BAHASA INDONESIA

Saat pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pembinaan Bahasa dan Sastra, ada harapan untuk memperbanyak bahan ajar yang sudah ada di sekolah untuk peningkatan mutu nilai Ujian Nasional (UN) dan PISA di Indonesia. Hal tersebut terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang mengacu pada standar kemahiran dan dimuat dalam standar isi serta kompetensi lulusan pendidikan. Harapan tersebut diwujudkan melalui penyusunan bahan pengembangan modul, bahan ajar, serta bahan pengayaan pembelajaran bahasa dan sastra yang diharapkan dapat meningkatkan

nilai UN dan PISA sesuai dengan sasaran strategis yang sudah ditetapkan, yaitu nilai UN SMP: 7,2 dan SMA/SMK: 7,5.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud, Totok Suprayitno, dalam suatu media menyatakan bahwa penurunan hasil UN disebabkan oleh kurangnya kemampuan penalaran siswa dalam menelaah soal. Selain itu, soal Tahun 2018 dianggap lebih sulit karena siswa sudah harus dihadapkan untuk persiapan Program for International Student Assessment (PISA). Sehubungan dengan penalaran, dikenal istilah Kemampuan Berpikir Tinggi atau High Learning Order Thinking Skill (HOTS).

Sebelumnya, Mendikbud, Muhadjir Effendy, menanggapi maraknya pemberitaan di media tentang soal-soal UN yang menuntut penalaran sudah harus diperkenalkan kepada para peserta didik. Ia mengatakan bahwa soal-soal penalaran UN sebenarnya hanya sekitar 10--15 persen dari keseluruhan soal.

Berkaca dari beberapa pandangan untuk penalaran tinggi pada soal UN, Badan Bahasa sudah menyiapkan 10 buku pendamping PISA pada Tahun 2016 dengan beberapa varian bentuk soal statis, kombinasi, dan multitek. Diharapkan pada Tahun 2019 nilai PISA membaca dapat meningkat.

Sepuluh Buku Pendamping PISA





Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) sebagai salah satu unit utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki cara untuk meningkatkan kedua hal tersebut, yaitu dengan meningkatkan kompetensi guru bahasa Indonesia. Kompetensi guru tentunya memiliki keterkaitan dengan hasil belajar siswa. Kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru, salah satunya, adalah pembuatan bahan pengayaan latihan kemahiran berbahasa Indonesia bagi guru bahasa Indonesia. Bahan pengayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia, menambah khazanah ilmu kebahasaan, serta meningkatkan penguasaan metodologi pembelajaran bahasa bagi guru bahasa Indonesia.

Penyediaan bahan pengayaan pembelajaran bertujuan untuk menguatkan pembelajaran bahasa Indonesia. Beberapa bahan pengayaan disusun untuk guru SMP dan SMA/SMK, yaitu paket bahan latihan soal dan pembahasan kemahiran berbahasa Indonesia, latihan soal, dan pembahasan UN Bahasa Indonesia SMP dan SMA. Bahan-bahan pengayaan ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi di luar bahan-bahan yang sudah tersedia sebagai buku teks wajib mereka. Dengan demikian, kemampuan guru dan siswa pun meningkat dan secara tidak langsung akan berpengaruh dalam kaitannya dengan peningkatan nilai UN bahasa Indonesia siswa SMP dan SMA/SMK. Bahan-bahan tersebut disusun dan diuji coba sebelum digunakan



Latihan Soal Kemahiran Berbahasa Indonesia

oleh guru dan siswa. Khusus untuk bahan kemahiran, dilakukan pula pengalihmediaan bahan ke dalam bentuk program komputer. Bahan ini nantinya diunggah ke laman Badan Bahasa agar dapat digunakan oleh masyarakat yang memerlukan.

Penyusunan modul, bahan ajar, dan pengayaan bahasa dan sastraterdiri atas beberapa tahapan. Tahap pertama dalam kegiatan ini adalah menginventarisasi materi dan SDM penyusun bahan yang dilakukan dengan rapat tentang konsep kegiatan, tim pelaksana penyusunan, dan

sumber daya lain yang dibutuhkan dalam kegiatan ini. Tahap kedua adalah penyusunan kisi-kisi bahan dan penyusunan bahan yang dilakukan secara mandiri oleh tim. Hasil dari penyusunan bahan ini adalah bahan mentah yang perlu divalidasi dan diselaraskan. Setelah seluruh rangkaian proses tersebut terlaksana, naskah siap cetak coba dihasilkan untuk selanjutnya diujicobakan kepada guru.

Penyediaan Bahan Penyediaan Buku Bacaan Literasi Baca Tulis

Saat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan



Budi Pekerti diterapkan, ada harapan untuk menumbuhkan minat baca siswa di sekolah. Melalui pembiasaan membaca selama 15 menit sebelum belajar, siswa dapat ditumbuhkan budi pekertinya melalui aktivitas membaca.

Untuk memenuhi harapan tersebut, Badan Bahasa mengambil ikhtiar penyediaan bahan bacaan untuk mendorong suksesnya Gerakan Literasi Nasional, khususnya literasi baca-tulis di sekolah dan komunitas pegiat literasi sebagai syarat penting dari pembiasaan membaca sebelum jam pelajaran di sekolah dimulai.

Sudah tiga Tahun (2016 - 2018) program Penyediaan Bahan Bacaan untuk Gerakan Literasi Baca-Tulis dilaksanakan oleh Badan Bahasa. Ada tiga pola penyediaan buku, yaitu reproduksi buku-buku

cerita rakyat yang pernah diterbitkan Badan Bahasa, sayembara penulisan buku, dan mengundang penulis untuk menulis buku. Pola pertama dilakukan pada Tahun 2016; dan pola kedua dan ketiga dilakukan mulai Tahun 2017. Penyediaan buku ini melalui dua tahap penting, yaitu (1) penilaian kualitas bahasa dan isi oleh Badan Bahasa dan (2) penilaian kesesuaian buku dengan usia dan jenjang pendidikan peserta didik oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sejumlah 162 buku cerita rakyat (109 buku untuk SD, 47 untuk SMP, dan 9 untuk SMA) hasil reproduksi dihasilkan pada Tahun 2016. Selain telah dicetak dalam jumlah yang terbatas untuk dibagi-bagikan kepada mitra Badan

Bahasa dalam setiap program pembinaan bahasa dan sastra, pada Tahun 2017, buku-buku tersebut telah diserahkan salinan lunaknya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diteruskan ke sekolah-sekolah. Pada Tahun yang sama, 28 dari total 162 buku cerita rakyat tersebut telah dipilih dan diminta oleh Kantor Sekretariat Kepresidenan untuk dicetak dalam Edisi Khusus Presiden dan dibagi-bagikan kepada anak sekolah dan pegiat literasi ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke daerah.

Pada Tahun 2017, dengan pola sayembara, telah dihasilkan 137 buku dengan lima tema: cerita rakyat, lanskap perubahan sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan, pelajaran penting dari





tokoh-tokoh Indonesia, kuliner, dan arsitektur. Buku-buku tersebut telah lolos penilaian kelayakan sebagai buku nonteks pelajaran bagi peserta didik.

Dengan mekanisme sayembara dan mengundang penulis, hingga April 2018, sedang diproses sejumlah 200 buku dengan enam tema: cerita tentang anak Indonesia, lanskap perubahan sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan,

pelajaran penting dari tokoh-tokoh Indonesia, kuliner tradisional Indonesia, arsitektur tradisional Indonesia, dan kekayaan bahasa daerah. Buku-buku ini sedang dalam tahap penyuntingan dan perbaikan bersama penulis serta penilaian kelayakan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Hingga akhir Tahun 2018 nanti, total buku yang disediakan Badan Bahasa untuk mendukung GLN, khususnya

untuk literasi baca-tulis sebanyak 502 buku. Dalam rencana, pada Tahun 2019 nanti, buku-buku tersebut akan dicetak dalam jumlah yang sesuai dengan anggaran yang tersedia, dibuat buku digital, dan alih wahana sejumlah buku terpilih. ■



Perkembangan TIK di sekolah

## TOL LANGIT, BANTUAN TIK, DAN PELATIHAN SEKOLAH PADA DAERAH 3T: UPAYA KEMENDIKBUD MENCIPTAKAN PENDIDIKAN YANG DEMOKRATIS ADIL DAN MERATA

*Guru guru daerah 3T merupakan patriot bangsa. Mereka berjuang dan bekerja keras dengan segala keterbatasan alat serta infrastruktur untuk mencerdaskan anak bangsa. Ini penting, pada zaman ini, (untuk) bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan anak anak kita di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal Mendikbud*

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mengoptimalkan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mewujudkan visi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Nawacita. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, pada Rapat Koordinasi TIK 2018 berpesan agar TIK dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengurangi kesenjangan antar

wilayah dan antar kelas sosial di masyarakat.

Sejalan dengan harapan Mendikbud, Pustekkom menghadirkan akses internet untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui program Tol Langit/USO (*Universal Service Obligation*), yaitu program kewajiban Pelayanan Universal di bidang telekomunikasi dan informatika hasil kerja sama antara Kemendikbud melalui Pustekkom dan Kemkominfo melalui

BP3TI. Pustekkom sendiri selain memiliki peran untuk menyediakan data dan lokasi sekolah serta rencana penggunaan akses internet yang dibutuhkan, juga menyiapkan sarana dan prasarana akses komputer dan pelatihan guru dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Program ini telah berlangsung dari Tahun 2015 hingga bulan Maret 2018 dengan sekitar 1.474 sekolah di daerah 3T dapat





Testmoni Siswa UNBK dengan Bantuan Pustekkom

menikmati akses internet melalui program ini.

Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan literasi siswa terhadap TIK dan menciptakan sistem evaluasi kualitas sumber daya manusia yang berintegritas, pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) berhasil dilaksanakan di sekolah-sekolah daerah 3T dengan menggunakan internet dari program USO. Pada Tahun 2017, sebanyak 143 sekolah penerima USO telah berhasil melaksanakan UNBK. Angka ini meningkat hingga 353 sekolah pada Tahun 2018. Penyelenggaraan UNBK saat ini menggunakan sistem semidaring, yaitu soal dikirim dari server pusat secara daring melalui jaringan (sinkronisasi) ke server lokal (sekolah), kemudian ujian siswa dilayani oleh server lokal (sekolah) secara luring (offline).



Sebaran penggunaan internet dengan program USO (data per Maret 2018)

Selanjutnya, hasil ujian dikirim kembali dari server lokal (sekolah) ke server pusat secara daring dengan pengunggahan (upload).

Ada satu momen yang cukup mengharukan, yakni pada saat salah satu sekolah penerima bantuan USO, yaitu SDN 1 Syuru, Asmat, Papua berhasil menyapa Presiden Joko Widodo melalui konferensi video (video conference). Momen ini terjadi pada saat kunjungan Bapak Presiden ke stan pameran Pustekkom pada Rembuknas 2018.

*"Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan sehingga sekolah kami sekarang bisa mengakses internet."*

ujar guru-guru SDN 1 Syuru.  
**Bantuan Perangkat dan Pelatihan PembaTIK (Pembuatan Bahan Ajar Berbasis TIK)**



Selain bantuan infrastruktur terkait akses internet, Pustekkom juga memberikan bantuan perangkat TIK kepada sekolah-sekolah penerima bantuan USO. Bantuan TIK untuk setiap sekolah terdiri atas perangkat pendukung

pembelajaran, seperti 4 buah laptop, 1 buah router (access point), dan 1 buah hard disk eksternal (yang berisi konten pembelajaran). Tahap pertama pemberian bantuan dilaksanakan pada Tahun 2017 dengan jumlah 164 sekolah

dan pada Tahun 2018 terdapat 518 sekolah menjadi target penerima bantuan baru sehingga total pada 2 Tahun terakhir menjadi 682 sekolah.

Data Target Penerima Bantuan TIK Tahun 2018





Orientasi Pembelajaran Daring  
10 Lokasi (Region)

Monitoring dan Evaluasi  
Pemanfaatan secara daring



Pembelajaran Daring  
diikuti oleh 682 Sekolah



Tidak berhenti sampai di situ, untuk memastikan bahwa segala bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan. Pustekkom berupaya untuk memastikan guru-guru sekolah penerima bantuan memiliki kompetensi

yang layak dalam memanfaatkan TIK. Lahirlah inisiasi peningkatan kompetensi TIK dengan tajuk PembaTIK (Pembelajaran Berbasis TIK) yang dilaksanakan dengan sistem berjenjang, yang mengacu pada UNESCO ICT Framework for Teachers (2012). Dengan

demikian, Pustekkom dapat melakukan kategorisasi tingkat literasi TIK setiap guru. Jenjang pada pelatihan PembaTIK sendiri ada empat, yaitu Level 1: Literasi TIK, Level 2: Implementasi TIK, Level 3: Kreasi TIK, dan Level 4: Berbagi TIK dengan

moda kombinasi baik daring maupun tatap muka. Khusus untuk pelaksanaan di sekolah 3T, pelaksanaan tatap muka dipusatkan pada sepuluh region yang telah ditentukan, kemudian Pustekkom mengundang sekolah-sekolah di provinsi terdekat ke region

tersebut. Terwujudnya layanan pendidikan yang merata merupakan bentuk kerja nyata untuk menciptakan prestasi bangsa yang kelak akan dapat dipetik melalui program dan proses yang berkelanjutan. Untuk itu, dukungan dari

semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta sangat diharapkan untuk terus meningkatkan layanan pendidikan yang lebih baik. ■







# PENGEMBANGAN MODEL LAYANAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI PAPUA DAN PAPUA BARAT

Strategi penyesuaian implementasi dan percepatan pendidikan konteks Papua dan Papua Barat diperlukan terkait dengan tingkat capaian pendidikan di provinsi tersebut tertinggal jika dibandingkan dengan kebanyakan provinsi lainnya di Indonesia. Hasil penelitian OECD memperlihatkan capaian indeks pembangunan manusia (IPM) secara nasional pada Tahun 2012 mencapai 73,3, sedangkan Provinsi Papua baru mencapai 65,86. Selain itu, perjalanan panjang pembangunan pendidikan di tanah Papua yang tidak lepas dari dinamika politik lokal dan politik nasional memberikan pengaruh pada pembangunan pendidikan bagi masyarakat di tanah Papua itu sendiri, yaitu masih tingginya kesenjangan antarkelompok, antarwilayah, dan antardaerah di tanah Papua. Hal tersebut menuntut adanya perlakuan khusus dan kebijakan tersendiri dalam perencanaan dan implementasi pendidikan, termasuk strategi perencanaan dan implementasi model diversifikasi kurikulum konteks Papua dan Papua Barat.

Dari 28 juta penduduk miskin di Indonesia atau 11 % dari total jumlah penduduk Indonesia, hampir seperempatnya adalah penduduk tanah Papua (BPS, 2014). Laporan OECD (2015) juga menyebut bahwa poverty rate

di tanah Papua mencapai 30 % pada Tahun 2014. Bagaimanapun juga, hal tersebut patut mendapat perhatian dalam merumuskan formula pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal bagi masyarakat tanah Papua. Rendahnya budaya belajar yang dianut oleh masyarakat tanah Papua karena mereka hidup dalam pola budaya nomaden (berburu dan meramu) menyebabkan angka partisipasi sekolah masih rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari rata-rata buta aksara di Provinsi Papua mencapai 34,8 % (Pusat Data dan Statistik Kemendikbud, 2015). Selain kualitas dan kuantitas guru belum memadai, ketidakhadiran (absenteism) guru di sekolah juga cukup tinggi yang berdampak pada angka putus sekolah (drop out) peserta didik SD dan SMP cukup tinggi.

Papua sebagai provinsi dengan otonomi khusus perlu mengembangkan lembaga-lembaga formal dan informal, peraturan daerah provinsi (perdasu) dan peraturan daerah khusus (perdasus), serta instrumen pemerintahan lainnya sehingga menuntut adanya kekhususan dalam manajemen pendidikan, mekanisme pengelolaan, dan perlakuan pemangku kepentingan, baik lembaga eksekutif (dinas pendidikan provinsi ataupun kabupaten/kota, termasuk pengadaan tenaga guru untuk sekolah

terpencil melalui lembaga yang disebut Kolese Pendidikan Guru (KPG) ataupun lembaga legislatif (keberadaan DPRD di provinsi disebut Dewan Perwakilan Rakyat [tanpa kata daerah] Papua, dengan ciri kekhususan yang berbeda jika dibandingkan dengan DPRD provinsi lain di Indonesia).

Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan di tanah Papua jika dibandingkan dengan rata-rata di provinsi lain di Indonesia disebabkan antara lain akses ke sekolah yang umumnya masih sulit, tingginya biaya pendidikan dan transportasi, jarak tempuh yang jauh dari rumah ke sekolah, ketersediaan guru yang kurang, sarana prasarana pendidikan yang belum memadai, dan umumnya perhatian masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang masih rendah. Hal lainnya adalah banyak guru yang enggan ditempatkan di daerah-daerah terpencil sehingga terjadi kesenjangan jumlah guru antara daerah yang dekat dengan pusat kota dan daerah-daerah terpencil di tanah Papua, seperti di wilayah pegunungan dan pesisir pantai.

Dari segi lingkungan ekosistem, masyarakat di tanah Papua dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yakni (1) kelompok masyarakat yang hidup dengan cara berburu meramu; (2) masyarakat



Pembangunan Sekolah Berasrama di Papua, sebagai kontribusi Diaspora untuk pendidikan di Papua

pedesaan sebagai petani huma (ladang), petani menetap dan nelayan; serta masyarakat maju yang umumnya bermukim di daerah perkotaan. Dari segi budaya dan wilayah adat, terdapat tujuh wilayah adat yang dapat dideskripsikan sebagai berikut.

Menurut Selo Sumardjan, struktur sosial masyarakat tanah Papua dapat dikelompokkan pada komunitas perkotaan; komunitas pantai; dan kelompok masyarakat pedalaman di hutan pegunungan dan rawa sebagai petani huma (ladang) semi-permanen yang hidup di pegunungan tinggi serta kelompok masyarakat berburu-meramu-nomaden yang hidup di lingkungan ekosistem rawa.

Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk pada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. Bagi masyarakat di Papua, adat umumnya diterima dan dimaknai sebagai norma yang berlaku umum bagi masyarakatnya, terutama dalam menghitung dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari.

Hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyediaan tanah ulayat dan tanah

perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apa pun dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan ataupun imbalannya.

Dengan merujuk pada ragam adat yang ada di setiap daerah, dalam membuat kebijakan pendidikan termasuk implementasi kurikulum perlu memperhatikan hal tersebut. Pertimbangan yang dimaksudkan terutama dalam menyusun kurikulum muatan lokal, bahasa daerah, dan juga kondisi alam yang bisa membantu kegiatan belajar-mengajar. Selain itu, juga penting menanamkan keragaman, nasionalisme, kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, dan pendidikan mengenai negara serta pemahaman tentang teritorial.

Kondisi perkembangan sosial, jarak wilayah, ekonomi



dan budaya masyarakat sangat menentukan bentuk, jenis dan model diversifikasi kurikulum yang dikembangkan sehingga peserta didik dapat belajar dengan menyenangkan, guru dapat mengemas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, orang tua merasakan manfaat belajar anaknya yang sesuai dengan konteks di rumah, kurikulum satuan pendidikan yang lebih sesuai dengan konteks daerah, kearifan lokal dan keunggulan daerah lebih terpelihara sehingga standar nasional pendidikan dapat tercapai, seperti yang tergambar dalam diagram berikut.

Penekanan, penguatan, muatan, dan konteks kurikulum satuan pendidikan konteks Papua dan Papua Barat dapat dideskripsikan menjadi tiga macam layanan kurikulum, yaitu (i) masyarakat pemburu dan peramu (remote education); (ii) masyarakat perdesaan (pertanian, peternakan, dan/atau perikanan); dan (iii) masyarakat perkotaan.

Layanan Kurikulum bagi Masyarakat Pemburu dan Peramu (Remote Education)

Masyarakat pemburu dan peramu di tanah Papua adalah masyarakat yang hidup di daerah rawa dan daerah dataran rendah yang banyak persediaan makanan di alam sekitarnya. Mereka sering berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya mengikuti musim dari ketersediaan pangan, baik yang berasal dari tanaman di hutan maupun dari hewan liar dan ikan-ikan di sungai, danau, ataupun laut. Orang tua sangat



mendukung adanya pendidikan formal di sekolah sehingga tujuan pendidikan perlu diarahkan ke pemenuhan dasar kebutuhan pendidikan, seperti pengenalan agama yang dianut, pengenalan cara hidup masyarakat bersih dan sehat, pengenalan cara memberi salam dengan orang tua, guru dan tema, pengembangan kemampuan berinteraksi sosial antara anak dan anak, anak dan guru, serta anak dan orang tua/orang lain.

Masyarakat Perdesaan (Pertanian, Peternakan, dan/atau Perikanan)

Tujuan pendidikan bagi masyarakat perdesaan dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan dengan disesuaikan pada kebutuhan masyarakat setempat dan perkembangan sosiologis dan psikologis peserta didik. Tujuan tersebut adalah

a. mengenalkan agama yang dianut;

b. mengenalkan cara memberi salam dengan orang tua, guru, dan teman;

c. mengenalkan cara hidup bersih dan sehat;

d. mengembangkan kemampuan berinteraksi sosial antara anak dan anak, anak dan guru, anak dan orang tua/orang lain;

b. memperkenalkan alam dan lingkungan sekitar mereka berada;

c. mengajak untuk secara bersama-sama menjaga dan melestarikan alam sekitar, lingkungan tempat mereka beraktivitas;

d. memperkenalkan kemampuan literasi dasar;

e. membekali kemampuan membaca, menulis, dan berhitung secara fungsional sesuai dengan lingkungan mereka;

f. membekali cara kehidupan dalam lingkungan keluarga (ayah, ibu, anak, dan saudara) dan lingkungan tetangga;

g. memperkenalkan teknologi baru dalam bercocok tanam,

pengolahan hasil pertanian, dan pelestarian alam serta pemasaran hasil pertanian;

h. memperkenalkan teknologi baru dalam beternak, pengolahan hasil peternakan, dan pelestarian alam, serta pemasaran hasil peternakan;

i. memperkenalkan teknologi baru dalam penangkapan hasil laut, pengolahan hasil laut, dan pelestarian laut serta pemasaran hasil perikanan air laut; dan

j. memperkenalkan teknologi baru dalam budi daya perikanan air tawar, pengolahan hasil perikanan air tawar, pelestarian ekosistem air tawar, dan pemasaran hasil perikanan air tawar.

Materi pembelajaran yang dikembangkan bagi peserta didik pada kelompok masyarakat perdesaan, disesuaikan dengan latar belakang masyarakat perdesaan terpencil di tanah Papua. Materi pembelajaran disampaikan dengan pendekatan yang bersifat inklusif yang artinya dilakukan melalui proses layanan khusus, dengan pendekatan yang memperhatikan kebutuhan khusus yang terpadu antara nonformal, informal, dan formal. Secara bertahap, materi/bahan ajar pada tahap awal berbentuk bahan visual (cetak, gambar, audio visual) atau dibawa ke alam sekitar (sumber belajar yang dimanfaatkan). Sumber ini terdiri atas alam dan lingkungan sekitar mereka berada; ajakan untuk secara bersama-sama menjaga dan melestarikan alam sekitar dan lingkungan tempat mereka beraktivitas; upaya memperkenalkan kemampuan literasi dasar dan sederhana;

memotivasi membaca, menulis, dan berhitung secara fungsional sesuai dengan lingkungan mereka; membekali cara kehidupan dalam lingkungan keluarga (ayah, ibu, anak, dan saudara) dan lingkungan tetangga; dan memperkenalkan teknologi sederhana/baru berkaitan dengan pertanian, peternakan, dan perikanan.

Masyarakat Perkotaan

Wilayah perkotaan di Papua memiliki komposisi sosial yang beragam, yaitu berasal dari berbagai macam suku, seperti suku Jawa, Batak, Toraja, Bugis, dan Makassar, Manado, Tionghoa, dan para pendatang yang berasal dari negara lain yang tinggal sementara di kota-kota yang ada di Papua karena alasan pekerjaan. Kelompok masyarakat perkotaan tersebar dari pusat kota hingga pinggiran perkotaan.

Dari segi kependudukan, penduduk di kawasan kota bersifat sangat heterogen. Penghidupan masyarakat perkotaan sudah lebih maju dipandang dari aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur umum. Pendidikan di daerah urban, seperti di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak, Merauke, Serui, Mimika, dan Jayawijaya dapat dikatakan telah maju dan penyelenggaraannya berorientasi kepada standar mutu nasional.

Materi dan bahan ajar pada peserta didik di perkotaan di tanah Papua, pada dasarnya sama dengan materi pada peserta didik lain di luar tanah Papua, walaupun dalam kadar tertentu tetap disesuaikan dengan latar budaya

dan lingkungan masyarakatnya. Pengembangan model layanan kurikulum satuan pendidikan konteks Papua dan Papua Barat dilakukan agar sesuai dengan kondisi, potensi, situasi, keadaan, karakteristik, kebutuhan, kapasitas, dan tingkat ekonomi, sosial serta budaya dan kearifan lokal masyarakat di tanah Papua.

Layanan kurikulum satuan pendidikan konteks Papua dan Barat meliputi penyusunan regulasi, pedoman dan/atau panduan implementasi kurikulum yang bersifat teknis; penyusunan muatan, tema, atau nilai-nilai kearifan lokal sebagai dasar perencanaan kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan yang sesuai dengan keadaan, karakteristik, dan kebutuhan masyarakat di tanah Papua. Pengembangan layanan tetap mengacu standar nasional pendidikan seperti model KTSP, model silabus, model bahan ajar, media dan alat peraga praktik, serta pengembangan model pembelajarannya.

Saat ini telah dikembangkan konsep regulasi, pedoman, atau panduan implementasi kurikulum serta model pengembangan kurikulum satuan pendidikan konteks Papua dan Papua Barat di SD, SMP, dan SMA/SMK yang disusun mengacu pada standar nasional pendidikan. Tujuan pedoman ini adalah:

a. menjadi acuan bagi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) di tanah Papua dalam menyusun, membina, mendampingi, dan melaksanakan Kurikulum 2013 dalam konteks Papua dan Papua Barat;





b. menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);

c. sebagai acuan dalam monitoring evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 dalam konteks Papua dan Papua Barat; dan

d. sebagai acuan bagi penyelenggara pendidikan (pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan masyarakat) dalam menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana, prasarana, dan sumber belajar lainnya yang mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 di tingkat satuan pendidikan dalam konteks Papua dan Papua Barat.

Sasaran pedoman ini adalah unit pelaksana teknis Kemdikbud (LPMP dan P4TK); dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat di Papua dan Papua Barat; satuan pendidikan formal dan nonformal baik negeri maupun swasta di daerah perkotaan, daerah perdesaan, dan daerah hunian suku-suku peramu di Papua dan Papua Barat; lembaga mitra pembangunan bidang pendidikan (lembaga donor/LSM

nasional dan internasional); dan lembaga mitra dunia usaha dan industri yang aktif membantu pendidikan di Papua dan Papua Barat.

Ruang lingkup pedoman ini meliputi prinsip, strategi, dan pihak yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi kurikulum konteks Papua dan Papua Barat di daerah perkotaan, daerah perdesaan, dan daerah hunian suku-suku peramu di tujuh wilayah adat untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pada jalur pendidikan formal dan nonformal. Kurikulum konteks Papua dan Papua Barat ini pada tingkat satuan pendidikan harus dikembangkan dalam bentuk dokumen I (visi, misi, tujuan, muatan, pengaturan beban belajar, kalender pendidikan, dan peran para pihak), dokumen II (silabus), dan dokumen III (RPP).

Program ke depan dalam pengembangan model layanan kurikulum satuan pendidikan konteks dan kearifan lokal Papua dan Papua Barat adalah pelaksanaan penguatan, pendampingan, bantuan teknis implementasi kurikulum secara bertahap dan

lebih luas di seluruh wilayah adat. Strategi implementasi dilakukan dengan mengintegrasikan muatan kurikulum konteks dan kearifan lokal Papua dan Papua Barat serta penguatan pendidikan karakter melalui program keteladanan, pembiasaan, dan pembudayaan serta program yang bersifat rutin dan insidental bagi seluruh warga satuan pendidikan.

Dapat disimpulkan kondisi dan karakteristik perkembangan sosial, jarak wilayah, ekonomi, dan budaya masyarakat di tanah Papua memerlukan layanan secara khusus dalam pengembangan dan penguatan implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran konteks Papua dan Papua Barat. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat belajar dengan menyenangkan, guru dapat mengemas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, orang tua merasakan manfaat belajar anaknya yang sesuai dengan konteks di rumah, kurikulum satuan pendidikan yang lebih sesuai dengan konteks daerah, serta kearifan lokal dan keunggulan daerah lebih terpelihara sehingga standar nasional pendidikan dapat tercapai. ■

## PENGUATAN BELA NEGARA DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN

Membela negara adalah kewajiban semua warga negara. Tanpa pembelaan dari warga negaranya, Indonesia tidak akan berumur panjang. Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan menjadikan sampai saat ini Indonesia eksis karena setiap warga negaranya sadar bahwa negara ini perlu dipertahankan dan dibela oleh segenap elemen bangsa. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga karena setiap komponen bangsa sadar kemerdekaan yang sudah diperoleh teramat mahal harganya dan upaya untuk memecah belah bangsa harus dihadapi secara bersama.

Penguatan bela negara utamanya perlu diberikan di daerah perbatasan, daerah terdepan NKRI. Daerah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga. Wilayah yang dimaksud ialah bagian wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang langsung bersinggungan dengan garis batas negara (wilayah negara lain). Perbatasan merupakan tempat perlintasan penduduk, barang, dan berbagai informasi. Daerah perbatasan merupakan wilayah terjadinya arus barang dan jasa dari luar negeri.

Radikalisme, separatisme/disintegrasi, dan terorisme merupakan masalah-masalah dan

tantangan yang harus dicegah dalam penguatan bela negara pada masyarakat Indonesia yang plural dan beragam suku, agama, budaya, bahasa, dan unsur keragaman lainnya. Tantangan lainnya yang juga merusak bela negara adalah maraknya peredaran narkoba dan miras di kalangan generasi muda, praktik korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan oknum tertentu.

Tantangan eksternal dalam bela negara, di antaranya berkembang the new colonialism, yakni bentuk penjajahan gaya baru, melalui penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, ekonomi, bahkan pola pikir (mindset) suatu bangsa oleh bangsa lain melalui kekuatan lunak (softpower) dan perang nonkonvensional seperti perang asimetris atau juga melalui perang proksi (proxy war). Saat ini, terdapat upaya pelemahan suatu negara oleh negara lainnya melalui bidang ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan agar semakin tergantung dan lebih mudah ditekan. Begitu pula penguasaan aset-aset ekonomi nasional yang vital oleh pihak asing harus diwaspadai karena akan memperlemah ekonomi bangsa yang pada gilirannya akan mengancam kemandirian dan kedaulatan bangsa.

Untuk menghindari dan mencegah perpecahan di antara komponen anak bangsa Indonesia yang majemuk dan beragam,

diperlukan strategi efektif dalam membela dan mempertahankan Negara Kesatuan RI dengan sekuat tenaga. Internalisasi nilai-nilai bela negara meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara yang melibatkan seluruh komponen anak bangsa secara aktif dan kreatif sejak dini.

Aktivitas membela negara tidak sekadar angkat senjata dan berperang, tetapi juga aktivitas harian pembangunan karakter, seperti menguatkan semangat belajar, menaati hukum dan aturan, melestarikan budaya, mencintai produk dalam negeri, ataupun ikut membantu masyarakat yang kesulitan. Warga negara harus dibekali pengetahuan (knowledge) bela negara, keterampilan (skill) strategis dan teknis bela negara, dan watak (disposition) bela negara melalui semangat nasionalisme yang handal, cerdas, dan mampu, secara komprehensif.

Bela negara sebagai sebuah keterampilan dan keahlian untuk memperkuat bidang ekonomi, sosial, dan budaya dilakukan dengan meningkatkan kemampuan di bidang usaha, peningkatan keterampilan teknis (hard skill) dan keterampilan nonteknis (soft skill) dan keterampilan profesional lainnya dengan penguatan pada kesadaran bela negara, semangat





Upacara bendera di sekolah dengan pembina upacara dari unsur TNI untuk kesadaran bela negara

nasionalisme, dan keyakinan untuk kemajuan bangsa.

Saat ini telah dihasilkan model pengembangan dan implementasi kurikulum satuan pendidikan dalam penguatan bela negara di daerah perbatasan yang bertujuan membentuk, menumbuhkan, dan menguatkan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara sebagai ideologi yang final, kerelaan berkorban untuk negara serta memberikan kemampuan awal bela negara. Secara khusus, model ini dikembangkan agar dapat digunakan oleh penentu kebijakan dan pengembang kurikulum daerah dan satuan pendidikan sebagai

acuan, pedoman, dan inspirasi dalam merealisasikan penguatan bela negara:

1. di tingkat nasional dan daerah serta menyentuh seluruh lapisan masyarakat;
2. dalam menjawab persoalan intoleransi, radikalisme, terorisme, separatism, liberalisme, dan komunisme, yang dihadapi anak bangsa sehingga berdaya, mampu mengembangkan diri, dan berkontribusi pada pembangunan; dan
3. agar bisa diterapkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan konteks dan kebutuhan.

Strategi dalam pengembangan dan implementasi penguatan bela negara melalui aliran dari atas ke bawah (*stream top down*) yang

diinisiasi pemerintah pusat dan daerah dan bersifat intervensi; aliran dari bawah ke atas (*stream bottom up*) yang diinisiasi satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat yang bersifat penggalan praktik baik (*best practice*) dan habituasi; dan aliran (*stream*) revitalisasi program dan bersifat pemberdayaan sumber daya.

Kebijakan dari atas ke bawah dilaksanakan melalui sosialisasi untuk membangun kesadaran kolektif, pengembangan kapasitas sumber daya pendidikan, dan implementasi secara bertahap, terbatas, dan menyeluruh serta melalui program kerja sama. Strategi dari bawah ke atas dilaksanakan melalui mengembangkan ide

inovasi/pembaruan, membangun komitmen dan kesepakatan, serta penguatan praktik baik (pengalaman praktisi dan pemangku kepentingan) di lingkungan kelas, satuan Pendidikan, dan dengan masyarakat melalui ketaatan terhadap aturan, pembiasaan, dan kebudayaan. Kebijakan revitalisasi program merupakan penguatan kembali program yang telah ada dan melibatkan satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Di tingkat satuan pendidikan, penguatan bela negara dilaksanakan melalui sosialisasi komite sekolah, masyarakat, lembaga-lembaga serta pengembangan kegiatan di satuan pendidikan melalui intrakurikuler, muatan

lokal, kokurikuler, dan ekstrakurikuler serta program pembiasaan dan kebudayaan. Nilai-nilai bela negara digunakan sebagai konteks dan diintegrasikan ke dalam perangkat perencanaan pembelajaran di dalam silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), bahan ajar, buku teks, dan sumber belajar lainnya serta diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran di kelas, di satuan pendidikan, juga di keluarga dan masyarakat.

Pusat Kurikulum dan Perbukuan melaksanakan program pengembangan model implementasi penguatan bela negara secara bertahap dan terbatas di beberapa sekolah di Anambas dan Nunukan yang berbatasan langsung dengan

Malaysia. Keutuhan NKRI, sikap nasionalisme, dan cinta tanah air bagi masyarakat dan peserta didik SD, SMP, SMA, dan SMK yang bermukim di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia sampai saat ini tetap terjaga di Kabupaten Nunukan dan Pulau Sebatik.

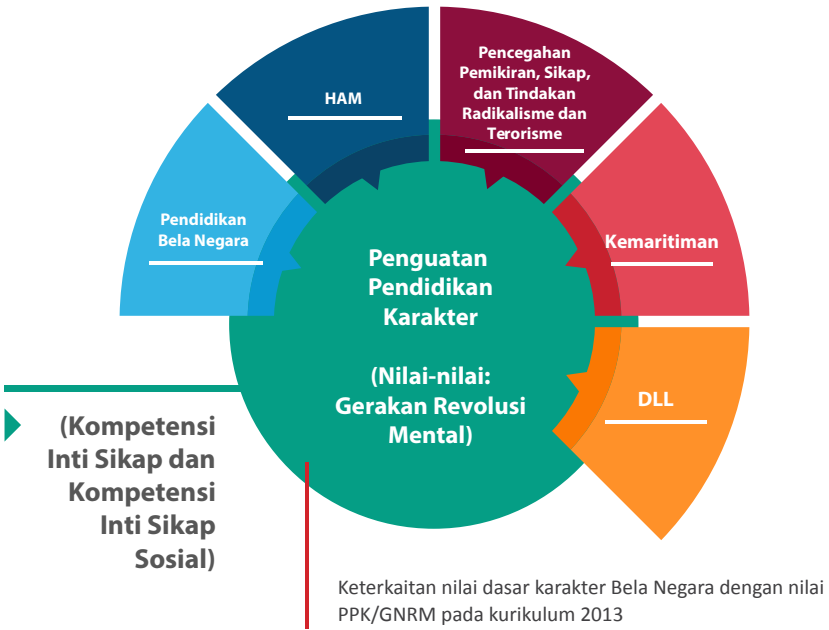
Pengertian peserta didik di SDN 05 Nunukan Selatan, SDN 003 Sebatik Barat, SMPN 2 Sebatik Barat, SMAN 2 Nunukan, dan SMKN 1 Nunukan tentang nasionalisme adalah cinta kepada tanah air, menjaga apa yang negara miliki, bersedia mempertahankan dan membela negara, walau tetap menggunakan produk-produk yang berasal dari Malaysia sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan terpaksa karena tidak



ada pilihan lain. Faktor yang menyebabkan penggunaan produk Malaysia karena sulitnya mendapatkan produk dalam negeri, jauhnya jarak ke kota atau pasar terdekat untuk membeli kebutuhan pokok, dan kualitas produk Malaysia yang lebih bagus dan cenderung lebih murah. Baik pendidik maupun peserta didik umumnya mengatakan bahwa dalam bidang perekonomian dan pemenuhan kebutuhan hidup, masyarakat Kabupaten Nunukan dan Pulau Sebatik sangat bergantung pada kondisi perekonomian Tawau, Sabah-Malaysia.

Kurikulum 2013 berbasis kompetensi yang dirancang dengan karakteristik mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karenanya, Kurikulum 2013 sangat kental dengan pendidikan karakter sehingga dapat pula dikatakan bahwa Kurikulum 2013 berbasis pendidikan karakter. Siswa diarahkan untuk mengembangkan dan menerapkan sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan dalam berbagai situasi di sekolah dan di kehidupan masyarakat. Dengan mengingat bahwa sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, siswa perlu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar.

Proses pembelajaran Kurikulum 2013 menempatkan prioritas utama pendidikan karakter (yang saat ini dikenal dengan kristalisasi nilai Penguatan Pendidikan



Karakter melalui implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental). Pendidikan karakter ini mengelola proses pembelajaran secara sengaja agar menghasilkan respons siswa terhadap proses berpikir dan membangun suasana komunikatif secara terus-menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam memperoleh pengetahuan yang dikonstruksi sendiri.

Terkait dokumen KTSP, sekolah di Kabupaten Nunukan dan Pulau Sebatik Barat belum memiliki KTSP dengan versi Kurikulum 2013, demikian juga dengan silabus dan RPP belum memiliki versi Kurikulum 2013. Namun mereka telah memiliki dokumen KTSP, silabus dan RPP dengan Kurikulum 2006. Dokumen Kurikulum Sekolah (KTSP, Silabus dan RPP) yang ada perlu disesuaikan dengan ketentuan Kurikulum 2013.

Sebagai langkah awal dalam gerakan pendidikan bela negara dilakukan analisis konteks.

Analisis konteks perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran, masalah, potensi, dan kebutuhan apa yang berkaitan dengan pendidikan bela negara yang perlu diperhatikan dan dikembangkan di lingkungan satuan pendidikan dan masyarakat sekitar sasaran. Secara umum, karena semua sekolah rintisan pendidikan bela negara telah menerapkan pendidikan karakter. Hal ini terlihat dari lingkungan sekolah dan dokumen. Umumnya, sekolah mengintegrasikan nilai-nilai karakter seperti nilai cinta tanah air, gotong royong, dan menjaga kebersihan lingkungan. Semua ini dapat digunakan/bermanfaat sebagai awal pengembangan pendidikan bela negara. Dengan demikian, sekolah di Kabupaten Nunukan dan Pulau Sebatik dapat memanfaatkan atau melanjutkan pendidikan karakter menjadi penancangan gerakan pendidikan bela negara dengan menggunakan nilai nasionalisme/cinta tanah air, gotong royong, kebersihan lingkungan,



Nilai nasionalisme masuk sebagai nilai cinta tanah air dan sadar berbangsa dan bernegara

dan pelestarian kearifan lokal. Nilai-nilai karakter tersebut dapat dipergunakan sebagai pengembangan awal nilai pendidikan bela negara pada:

1. nilai nasionalisme masuk sebagai nilai cinta tanah air dan sadar berbangsa dan bernegara,
2. nilai gotong royong masuk sebagai nilai sadar berbangsa dan bernegara,
3. nilai menjaga kebersihan lingkungan masuk sebagai nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan
4. nilai pelestarian kearifan lokal masuk sebagai nilai cinta tanah air.

Setelah nilai pendidikan bela negara ditetapkan, perlu ditetapkan komitmen dengan seluruh ekosistem pendidikan yang meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua, serta kemitraan dengan masyarakat sekitar lingkungan

persekolahan. Komitmen akan membuat suatu energi yang kuat untuk mengimplementasikan gerakan pendidikan bela negara di persekolahan. Komitmen dapat dilakukan dengan meminta pihak dinas pendidikan setempat untuk membuat suatu surat komitmen yang ditandatangani oleh seluruh pihak ekosistem pendidikan. Surat komitmen berupa proposal dan nota kesepahaman (MOU) gerakan pendidikan bela negara yang ketentuan-ketentuannya disepakati bersama oleh seluruh ekosistem pendidikan di satuan pendidikan. Dengan adanya surat komitmen yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan, pihak satuan pendidikan akan secara serius dan bertanggung jawab dalam mengimplementasikan gerakan pendidikan bela negara.

Untuk program ke depan, pengembangan model penguatan bela negara pada kurikulum satuan pendidikan di daerah perbatasan

adalah pelaksanaan penguatan, pendampingan, bantuan teknis implementasi kurikulum secara bertahap dan lebih luas di seluruh wilayah perbatasan. Strategi implementasi dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai bela negara ke dalam pendidikan melalui program keteladanan, pembiasaan, dan pembudayaan di kelas, lingkungan satuan pendidikan, di keluarga, dan di masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi dan karakteristik perkembangan sosial, jarak wilayah, ekonomi, dan budaya masyarakat di wilayah perbatasan memerlukan layanan dalam pengembangan dan penguatan nilai-nilai bela negara dalam proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler serta program khusus lainnya dalam membangun empat pilar kebangsaan, yaitu NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 1945. ■



# AKREDITASI: DARI COMPLIANCE KE PERFORMANCE

Patut disyukuri bahwa kini kebutuhan satuan pendidikan terhadap proses akreditasi semakin meningkat. Satuan pendidikan formal mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga Perguruan Tinggi (PT) semakin menyadari pentingnya akreditasi. Pendidikan Non Formal (PNF) dalam berbagai bentuknya, seperti Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), juga menempatkan akreditasi sebagai mekanisme penjaminan mutu.

Untuk menyukseskan pelaksanaan akreditasi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) membentuk Badan Akreditasi Nasional (BAN). Kemendikbud membentuk BAN Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (PAUD dan PNF) serta BAN Sekolah/Madrasah (BAN S/M). BAN PAUD dan PNF, dan BAN S/M memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan akreditasi secara profesional, mandiri, dan berintegritas.

Pelaksanaan akreditasi secara eksternal melalui tiap-tiap badan yang dibentuk pemerintah terasa sangat efektif untuk menjamin mutu satuan pendidikan. Masyarakat pun dapat dengan mudah mengetahui mutu satuan pendidikan melalui status akreditasinya. Semakin baik status akreditasi suatu satuan pendidikan berarti proses penjaminan budaya mutunya semakin terjaga. Sebaliknya, jika status akreditasi satuan pendidikan tertentu buruk, berarti budaya mutunya belum terjaga dengan baik.

Pada konteks itulah masyarakat sebagai pengguna pendidikan harus dengan cermat mengecek status akreditasi lembaga pendidikan. Para orang tua juga penting menanyakan status akreditasi lembaga sebelum mendaftarkan buah hatinya di suatu satuan pendidikan. Status akreditasi penting untuk memastikan anak-anak belajar di lembaga pendidikan berbudaya mutu baik. Status akreditasi juga penting untuk menjamin bahwa ijazah anak-anak dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang legal. Selain itu, hal yang paling

penting lainnya adalah meningkatkan status akreditasi orang tua harus juga berperan aktif.

Bukan hanya bagi orang tua, kini sejumlah instansi pemerintah dan swasta juga sangat berkepentingan dengan status akreditasi. Itu dapat diamati pada saat rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS). Semua instansi pemerintah mensyaratkan pelamar harus lulusan satuan pendidikan yang terakreditasi dengan nilai minimal baik (B). Persyaratan yang sama juga dilakukan instansi swasta serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Sebagai pengguna lulusan, pemerintah, swasta, dan DUDI tentu tidak ingin menerima pegawai dari satuan pendidikan yang tidak legal dan berbudaya mutu rendah.

## Potret Mutu: PAUD dan PNF

Direktorat Jenderal (Ditjen) PAUD dan Dikmas Kemendikbud menyebutkan bahwa jumlah populasi lembaga penyelenggara PAUD dan PNF pada 2017 mencapai 258.146 satuan pendidikan dengan rincian: PAUD (228.140), LKP (18.744), PKBM (11.262), dan SKB (297). Dari total jumlah PAUD dan PNF, satuan pendidikan yang belum terakreditasi mencapai 228.540 (88,42 %). Itu berarti satuan pendidikan PAUD dan PNF yang terakreditasi masih sangat sedikit. Untuk mengejar ketertinggalan lembaga yang belum terakreditasi, pada 2018 pemerintah telah mengalokasikan pembiayaan akreditasi sebanyak 30.275 satuan pendidikan. Jumlah ini meningkat drastis jika dibanding jumlah alokasi akreditasi pada 2017 yang hanya 10.913 program dan satuan pendidikan. Peningkatan alokasi pembiayaan akreditasi menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan legalitas dan penjaminan mutu satuan pendidikan PAUD dan PNF.

Komitmen tersebut penting karena semua satuan pendidikan wajib mengikuti akreditasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Bahkan, pada masa mendatang akreditasi juga wajib dilaksanakan pada madrasah diniyah (madin). Akreditasi madin penting sebagai bagian dari akuntabilitas penjaminan mutu lembaga. Apalagi sebagian pendanaan

kegiatan madin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Madin merupakan satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag) yang hingga kini belum tersentuh proses akreditasi. Semua satuan pendidikan harus menyadari bahwa akreditasi merupakan amanah konstitusi sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32/2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Jika dicermati, satuan pendidikan PAUD dan PNF sejatinya memiliki peran penting dalam mewujudkan generasi emas bangsa pada masa mendatang. Pendidikan bermutu saat anak berusia emas (*golden age*) penting menjadi perhatian semua pihak, apalagi pemerintah sedang merancang bangun generasi emas 2045. Jika dilakukan secara berkelanjutan, penjaminan mutu satuan pendidikan PAUD dan PNF akan memberi sumbangan berharga bagi generasi emas bangsa saat memasuki abad XXI. Pada abad XXI inilah generasi bangsa harus memiliki sekurang-kurangnya empat kompetensi (4C), yakni berpikir kritis (*critical thinking*), komunikatif (*communicative*), kreatif (*creative*), dan kolaboratif (*collaborative*).

Sayang sekali sebagian satuan pendidikan PAUD dan PNF belum memandang akreditasi sebagai hal yang penting. Proses akreditasi PAUD dan PNF terasa belum memiliki pengaruh sosial (*social effect*) yang besar. Kondisi itu jelas berbeda dengan pengaruh sosial akreditasi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi. Padahal, semestinya tidak ada alasan bagi satuan pendidikan PAUD dan PNF untuk menghindari proses akreditasi. Jika ada satuan pendidikan PAUD dan PNF enggan mengajukan akreditasi, hal itu bukan hanya melanggar peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, berarti, satuan pendidikan tersebut tidak mau memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan berkaitan dengan proses penjaminan mutu. Melalui mekanisme akreditasi dapat dipastikan bahwa satuan pendidikan telah menerapkan konsep penjaminan mutu yang berkelanjutan.

## Dari Pemenuhan ke Performansi

Penjaminan mutu merupakan penetapan standar pengelolaan pendidikan secara konsisten dan

berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan sesuai dengan kebutuhan. Hasil penelitian tim dosen Universitas Gadjah Mada (2007) menegaskan bahwa kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan yang terutama adalah kebutuhan sosial, dunia kerja, dan profesional. Hal itu menunjukkan bahwa pihak yang berkepentingan dengan mutu layanan pendidikan bukan hanya peserta didik, melainkan juga masyarakat dan pengguna lulusan (*user*).

Yang perlu ditekankan adalah bahwa sistem penjaminan mutu harus dilakukan secara berkelanjutan (*continous improvement*). Hal itu penting agar penjaminan mutu menjadi gerakan hingga membentuk budaya semua ekosistem pendidikan. Dengan demikian, orientasi penjaminan mutu tidak boleh sekedar memenuhi kebutuhan pada saat penilaian akreditasi. Dengan kata lain, akreditasi satuan pendidikan tidak boleh sekedar pemenuhan kebutuhan standar minimal pendidikan (*compliance*). Akreditasi harus benar-benar memotret performansi satuan pendidikan (*performance*).

Agar akreditasi bergerak dari sekedar pemenuhan kebutuhan delapan standar sebagaimana ditentukan SNP ke performansi, satuan pendidikan harus melampaui SNP. Komitmen ini penting karena harus diakui bahwa butir-butir instrumen dalam akreditasi lebih banyak yang berkaitan dengan soal-soal administrasi. Instrumen akreditasi belum dirancang secara komprehensif untuk memotret performansi dan budaya mutu satuan pendidikan. Inilah tantangan bagi badan akreditasi yang dibentuk pemerintah. Badan akreditasi di setiap level harus mampu membuat perangkat akreditasi yang tidak sekedar compliance, tetapi benar-benar mengarah ke performance satuan pendidikan.

Untuk menghasilkan potret performansi satuan pendidikan dalam penerapan budaya mutu jelas dibutuhkan asesor yang berkualitas. Harus diakui, asesor merupakan ujung tombak dalam sistem akreditasi. Oleh karena itu, program peningkatan kapasitas asesor sebagai juru potret satuan pendidikan penting dilakukan. Apalagi kini, dalam menjalankan tugas, asesor harus mengikuti perkembangan mekanisme akreditasi yang menggunakan aplikasi daring (*online*), yakni Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena). Pada 2018 ini, Sispena wajib diterapkan dalam sistem akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF. Melalui Sispena, pelaksanaan akreditasi diharapkan lebih efektif, tepercaya,



cepat, dan murah.

Bukan hanya asesor, satuan pendidikan juga harus membiasakan untuk mengisi Evaluasi Diri Satuan (EDS) masing-masing melalui aplikasi Sispena. Satuan pendidikan yang tidak mengisi EDS melalui Sispena dengan sendirinya tidak masuk kuota akreditasi. Melalui aplikasi Sispena, mekanisme pelaksanaan akreditasi tidak lagi menggunakan borang, tetapi dengan tanpa kertas (*paperless*). Mekanisme manual dan tumpukan borang akreditasi diganti dengan sistem daring. Dengan demikian, asesor dan satuan pendidikan harus terampil menggunakan aplikasi akreditasi melalui Sispena. Itu berarti asesor dan satuan pendidikan harus melek teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK). Tantangannya adalah perluasan akses layanan jaringan internet di seluruh satuan pendidikan agar dapat mengikuti mekanisme akreditasi dengan menggunakan aplikasi Sispena.

BAN PAUD DAN PNF SIAPKAN AKREDITASI YANG DINAMIS

BAN PAUD dan PNF merupakan badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sebuah keharusan bagi BAN PAUD dan PNF untuk siap akan sebuah perubahan (*readiness for change*). Terlebih saat ini, perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang begitu pesat sehingga BAN PAUD dan PNF perlu beradaptasi dengan perkembangan tersebut agar proses akreditasi mengalami percepatan dan berkualitas.

Penggunaan sistem daring dalam proses akreditasi menjadi perhatian penting. Hal ini dimaksudkan agar BAN PAUD dan PNF memiliki suatu sistem yang terintegrasi. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018, BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugasnya menggunakan data yang terintegrasi dengan kementerian. Pengelolaan manajemen satu data dilakukan dalam menunjang tata kelola dan informasi yang terpadu.

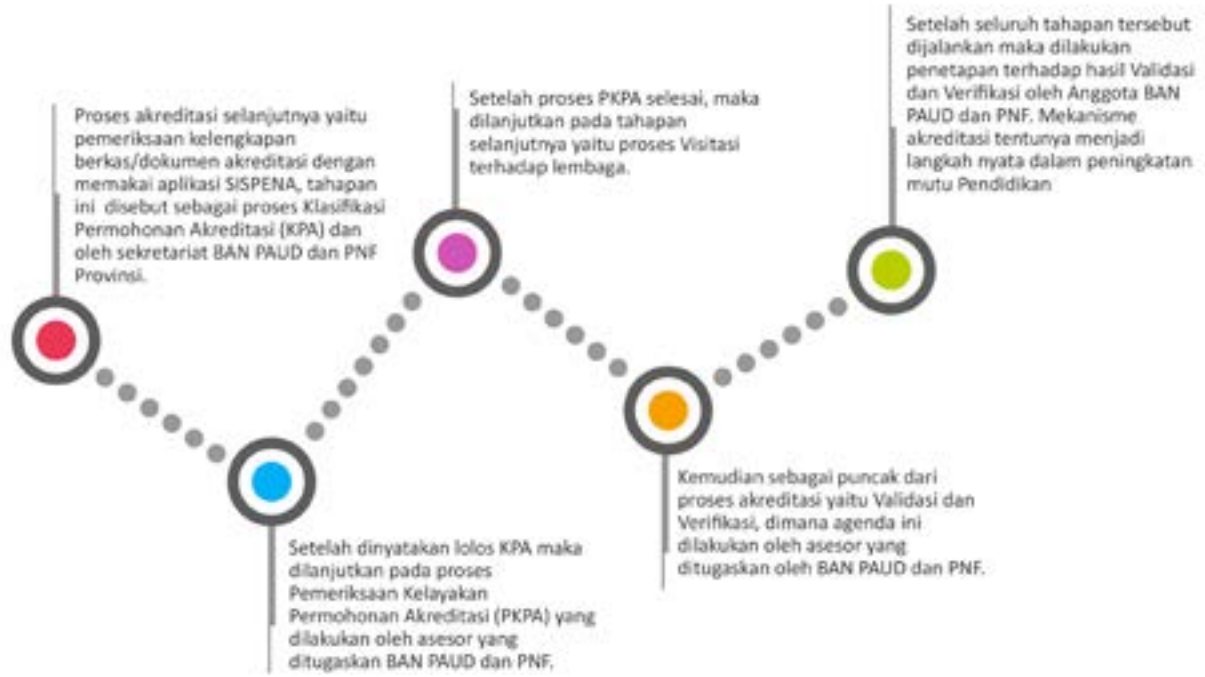
BAN PAUD dan PNF telah melakukan usaha konkret untuk merealisasikan amanah dari Permendikbud tersebut. Adapun realisasinya, yaitu dengan dikembangkannya Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena)

sebuah aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan pangkalan data (database) yang ada di Kemendikbud (Dapodik). Penggunaan aplikasi Sispena diharapkan dapat mempermudah semua pihak yang terlibat pada penyelenggaraan akreditasi, khususnya penyelenggara satuan PAUD dan PNF, anggota BAN PAUD dan PNF, anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi, dan asesor.

BAN PAUD dan PNF juga akan merealisasikan terobosan baru dengan menerbitkan Sertifikat Akreditasi dan Sertifikat Asesor secara elektronik, sehingga dapat menjaga Validitas dan efisiensi anggaran. Terobosan ini juga bagian dari keinginan kuat BAN PAUD dan PNF untuk mewujudkan visi sebagai lembaga yang mandiri, tepercaya, dan berkualitas untuk menghasilkan layanan prima dalam akreditasi program dan satuan pendidikan nonformal.

Tahun 2018 ini, BAN PAUD dan PNF membuat mekanisme yang dirasa ideal untuk mempercepat proses akreditasi. Adapun mekanisme tersebut dimulai dari lembaga melakukan permohonan akreditasi satuan menggunakan aplikasi Sispena yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja dengan syarat terhubung dengan internet, lembaga memiliki NPSN, dan mengisi data Dapodik. Kemudian, penyelenggara PAUD dan PNF dapat memperkirakan perolehan nilai yang mampu diraih apabila pengajuan permohonan akreditasi dilakukan dengan mengisi Evaluasi Diri pada aplikasi Sispena.

Proses akreditasi selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan berkas/dokumen akreditasi dengan memakai aplikasi Sispena. Tahapan ini disebut sebagai proses Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA) dan oleh sekretariat BAN PAUD dan PNF provinsi. Setelah dinyatakan lolos KPA, proses dilanjutkan pada Pemeriksaan Kelayakan Permohonan Akreditasi (PKPA) yang dilakukan oleh asesor yang ditugaskan BAN PAUD dan PNF. Setelah selesai, proses PKPA dilanjutkan dengan proses Visitasi terhadap Lembaga. Kemudian, sebagai puncak dari proses akreditasi adalah Validasi dan Verifikasi. Proses ini dilakukan oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN PAUD dan PNF. Setelah seluruh tahapan tersebut dijalankan, dilakukan penetapan terhadap hasil Validasi dan Verifikasi oleh Anggota BAN PAUD dan PNF. Mekanisme akreditasi tentunya menjadi langkah nyata dalam peningkatan mutu pendidikan.



Jika melihat pencapaian akreditasi pada Tahun 2012-2017, BAN PAUD PNF telah berhasil melaksanakan

akreditasi sebanyak 27.921 lembaga dengan perincian sebagai berikut.

Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Grand Total
LKP	237	317	221	815	591	473	2.654
PAUD	488	514	641	3.432	8.076	9.067	22.218
PKBM	75	69	58	510	964	1.373	3.049
	800	900	920	4.757	9.631	10.913	27.921

Pelaksanaan Akreditasi BAN PAUD dan PNF Secara Nasional Tahun 2012-2017

Kemudian, dari tabel tersebut, dapat dilihat capaian pada Tahun 2017. Dalam capaian itu, BAN PAUD dan PNF berhasil mengakreditasi sebanyak 10.913 lembaga. Adapun status dari hasil akreditasi tersebut jika dipersentasekan untuk seluruh satuan PAUD, LKP

dan PKBM adalah (i) persentase dengan peringkat A sebanyak 8,82 %; (b) persentase dengan peringkat B sebanyak 53,05 %; (iii) persentase dengan peringkat C sebanyak 37,43 %; dan (iv) persentase dengan peringkat TT sebanyak 0,71 %.





Akreditasi diharapkan bisa membantu tercapainya pendidikan yang bermutu di seluruh penjuru negeri

### Akreditasi dan Budaya Mutu

Setiap penyelenggara satuan pendidikan harus menyadari bahwa pada masa mendatang eksistensi lembaga pendidikan tidak boleh bergantung pada pemerintah. Nasib lembaga pendidikan akan sangat bergantung pada penilaian pemangku kepentingannya. Penilaian dalam hal ini terutama terkait mutu layanan pendidikan pada masyarakat. Itu berarti penilaian pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang sangat penting. Pada konteks itulah, Guru Marketing Dunia, Hermawan Kartajaya (2009) menegaskan bahwa pemangku kepentingan memiliki kedudukan (*positioning*) yang sangat penting.

Satuan pendidikan yang tidak cerdas dalam merespons kemauan pelanggan (*customer*) pasti akan ditinggalkan pemangku kepentingan. Jika situasi sudah demikian, cepat atau lambat lembaga pendidikan pasti terpuruk. Faktor kepuasan pemangku kepentingan penting menjadi pertimbangan pengelola lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal. Substansi

pengertian mutu sesungguhnya berkaitan dengan terpenuhinya standar dan janji yang telah diutarakan kepada pemangku kepentingan. Itu berarti bahwa satuan pendidikan akan disebut bermutu jika memenuhi standar mutu layanan yang dijanjikan kepada pemangku kepentingan.

Pada konteks itulah akreditasi menjadi mekanisme yang efektif untuk menilai budaya mutu setiap satuan pendidikan. Akreditasi juga bermanfaat untuk menilai standar mutu layanan yang diberikan satuan pendidikan kepada peserta didik, pemerintah, masyarakat, dan pengguna lulusan. Dengan demikian, setiap satuan pendidikan, termasuk PAUD dan PNF, harus mengikuti proses akreditasi untuk memastikan legalitas dan penjaminan budaya mutu lembaga. Akhirnya, semoga satuan pendidikan PAUD dan PNF terus berbenah untuk meningkatkan proses akreditasi dari sekadar memenuhi kebutuhan standar minimal ke pencapaian performansi. ■

## PENCIPTAAN TRADISI PRESTASI, PENANAMAN BUDI PEKERTI DAN CINTA TANAH AIR

*Tiga kegiatan akbar siswa tingkat nasional, yaitu OSN, O2SN, dan FLS2N, tak hanya bertujuan menciptakan tradisi prestasi di kalangan siswa, tetapi juga merupakan kawah candradimuka di bidang budi pekerti dan cinta tanah air bagi generasi muda Indonesia.*

Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, mengatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Pendapat Ki Hadjar Dewantara ini sangat menarik karena memuat tiga komponen yang selama ini dianggap penting dalam dunia pendidikan, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik.

Dengan menyadari hal itu, pemerintah Indonesia memasukkan ketiga komponen itu ke dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab.

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam setiap pelaksanaan kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan tersebut di antaranya adalah olimpiade dan festival siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ada tiga jenis kegiatan olimpiade dan festival siswa, yaitu Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N). OSN, O2SN, dan FLS2N adalah perhelatan lomba dan festival di bidang sains, olahraga, dan seni tingkat nasional yang diikuti oleh peserta didik dari seluruh Indonesia setelah lolos seleksi pada olimpiade dan festival tingkat provinsi.

Ada enam tujuan dari setiap penyelenggaraan OSN, O2SN, dan FLS2N. Tujuan tersebut adalah pertama, membina kreativitas dan inovasi peserta didik dalam bidang sains, olahraga, dan seni; kedua, memberikan wadah bagi peserta didik untuk berkompetisi dan unjuk kemampuan di bidang sains, olahraga, dan seni; ketiga, menanamkan rasa cinta kepada peserta didik terhadap sains, olahraga, dan seni budaya Indonesia;

keempat, mengasah kepekaan siswa dalam menghargai prestasi orang lain; kelima, menumbuhkan semangat persaudaraan antaranak bangsa; dan keenam, membangun karakter bangsa yang cinta tanah air dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa perhelatan lomba dan festival di bidang sains, olahraga, dan seni tingkat nasional tersebut bukanlah kegiatan yang main-main. Menurutnya, OSN merupakan kegiatan strategis untuk menyiapkan generasi Indonesia yang ahli di bidang sains dan teknologi.

“Oleh karena itu, tekunilah bidang yang Anda gemari ini sampai menjadi pilihan hidup Anda menjadi saintis. Bila di antara Anda ada 50 persen saja yang betul-betul istikamah, saya yakin Indonesia dapat mengungguli bangsa-bangsa yang maju lainnya!” pesan Mendikbud dalam penutupan OSN XVII yang diselenggarakan di Auditorium Universitas Negeri Padang, Sumatra Barat, Jumat, 6 Juli 2018.

Sebelum mengikuti OSN, O2SN, dan FLS2N, para peserta yang terdiri atas siswa SD/MI/SDLB/SD Inklusif; SMP/MTs/



SMPLB/SMP Inklusif; dan SMA/MA/SMK/SMALB/SMA Inklusif mengikuti proses seleksi yang dilakukan secara bertingkat mulai dari sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Para juara tingkat provinsi adalah peserta OSN, O2SN, dan FLS2N tingkat nasional.

“Saya mengikuti seleksi kabupaten mewakili sekolah dan mendapat juara pertama,” ujar Gita Milenia Pertiwi, salah satu peserta FLS2N jenjang SMK di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Selasa, 28 Agustus 2018. Menurut siswi SMK Negeri 1 Gombong Jawa Tengah ini, setelah lolos tingkat kabupaten, ia mengikuti seleksi tingkat provinsi dan dinobatkan sebagai juara pertama.

*“Alhamdulillah, saya menjadi juara pertama dan jadi duta dari Jawa Tengah untuk FLS2N di Aceh Tahun ini.”*

tambahnya senang.

Pada Tahun-Tahun pertama, OSN, O2SN, dan FLS2N diselenggarakan oleh tiap-tiap direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada perkembangan selanjutnya, lahir ide segar agar penyelenggaraannya dilakukan secara integratif antar direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Ide brilian ini langsung disetujui sehingga penyelenggaraan OSN, O2SN, dan FLS2N menjadi lebih masif dan monumental. Saat itu, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah didaulat



Bapak Mendikbud memberikan apresiasi kepada siswa Indonesia yang menjadi pemenang pada ajang *World Skill Asia* 2018 di Abu Dhabi

sebagai koordinator penyelenggaraan.

**Memotivasi Siswa**

Hingga Tahun 2018, OSN telah berjalan 16 Tahun, sementara FLS2N dan O2SN 11 Tahun. OSN pertama diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 10 September 2002. Sementara itu, O2SN pertama diselenggarakan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada 2--7 Agustus 2008, dan FLS2N pertama kali diselenggarakan di Provinsi Jawa Barat pada 21--26 Juli 2008.

Selama penyelenggaraan tersebut, baik OSN, O2SN, dan FLS2N berhasil memotivasi siswa. Hal ini seperti diungkapkan Rizki, siswa kelas VIII SMP 11 Pamulang,

Tangerang Selatan.

*“Tentu (ini) dapat mendorong semangat dan minat untuk bersaing, karena itu sangat positif,”*

tegas siswa yang pernah mengikuti seleksi O2SN ini, di SMP 11 Pamulang, Tangerang Selatan, Kamis, 13 September 2018.

Hal yang sama disampaikan Nindin Kamarudin, Kepala Sekolah SMP 11 Pamulang, Tangerang Selatan. Menurutnya, OSN, O2SN, dan FLS2N merupakan sebuah kompetisi yang memotivasi siswa untuk menunjukkan minat, bakat, kemampuan, dan keterampilan mereka.



Dirjen Pendidikan Dasar & Menengah, Hamid Muhammad membuka Olimpiade Sains Nasional 2018 di Padang

Selain memotivasi siswa, OSN, O2SN, dan FLS2N juga berhasil mendorong para guru berlomba-lomba meningkatkan mutu pembelajarannya. Hal ini diungkapkan M. Abrar Mardhatillah, salah satu peserta OSN bidang Kimia. “Sekolah berlomba-lomba untuk mengembangkan program peningkatan mutu pembelajaran,” tegas siswa SMA Modal Bangsa, Aceh Besar ini, di Auditorium Universitas Negeri Padang, Senin, 2 Juli 2018.

**Mencipta Tradisi Prestasi**

OSN, O2SN, dan FLS2N terbukti melecut semangat para siswa untuk meningkatkan prestasi mereka dari satu level ke level lebih tinggi. Mereka tak puas bila hanya meraih prestasi di tingkat nasional. Mereka ingin mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia di tingkat internasional.

Keinginan mulia tersebut, berhasil diwujudkan oleh Ong

Christoper Ivan Wijaya. Alumni OSN Tahun 2017 ini berhasil meraih medali emas pada International Chemistry Olympiad (IChO) ke-50 yang diselenggarakan di Republik Ceko. Teman Ong, yaitu Abdullah Muqoddam, meraih satu medali perak, sementara Rizki Kurniawan dan Muhammad Syai-ful meraih medali perunggu. Keempat siswa ini berhasil bersaing dengan 309 siswa dari 80 negara peserta IChO 2018.

Sementara itu, alumni OSN Tahun 2017 lainnya, yaitu Kristen Frateran, meraih medali emas pada International Physics Olympiad (IPhO) ke-49 di Lisbon, Portugal. Keberhasilan Kristen diikuti Jason Jovi Brata yang meraih medali perak dan Ahmad Aufar Thoriq, Bryant Juspi, serta Raditya Adhidarma Nugraha yang meraih medali perunggu. Lima remaja ini mampu bersaing dengan 670 siswa dari 90 negara peserta IPhO 2018.

Direktur Pembinaan SMA, Purwadi Sutanto, mengaku bangga atas prestasi yang diraih para siswa. Tim IChO dan IPhO merupakan hasil seleksi berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional, yakni ajang OSN di Pekanbaru, Riau, pada 2017 lalu.

*“Prestasi ini, kado ulang Tahun hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Ini prestasi luar biasa. Ini membanggakan buat kita semua, bangsa Indonesia.”*

ucap Purwadi di Kemendikbud, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.

**Menanamkan Budi Pekerti dan Cinta Tanah Air**

Di sisi lain, kegiatan OSN, O2SN, dan FLS2N juga bertujuan menanamkan budi pekerti dan





3.426 Peserta Mengikuti FLS2N 2018

menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air. Hal ini dapat dengan mudah dijumpai, misalnya dalam berbagai lomba dan festival yang diikuti para peserta FLS2N 2018 di Kepulauan Riau dan Aceh.

“Belajar menari tarian daerah, secara langsung menumbuhkan cinta tanah air,” kata Mikael Migel Rahayaan, siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Merauke, se usai tampil pada lomba tari tradisional jenjang SMK di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Senin, 28 Agustus 2018.

Saat itu, Mikael bersama dengan teman-temannya memperkenalkan salah satu seni tari Papua, yaitu Tari Legenda Burung Cendrawasih. Tari ini menceritakan tentang awal keberadaan

burung cendrawasih yang memiliki bulu cantik dan kicauannya merdu. Melalui tari ini, Mikael dan teman-temannya berhasil membuat penonton terpukau. Gerakan, teriakan, dan pakaian khas Papua yang ditampilkan siswa kelas XII Jurusan Administrasi Perkantoran, SMK Negeri 1 Merauke ini terbukti membuat takjub para penonton.

Sementara Nachita Putri Musela, siswi kelas XI Jurusan IPA, SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta ini mengatakan bahwa ajang FLS2N dapat memperkuat rasa nasionalisme antaranak bangsa. “Karena kita dapat berbagi pengalaman, mengenal budaya teman-teman dari seluruh Indonesia. Ini dapat dilihat misalnya

waktu pembukaan, ada karnaval, tarian, dan nyayian Aceh. Di samping itu, dengan ajang ini, ilmu bertambah dan memperkaya pengalaman,” ujarnya di Grand Nangroe Hotel, Banda Aceh, 28 Agustus 2018.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad, fenomena tersebut sangat menunjang Penguatan Pendidikan Karakter yang notabene merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menonjolkan nilai-nilai budi pekerti dan cinta tanah air dapat pula diartikan sebagai upaya meningkatkan ketahanan nasional dari perspektif kebangsaan. ■

## KEBIJAKAN KEMITRAAN ANTARA LEMBAGA PENDIDIKAN VOKASI DAN INDUSTRI

### IMPLEMENTASI

#### INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 Tahun 2016



29 November 2016 terdapat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara 5 Menteri tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri

Sinergi L/K dalam Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 bertujuan untuk melakukan revitalisasi pendidikan vokasi dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi agar revitalisasi diarahkan untuk reorientasi vokasi ke arah kebutuhan kerja, reorientasi dengan melibatkan dunia usaha dan dunia industri, dan proses pembukaan sekolah kejuruan di seluruh Indonesia yang harus dipermudah.

Guna mencapai hal tersebut, pemerintah Jokowi-JK melakukan sinergi dan koordinasi dalam rangka revitalisasi pendidikan

vokasi. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara lima menteri mengenai pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang kiranya *link and match* dengan industri.

Selain itu, fokus pemerintah pada Tahun 2018 dan 2019 adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui pengembangan vokasi. Hal ini sejalan dengan instruksi dari presiden yang mengatakan bahwa Indonesia harus segera memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja yang ada saat ini agar bisa menjadi tenaga kerja yang

terlatih dan terampil agar terserap semuanya ke dalam industri-industri yang ada di Indonesia (Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 3 Januari 2018). Selain itu, Presiden RI juga memerintahkan agar kementerian terkait, seperti Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan kementerian lainnya untuk mulai merancang apa yang akan dikerjakan dalam pembangunan SDM pada Tahun 2018 dan 2019 (Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 12 Februari 2018).



# ARAH KEBIJAKAN REVITALISASI VOKASI

Fokus Pemerintah pada Tahun 2018 & 2019 adalah pembangunan kualitas SDM, melalui pengembangan vokasi

“Kita harus terus memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja kita agar menjadi tenaga kerja yang *terlatih, terampil* agar *terserap* semuanya ke dalam *industri-industri* kita,” kata Kepala Negara (Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 3 Januari 2018)



“Kementerian terkait, yaitu Kemnaker; Kemdikbud; Kemristek Dikti; dan Kementerian lainnya harus mulai merancang apa yang akan dikerjakan dalam *pem-bangunan* SDM pada Tahun 2018 dan 2019” (Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 12 Februari 2018)

Presiden meminta Menko Perekonomian melaporkan hasil tindaklanjut Sidang Kabinet dalam waktu 2 minggu (sekitar tanggal 27 Februari 2018)



Arah Kebijakan Revitalisasi Vokasi Pemerintah Jokowi - JK

Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SMK mengimplementasikan program revitalisasi SMK di seluruh Indonesia. Revitalisasi SMK dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan potensi wilayah, sumber daya, dan kebutuhan riil tenaga kerja untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Revitalisasi SMK diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu SMK sekaligus memberikan pengaruh terhadap kualitas lulusan SMK yang akan menjadi sumber daya pembangunan di Indonesia. Kondisi SMK yang beragam dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia memerlukan dukungan

eksternal dari berbagai pihak dalam program revitalisasi tersebut. Masyarakat dan dunia usaha atau industri sebagai penerima manfaat lulusan SMK yang memiliki kompetensi dan berjiwa kewirausahaan (*enterpreunership*). Direktorat Pembinaan SMK telah menetapkan lima area revitalisasi yang terdiri atas kurikulum, guru dan tenaga kependidikan, kerja sama dengan dunia usaha/ industri, sertifikasi dan akreditasi, serta sarana prasarana dan kelembagaan. Setiap area dari kelima area revitalisasi tersebut perlu diimplementasikan dengan langkah nyata demi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul di setiap bidang.

Dalam perwujudan revitalisasi yang dituangkan dalam sepuluh

langkah revitalisasi SMK dapat dirumuskan model revitalisasi sebagai pendukung terlaksananya sepuluh langkah revitalisasi SMK. Reorientasi revitalisasi SMK ini sangat penting dalam beberapa aspek. Tujuannya adalah agar sekolah menengah kejuruan dapat menyediakan tenaga kerja terampil yang siap kerja di berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, pariwisata, bahkan ekonomi kreatif. Diharapkan keberhasilan revitalisasi SMK ini juga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia serta dapat mengurangi permasalahan pengangguran usia produktif.



Presiden Jokowi saat mengunjungi pameran vokasi pada Rembuknas 2018

Pada perkembangannya jumlah SMK sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2017 telah terjadi penambahan yang penambahan kuantitas, baik swasta maupun negeri. Hal serupa juga terjadi

pada siswanya. Pada Tahun 2015, jumlah SMK sebanyak 12.659, kemudian pada Tahun 2017 terdapat 13.926. Berarti, terjadi kenaikan sejumlah 1.267 SMK. Sementara itu, untuk siswanya

pertambahan jumlah setiap Tahun sekitar 250.000 siswa per Tahun atau 6.944 rombongan belajar (rombongan belajar). Hingga saat ini terdapat jumlah siswa SMK sebesar 4.911.184 siswa.



No.	Bidang Prioritas	Tahun				Total
		2015 (sekolah)	2016 (sekolah)	2017 (sekolah)	2018 (Agustus) (sekolah)	
1	SMK yang bekerjasama dengan Industri	0	859	1.540	301	2.700
2	Pengembangan Teaching Factory/Technoparrk	59	73	200	228	560
3	SMK Kelautan Pendukung Kemaritiman	0	105	44	90	239
4	Pengembangan SMK Pertanian Pertahanan Keamanan	0	32	87	160	279
5	Pengembangan SMK Pariwisata	0	0	46	90	136

Perkembangan Revitalisasi SMK berdasarkan Bidang Prioritas

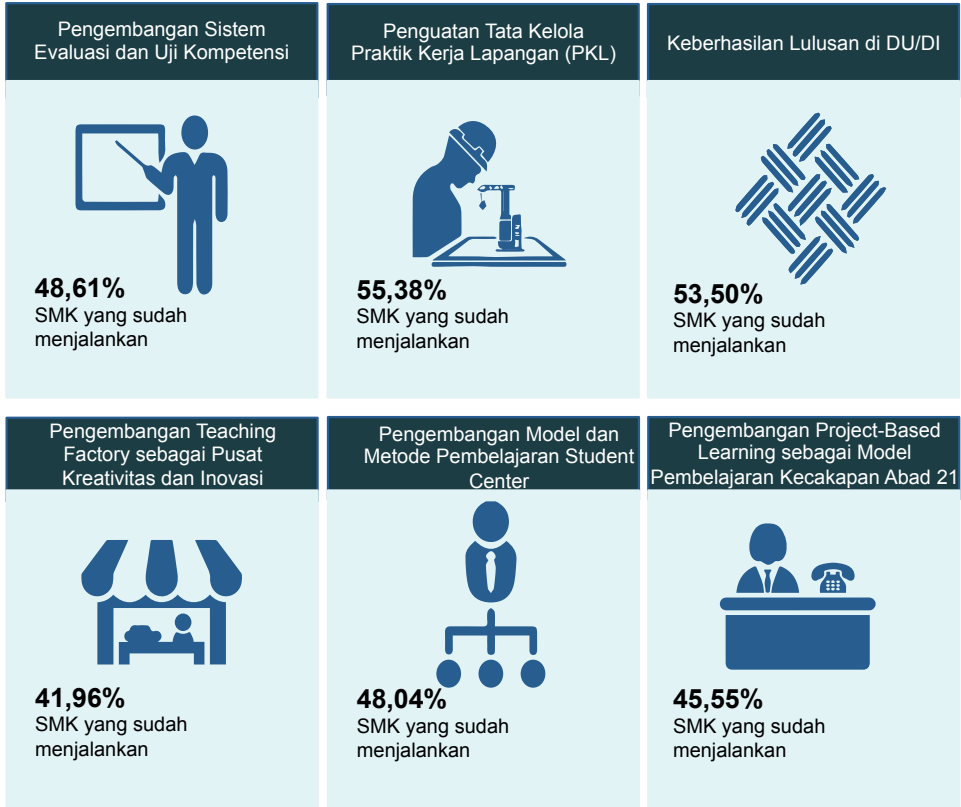
dengan DUDI, pengembangan teaching factory, bidang kelautan, bidang pertanian pertahanan keamanan, dan bidang pariwisata. SMK yang bekerja sama dengan dunia industri hingga Agustus Tahun 2018 sudah ada sebanyak 2.700 SMK. Begitu juga dengan SMK yang mengembangkan teaching factory yang pada Tahun 2015 hanya sebesar 59 orang, pada pertengahan Tahun 2018 total keseluruhannya sudah mencapai 560 SMK. SMK Kemaritiman juga sama yang dimulai dari bidang yang tidak ada hingga saat ini mencapai 239 SMK.

Pada Tahun 2017 dan 2018,

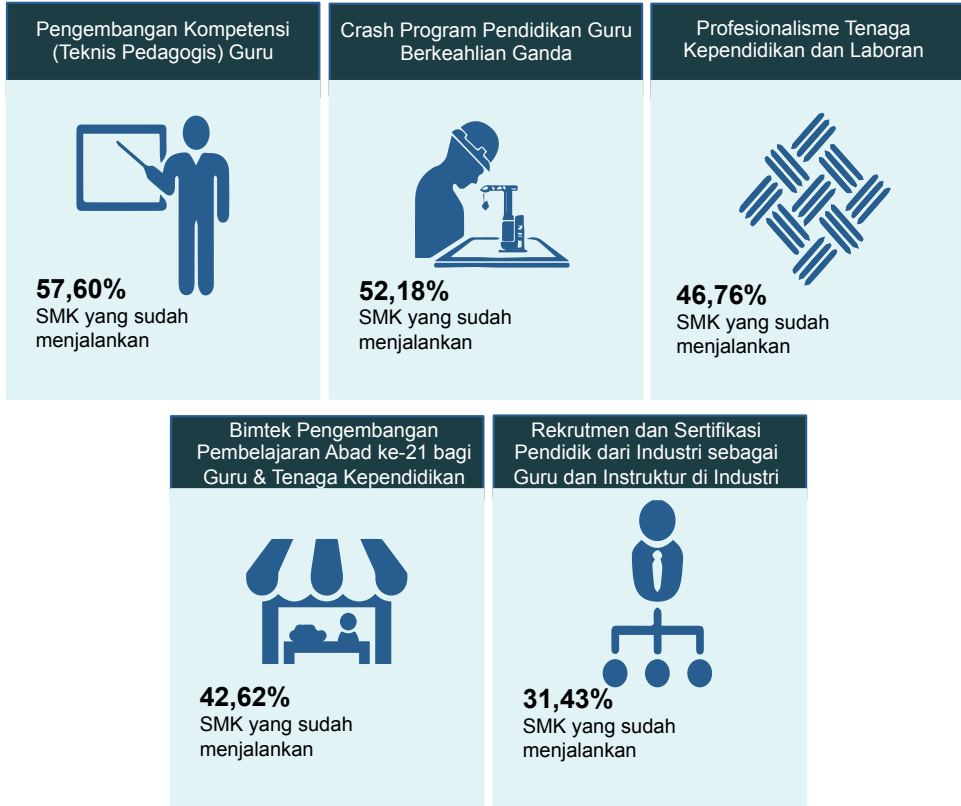
guna mendukung arah kebijakan dari pemerintah Jokowi-JK untuk melakukan revitalisasi pendidikan vokasi sekaligus mengimplementasikan revitalisasi SMK, Direktorat Pembinaan SMK melakukan revitalisasi pada 219 SMK yang tersebar di seluruh Indonesia. Penetapan ke-219 SMK tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 96/KEP.D5/KS/2018. Strategi yang dilakukan dalam pengembangan SMK tersebut antara lain (i) melakukan pendampingan dalam melakukan revitalisasi SMK; (ii) pengembangan dan penyelarasan kurikulum;

(iii) inovasi pembelajaran; (iv) pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru; (v) standarisasi sarana dan prasarana utama; (vi) kerja sama sekolah dengan DUDI/PT; dan (vii) penataan dan pengelolaan kelembagaan SMK. Untuk laporan perkembangan (progress report) dari program ini, tepatnya pada Juli 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan survei untuk mengetahui perkembangan program ini pada Tahun 2017 dari berbagai aspek seperti yang terlihat pada gambar berikut.

Sub Aspek Inovasi Pembelajaran

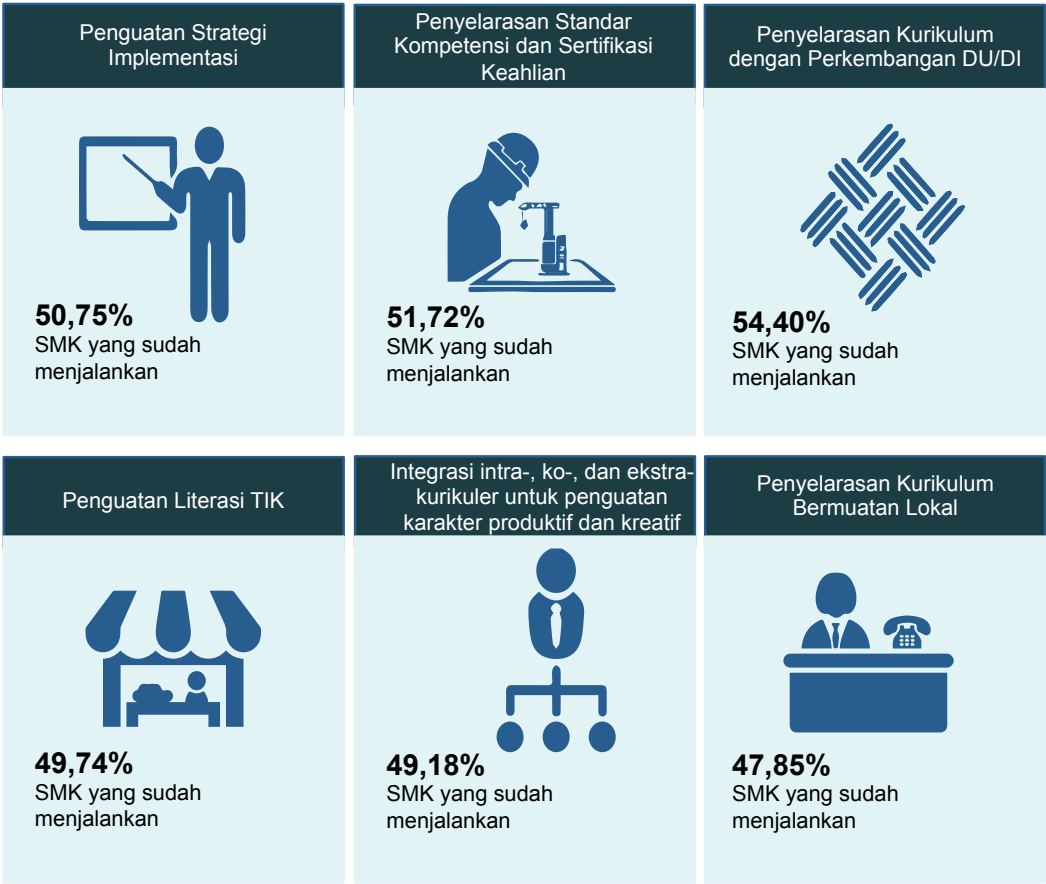


Sub Aspek Pemenuhan dan Peningkatan Profesionalitas Guru dan Tendik

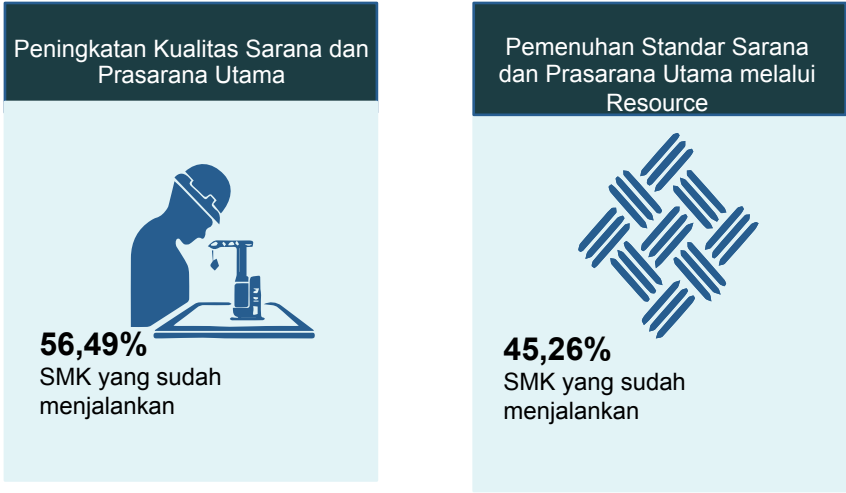




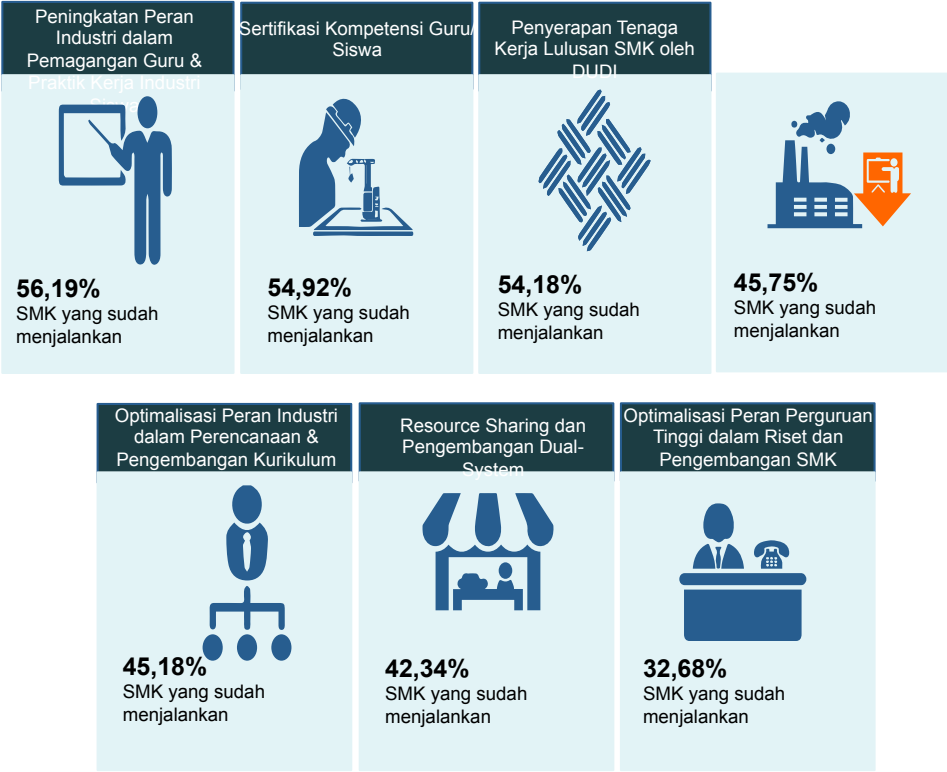
Sub Aspek Pengembangan dan Penyelarasan Kurikulum



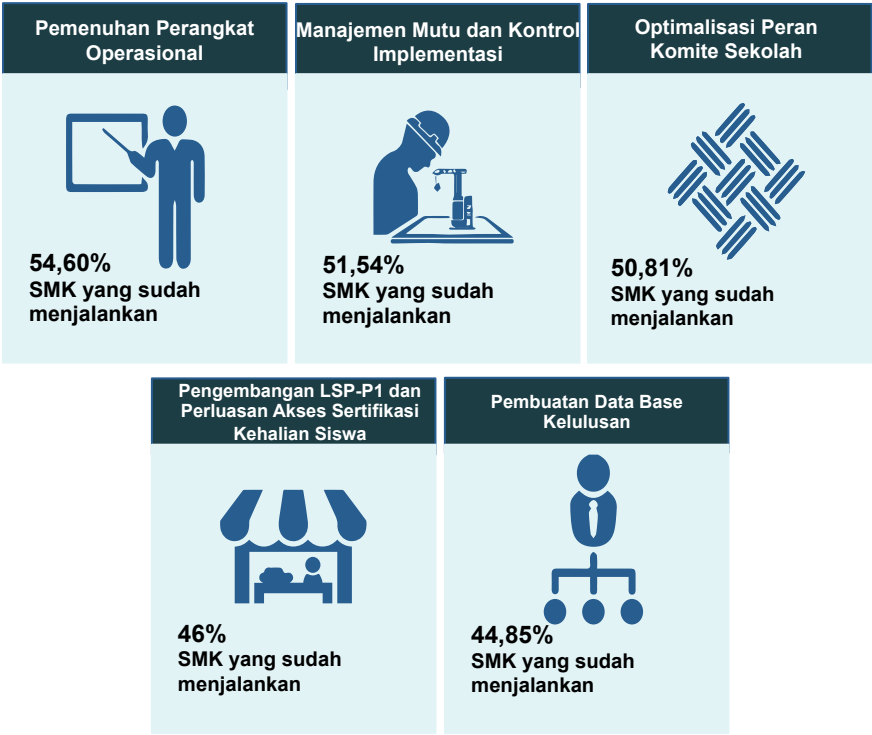
Sub Aspek Standarisasi Sarana dan Prasarana



Sub Aspek Kerja Sama Sekolah dengan Dunia Usaha dan Industri, serta Perguruan Tinggi



Sub Aspek Pengelolaan dan Pemetaan Kelembagaan





2015	2016	2017-2018
<ul style="list-style-type: none"><li>Menyiapkan draf Inpres</li><li>Tahap awal penyusunan peta jalan</li><li>Transisi penyelarasan kurikulum</li><li>Kekurangan guru produktif</li><li>Tidak ada data lembaga</li><li>sertifikasi di SMK dan PPPPTK</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Terbit Inpres Nomor 9 Tahun 2016</li><li>Peta Jalan 2030</li><li>Naskah Akademik Vokasi</li><li>56,7 % struktur kurikulum selaras dengan DUDI dan SKKNI</li><li>Merekrut 112.740 guru untuk program keahlian ganda</li><li>Memberikan bantuan SMK prioritas: 39 SMK Kelautan/Kemaritiman, 66 SMK Pariwisata, 32 SMK Pertanian</li><li>Kerja sama dengan 9 K/L dan 8 DUDI</li><li>321 SMK menjadi LSP-P1, 4 P4TK menjadi LSP-P2, 1.146 lembaga kursus menjadi TUK</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>89,25 % struktur kurikulum selaras dengan DUDI dan SKKNI</li><li>10.105 orang dilatih menjadi guru produktif</li><li>15.000 guru PKG rekrutmen lanjutan</li><li>Memberikan bantuan SMK prioritas: 50 SMK Kelautan/Kemaritiman, 50 SMK Pariwisata, 100 SMK Pertanian</li><li>Kerja sama dengan 9 K/L dan 16 DUDI</li><li>3.574 industri bekerja sama dengan SMK</li><li>Terdapat 219 SMK Rujukan</li><li>421 SMK menjadi LSP-P1, 6 PPPPTK menjadi LSP-P2, lembaga kursus menjadi TUK</li></ul>

Capaian Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan

Secara keseluruhan, capaian revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan dapat dilihat pada Tabel di atas. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa telah terjadi perubahan-perubahan menuju pada hal lebih baik. Pada Tahun 2015 pendidikan vokasi masih belum mempunyai peta jalan, kekurangan guru produktif, tidak adanya lembaga sertifikasi, dan kurikulum yang belum mendukung dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Tahun 2016

Sesungguhnya kerja sama

dengan dunia usaha dan dunia industri sebagai penerima manfaat lulusan SMK tidak lagi menjadi satu-satunya tujuan dari lulusan SMK. Hal ini terlihat dari banyaknya testimoni berbagai pihak, walaupun belum optimal. Semangat itu terlihat dari testimoni dari SMK Pembangunan Tegalampel dan SMK Pertanian Pembangunan Tegalampel, Bondowoso yang menjelaskan bahwa sekolah tidak hanya berorientasi pada penciptaan siswa yang siap bersaing di dunia usaha. Sekolah

tersebut juga mencetak siswa berjiwa wirausaha (entrepreneur). Lulusan SMK Tegalampel yang tidak dapat melanjutkan kuliah dan diterima bekerja di suatu perusahaan dapat mengembangkan jiwa kewirausahaannya di sektor agrobisnis atau pertanian.

Kepala SMK PP N 1 Tegalampel, Anik Sudiartini, M.Pd. mengatakan bahwa pendidikan wirausaha atau entrepreneur sudah ditanamkan SMK Tegalampel sejak siswa kelas X atau saat baru masuk.

”Kami memberikan pemahaman dan motivasi kepada para siswa bahwa berwirausaha baik karena menjadi wirausaha membuat orang kreatif dan produktif serta tidak kalah dengan orang bekerja pada dunia usaha atau industri.”

Pemerintah Daerah Bantul juga amat bangga dengan prestasi SMK yang sudah melaksanakan izin (approval) profesi pelaut, yaitu SMK Negeri 1 Sanden. SMK tersebut diharapkan mampu untuk mengoptimalkan potensi laut yang ada di sana.

“Saya, mewakili Bupati Bantul, bangga dengan prestasi sekolah yang sudah melaksanakan approval profesi pelaut ini sehingga harapannya SMK Negeri 1 Sanden ini dapat mengoptimalkan kelulusannya agar dapat menggali potensi hasil perikanan laut selatan; sehingga lulusan SMKN 1 Sanden nantinya dapat menjadi perwira menengah di kapal penangkap ikan yang berkualitas, baik dari segi keterampilan dan pengetahuan,”

kata Munir, pegawai Pemda Bantul.

Selain testimoni tersebut, dampak dari revitalisasi SMK dapat dilihat pada grafik di bawah. Reorientasi revitalisasi pendidikan vokasi ini sangat penting dalam beberapa aspek, khususnya sekolah menengah kejuruan agar dapat menyediakan tenaga kerja terampil yang siap kerja di berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri, pariwisata, bahkan ekonomi kreatif. Keberhasilan revitalisasi SMK ini juga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia serta dapat mengurangi permasalahan pengangguran usia produktif sekaligus menghadapi era globalisasi dan era kompetitif.



**Peningkatan Kerjasama**  
Adanya penyusunan peta jalan di provinsi meningkatkan kerja sama dan sinergitas antara SKPD terkait di masing-masing provinsi



**Pengembangan Wilayah**  
Pendirian SMK dengan berbagai bidang keahliannya harus didasarkan dengan potensi wilayah. Sehingga adanya revitalisasi SMK mampu menjadi solusi untuk pengembangan wilayah, baik dari segi pemenuhan calon tenaga kerja yang berkualitas juga sebagai sarana untuk mengoptimisasi potensi daerah dengan dukungan langsung dari SMK pelaksana program revitalisasi



**Penataan Kelembagaan**  
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai persiapan menghadapi Revolusi Industri 4.0



**Revitalisasi BLK/Kursus**  
Adanya Inpres nomor 9 tahun 2016 juga meningkatkan kesadaran lembaga terkait untuk merevitalisasi lembaga BLK/kursus di masing-masing daerah



**Pemenuhan Tenaga Kerja**  
Salah satu dasar penyusunan peta jalan revitalisasi SMK tingkat provinsi adalah proyeksi kebutuhan tenaga kerja dengan mempertimbangkan keunggulan wilayah. Hal tersebut dapat menjadi bahan proyeksi daerah untuk memenuhi tenaga kerja yang dibutuhkan

Dampak Revitalisasi SMK



Tidak hanya itu, kemitraan yang dibangun dengan lembaga lain, seperti DUDI, menjadi amat penting karena lembaga/institusi

tersebut yang akan menggunakan lulusan dari pendidikan vokasi ini. Selain itu, lulusan SMK juga diharapkan bisa mengembangkan

kemampuan kewirausahaannya dengan baik sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. ■



## KEAHLIAN GANDA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS PEMENUHAN GURU PRODUKTIF DI SMK

### *Menambah Guru Produktif SMK, Meningkatkan Daya Saing SDM*

Salah satu arah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Melalui inpres ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diinstruksikan untuk meningkatkan jumlah dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di SMK.

Program Revitalisasi Pendidikan Vokasi merupakan amanah Nawacita dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 dalam rangka pemenuhan 58 juta tenaga kerja terampil sampai 2030. Melalui Nawacita tersebut bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang tinggi untuk menjadikan ekonomi Indonesia peringkat VII dunia pada 2030 dan memenangkan persaingan SDM di tingkat regional dan global.

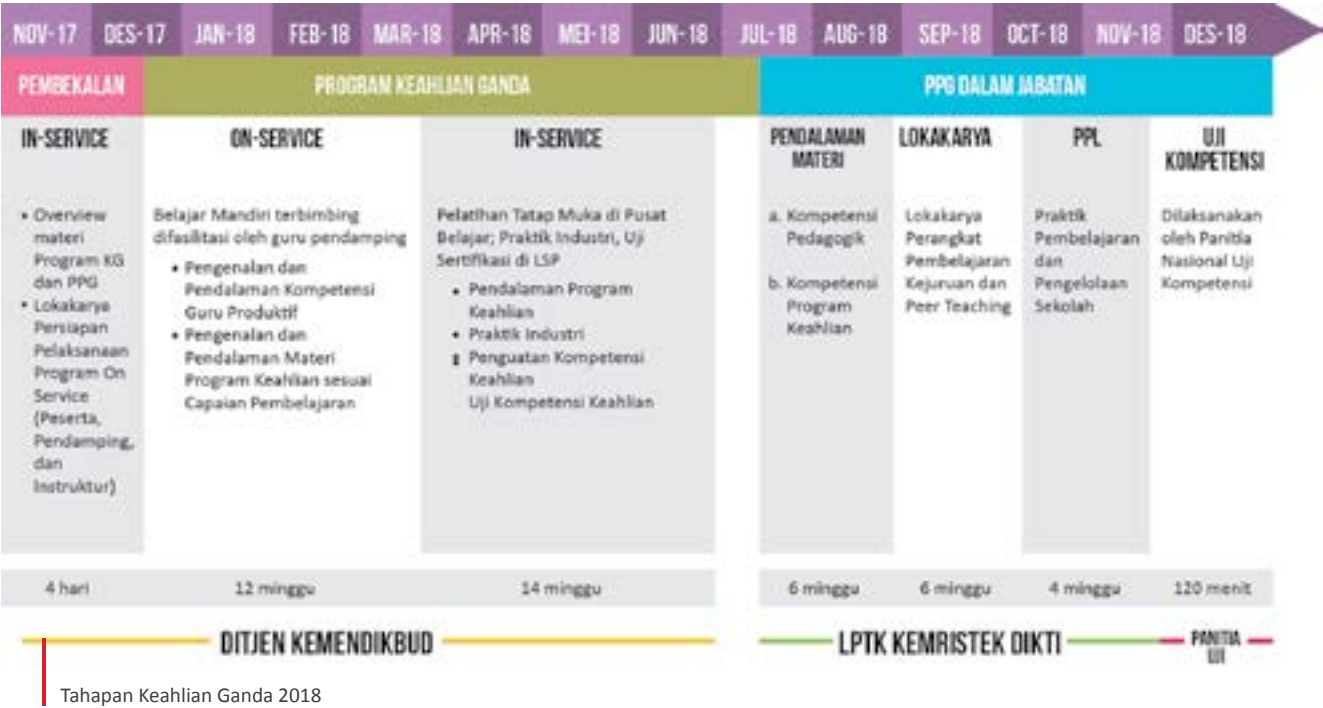
Program Keahlian Ganda adalah program pemberian tambahan kewenangan mengajar bagi guru SMK/SMA. Melalui program ini, guru yang mengajar mata pelajaran tertentu menjadi guru mata pelajaran produktif di SMK untuk kompetensi keahlian tertentu yang berbeda dengan kompetensi keahlian sebelumnya dan relevan dengan latar belakang pendidikannya. Agenda penting dari Program Keahlian Ganda ialah meningkatkan kompetensi dan jumlah tenaga pendidik. Program ini sangat relevan untuk segera dilaksanakan mengingat jumlah guru produktif di SMK masih sangat minim.

Tujuan pelaksanaan Program Keahlian Ganda adalah

untuk membekali calon guru sasaran Program Keahlian Ganda dengan kompetensi keahlian produktif sehingga mampu menjadi guru mata pelajaran produktif di SMK; memenuhi kebutuhan guru produktif di SMK, khususnya untuk bidang maritim/kelautan, pertanian, ekonomi kreatif, pariwisata, teknologi dan rekayasa; serta memberdayakan dan menata guru yang berlebih agar merata sesuai kebutuhan.

Program tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan guru produktif dalam waktu singkat dengan cara memanfaatkan kelebihan guru normatif dan adaptif di SMA dan SMK. Guru normatif dan adaptif, seperti guru fisika, matematika, kimia, dan bahasa Inggris diberikan materi pelajaran produktif, seperti mesin produksi, mesin konversi energi, elektronika, dan lain-lain. Program Keahlian Ganda berlangsung selama 12 bulan dengan tahapan, yaitu (1) pembekalan (2) belajar mandiri terbimbing yang dilaksanakan di SMK sekolah tempat guru mengajar (*on-service training*); (3) pendidikan dan pelatihan (*in-service training*) yang diakhiri oleh Uji Kompetensi Keahlian (UKK) di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang ditunjuk. Syarat untuk bisa mengikuti UKK tersebut adalah menyelesaikan on-in service training dan mendapatkan nilai akhir (NA)  $\geq 75$ . Apabila dinyatakan kompeten setelah Uji Kompetensi Keahlian, peserta dapat mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sesuai dengan persyaratan dan pelaksanaan yang diberlakukan oleh LPTK Kemristek Dikti. Secara jelas tahapan KG 2018 terlihat pada gambar di bawah ini.





Keluaran dari program ini adalah peserta akan memperoleh dua sertifikat: sertifikat pendidik yang baru dan sertifikat keahlian yang akan dikeluarkan LSP. Penerbitan sertifikasi keahlian dilatarbelakangi arah orientasi program nasional revitalisasi SMK, yaitu untuk mencetak lulusan yang memiliki ijazah serta sertifikat kompetensi keahlian. Lulusan SMK harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang keahlian sehingga mereka mampu bersaing di dunia kerja terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Oleh karena itu, guru produktif SMK harus pula mempunyai sertifikat kompetensi keahlian. Mendikbud berpesan agar para guru meluruskan niat untuk memperkuat kompetensi siswa di sekolah, tidak hanya sekadar berburu sertifikat. Hal tersebut disampaikan Mendikbud, Muhadjir Effendy, Rabu siang (30/5/2018) dalam acara penutupan Pelatihan Program Sertifikasi Pendidik dan Sertifikasi Keahlian bagi Guru SMA/SMK (Keahlian Ganda) Angkatan II yang berlangsung di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bisnis dan Pariwisata (PPPPTK Bispar), Bogor, Jawa Barat.

*“Niatnya harus diluruskan betul, bapak ibu diikutkan keahlian ganda untuk memperkuat kompetensi di sekolah, supaya siswa-siswa kompetensinya terjamin betul. Ikut (pelatihan) ini sebetulnya pintu masuk, belajar mandiri, untuk kemudian Saudara kembangkan sendiri,”*

*tutur Mendikbud pada penutupan Pelatihan Program Sertifikasi Pendidik dan Sertifikasi Keahlian Bagi Guru SMA/SMK (Keahlian Ganda) Angkatan II, 30 Mei 2018*

Sasaran paket keahlian yang menjadi tujuan Program Keahlian Ganda adalah 28 paket keahlian yang dikelompokkan ke dalam bidang maritim/kelautan, pertanian, ekonomi kreatif, dan pariwisata, serta teknologi dan rekayasa. Dengan persyaratan yang lebih selektif dengan tujuan agar peserta Program Keahlian Ganda Angkatan II memenuhi persyaratan untuk mengikuti setiap tahapan program tersebut serta untuk mengambil

kompetensi keahlian yang benar-benar dibutuhkan oleh sekolah atau provinsi yang bersangkutan, peserta Program Keahlian Ganda Angkatan II hanya diikuti oleh 1.231 orang yang memenuhi persyaratan. Dari jumlah peserta yang memenuhi persyaratan tersebut, 957 orang peserta dinyatakan lulus program Keahlian Ganda dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK).



Peserta Keahlian Ganda Angkatan II didampingi Widyaaiswara sedang praktek menyadap karet





Peserta Keahlian Ganda Angkatan II bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan praktek pemanenan

*“Di sekolah kami belum ada guru multimedia yang berstatus PNS sehingga harapan kami setelah lulus dan bersertifikat, kami memiliki kompetensi untuk mengajar multimedia di sekolah kami. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena kewajiban jam mengajar saya dapat terpenuhi. Apabila saya masih kurang jam mengajar selama mengajar fisika, kekurangannya dapat ditambah dengan dengan jam mengajar multimedia.”*

*(Nunik, peserta Keahlian Ganda asal Temanggung, Jawa Tengah)*



Suasana Uji Kompetensi Keahlian pada Diklat Keahlian Ganda Angkatan II, bidang agribisnis teknologi hasil pertanian - pembuatan selai buah

Ibu Nunik yang mengajar Fisika di PB SMKN 1 Kebumen ini juga berharap agar Program Keahlian Ganda dapat dilanjutkan karena akan bermanfaat untuk memenuhi kekurangan guru produktif yang selama ini terjadi di SMK. Peserta lainnya, yaitu Ibu Rizki yang berasal dari Bieureun, Aceh (Guru PB BPPP Medan Jurusan Kimia/ Teknik Kapal Penangkapan Ikan/TKPI) juga menceritakan manfaat lain yang ia dapatkan dari program Keahlian Ganda.

*“Saya mengajar di SMK dengan bidang keahlian kelautan dan perikanan. Kami juga punya jurusan teknik kapal penangkapan ikan, namun tidak ada guru yang PNS. Maka, saya mencoba untuk membantu sekolah agar nanti setelah selesai program ini saya juga mampu mengajarkannya ke anak-anak. Banyak sekali ilmu baru yang jelas beda dengan bidang keahlian awal saya yang saya dapat dari kegiatan ini.” ■*



# PENINGKATAN KOMPETENSI GURU SEBAGAI BAGIAN PROGRAM REVITALISASI SMK

Berkenaan dengan tuntutan penyediaan sumber daya manusia yang memiliki daya saing sebagaimana diinstruksikan melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, terdapat enam isu strategis yang menjadi prioritas revitalisasi SMK. Enam isu strategis tersebut, yakni penyelarasan dan pemutakhiran kurikulum; inovasi pembelajaran; pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan; kemitraan sekolah dengan dunia usaha/dunia

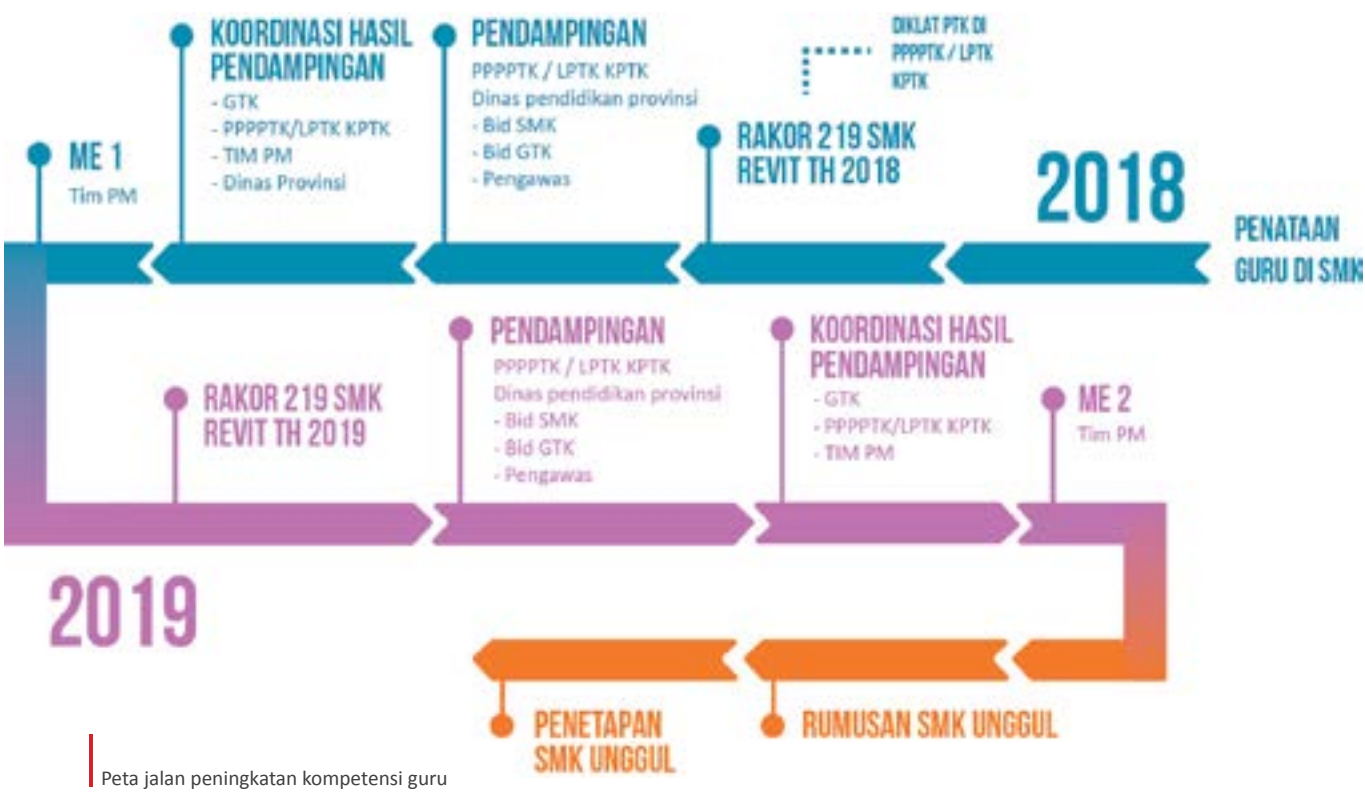
industri (DU/DI) dan perguruan tinggi; standarisasi sarana dan prasarana utama; dan penataan/pengelolaan kelembagaan. Kemendikbud saat ini tengah melakukan revitalisasi terhadap 219 SMK piloting. SMK piloting tersebut terdiri atas enam bidang keahlian, yaitu Agribisnis dan Agroteknologi, Bisnis dan Manajemen, Industri Kreatif, Kemaritiman, Pariwisata, dan Teknologi dan Rekayasa dengan rekapitulasi sasaran sekolah tergambar pada tabel di bawah ini.

No	Bidang Keahlian	Sekolah	Kabupaten	Provinsi
1	Agribisnis dan Agroteknologi	33	33	16
2	Bisnis dan Manajemen	28	26	17
3	Industri Kreatif	31	23	14
4	Kemaritima	24	23	14
5	Pariwisata	45	44	30
6	Teknologi Rekayasa	57	50	23

Jumlah SMK piloting Revitalisasi tahun 2018

Sehubungan dengan poin ketiga dalam revitalisasi SMK, yaitu pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, Kemendikbud melakukan pembinaan bagi guru produktif di 219 SMK piloting revitalisasi. Pembinaan yang diberikan mencakup kesiapan guru menghadapi abad ke-21. Sasaran prioritas pembinaan kompetensi guru Tahun 2018 adalah guru produktif pada 219 SMK piloting. Perincian guru produktif yang menjadi sasaran penerima pembekalan adalah mereka yang sudah mengikuti Program Keahlian Ganda Tahap I dan II. Pada tahap pertama, dari 219 sekolah piloting terdapat 179 sekolah yang

mengikutsertakan gurunya untuk mengikuti Program Keahlian Ganda Tahap I dengan jumlah guru sebanyak 1.172. Pada Keahlian Ganda Tahap II terdapat 71 sekolah yang mengikutsertakan gurunya untuk mengikuti Program Keahlian Ganda Tahap II serta terdapat 202 guru yang mengikuti Program Keahlian Ganda Tahap I. Dalam melaksanakan program revitalisasi tersebut, SMK piloting akan didampingi oleh PPPPTK/LPPPTK KPTK terkait sesuai dengan program keahlian yang diunggulkan. Peta jalan peningkatan kompetensi guru di 219 SMK piloting revitalisasi sebagai berikut.



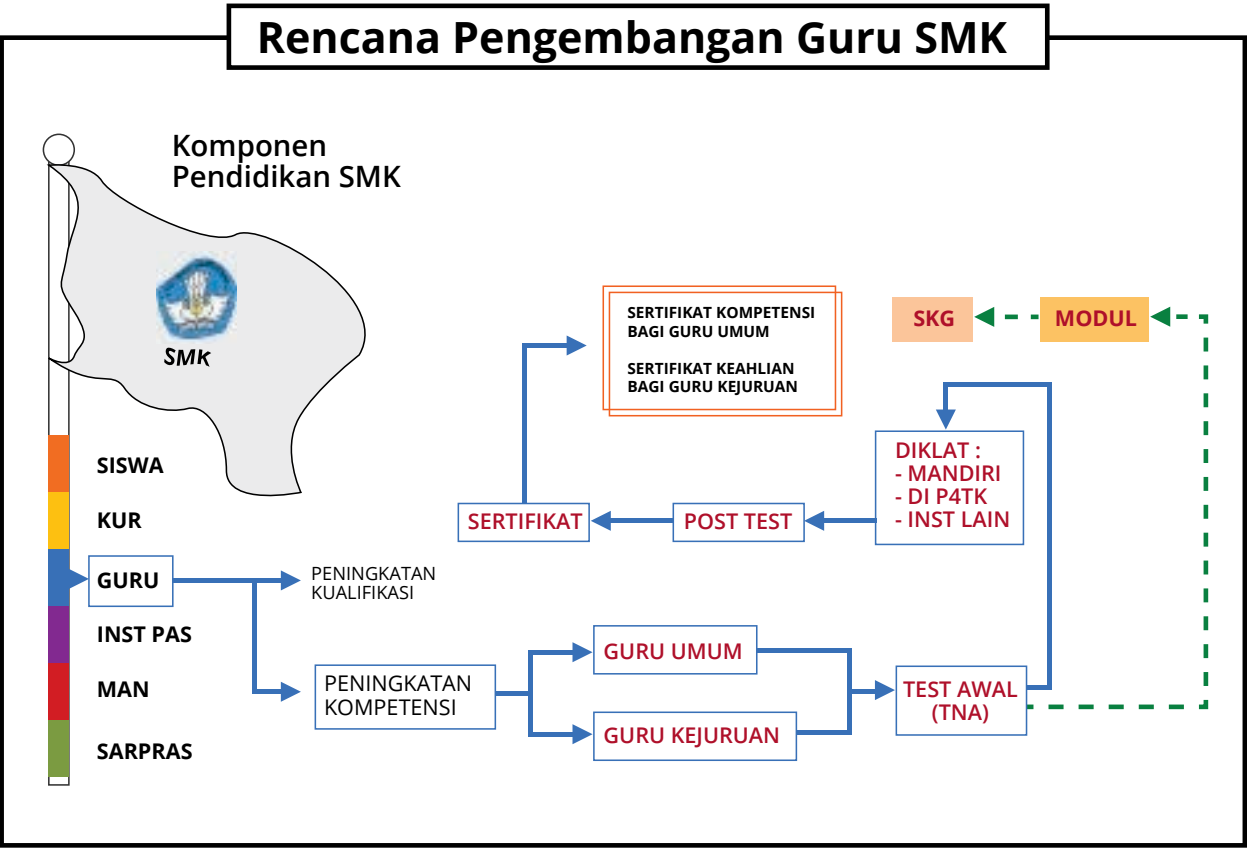
Penyiapan lulusan SMK yang terampil tidak terlepas dari penyediaan guru yang berkualitas ditinjau dari aspek penguasaan materi bidang studi, keterampilan mengajar, kewirausahaan, dan keterampilan dalam bidang kejuruan yang diampunya. Hal inilah yang menjadi perhatian serius dari Kemendikbud untuk segera ditangani.

*“Salah satu poin program revitalisasi SMK adalah memperkuat kemampuan manajerial kepala SMK dan keterampilan guru-gurunya, baik secara pedagogis maupun substansi materi pelajaran keterampilan.”*

(Pernyataan Mendikbud ketika mengunjungi lembaga pelatihan instruktur SMK di Jerman tanggal 2 September 2018)

Berkenaan yang hal tersebut, setelah mengikuti pembekalan, guru SMK akan memperoleh skill passport. Salah satu kebijakan dan program Kemendikbud adalah setiap guru produktif di SMK wajib memiliki sertifikat kompetensi keahlian dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Level IV. Proses sertifikasi dilakukan di tujuh LSP P2 yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP. Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ini, guru secara bertahap mengikuti beberapa kali uji kompetensi keahlian (UKK) sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi yang telah ditetapkan dan disetujui BNSP.





Unit kompetensi yang telah dikuasai guru dapat diketahui melalui skill passport yang dimiliki guru. Skill passport ini berisi unit-unit kompetensi yang harus dikuasai oleh guru pada SKKNI Level IV. Guru pemegang skill passport akan mengetahui hasil rekaman unit kompetensi yang telah dikuasainya dan melengkapinya sampai guru tersebut memperoleh sertifikat kompetensi. Untuk mendukung uji kompetensi tersebut, 111 skema KKNi Level IV telah terpetakan kebutuhannya. Hingga saat ini 56 Skema Sertifikasi KKNi Level IV telah disusun oleh LSP P2 GTK,

telah disahkan oleh BNSP, dan telah digunakan untuk sertifikasi kompetensi keahlian bagi peserta Program Keahlian Ganda Tahun 2017 dan 2018. Selain itu, 25 skema Sertifikasi KKNi Level IV telah diselesaikan, 25 dalam proses penyelesaian, dan masih ada 5 skema Sertifikasi KKNi Level IV yang belum dibuat. Melalui berbagai upaya yang dilakukan tersebut diharapkan agar guru dapat membentuk dan menjadikan lulusan SMK memiliki kompetensi kerja sebagaimana dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri. ■



## PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA DI BANYUWANGI

*Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) sudah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka kini telah bekerja di sejumlah industri pariwisata, mulai dari perhotelan hingga tempat wisata.*

Angka pengangguran di Kabupaten Banyuwangi masih tergolong tinggi. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah pengangguran di Banyuwangi pada Tahun 2014 mencapai 7,71 persen atau sebanyak 60.335 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia kerja mencapai 1.216.443 jiwa. Jumlah ini meningkat dari Tahun sebelumnya, yakni 1.187.185 jiwa.

Rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja karena masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi. Mereka rata-rata tidak memiliki keterampilan dan kompetensi yang memadai untuk bekerja di sektor pariwisata. Untuk bisa memasuki industri pariwisata, seperti perhotelan dibutuhkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten. Akibatnya banyak tenaga kerja yang diambil dari luar Banyuwangi, seperti Surabaya, Malang, dan kabupaten

lainnya di Jawa Timur.

Untuk itulah, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Ditbinsuslat), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK). Di Kabupaten Banyuwangi, program ini dilaksanakan oleh Lembaga Kursus dan Pendidikan (LKP) Desy Education. Lembaga ini mendapatkan bantuan PKKU (Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan) sejak Tahun 2016 hingga 2018. Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Desy Education, Handoyo menilai program PKK ini tidak hanya memberikan kesempatan masyarakat Banyuwangi untuk memiliki berbagai keahlian, tetapi juga dapat membantu salah satu program pemerintah dalam menuntaskan penganggur dan kemiskinan. “Output program ini untuk bekerja”, tandasnya.

Melalui program ini, Handoyo ingin mengentaskan





masyarakat Banyuwangi dari pengangguran dan kemiskinan. Ia mendidik masyarakat agar bisa memiliki keterampilan bidang perhotelan dan pariwisata. “Kita akan membekali mereka dengan keterampilan dan menyalurkannya ke dunia kerja,” tutur Handoyo.

LKP Desy Education terpilih sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan program PKKU di Kabupaten Banyuwangi untuk bidang perhotelan. Dipilihnya bidang itu karena kebutuhan tenaga kerja bidang perhotelan sangat terbuka. Banyaknya hotel yang berdiri di Banyuwangi membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Kebutuhan tenaga kerja di hotel ada setiap saat. “Saya bersyukur, Ditbinsuslat memercayakan LKP Desy Education untuk menyelenggarakan program PKKU,” ujar Handoyo.

Penjaringan terhadap calon peserta didik program PKKU yang dilaksanakan oleh LKP Desy Education mendapat sambutan hangat dari masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Puluhan masyarakat yang memenuhi kriteria ikut mendaftar agar bisa ikut pelatihan di LKP ini. Ada sekitar 40 orang yang mendaftar. Latar belakang pendidikan mereka kebanyakan lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan ada juga yang hanya tamatan sekolah menengah pertama (SMP). “Mereka mengaku tertarik untuk bekerja di hotel,” kata Handoyo.

Untuk menjaring calon peserta didik, Handoyo

mendatangi satu per satu calon peserta didik di rumahnya. Di sana ia melihat langsung latar belakang ekonomi dan keluarganya. Selain itu, ia juga menjelaskan jika program dari Ditbinsuslat ini tidak dipungut biaya. “Saya ingin melibatkan partisipasi para orang tua peserta didik dalam program tersebut,” katanya.

Guna memublikasikan program ini, Handoyo menjalin kerja sama dengan sejumlah media lokal seperti Radar Banyuwangi. “Kita juga memberikan kesempatan bagi keluarga media yang kurang mampu untuk mengikuti pelatihan ini,”ujarnya.

Calon peserta didik yang berhasil dijaring sebanyak 30 orang, sedangkan kuota yang diberikan dari Ditbinsuslat hanya 15 orang. Agar seluruh peserta didik itu bisa mengikuti pelatihan, Handoyo menyiasatinya dengan cara sebanyak 15 orang peserta didik dibiayai dengan cara swadaya oleh LKP Desy Education, sedangkan yang 15 orang lainnya dibiayai Ditbinsuslat. “Kami berusaha memaksimalkan dana dari program ini untuk peserta,” katanya.

Peserta didik yang mengikuti pelatihan di LKP Desy Education kebanyakan dari perdesaan, seperti dari daerah Songgoh, Gelagah, Rogojampi, dan Wongsorejo. Di wilayah tersebut, terdapat banyak objek wisata lokal. Ia mencontohkan, di daerah Songgoh yang dulunya hutan biasa, kini dikemas menjadi wisata hutan pinus. Di sana ada rumah pohon dan berbagai sarana wisata lain. Di sana juga belum tersedia guesthouse

atau homestay. “Dengan begitu, peserta didik bisa mendapatkan pekerjaan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya”, jelasnya.

Handoyo menjelaskan, pelaksanaan PKK di lembaganya melibatkan sembilan instruktur. Mereka berasal dari praktisi, dunia usaha dan dunia industri (Dudi), dan Perhimpunan Hotel serta Restoran Indonesia (PHRI). Selain itu, ada juga dari akademisi dan tim pengajar di LKP Desy Education. Pelatihan diselenggarakan selama 350 jam yang ditempuh peserta didik selama tiga bulan di LKP Desy Education. Komposisi pembelajarannya, 30 persen teori dan 70 persen praktik. Untuk pembelajaran praktik seperti housekeeping dan front office, pihaknya bekerja sama dengan Hotel Santika Banyuwangi.

Tidak hanya materi keterampilan yang diajarkan, tetapi juga perilaku atau etika dalam bekerja yang menjadi salah satu materi pendidikan karakter, seperti menanamkan sikap kedisiplinan, tanggung jawab pada pekerjaan, dan saling percaya kepada teman. Bila ada peserta yang tidak masuk, ia tak segan-segan memberikan sanksi. Sebelumnya, calon peserta didik menandatangani surat kesanggupan untuk mengikuti pelatihan hingga selesai. “Ini kami lakukan agar peserta didik bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan nantinya,” katanya.

Pada akhir pelatihan, LKP Desy Education melakukan uji kompetensi kepada peserta didiknya. Hasilnya, seluruh peserta didik program PKKU lulus uji kompetensi. Menariknya, uji kompetensi yang dilakukan LKP Desy Education diselenggarakan dua kali, yakni uji kompetensi ahasa Inggris dan perhotelan. Alasannya, kenyataan di lapangan masih banyak karyawan perhotelan yang memiliki kelemahan dalam bahasa Inggris. “Kami melakukan uji kompetensi bahasa Inggris agar peserta didik bisa ditempatkan di posisi apa pun,” katanya.

Selain itu, peserta didik juga wajib mengikuti program pemagangan di hotel. Selepas magang tiga bulan, peserta didik mengikuti proses perekrutan. Mereka akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan hotel tersebut. “Karena itu, kami membekali peserta didik semua kompetensi di bidang perhotelan. Mereka sudah siap ditempatkan di mana saja”, katanya.

Tidak cuma terampil, peserta didik program PKKU ini menurut Handoyo juga memiliki keunggulan dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Selama

mengikuti pelatihan, peserta didik diwajibkan untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris menjadi prioritas di LKP Desy Education. “Melatih kemampuan berbahasa Inggris lebih sulit daripada melatih skill perhotelan.” ujarnya.

Menurut Handoyo, kebanyakan peserta didik yang diterima di dunia kerja karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang mumpuni dan bukan semata kemampuan di bidang perhotelannya. “Lulusan LKP Desy Education mudah diterima bekerja karena memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya bagus, pasti komunikasi juga lancar,” terang Handoyo.

Selain itu, kata Handoyo, dalam melaksanakan program PKK ini, ia juga memfokuskan pada pembentukan mental peserta didik. Apalagi kebanyakan peserta didik program ini berasal dari kalangan kurang mampu. Mereka juga berasal dari latar belakang keluarga yang beragam. Aspek penampilan juga dibenahi, mulai dari cara berpakaian, berkomunikasi hingga cara bersikap. “Bekerja di hotel itu penampilan harus diutamakan,” katanya.

Diakui Handoyo, melatih peserta program PKK ini membutuhkan penanganan khusus. Tidak hanya pelatihan, tapi yang lebih penting juga mengubah cara berpikir mereka. Kebanyakan anak-anak yang mengikuti program ini berasal dari keluarga kurang mampu dan sering kali tidak percaya diri untuk bekerja di hotel. Bagi mereka, dunia perhotelan adalah hal yang baru. Mereka perlu dikenalkan dengan suasana hotel. “Karena itu, kami kemas mereka, mulai dari penampilan, sikap hingga kepribadiannya. “Yang penting dalam perhotelan itu disiplin dan penampilan,” tuturnya.

Handoyo memastikan bahwa peserta program PKK telah bekerja semua. Kebanyakan bekerja di perhotelan. Bahkan ada sebanyak empat orang peserta program PKKU yang diterima bekerja di salah satu hotel di Malaysia. Ada pula yang bekerja di luar kota, seperti Malang. Peserta program lainnya bekerja di hotel sekitar Banyuwangi. Seperti dua orang yang telah bekerja di Hotel Santika. Ada lima orang bekerja di Kalibaru Cottage. Mereka rata-rata kontrak kerja selama tiga hingga lima Tahun,” katanya.

Meski sudah bekerja, LKP Desy Education tidak lepas tangan begitu saja. Handoyo kerap menyambangi hotel tempat mereka bekerja. Di sana ia memantau perkembangan alumnusnya, apakah kompetensi yang





dimiliki lulusannya sudah sesuai dan selaras dengan kebutuhan dunia kerja atau belum, khususnya perhotelan. “Kita tetap bertanggung jawab kepada anak-anak. Paling tidak kerjanya nyaman dan mendapat tempat tinggal,” katanya.

Penghasilan yang diterima, menurut Handoyo, sesuai dengan upah minimum regional (UMR), yakni sebesar Rp1.800.000,00 per bulan. Penghasilan mereka akan meningkat sesuai dengan posisi dan lamanya bekerja. Bagi yang telah bekerja lebih dari dua Tahun, penghasilan bisa mencapai Rp3.000.000,00 “Rata-rata,

mereka menempati posisi housekeeping dan ada juga yang front office,” ujarnya.

Menurut Handoyo, program PKK yang dilaksanakan di lembaganya telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Banyuwangi. Tidak sedikit dari keluarga yang kurang mampu, kini sudah mentas. Mereka memiliki penghasilan yang bisa membantu ekonomi keluarga. “Kami berharap program ini terus dikembangkan dan bisa menyentuh masyarakat di daerah lain yang membutuhkan,” ujar Handoyo tersenyum. ■

## PEMBENTUKAN GURU PROFESIONAL MELALUI SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan upaya peningkatan mutu guru sesuai dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Sejak 2018 sertifikasi guru tidak lagi menggunakan model Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang telah dilaksanakan selama 11 Tahun. PLPG sudah diselenggarakan sejak 2007 sampai dengan 2017 dan guru yang mendapat sertifikat pendidik sudah mencapai sudah lebih dari 1,6 juta. Sementara itu, guru yang belum memiliki sertifikat pendidik berjumlah 837.535 orang.

Tahun 2018 sertifikasi bagi guru dalam jabatan menggunakan model Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 66 yang berbunyi

*“Bagi Guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir Tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik S-I/D-IV, tetapi belum memperoleh sertifikat pendidik dapat memperoleh sertifikat pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru”.*

Dengan demikian, sebanyak 837.535 guru yang belum memiliki sertifikat pendidik wajib mengikuti PPG dalam Jabatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik tersebut.

Penyelenggaraan PPG dalam Jabatan Tahun ini dilaksanakan di 38 perguruan tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, penandatanganan Nota Kesepahaman Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan ini

dilaksanakan pada 28 Mei 2018 antara Setjen Kemdikbud dan para rektor/wakil rektor dan koordinator PPG dari 38 perguruan tinggi. Pada kesempatan tersebut Setjen Kemendikbud, Didik Suhardi, berharap agar PPG yang dimulai pada 31 Mei 2018 membawa perubahan dalam cara mengajar guru.

*“Harapan kami hanya ingin begitu guru-guru keluar dari PPG, cara mengajarnya sudah berubah, cara memberi evaluasi berubah, juga yang lebih penting anak-anak yang diajarpun.”*  
*Ungkap Direktur Pembelajaran Kemenristek Dikti, Paristianti Nurwandani.*

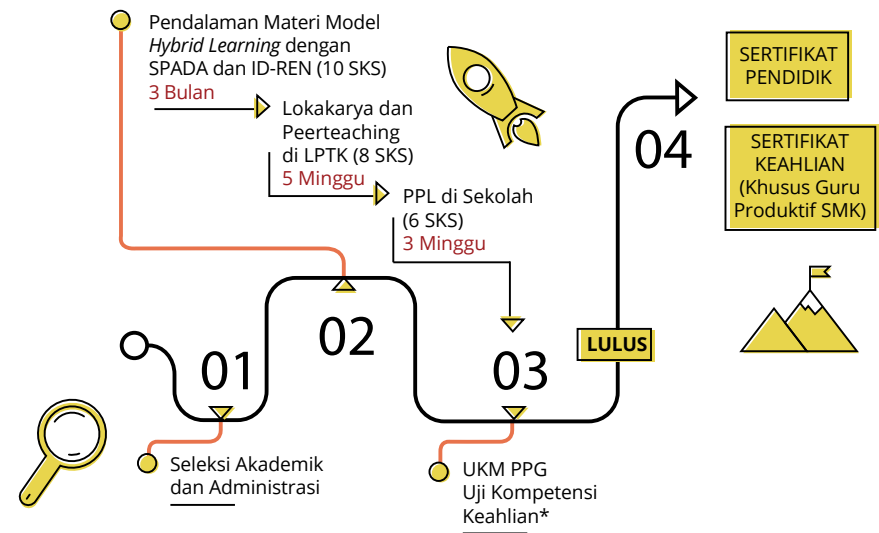
Direktur Pembelajaran Kemenristek Dikti, Paristianti Nurwandani, mengatakan,

*“Harapan kami, guru Indonesia betul-betul profesional dan tidak kalah dari profesi dokter. Jadi nanti PPG akan sama prestisiusnya dengan pendidikan dokter,”*

Pelaksanaan PPG dalam Jabatan dengan beban 24 SKS ditempuh selama 1 semester dengan menggunakan model pembelajaran hybrid learning, yaitu melalui daring selama 3 bulan dan dilanjutkan dengan workshop tatap muka selama 5 minggu, dan terakhir mengikuti program pengalaman lapangan (PPL) selama 3 minggu.



ALUR PPG DALAM JABATAN



Dengan model pembelajaran tersebut guru hanya dua bulan meninggalkan sekolah. Selama proses pembelajaran daring, guru akan difasilitasi oleh dosen sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih. Pada akhir PPG dalam Jabatan guru akan mengikuti ujian akhir PPG yang disebut uji kompetensi mahasiswa PPG (UKM PPG). Ujian tersebut dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan oleh Menristek Dikti. Bagi peserta PPG yang berasal dari daerah 3T, tahapan daring tersebut diganti dengan Program Pelatihan Guru Daerah Khusus (PGDK).

Pelaksanaan PPG dalam Jabatan dapat dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Biaya pelaksanaan PPG dalam Jabatan mencakup biaya pendidikan sebesar Rp. 7.500.000,00 per orang dan biaya pribadi sesuai dengan keperluan yang meliputi biaya transportasi, penginapan, konsumsi, dan keperluan pribadi lainnya.

Pada Tahun 2018, pemerintah melalui Ditjen GTK mengalokasikan anggaran untuk dua puluh ribu guru untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Alokasi tersebut hanya untuk biaya pendidikan sebesar Rp. 7.500.000 per orang. Selain itu, terdapat beberapa pemerintah daerah yang membantu biaya pendidikan tersebut, yaitu Provinsi Jawa Barat membiayai 650 orang, Kabupaten Cimahi 53 orang, Kabupaten Merauke 40 orang,

Kabupaten Seluma 100 orang sehingga tambahan peserta yang dibiayai oleh pemda berjumlah 843 orang.

PPG dalam Jabatan 2018 akan diselenggarakan dalam tiga tahap seperti tertera pada tabel di bawah ini.

PPG 2018	Mulai Pelaksanaan	Peserta
Tahap 1	31 Mei 2018	6.675 Guru
Tahap 2	2 Juli 2018	10.687 Guru
Tahap 3	1 September	3.538 Guru

Tabel Waktu dan Peserta PPG 2018

Program PPG dalam Jabatan dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip menjaga mutu sejak seleksi, proses pembelajaran dan penilaian, hingga uji kompetensi. Dengan demikian, program ini diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter, serta cinta tanah air.

Pada Selasa, 28 Agustus 2018 Undiksha sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara PPG sudah mulai aktif melaksanakan lokakarya untuk setiap program studi.

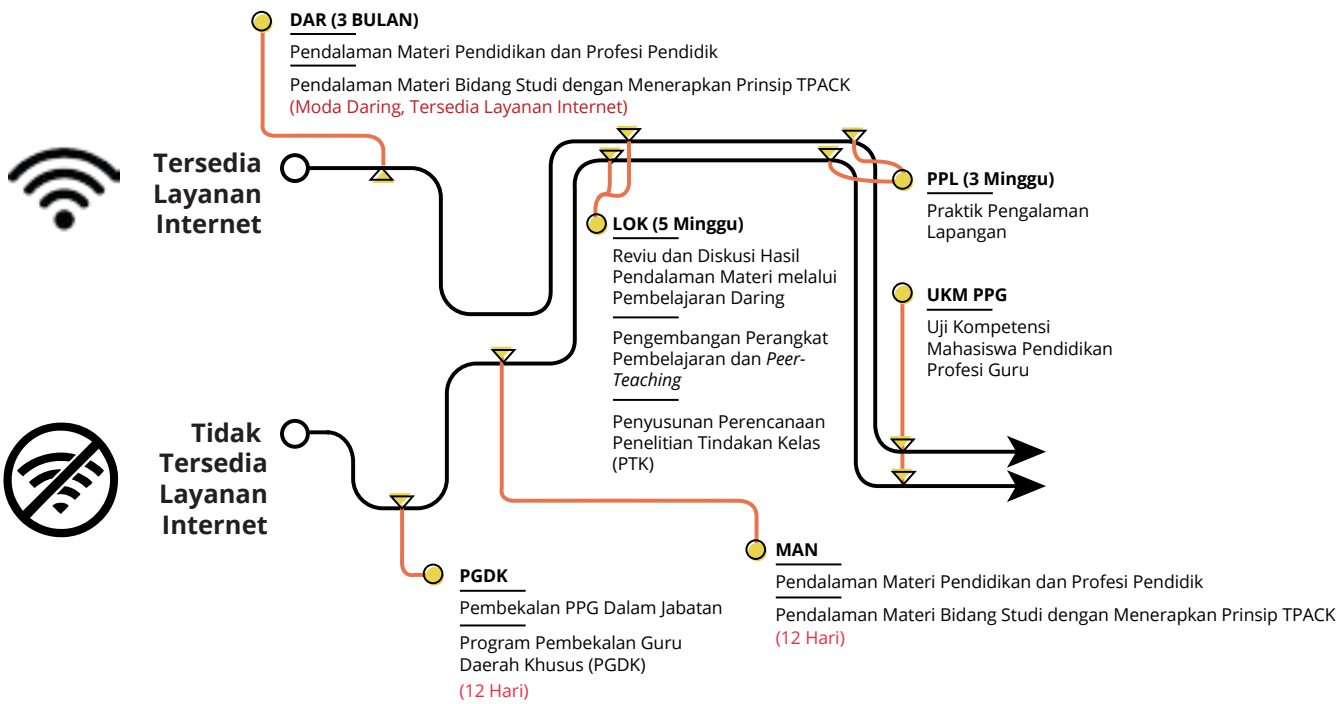
Pelatihan Guru Daerah Khusus

Pola pelaksanaan sertifikasi dalam jabatan melalui PPG ini juga harus dijalani oleh guru yang bertugas di daerah khusus (gurdasus). Berbeda dengan guru reguler, pada umumnya guru daerah khusus memiliki kendala yang disebabkan kondisi, tantangan, dan hambatan lingkungan. Agar lebih siap mengikuti program PPG, gurdasus perlu mengikuti kegiatan prakondisi atau pembekalan dalam bentuk pelatihan. Tujuannya adalah agar gurdasus berhasil dalam menyelesaikan

program PPG. Kegiatan ini selanjutnya disebut Program Pelatihan Guru Daerah Khusus (Program PGDK). Dengan adanya Program PGDK diharapkan gurdasus memiliki kesiapan dan kemampuan untuk mengikuti program PPG.

Pelatihan tersebut menjadi bagian dari Pola PPG dalam Jabatan. Tahapan Pendalaman Materi Pendidikan dan Profesi Pendidik selama 3 bulan diganti menjadi pelatihan selama 24 hari bagi guru daerah khusus tersebut.

POLA PPG DALAM JABATAN



Program PGDK dilaksanakan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) atau Lembaga lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Pelatihan Program PGDK diselenggarakan mulai tanggal 1 s.d. 8 September 2018.





Pembukaan Kegiatan Pelatihan Guru Daerah Khusus di P4TK Medan

Sistem pembelajaran yang digunakan dalam Program PGDK menggunakan prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran dilakukan dengan melibatkan sejumlah unsur, yaitu materi, strategi, media pembelajaran, sarana dan prasarana, serta unsur pendukung lainnya. Sebagai tahapan strategis pencapaian kompetensi, kegiatan pembelajaran didesain dan dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga memperoleh hasil maksimal. Berdasarkan pola pembelajaran yang digunakan, kegiatan pembelajaran terdiri atas kegiatan tatap muka (pendalaman teori dan praktik), kegiatan tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Kegiatan tatap muka dilakukan

dengan strategi yang bervariasi, baik ekspositori, discovery, maupun inkuiri. Metode yang digunakan, seperti ceramah interaktif, presentasi, diskusi kelas, diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, demonstrasi, eksperimen, eksplorasi dan kajian pustaka atau internet, tanya jawab, dan/atau simulasi.

Sebagai rangkaian kegiatan prakondisi dalam menghadapi pendidikan profesi guru, gurdasus yang mengikuti Pelatihan Guru Daerah Khusus (PGDK) diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan profesi guru.

Untuk mengantisipasi hambatan pembelajaran di daerah khusus saat guru daerah khusus mengikuti PPG selama 3 bulan,

Ditjen GTK membantu mencari guru pengganti lewat Program Pengajar Pengganti (Jarti). Untuk tetap memperhatikan quality assurance dari guru pengganti, Program Pengajar Pengganti mensyaratkan kualifikasi pendidikan sarjana sejak proses rekrutmen.. Setelah memenuhi persyaratan administrasi tersebut, mereka yang dinyatakan lulus sebagai guru pengganti selanjutnya diberikan pelatihan atau pembekalan untuk menjadi guru profesional. ■



Peringatan Hari Guru Nasional 2018

## PROGRAM PELINDUNGAN GURU DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2018

Saat ini perlindungan bagi profesi pendidik dan tenaga kependidikan diperlukan karena banyaknya kasus terhadap guru dan tenaga kependidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengamanatkan bahwa pelindungan merupakan upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait dengan pelaksanaan tugas. Pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pelindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau hak atas kekayaan intelektual.

Peraturan terkait dengan

perlindungan ini mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), yaitu penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pelindungan guru.

### A. Perlindungan Hukum

Pelaksanaan terhadap pelindungan guru telah dilaksanakan oleh Ditjen GTK, di antaranya, berupa kegiatan sebagai berikut.

#### 1. Trauma Healing

Ditjen GTK memberikan kegiatan trauma healing kepada guru yang mengalami kekerasan pada bulan April 2018 di sekolah dasar di Kabupaten Timika. Mereka

mengalami kekerasan yang berdampak, baik secara psikis maupun kesehatan. Trauma healing bertujuan untuk (1) meredakan gejala traumatis yang dialami guru sebagai korban kekerasan; (2) meningkatkan kemampuan guru yang menjadi korban kekerasan untuk menerima dan mengolah pengalaman traumatis yang diterimanya menjadi suatu pelajaran; (3) mempersiapkan guru yang menjadi korban kekerasan untuk dapat berfungsi kembali secara normal di lingkungan masyarakat/satuan pendidikan. Kegiatan trauma healing yang dilaksanakan bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan dokter spesialis kandungan dalam



penanganan medis.

**2. Pendampingan Guru di Sampang Madura, Jawa Timur**

Pendampingan terhadap seorang guru yang meninggal dunia setelah terjadi penganiayaan oleh muridnya. Guru yang dianiyaya adalah Bapak Ahmad Budi Cahyono, Guru GTT (honorar) mata pelajaran Seni Rupa di SMAN 1 Torjun, Ds. Jrengik, Kec. Jrengik, Kabupaten Sampang. Kemendikbud langsung bertindak saat menerima kabar bahwa Guru Budi dirujuk ke rumah sakit dan pada malam harinya Guru Budi meninggal dunia. Bersama Kapolres Sampang dan Kodim, Kemendikbud memberikan pengarahan di sekolah Guru Budi agar situasi belajar mengajar tetap kondusif. Setelah itu, bersama perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kemendikbud datang ke rumah duka untuk memberikan uang duka yang diserahkan oleh Bapak Kasubdit Kesharlindung Dr. Kadarisman, M.Pd. kepada pihak keluarga yang diwakili oleh ayahanda Guru Budi.

**3. Pendampingan Guru di Kisaran, Sumatra Utara**

Pendampingan guru ini dilakukan atas kasus penganiayaan yang dilakukan oknum perwira polisi AKP E.P. terhadap guru Agama Islam SMA Swasta Diponegoro Kisaran Zailani, M.Pd.I. Kemendikbud melalui Kasubdit Kesharlindung Dikmen, Dr. Kadarisman, melakukan mediasi untuk meminta klarifikasi kepada guru dan wali murid atas kasus penganiayaan yang terjadi di SMA Yayasan Diponegoro, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara (Sumut). Mediasi

itu dilakukan di ruang rapat kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Medan, Jumat 27 Juli 2018.

Mediasi lanjutan akan dilakukan oleh Disdik Provinsi Sumut yang juga memantau kasus ini sehingga diperoleh putusan yang tidak merugikan para pihak yang berkasus.

**B. Bimbingan Teknis**

Untuk mendukung pelaksanaan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 182009/B.B1/GT/2018 Tanggal 8 Agustus 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Berupa Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Melalui Perdirjen ini diharapkan perlindungan terhadap guru dapat dilaksanakan oleh semua pihak. Berdasarkan surat keputusan tersebut Ditjen GTK juga melakukan kegiatan berupa sosialisasi untuk guru-guru tentang perlindungan guru. Kegiatan yang dilakukan berupa workshop dengan materi seperti perlindungan profesi, hukum, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan kode etik. Berikut adalah beberapa bimbingan teknis (bimtek) yang sudah dijalankan.

Bimbingan Teknis Pelindungan Hukum dilakukan dengan tujuan untuk menyosialisasikan Permen- dikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Melalui bimtek tersebut guru diharapkan

dapat membedakan wilayah pelanggaran dan pendidikan. Hasil yang diharapkan dari bimtek itu adalah guru dapat mengetahui ranah pelindungan bagi profesi guru dan tenaga kependidikan sehingga guru dapat menjalankan tugas profesinya dengan aman dan nyaman serta dapat mendiseminasikan pengetahuannya kepada guru-guru yang lain.

Bimbingan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertujuan untuk memberikan pemahaman dan implementasi dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja, pelindungan jaminan sosial kesehatan, dan keselamatan kerja; sanitasi dan pengelolaan limbah di laboratorium sekolah; dan potensi bahaya faktor biologi, kimia, dan fisika. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah guru dapat mengetahui keselamatan dan kesehatan kerja serta implementasinya dalam pembelajaran.

Bimbingan Teknis Hak dan Kekayaan Intelektual bertujuan untuk menginformasikan kepada guru mengenai perlingkungannya dalam hak dan kekayaan intelektual. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah guru dapat mengajukan HAKI bagi karya-karyanya serta dapat mendiseminasikan kepada guru dan tenaga kependidikan lain. ■





# PERTUKARAN KEPALA SEKOLAH DAN KEMITRAAN GURU SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KESENJANGAN KUALITAS PENDIDIKAN ANTAR DAERAH

Melalui program Kemitraan Guru dan Kepala Sekolah dikembangkan komunitas belajar dengan tujuan mewujudkan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran dan memecahkan masalah yang dihadapi.

Penjabaran Nawacita di atas dapat kita lihat secara lebih operasional dalam Sasaran Strategis Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019, khususnya pada aspek penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. Sasaran strategis dijabarkan dalam Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Kemdikbud 2015–2019, yaitumemperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan melalui pemantapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pada jenjang pendidikan dasar dan penerapan SPM pada jenjang pendidikan menengah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antarsatuan pendidikan dan antar daerah

Sasaran strategis inilah yang telah mengarahkan pembangunan pendidikan di daerah khusus dalam berbagai program, yang intinya mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antarsatuan pendidikan di berbagai daerah, khususnya antara daerah khusus dan daerah reguler. Program Pertukaran Kepala Sekolah dan Program Kemitraan Guru menjadi salah satu solusi untuk memperkecil kesenjangan antardaerah tersebut.

### Program Pertukaran Kepala Sekolah

Program Pertukaran Kepala Sekolah adalah program penguatan kompetensi dan kinerja kepala sekolah imbas secara terpadu melalui proses belajar dari

pengalaman kepala sekolah lain (mitra) yang sudah terbiasa melakukan budaya mutu menuju kesetaraan kemampuan kepala sekolah dan kualitas sekolah. Kepala sekolah (KS) imbas adalah kepala sekolah yang ditugasi memimpin sekolah di daerah khusus. Kepala sekolah mitra adalah kepala sekolah yang ditugasi memimpin sekolah yang memiliki keunggulan akademik dilihat dari Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN), Ujian Nasional (UN), akreditasi sekolah, pelaksana kurikulum 2013, dan penguatan pendidikan karakter. Kepala sekolah mitra berperan mendampingi kepala sekolah imbas dalam rangka peningkatan mutu sekolah imbas melalui proses berbagi pengalaman dan pemecahan masalah secara bersama. Kepala sekolah imbas belajar dari kepala sekolah mitra dan warga sekolah mitra melalui interaksi di workshop, selama proses on the job learning (OJL) dan pada saat pendampingan langsung (tatap muka) dan jarak jauh.

Tujuan pelaksanaan program Pertukaran Kepala Sekolah Tahun 2018 adalah (1) meningkatkan kompetensi dan kinerja KS imbas (KS pada sekolah yang belum maju) secara terpadu; (2) menularkan praktik baik (seperti disiplin, kerja keras, dll.) dari KS mitra kepada KS imbas; (3) membangun kerja sama antara KS mitra dan KS imbas dalam meningkatkan mutu sekolah; (4) mengurangi disparitas mutu pendidikan (jangka panjang) antara daerah reguler/maju dan daerah khusus.

Substansi program Pertukaran KS meliputi penguatan tiga bidang tugas pokok kepala sekolah, yaitu manajerial, supervisi guru dan tenaga kependidikan, dan pengembangan kewirausahaan melalui (1) belajar dari komunitas sekolah mitra, (2) mencoba hal baru dalam mengelola sekolah dengan didampingi KS mitra, dan (3) memecahkan masalah secara bersama antara KS imbas dan mitra. Hasil

dan dampak yang ditargetkan dari program pertukaran adalah (1) penguatan kapasitas diri KS (sikap, pengetahuan, dan keterampilan), (2) kapasitas sekolah imbas dilihat dari kondisi manajerial, supervisi, dan pengembangan kewirausahaan, dan (3) prestasi akademik dan non-akademik. Substansi program ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut:



Tahun 2018 sasaran program Pertukaran Kepala Sekolah melibatkan kepala sekolah mitra sebanyak 160 orang dari provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Kepulauan Riau; kepala sekolah

imbas sebanyak 320 orang; dan pengawas imbas sebanyak 48 orang. Secara terperinci, sasaran program Pertukaran Kepala Sekolah adalah sebagai berikut.

Satuan Pendidikan	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	TOTAL
KS Mitra	70	30	25	25	10	160
KS Imbas	140	60	50	50	25	320
Pengawas Imbas	21	8	7	7	5	48





Program Kemitraan Guru

Kemitraan (partnership) guru mengandung makna kesejajaran. Artinya, Guru Mitra 1 bekerja sama/bermitra dengan Guru Mitra 2 sehingga kelemahan di satu guru dapat dipecahkan melalui berbagi pengalaman. Kemitraan juga mengandung arti suatu proses penciptaan suasana (iklim) kerja sama antaruru yang bermitra. Kemitraan dapat diartikan juga sebagai wahana membangun jejaring pengembangan profesi pendidik agar menjadi organisasi pembelajar dan masyarakat belajar yang kondusif.

Program kerja sama kemitraan ini dimaksudkan untuk memotivasi, berbagi pengalaman, mengimbaskan, dan membangun keunggulan bersama di antara guru-guru SMP. Melalui program kemitraan ini diharapkan guru-guru SMP yang sudah kompeten dan terbiasa melakukan pembelajaran abad ke-21 (Guru Mitra 1) dan guru SMP yang belum kompeten atau

belum terbiasa memberikan pelayanan pembelajaran profesional (Guru Mitra 2) dapat saling bertukar pengalaman melakukan pelayanan pembelajaran terbaik. Muara akhirnya adalah peningkatan kualitas hasil belajar, terutama perbaikan masalah-masalah pembelajaran bagi guru-guru SMP.

Program Kemitraan Guru ini, antara lain, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kemampuan profesional dan pedagogik di antara guru imbas dan guru mitra; mengembangkan dan memberdayakan guru yang sudah kompeten untuk membantu guru yang belum kompeten dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik dan memecahkan masalah yang dihadapi; menstimulasi kerja sama antara guru mitra dan guru imbas dalam peningkatan mutu layanan pembelajaran; dan membangun jejaring antara guru imbas dan guru mitra. Pada Tahun 2018 sasaran Program Kemitraan Guru pada jenjang di SMP dan SMA terlihat pada tabel di bawah.

No	Kategori Peserta	Jumlah	
		SMP	SMA
1.	Guru Mitra 1	76 orang dari Yogya Jabar, Jateng, Jatim dan Banten	30 orang dari Yogya, Jabar, Jateng, dan Bali
2.	Guru Mitra 2 (Imbas) dan 3 (Binaan)	152 orang dan 1520 orang dari Aceh, Kalteng, Sulteng, NTB, NTT, Papua, Maluku, Gorontalo Babel dan Kaltara	30 orang dan 960 orang dari Aceh, Lampung, NTB, Papua, Bengkulu Gorontalo, Papua Barta, Sulbar, dan Kaltara
Total		1.748 orang	1.020 orang

Tabel Sasaran Program Kemitraan Guru

Pengembangan kompetensi profesional melalui kolaborasi di antara guru pun terbukti efektif sebagai strategi pengembangan kompetensi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi guru melalui kerja sama kemitraan di antara para guru, khususnya kemitraan antara guru yang memiliki kompetensi tinggi dan guru yang memiliki kompetensi rendah. Melalui kerja sama kemitraan akan tercipta saling tukar pengalaman, saling bagi pengetahuan, serta

saling bagi upaya pemecahan masalah dan praktik baik di antara sesama guru. Pada akhirnya, kerja sama kemitraan guru ini akan bermuara pada peningkatan mutu pendidikan secara merata di wilayah NKRI.

Berikut adalah beberapa testimoni peserta program yang dikutip dari website <http://pgdikmen.kemdikbud.go.id>.





Tara Osi (Guru Imbas), Guru SMKN 1 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara

*“Saya bermitra dengan guru dari SMKN 2 Sewon, Bantul, Yogyakarta. Salah satu hasil yang membanggakan dari program ini adalah kami bisa membangkitkan semangat siswa untuk belajar dan kreatif. Beberapa waktu lalu, ada lomba kreativitas pelajar dan anak didik saya membuat inovasi kopi dari biji salak, namanya Kobisa. Mereka berlomba bersaing dengan (peserta) umum, ada dari universitas dan karang taruna. Ternyata mereka menjadi juara III, dan peminat Kobisa ini cukup banyak.”*



Putriani (Guru Mitra), Guru SMAN 1 Seulimeum, Aceh Besar, Aceh

*“Menjadi guru mitra, intinya adalah jangan sampai kita menggurui. Guru mitra adalah sosok yang benar-benar dibutuhkan guru imbas sehingga kita harus memberikan solusi dengan cara yang tepat. Sampaikan ilmu dengan menyentuh hatinya dengan penuh ikhlas. Menurut saya, keteladanan adalah hal pertama yang harus diberikan kepada guru imbas, bukan semata membekali dengan beragam materi.”*



Budi Ediya Permana (Guru Mitra), Guru SMKN 1 Kota Sukabumi

*“Saya bermitra dengan tiga sekolah, yakni dari SMAN 1 Rungan, SMAN 1 Rungan Raya, dan SMAN 1 Manuhing. Ketiganya berada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Di SMAN 1 Manuhing Raya listriknya menggunakan genset. Saya kira untuk menjadi guru profesional yang bisa meraih nilai UKG bagus, semuanya dimulai dari pembenahan karakter gurunya. Makanya, kita bimbing guru itu menjadi sosok yang disiplin, terutama dari dirinya sendirilah. Itu harus terbiasa dilakukan.*

*Salah satu hasil dari kemitraan ini adalah Pohon Literasi. Karya ini merupakan hasil kolaborasi antara guru imbas di SMA-SMA di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Mereka adalah Mutiawati, S.Pd. dari SMAN 2 Bandar Dua, Asmawati, S.Pd. dari SMAN 1 Bandar Dua, dan Muhammad, S.Pd. dari SMAN 1 Panteraja, sedangkan guru mitra mereka adalah Ernasari, M.Pd. dari SMAN Rancaekek, Bandung, Jawa Barat.” ■*



# PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) BERJENJANG BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (GTK) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

***Penerima UNESCO Hamdan bin Rashid Al Maktoum Prize (2017 - 2018 edition) for Outstanding Practice and Performance in Enhancing the Effectiveness of Teachers***

Berbagai penelitian internasional menyebutkan bahwa guru memegang peranan penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Namun, banyak guru di Indonesia memiliki pengetahuan yang minim tentang cara menstimulasi pembelajaran bagi anak usia dini. Seiring dengan peningkatan kondisi perekonomian Indonesia, dampak pendidikan masih dianggap rendah. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai salah satu program prioritas strategis. Sejalan dengan program prioritas tersebut, sejak Tahun 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mempersiapkan para guru PAUD untuk memenuhi standar pendidik yang dibutuhkan. Modul pelatihan disusun dalam tiga jenjang: dasar, lanjut, dan mahir. Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Berjenjang bagi GTK PAUD diperkenalkan melalui dana bantuan pemerintah bagi organisasi masyarakat, khususnya organisasi pendidik anak usia dini, antara lain, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpadi) dan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI). Program ini mampu membangkitkan animo

yang tinggi dari berbagai komponen masyarakat, khususnya GTK PAUD (TK/KB/TPA/SPS) mulai dari tingkat pedesaan sampai ke tingkat kabupaten/kota dan provinsi serta daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T). Animo masyarakat terhadap Program Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar, Lanjut, dan Mahir) pun meningkat melalui tiga sumber pendanaan, yaitu APBN, APBD, dan swadaya/mandiri.

Program Diklat Berjenjang bagi GTK PAUD telah dinominasikan sebagai salah satu penerima Penghargaan UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum Prize (2017-2018 edition) for *Outstanding Practice and Performance in Enhancing the Effectiveness of Teachers*. Program ini dinilai oleh UNESCO sebagai program yang mampu mempromosikan pengembangan profesionalisme yang berkualitas tinggi dan mudah diakses oleh para guru PAUD, terutama di daerah pedesaan dan daerah 3T. Selain itu, Program ini dinilai mampu menjawab Tujuan 1 Pendidikan untuk Semua (EFA Goal 1): *Expanding and improving comprehensive early childhood care and education, especially for the most vulnerable and*

*disadvantaged children.*

*“The Diklat Berjenjang project from Indonesia is rewarded for bringing quality professional development to early childhood teachers, notably in the poorest and most remote areas. It helps meet Indonesia’s need for teachers skilled in creating stimulating learning environments for young learners. It helps identify potential teacher trainers and provides step-by-step written guides, follow-up assignments and exchanges.”* (<https://en.unesco.org/news/unesco-rewards-outstanding-teacher-initiatives-chile-indonesia-and-uk>)

Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas), Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) merupakan salah satu unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab, antara lain, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru pendidikan anak usia dini (PAUD). Program yang dimulai pada Tahun 2012 ini mendapatkan animo yang luar biasa besar dari masyarakat dengan

jumlah peserta (biaya APBN, APBD dan Mandiri). Sampai dengan Tahun 2017, sejumlah 147.338 orang guru PAUD telah menjalani Diklat Berjenjang ini, khususnya Diklat Tingkat Dasar. Sementara itu, pada Tahun 2018, Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas akan melatih sejumlah 28.440 orang guru PAUD.

Perbaikan dan penyempurnaan materi-materi pendidikan dan pelatihan berjenjang pun terus dilakukan Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas bersamaan dengan peningkatan kualitas pelaksanaan diklat. Salah satu usaha tersebut adalah dengan melakukan kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Imigrasi dalam hal pemanfaatan dana desa untuk pelatihan guru PAUD melalui Pilot Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Generasi Cerdas Desa (GCD) Tahun 2016 sampai dengan 2017. Program tersebut menyentuh para guru yang tinggal di pedesaan dan yang kurang mendapatkan akses untuk mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi bidang PAUD. Program ini diharapkan dapat memperkuat layanan PAUD yang berkualitas di desa, baik dari sisi akses maupun kualitas, seperti yang dicita-citakan negara. Program PAUD GCD dilaksanakan di 25 kabupaten. Program PAUD GCD berhasil menjangkau guru PAUD di desa-desa terpencil dan membantu masyarakat sekitar memiliki program pendidikan anak usia dini yang lebih berkualitas.

Selain berbagai upaya yang telah dilakukan, pelaksanaan

sistem ini masih belum menjawab kebutuhan, khususnya masyarakat di daerah miskin dan daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T). Pemerintah daerah (kabupaten dan kota) belum memiliki kapasitas yang mencukupi untuk mengembangkan sebuah sistem peningkatan profesionalisme GTK secara terkoordinasi, seperti ketersediaan jumlah pelatih yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memenuhi persyaratan. Uji coba yang dilaksanakan pada Tahun 2014 menunjukkan bahwa guru PAUD di pedesaan yang telah mengikuti pelatihan belum mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang berkualitas. Di samping itu, dukungan tindak lanjut untuk meningkatkan kompetensi GTK dalam pembelajaran belum tercukupi.

Untuk merespons kebutuhan di atas, sejak Tahun 2012 pemerintah telah mengembangkan serangkaian modul pelatihan sejalan dengan standar pendidik dan diawali dengan jenjang dasar Diklat Berjenjang. Baru-baru ini, Program Diklat Berjenjang telah memulai inovasi untuk meningkatkan akses para guru di pedesaan terhadap pengembangan profesionalisme dengan menggunakan pendekatan Frontline untuk merespons kebutuhan masyarakat. Materi dan metode yang disusun mendorong para pelatih dan guru untuk mengimplementasikan praktik-praktik yang efektif. Pendekatan inovatif program ini memanfaatkan lembaga dan organisasi lokal yang ada untuk meningkatkan kapasitas dan mengkoordinasikan tugas-tugas mereka

dengan para guru.

**Pembiayaan, Kapasitas Sumber daya Manusia, dan Keterlibatan Para Pemangku Kepentingan**

Pada awal Tahun 2012, Diklat Berjenjang didanai oleh bantuan pemerintah dan kontribusi masyarakat. Program pilot dengan pendekatan Frontline juga didukung oleh Bank Dunia dan pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Ke depannya, pembiayaan pelaksanaan diklat bagi guru PAUD akan didanai melalui Dana Desa. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kabupaten dan pedesaan menjadi prioritas utama dalam program ini. Pemerintah lokal dan organisasi profesi pendidik lain di daerah dilibatkan sebagai pelatih dan lembaga pelaksana pelatihan.

**Monitoring dan Evaluasi**

Sejak awal, pemantauan terhadap pelaksanaan Diklat Berjenjang dilaksanakan oleh kabupaten. Selain itu, pengamatan secara tersistem terhadap metode dan materi diklat yang diterapkan oleh para pelatih juga dilakukan. Desain evaluasi menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk menilai pendekatan inovatif yang digunakan dalam pelaksanaan program. Pengamatan dilakukan terhadap guru pada saat mengajar di kelas sebelum dan setelah guru mengikuti Diklat Berjenjang. Salah satunya dengan menggunakan instrumen Measuring Early Learning Education (MELE). Selain itu, studi terhadap berbagai kasus terkait dengan program ini dilakukan untuk menghasilkan berbagai



tanggapan terhadap proses dan tantangan yang dihadapi selama program dilaksanakan dan juga menghasilkan rekomendasi bagi penguatan dan perbaikan kualitas program.

Dampak dan pencapaian yang telah dihasilkan melalui Program Diklat Berjenjang adalah sebagai berikut.

1. Akses peningkatan profesionalisme di daerah miskin dan 3T semakin tinggi;
2. Para guru PAUD di pedesaan lebih banyak menggunakan praktik-praktik efektif setelah mengikuti diklat;
3. Pelatih dan pendamping menggunakan sumber daya dan metode baru untuk melakukan pendekatan secara lokal dan berbasis penelitian;
4. Lembaga PAUD lokal meningkatkan kapasitasnya untuk mendukung pengembangan profesionalisme guru;
5. Pemerintah daerah (kabupaten/kota) meningkatkan kapasitas mereka untuk menjadi komponen terdepan dalam pengembangan profesionalisme berkelanjutan melalui sistem yang sudah ada; dan
6. Tuntutan terhadap akses pengembangan profesionalisme berkelanjutan dari desa ke tingkat nasional meningkat.

Pak Affendi, M.Pd. merupakan pelatih Diklat Berjenjang Tingkat Dasar yang berasal dari Kabupaten Ketapang. Tantangan yang dihadapi Pak Affendi sebagai pelatih, yaitu adanya kendala bahasa sehingga ia membutuhkan lebih banyak pendampingan. Walaupun

terdapat kendala, beliau pun menceritakan apa yang dirasakannya selama kegiatan ini.



Affendi, M.Pd. pelatih Diklat Berjenjang Tingkat Dasar yang berasal dari Kabupaten Ketapang

“... Saya mengidentifikasi bahwa peserta sangat antusias mengikuti pelatihan. Tingkat ketercapaiannya adalah 60--90% materi diterima dengan baik. Semua peserta belum pernah mengikuti pelatihan dasar. Peserta rata-rata berpendidikan SMA ke bawah dengan daya tangkap tertentu sehingga diperlukan berbagai metode dalam penyampaian materi. Evaluasi yang didapatkan dari peserta adalah peserta sangat antusias dan termotivasi mengikuti diklat ini. Saya pun berharap kita tetap melihat situasi dan kondisi lokal yang sangat membutuhkan pengayaan dan memperbanyak kegiatan praktik dan praktik lapangan.”

Ibu Ida Sulasmiwati yang merupakan pelatih Diklat Berjenjang Tingkat Dasar dari Kabupaten Ketapang pun memberikan masukan untuk kegiatan ini.

“... Di kabupaten di daerah terpencil, masih banyak kekurangan dan masih banyak yang perlu diperbaiki. Pemahaman para peserta di kabupaten yang terpencil masih kurang sekali. Saya berharap ada perubahan pembuatan video agar hasilnya lebih bernuansa lokal kedaerahan.”

Berikut adalah suasana pelaksanaan Diklat Berjenjang di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. ■



Ida Sulasmiwati pelatih Diklat Berjenjang Tingkat Dasar dari Kabupaten Ketapang

Peserta Diklat Berjenjang Tingkat Dasar melakukan pemaparan hasil diskusi kelompok







# APRESIASI GTK PAUD DAN DIKMAS

## Gur u Mulia Karena Karya

Sebagai bentuk penghargaan terhadap peran guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini (GTK PAUD) dan pendidikan masyarakat (Dikmas) dalam penyelenggaraan pendidikan, Direktorat Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas melakukan rangkaian kegiatan Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas. Rangkaian tersebut dimulai dari pembimbingan teknis seleksi serta pelaksanaan dan pemberian hadiah terhadap pemenang Apresiasi GTK. Apresiasi GTK diberikan kepada guru dan kepala satuan pendidikan yang berprestasi, berdedikasi, dan melakukan inovasi pembelajaran. Kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi, kreasi, dan prestasi GTK PAUD dan Dikmas dalam membina, membimbing, melatih, dan mengajar peserta didik di lapangan,

termasuk dalam mengelola lembaga. Selain itu, melalui ajang apresiasi akan terwujud suasana saling belajar antarwilayah di seluruh Indonesia. Terjadinya proses akselerasi kemajuan pendidikan nonformal tidak dapat dipungkiri. Para peserta maupun official dapat saling bersilaturahmi sambil belajar dan mengambil inspirasi melalui unjuk kreativitas pendidikan nonformal. Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas menjadi sarana untuk memperkokoh keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beragam etnis, budaya, dan adat kebiasaan.

*“Apresiasi ini menjadi salah satu media untuk meningkatkan kualitas*

*GTK PAUD Dikmas. Mengapa? Karena ajang ini memicu para GTK PAUD Dikmas untuk terus meningkatkan kualitas mereka dalam memberikan pembelajaran yang inovatif kepada peserta didik.”*

ujar Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud & Dikmas, Dr. Abdoellah, M.Pd., dalam gelar wicara di studio Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) yang disiarkan melalui RRI Pro 3, Rabu (4/7).

Selaras dengan kebijakan pemerintah, kegiatan apresiasi ini diarahkan untuk mewujudkan



revolusi mental yang mencakup aspek integritas, etos kerja, dan gotong royong bagi GTK PAUD dan Dikmas dalam pelaksanaan tugasnya. Pada Tahun 2018 pelaksanaan dilakukan pada tanggal 7--14 Juli 2018 di wilayah Indonesia bagian barat, yaitu di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Sekretaris Jenderal Kemdikbud RI, Didik Riyadi, hadir mewakili Mendikbud dalam acara pembukaan dan menyampaikan bahwa kegiatan apresiasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan penghargaan serta untuk meningkatkan harkat dan martabat GTK PAUD DIKMAS atas pengabdian, dedikasi, dan prestasi mereka dalam meningkatkan kualitas PAUD dan DIKMAS di Indonesia, sekaligus untuk memotivasi PTK dalam berkarya, berinovasi, dan berprestasi dalam tugasnya.

Terkait dengan pentingnya apresiasi terhadap GTK PAUD DIKMAS, Pejabat (Pj.) Gubernur

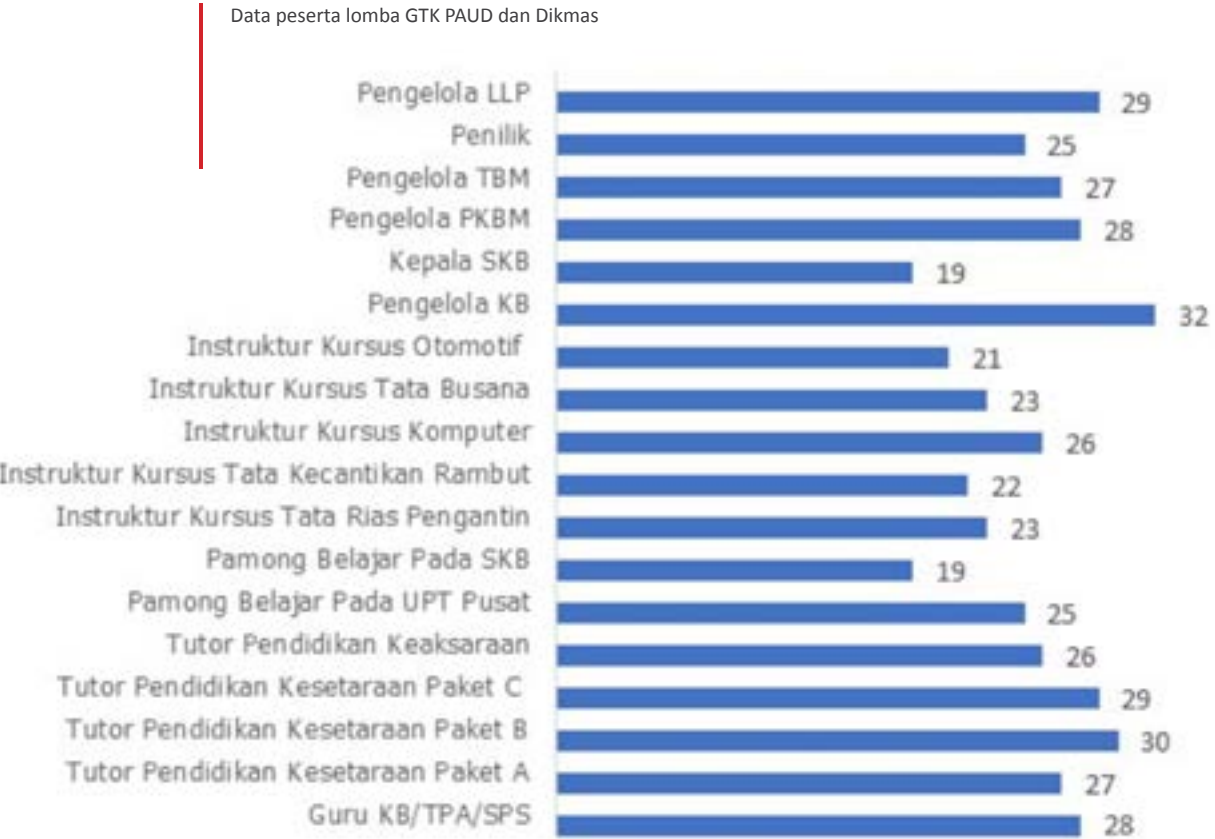
Kalimantan Barat, Dodi Riyadmadji, berpendapat bahwa kualitas guru dan tenaga kependidikan sangat menentukan kualitas pembelajaran. Hal tersebut berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas bangsa. Diakui Dodi bahwa pelaksanaan dan pengembangan PAUD dan Dikmas tidaklah mudah dan cukup kompleks. Untuk itu, ia memandang pemberian apresiasi kepada GTK PAUD dan Dikmas yang telah berkomitmen dalam upaya pencerdasan dan pembangunan karakter bangsa cukup penting. “Mari kita berikan apresiasi dan tepuk tangan untuk GTK PAUD dan Dikmas,” ajak Dodi.

Kegiatan apresiasi dilaksanakan dalam bentuk karya nyata, olahraga, dan seni yang melibatkan delapan belas jenis GTK PAUD dan Dikmas dengan mengembangkan konsep kegiatan yang mengandung unsur edukasi, kompetisi, dan rekreasi. Seleksi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi

diselenggarakan dengan kategori perorangan untuk tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi. Sementara itu, pada tingkat nasional diselenggarakan dengan kategori perorangan dan kelompok, yaitu dalam bentuk Senam Kreasi Daerah dan Paduan Suara.

Tim juri kegiatan ini terdiri atas unsur birokrasi, akademisi dan praktisi, yaitu sebanyak 72 orang. Ada empat tahapan penilaian, yaitu verifikasi administrasi, penilaian karya nyata (best practise), presentasi, dan tanya jawab (interview ). Sasaran kegiatan apresiasi ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan dikmas yang berprestasi dan berdedikasi dan diseleksi secara berjenjang mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional. Kegiatan ini diikuti oleh 479 orang peserta yang berasal dari 34 provinsi dengan 22 kategori sebagai berikut.





Pada acara puncak Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Tingkat Nasional tersebut penghargaan diberikan kepada pemenang 18 jenis Lomba GTK Dikmas kategori perorangan dan 2 pemenang kategori kelompok. Penilaian dilakukan melalui beberapa tahap

mulai dari verifikasi administrasi, tes psikologi, tes kompetensi, penilaian karya nyata (best practise), presentasi, dan interview. Pada Apresiasi GTK PAUD Dikmas 2018 ini, Provinsi D.I. Yogyakarta berhasil meraih gelar juara umum karena memperoleh gelar pemenang

terbaik pada lima kategori, yakni Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Instruktur Kursus Tata Busana, Instruktur Kursus Tata Kecantikan Rambut, Instruktur Kursus Otomotif Roda Dua, serta Tutor Kesetaraan Paket A.



Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Supriano memberikan sambutan pada Pemilihan GTK Beprestasi dan Berdedikasi Tahun 2018

## PEMILIHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI

***Ajang untuk meningkatkan semangat berprestasi, kreativitas, dan semangat kebersamaan.***

Kegiatan Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Berprestasi dan Berdedikasi merupakan acara rutin untuk memberikan penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan terbaik dari tiap-tiap provinsi. Program ini merupakan bagian dari rangkaian acara untuk memperingati Hari Ulang Tahun Ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia serta menjadi sebuah forum yang prestisius bagi guru dan tenaga kependidikan di tingkat nasional. Kegiatan ini juga merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Muhadjir Effendy mengharapkan agar seluruh peserta Pemilihan GTK Berprestasi dan Berdedikasi Tahun ini siap menjadi teladan, baik bagi rekan sesama profesi, maupun bagi peserta didik.

*“Mudah-mudahan keberadaan Saudara-saudara sekalian di suatu lingkungan ekosistem pendidikan bisa menjadi contoh, menjadi teladan. Bisa menjadi tempat bercermin kalau orang ingin mematut diri sebagai guru yang baik, guru yang hebat, bisa dijadikan contoh.”*



Arahan tersebut disampaikan Mendikbud dalam malam Apresiasi Pemilihan GTK Berprestasi dan Berdedikasi Tahun 2018 di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Pada Tahun 2018 terjadi perubahan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, di antaranya, dalam sistem pemberkasan dilakukan secara nirkertas (paperless), yaitu dengan sistem aplikasi sehingga seluruh berkas peserta dikirim secara daring (online). Selain itu, terjadi peningkatan kualitas penjurian, yaitu dengan melibatkan para profesional dari berbagai unsur, di antaranya, dari perguruan tinggi, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), industri, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Perpustakaan Nasional, serta praktisi. Sisi penilaian tidak lagi hanya berfokus pada kompetensi teknis dan akademis, tetapi juga pada ranah soft skill yang mencakup kompetensi sosial (kemampuan bekerja sama, kemampuan berkomunikasi, dan pemecahan masalah), digital literacy, aspek nasionalisme, dan cinta tanah air yang dikemas dalam bentuk aktivitas permainan dan tugas proyek kelompok. Mekanisme seleksi dilakukan secara ketat, transparan, dan terukur

sehingga dapat memberikan kebanggaan dan motivasi serta membangkitkan tekad yang semakin kuat dalam diri peserta untuk terus memberikan pengabdian terbaik melalui karya-karya inovatif, inspiratif, dan berdedikasi yang tinggi.

Kegiatan ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan sampai pada tingkat nasional. Kegiatan Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 2018 diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 18 Agustus 2018 di enam titik lokasi hotel di Jakarta. Jumlah sasaran 1.296 orang, tetapi karena sesuatu dan lain hal peserta yang hadir hanya berjumlah 908 orang yang terdiri atas unsur guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang merupakan perwakilan dari 34 provinsi. Kategori lomba dibagi menjadi 39 kategori dengan pemenang I, II, dan III untuk setiap kategori lomba. Seluruh pemenang mendapatkan penghargaan berupa piagam penghargaan dari Mendikbud. Sebaran peserta terlihat seperti tabel berikut. ■

PAUD	Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah	Tendik
PTK Berprestasi			
32 Guru TK	34 Guru SD	34 Guru SMA	131 Kepala Sekolah (SD, SMP, SMA, dan SMK)
33 Kepala TK	34 Guru SMP	33 Guru SMK Berprestasi	119 Pengawas Sekolah (SD, SMP, SMA, dan SMK)
19 Pengawas TK			42 Tenaga Administrasi (SMP, SMA, dan SMK)
			44 Tenaga Perpustakaan (SMP, SMA, dan SMK)
			33 Laporan (SMA, dan SMK)
PTK Berdedikasi dari Daerah 3T			
16 guru TK	54 Guru SD	19 Guru Dikmen	19 Kepala Sekolah SD
16 kepala TK			16 Kepala Sekolah SMP
10 pengawas TK			9 Kepala Sekolah SMA/SMK
			12 Pengawas
PTK Pendidikan Khusus Berprestasi			
	31 Guru Dikdas	29 Guru Dikmen	5 Kepala Sekolah SPILN
			29 Kepala Sekolah
			15 Pengawas
Guru Inklusi Berprestasi			
	19 Guru Dikdas	22 Guru Dikmen	

Sebaran Peserta Pemilihan GTK Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 2018



Pembelajaran menyenangkan yang dikembangkan oleh guru inovatif



Salah satu bentuk inovasi pembelajaran oleh guru





Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Harris Iskandar memberikan sambutan pada *International seminar on early childhood care education and parenting 2017*

## PAUD: INVESTASI MASA DEPAN

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama yang menentukan maju tidaknya suatu negara. Pembangunan SDM ini merupakan tugas dari bidang pendidikan. Karena begitu pentingnya pendidikan, tidak mengherankan apabila banyak negara menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah Indonesia pun memberikan layanan pendidikan gratis hingga tingkat pendidikan dasar.

Tahapan awal pendidikan,

terutama jenjang pendidikan anak usia dini, merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan anak usia dini itu penting karena pada usia inilah anak membentuk pendidikan yang paling bagus. Pada usia inilah anak-anak harus membentuk kesiapan dirinya menghadapi masa sekolah dan masa depan. Investasi terbaik yang bisa berikan untuk anak-anak adalah persiapan pendidikan mereka di usia dini.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan paling dasar yang harus diterima setiap anak karena pendidikan merupakan salah satu modal yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk meraih kesuksesan dalam hidupnya. Keberlangsungan pendidikan bagi setiap warga negara perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah.

Jika suatu daerah ingin memiliki daya saing yang kuat, berinvestasilah dengan membangun

pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Insyaallah, ke depannya daerah tersebut akan mampu menjadi daerah yang maju dengan SDM berkualitas. Program BOP DAK PAUD yang kini menjadi program di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) menjadi perhatian serius Dirjen PAUD dan Dikmas, Harris Iskandar, Ph.D.

Menurut Dirjen PAUD dan Dikmas, adanya BOP DAK PAUD ini menjadi peluang untuk pengembangan PAUD berkualitas

untuk itu pengelolaannya harus benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan aturan. Penegasan tersebut disampaikan Harris saat memberikan arahan dengan tema “Pengelolaan BOP DAK PAUD dan Program PAUD DIKMAS” yang digelar di Mercure Hotel & Convention Ancol.

Harris menyatakan bahwa pengelolaan BOP DAK harus menjadi perhatian bersama karena ini untuk kepentingan pendidikan anak usia dini. Keseriusan pengelolaan BOP DAK PAUD ini, lanjut Harris, penting dilakukan karena ada banyak anak usia dini, para guru PAUD, dan pengelola menunggu bantuan untuk hal yang mereka butuhkan.

*“Menjadi penting juga karena PAUD menjadi prioritas pembangunan human capital di Indonesia dan juga dunia. PAUD diangkat derajatnya masuk ke dalam salah satu Sustainable Development Goals (SDG),”*

katanya. Dirjen menambahkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG antara lain memastikan kualitas pendidikan minimal pra-SD merupakan target yang harus dicapai seluruh negara sebelum 2030. “Masih lama memang, tetapi kalau tidak disiapkan dari sekarang kita akan kedodoran. Itulah pentingnya minimal pra-SD itu anak-anak mendapat layanan PAUD,” ujar Harris.

Dari Deklarasi Incheon, Korea, Tahun lalu, Dirjen PAUD dan Dikmas mengemukakan, yang menjadi fokus utama adalah compulsory childhood education atau PAUD. Mengapa demikian? Karena perkembangan otak manusia terjadi pada periode-periode yang disebut usia emas. Bahkan, hasil riset terakhir menyatakan bahwa pada 1.000 hari pertama kehidupan manusia, struktur otak terbentuk mencapai 80%. Riset tersebut, menurut Harris, semakin menguatkan bahwa kita selama ini tidak memberikan perhatian pada pendidikan PAUD. Padahal, jika merujuk riset penerima nobel tersebut, tidak ada investasi yang paling berharga selain PAUD. Jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lain, investasi PAUD memberikan return jauh lebih tinggi.

*“Sekitar 15 Tahun lalu saat menjadi atase di AS, saya mengantar Dirjen PAUD. Saat itu nama PAUD belum banyak diketahui. Harapan saya yang bicara orang psikologi, pendidikan, atau pengasuh. Ternyata narasumbernya bankir dari Federal Reserve, ekonom. Mereka mengatakan mengenai rate of return of investment, yang paling menjanjikan tidak ada selain early childhood education,”* katanya. ■



# PENINGKATAN MUTU PAUD DAN TARGET NAWACITA

**Ma ri kita semua wujudkan PAUD Berkualitas Universal sebagai kunci keberhasilan masa depan anak Indonesia, (Iriana Joko Widodo)**

Pada Hari Anak Universal, ibu negara selaku Bunda PAUD Indonesia berpesan agar seluruh komponen masyarakat memperhatikan tumbuh kembang anak usia dini untuk menjadi sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Ibu Negara didampingi Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia, Mufida Jusuf Kalla dan sejumlah istri menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja, pada Tahun 2018 juga terus mendatangi sejumlah pendidikan anak usia dini (PAUD) di seluruh Indonesia untuk mendorong program peningkatan mutu PAUD terpenuhi.

“Kepada semua penerima Anugerah PAUD Tingkat Nasional, saya bangga dan berterima kasih atas dedikasi dan kreasinya untuk PAUD,” kata Iriana dalam sambutan peringatan Hari Anak Universal di Kota Tangerang, Banten, Senin (20/11). Ibu Negara dalam kesempatan tersebut juga berharap seluruh pemangku kepentingan pendidikan dapat segera mewujudkan PAUD Berkualitas Universal sebagai kunci keberhasilan masa depan anak Indonesia. “Saya bangga dari 34 provinsi ada wakilnya yang mendapat anugerah PAUD ini, tidak mudah untuk mendapatkan anugerah ini

karena ada seleksi yang berjuang mulai membangun PAUD,” jelas Iriana.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendi menambahkan, PAUD semakin mendapat perhatian dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional. PAUD tidak lagi hanya dianggap sebagai sarana bermain bagi anak di bawah usia sekolah, tetapi juga sebagai fondasi awal program penguatan pendidikan karakter dan budi pekerti.

*“Pembentukan dan pembangunan karakter, budi pekerti, dan akhlak mulia seorang manusia sejak usia dini harus menjadi pilar dan arus utama pembangunan pendidikan nasional,”*

ujar Mendikbud.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Haris Iskandar menambahkan, saat ini pemerintah tengah mengembangkan PAUD berkualitas universal. Hal ini dilakukan karena pemerintah menyadari bahwa kualitas PAUD masih banyak yang belum berstandar nasional, baik dari segi infrastruktur maupun kualitas gurunya.

Komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas PAUD, di antaranya terlihat dari program komitmen PAUD Prasekolah dasar dan bertambahnya anggaran PAUD.

Mendikbud yang juga menjadi Presiden SEAMEO menyampaikan bahwa kehadiran SEAMEO Centre for Early Childhood Care and Education and Parenting (SEAMEO CE-CCEP) sebagai lembaga pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan keluarga sangat diharapkan peran aktifnya dalam penuntasan pendidikan anak usia dini di Indonesia.

Direktorat Pembinaan PAUD menggagas tema “Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas Masa Depan adalah Kunci Keberhasilan Masa Depan” dalam meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini di Indonesia. Tema ini sejalan dengan Nawacita kelima, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pendidikan. Menginjak Tahun ketiga sejak dicanangkan, telah banyak upaya yang dilakukan dan menghasilkan banyak perkembangan.

Program peningkatan mutu layanan diharapkan berdampak pada peningkatan tata kelola, akuntabilitas, relevansi, daya saing, pencitraan PAUD dan khususnya pada pencapaian dan pembentukan anak-anak Indonesia



Penyerahan anugerah PAUD tingkat NASional 2017 oleh ibu Iriana Joko Widodo didampingi ibu Mufida Jusuf Kalla

yang cerdas komprehensif. Program peningkatan layanan anak usia dini diupayakan melalui peningkatan mutu penyelenggaraan Layanan PAUD Terpadu secara terus-menerus; pemenuhan standar layanan PAUD secara bertahap, khususnya standar pembelajaran, pendidik, dan sarana/prasarana pendidikan; pengoptimalan penanaman pendidikan karakter di PAUD; perluasan layanan PAUD holistik-integratif yang mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan dan perlindungan anak; peningkatan kualifikasi dan kompetensi Peneliti Tindakan Kelas (PTK) PAUD (taman kanak-kanak, kelompok belajar, tempat penitipan anak, dan satuan paud sejenis); peningkatan karier, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan PTK PAUD; peningkatan jumlah PAUD rujukan di setiap kabupaten/kota untuk memperluas jejaring mutu dan model layanan PAUD di semua

daerah; pembenahan manajemen kelembagaan PAUD, khususnya di tingkat satuan pendidikan; penyediaan pusat konsultasi PAUD yang dapat diintegrasikan dengan puskesmas; serta pendirian PAUD Improvement Center (PIC) yang dapat menjadi pusat mutu, informasi dan rujukan pembangunan PAUD (misal: dengan revitalisasi balai pengembangan kegiatan belajar (BPKB), sanggar kegiatan belajar (SKB) dan diintegrasikan dengan penguatan peran Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) atau Ikatan Guru TK se-Indonesia (IGTKI), dan yang lainnya).

Dalam mewujudkan peningkatan mutu tersebut diperlukan optimalisasi setiap potensi dari semua pemangku kepentingan. Komponen utama yang harus dioptimalkan, di antaranya peran organisasi profesi, peran organisasi sosial kemasyarakatan serta

perguruan tinggi. Organisasi profesi seperti HIMPAUDI dan IGTKI dapat dilibatkan dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Dengan Komitmen bersama untuk memajukan pendidikan anak usia dini di Indonesia, maka dibentuk Gugus PAUD yang dapat menjadi solusi tepat bagi percepatan peningkatan kualitas pendidik PAUD Indonesia. Gugus PAUD adalah sebuah wadah yang merupakan bengkel kerja yang mendorong tenaga pendidik dan pemimpin lembaga untuk meningkatkan kemampuan berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam suatu kegiatan berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program PAUD. Gugus PAUD merupakan kumpulan dari 3–8 lembaga PAUD yang berdomisili dalam area terdekat untuk semua bentuk layanan, yaitu TK, KB, TPA, dan SPS. ■





## KOMITMEN INDONESIA HEBAT LEWAT PAUD HI

***Orang orang yang waktu kecilnya bahagia besarnya Insya Allah produktif, cerdas, pintar lahir batin, sebab usia dini ini sampai 6 Tahun anak anak betul betul sangat kritis (Ngasmawi)***

Penciptaan karakter yang baik pada usia dewasa tidaklah mudah membalikkan telapak tangan. Semua bermula dengan pengajaran yang baik saat usia dini. Salah satu cara untuk mendapatkan pendidikan karakter, budi pekerti dan ahlak yang luhur melalui pendidikan anak usia dini (PAUD). Seluruh hal tersebut dapat dilakukan lewat program PAUD Holistik Intergratif (PAUD HI). Program PAUD HI adalah penanganan anak usia dini secara menyeluruh

terkait pemberian layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, serta kasih sayang dan perlindungan. Semua aspek perkembangan anak harus dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat agar optimal.

Program PAUD HI adalah sebuah bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan,

kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak. Pelaksanaan PAUD HI dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Pemerintah saat ini terus berupaya memberikan kontribusi

membantu keterlaksanaan program pengembangan anak usia dini dengan membuat suatu gerakan Belajar Jadi Orang Tua, yaitu forum diskusi mengenai pendidikan anak bagi pasangan usia subur atau calon orang tua, serta orang tua yang memiliki anak usia 0—6 Tahun. Selain itu, pemerintah juga membuat laman yang berisi artikel mengenai pengasuhan anak dan berbagi media pembelajaran gratis yang dapat diunduh dan dimanfaatkan untuk mendampingi kegiatan belajar anak. Meskipun masih dalam tahap pengembangan dan perbaikan, diharapkan langkah kecil ini dapat memberikan dampak positif bagi berbagai pihak.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Harris Iskandar mengatakan,

*“Upaya peningkatan kualitas SDM perlu dilaksanakan sejak dini, baik dari segi kesehatan maupun pendidikan.”*

Pada seribu hari pertama anak dan fase emas atau yang biasa disebut golden age merupakan periode sangat penting dan membutuhkan pelayanan kesehatan serta pendidikan yang maksimal. Oleh karena itu, upaya pembangunan suatu bangsa akan sangat membutuhkan individu-individu yang sehat fisik dan mental, cerdas, serta berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar tersebut,

pemerintah telah memfasilitasi beberapa program seperti pos pelayanan terpadu (posyandu) yang berupaya memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan anak usia dini (PAUD) serta program bina keluarga balita (BKB) yang berfokus pada ranah pendidikan dan pengasuhan anak. Ketiga program ini terus dilakukan perbaikan dari yang awalnya berjalan sendiri-sendiri hingga adanya keterpaduan program posyandu dengan PAUD dan BKB sesuai Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Kebijakan tersebut menekankan bahwa setiap anak harus mendapatkan pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, perlindungan, rangsangan pendidikan secara berkesinambungan sejak janin sampai usia enam Tahun dengan sistem pelayanan menyeluruh dan terintegrasi. Pengintegrasian posyandu dengan BKB dan PAUD ini memiliki peran penting dan strategis dalam upaya mengatasi kesenjangan karena terlibat langsung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan orang tua dan anak dalam berbagai aspek.

Posyandu memantau kesehatan ibu dan anak, PAUD memfasilitasi balita bermain dan belajar bersama yang dibimbing oleh tutor/guru PAUD, dan BKB memberikan ruang untuk orang tua menggali pengetahuan dan keterampilan mengenai pengasuhan anak yang baik. Hal ini membawa harapan agar orang tua dan anak memiliki wadah untuk memantau dan menstimulasi tumbuh

kembang anak secara optimal.

Pada realitasnya, implementasi ketiga program ini masih mengalami kendala, khususnya program BKB yang pelaksanaannya kurang begitu terasa di masyarakat. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam laman-nya, berdasarkan data Pengendalian Lapangan (Dalap BKKBN) bulan Desember 2017, jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan BKB sejumlah 3.023.926 keluarga (63.88%) dari sasaran 7.408.983 keluarga. Berdasarkan data tersebut, belum semua kelompok BKB yang menjalankan keterpaduan antara kegiatan posyandu dan PAUD. Kinerja program BKB dan anak saat ini masih membutuhkan perhatian dan komitmen dari para pengelola program BKB dari tingkat pusat hingga desa.

Perhatian terhadap program BKB ini perlu ditingkatkan karena seperti yang kita ketahui orang tua berada di garda terdepan pertumbuhan dan perkembangan anak. Peran orang tua dan keluarga dalam mendidik anak tidak dapat tergantikan oleh sekolah dengan kualitas terbaik sekalipun. Begitu kuatnya peran orang tua dalam pendidikan anak hingga disebut sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama.

### Layanan PAUD HI

Dalam penyelenggaraan PAUD HI di satuan PAUD meliputi beberapa layanan yang akan diterapkan di satuan PAUD, yaitu layanan pendidikan, kesehatan, gizi dan perawatan, pengasuhan,





perlindungan, Layanan kesejahteraan.

Layanan PAUD Holistik Integratif ini meliputi enam aspek perkembangan anak usia dini, yakni perkembangan kognitif, bahasa, seni, sosial emosional, moral dan agama, serta motorik anak. Selain itu, dalam penerapan PAUD Inklusi berbasis holistik integratif, para lembaga dan pendidik sekolah juga harus menekankan layanan kesehatan, gizi, stimulasi, serta layanan PAUD harus memiliki konsep program berbasis keluarga dan komunitas.

Integrasi beberapa instansi dalam layanan PAUD HI diperlukan untuk mendukung pengembangan anak usia dini. "Di PAUD HI

minimal ada tiga lembaga yang bekerja sama, yaitu dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten, dinas kesehatan melalui kegiatan posyandu dan dinas BP2KB kabupaten melalui program Bina Keluarga Balita," ujar Kepala Subdit Program dan Evaluasi Direktorat PAUD, Muhammad Ngasmawi.

Selain menjalankan fungsi utama untuk mengembangkan kualitas diri anak di usia dini, PAUD HI umumnya juga diterapkan untuk melakukan pencegahan penyakit menular dan peningkatan status gizi anak. Pengajaran di PAUD HI juga melibatkan orang tua guna memberikan pengetahuan agar anak tetap mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.

Sistem pengajaran seperti ini sekaligus mengajak orang tua untuk bertindak sebagai tutor saat anak berada di rumah.

Anak-anak PAUD HI yang diajarkan mendapatkan pengajaran yang difokuskan pada pengembangan mental.

*"Anak diajarkan mentalnya. Mereka diajar untuk tampil percaya diri di hadapan guru, orang tua, dan teman-teman. Bahkan bertemu pejabat, bertemu Bupati juga mereka sudah tidak malu-malu,"*

tambah Ngasmawi.

Anak-anak PAUD HI harus berani tampil di depan umum. Mereka mau berbicara saat ditanya dan menjawab soal-soal yang diberikan. Berbeda halnya dengan anak yang tidak mendapatkan pendidikan PAUD HI yang cenderung menjadi pribadi yang malu dan penakut. PAUD ini penting bagi anak-anak untuk menciptakan situasi lingkungan yang positif bagi anak-anak. Di PAUD, anak-anak belajar untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya di luar lingkungan keluarga. Anak juga diberikan ruang untuk berkreasi sesuai dengan kapasitas usianya. Kebahagiaan dan kegembiraan anak ini penting untuk membangun karakter anak-anak. PAUD memberikan fondasi nilai-nilai kepada anak dengan jalan yang bahagia dan menyenangkan. ■



Grand Desain PAUD HI





## PENGUATAN PAUD DAERAH PINGGIRAN MELALUI BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU PAUD DI DAERAH 3T

Peningkatan kualitas PAUD harus dimulai dari pemenuhan standar layanan PAUD secara bertahap, khususnya standar pembelajaran, pendidik, dan sarana prasarana pendidikan serta penguatan pendidikan karakter sejak dini yang menjadi visi misi Jokowi-JK. Semuanya harus terimplementasikan melalui pembelajaran.

Selain itu, pekerjaan rumah seluruh pemangku kepentingan pendidikan anak usia dini yang juga harus dituntaskan adalah perluasan layanan PAUD holistik-integratif yang terintegrasi dengan kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak. Anak harus bertumbuh kembang dengan baik. Jadi, sanitasi dan gizi anak juga harus diperhatikan agar tumbuh menjadi generasi yang sehat dan berkarakter.

Berpijak dari kondisi tersebut di atas, pada Tahun 2017 dan 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, telah memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T. Selain itu, Direktorat PAUD juga menyediakan bantuan untuk tanggap darurat dan tanggap bencana bagi satuan pendidikan PAUD yang menjadi korban bencana.

Bantuan yang cukup banyak diminati lembaga PAUD di Indonesia adalah rehabilitasi atau rehab PAUD. Ribuan proposal dikirim oleh lembaga yang kemudian diseleksi secara administrasi, dinilai oleh tim independen, kemudian dilakukan verifikasi lapangan apakah lembaga yang bersangkutan layak untuk menerima bantuan.

Dengan adanya program dan kegiatan layanan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) termasuk daerah yang terkena bencana/pinggiran, perbatasan/daerah pesisir/tepi pantai/termarginalkan, dan daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Bantuan Pembangunan UGB PAUD di Daerah 3T Tahun 2018 adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang untuk pembangunan gedung baru di daerah 3T, termasuk daerah yang terkena bencana/pinggiran, perbatasan/daerah pesisir/tepi pantai/termarginalkan, dan daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang pembangunannya dilaksanakan sendiri oleh lembaga penerima bantuan. Tujuan pemberian bantuan adalah untuk (a) meningkatkan dukungan partisipasi dan peran

serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, (b) meningkatkan akses anak usia dini yang terlayani di lembaga PAUD, dan (c) meningkatkan mutu layanan PAUD.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana bantuan sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018. ■

## 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK), NUTRISI, DAN STIMULASI

*Kunci pencegahan terjadinya stunting dimulai sejak anak berada di dalam kandungan hingga berusia 2 Tahun. Pada saat itu, untuk memaksimalkan tumbuh kembangnya, anak membutuhkan nutrisi dan pengasuhan yang tepat.*

MASA 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Pada masa inilah proses tumbuh kembang seorang anak dimulai. Masa 1.000 HPK dihitung sejak bayi berada dalam kandungan ibunya selama sembilan bulan sampai bayi berusia dua Tahun.

Orang tua memiliki peran penting untuk memberikan perawatan dan pengasuhan yang berkualitas sesuai dengan tahap perkembangan anak agar si anak terhindar dari kondisi stunting.

Menurut konsultan tumbuh kembang anak, Rini

Sekartini, intervensi pada 1.000 HPK ini penting karena sejak hamil, otak anak sudah delapan puluh persen terbentuk. Karena itu, selama masa kehamilan, seorang ibu harus mengonsumsi makanan yang baik.

Sementara saat bayi sudah lahir, ada dua hal yang berperan penting dalam tumbuh kembang anak, yaitu nutrisi dan stimulasi. Nutrisi pada enam bulan pertama adalah ASI yang langsung diberikan dari ibu lewat menyusui, bukan ASI yang diperah.

"Menyusui langsung dari ibu penting untuk ke matangan sel otak. Nutrisi berperan untuk merangsang sel-sel otak itu," kata dokter anak yang juga Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia



(IDAI) Cabang DKI Jakarta ini.

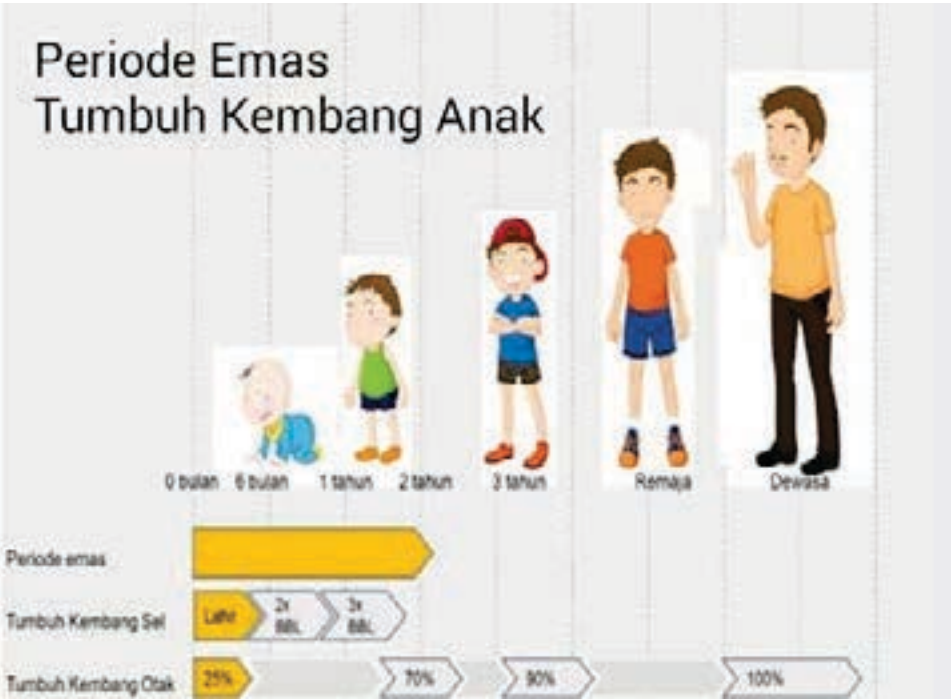
Selain nutrisi, untuk perkembangannya anak membutuhkan stimulasi sejak dini. Stimulasi, yaitu rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir, bahkan sejak janin berusia 6 bulan di dalam kandungan. Aktivitas ini dilakukan setiap hari untuk merangsang semua sistem indra pendengaran,

penglihatan, perabaan, penciuman, dan pengecap. Stimulasi tumbuh kembang anak dapat dilakukan oleh setiap orang yang berinteraksi dengan anak, mulai dari ibu, ayah, pengasuh anak, anggota keluarga lain, dan kelompok masyarakat di lingkungan rumah tangga masing-masing dan dalam kehidupan sehari-hari.





Intervensi pada 1.000 HPK ini penting karena sejak hamil, otak anak sudah delapan puluh persen terbentuk. Karena itu, selama masa kehamilan, seorang ibu harus mengonsumsi makanan yang baik. ■





# PELIBATAN KELUARGA EFEKTIF KENDALIKAN PERILAKU SISWA

KETERLIBATAN keluarga sangat penting dalam menumbuhkan karakter dan budaya berprestasi peserta didik. Sebagaimana tertera dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 dan turunannya sebagai petunjuk operasional, yakni Perdirjen PAUD dan Dikmas Nomor 127 Tahun 2017. Lantas, bagaimana agar kedua peraturan tersebut mampu mengeliminasi perilaku siswa yang negatif, seperti terlibat pornoaksi, pelecehan seksual, kekerasan, dan perilaku negatif lainnya?

Sebagai bentuk implementasi dari Permendikbud dan Perdirjen PAUD dan Dikmas itu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga merumuskan program pendidikan keluarga di satuan pendidikan, yakni pertemuan orang tua atau wali siswa dengan sekolah dan wali kelas. Sejatinya orang tua adalah guru pertama dan utama seorang anak, sedangkan guru di sekolah hanya sebagai fasilitator, pembimbing, sekaligus orang tua kedua di sekolah. Oleh karena itu, orang tua dan pihak sekolah, terutama wali kelas, akan sangat baik jika sering melakukan pertemuan untuk menyamakan pandangan dan cara mendidik anak-anak. Misalnya, bagaimana orang tua di

rumah dan guru di sekolah memiliki kesamaan dalam menciptakan pembiasaan kedisiplinan, keuletan, kemandirian, dan berbagai pembiasaan baik lainnya, baik di rumah maupun di sekolah.

Dalam pertemuan itu, pihak sekolah menginformasikan kepada orang tua mengenai program-program sekolah, manfaat, dan tujuannya. Orang tua juga bisa berkenalan dengan guru, begitu juga sebaliknya. Dalam pertemuan itu, guru bisa menggali dari orang tua mengenai situasi rumah siswa dan mengenali karakter serta potensi siswa.

Dengan demikian, guru dan orang tua dapat berjalan bersama dan bekerja sama dalam mendidik anak-anak. Salah satu bentuk kerja sama itu adalah terbentuknya paguyuban orang tua di kelas masing-masing. Paguyuban itulah yang diharapkan mengelola berbagai kegiatan yang melibatkan

orang tua siswa.

## Kelas Orang Tua

Salah satu kegiatan yang didorong dalam paguyuban orang tua itu adalah kelas orang tua atau parenting. Dalam kegiatan itu, para orang tua bisa saling berbagi pengalaman dan usaha mendidik anak di rumah. Di kelas orang tua ini juga, para orang tua membicarakan isu-isu yang terkait perilaku anak untuk mencegah terjadinya isu negatif dan membangun hal-hal yang positif.

Dalam kelas orang tua itu, bisa juga dilakukan diskusi yang menghadirkan narasumber, seperti psikolog atau pendidik untuk berbagi informasi terkait cara mengasuh dan mendidik anak. Juga tak menutup kemungkinan salah seorang dari orang tua siswa menuturkan pengalamannya dalam mendidik anak dan bagaimana hasilnya untuk menjadi inspirasi bagi orang tua lainnya.



Ayah dan Bunda, mengapa kita perlu terlibat dalam kegiatan di sekolah anak kita?



Agar lebih memahami program sekolah.

Agar dapat menyelaraskan kegiatan anak di rumah

Agar dapat memberikan masukan untuk kemajuan sekolah

Agar dapat mengikuti kemajuan belajar anak dan memberikan dukungan untuk kemajuan anak

Agar bisa membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi sekolah

## Kelas Inspirasi

Kegiatan lain yang dikelola paguyuban orang tua adalah kelas inspirasi. Bila kelas orang tua ditujukan kepada orang tua dalam upaya memberdayakan orang tua, kelas inspirasi ini ditujukan pada siswanya. Di kelas inspirasi ini, dihadirkan narasumber untuk memberikan motivasi kepada siswa. Narasumber itu bisa dari

luar sekolah, misalnya pengusaha, pejabat lokal, wirausahawan, atau profesional atau tokoh agama. Tak tertutup kemungkinan bahwa narasumber berasal dari salah seorang orang tua siswa yang dinilai punya pengalaman atau pengetahuan yang layak diketahui siswa.

Di kelas inspirasi ini, narasumber bisa bercerita tentang

perjalanannya dari mulai nol sampai berhasil. Narasumber juga bercerita tentang berbagai kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya serta memotivasi siswa dan bahwa kesuksesan itu milik semua orang.

Melalui kelas inspirasi ini, siswa diharapkan termotivasi untuk berhasil sesuai dengan potensinya.



Alasan perlunya Ayah dan Bunda hadir sebagai nara sumber atau membantu di kelas anak



Pentas akhir Tahun

Pentas akhir Tahun ini bisa berupa pementasan kesenian di panggung atau berupa pagelaran hasil karya anak. Setiap anak diberi peluang untuk menampilkan hasil karyanya, baik berupa kerajinan, kesenian, olahraga dan karya-karya lainnya. Pentas akhir Tahun ini dihadiri oleh para guru dan orang tua siswa. Tujuannya bukanlah menuntut anak membuat karya yang sebaik-baiknya, melainkan memberi kesempatan kepada anak menikmati suasana, menemukan keberanian dan

menampilkan potensinya bersama teman-teman lain. Karya-karya yang dinilai baik akan dinilai guru dan orang tua untuk diberi penghargaan. Melalui pentas akhir Tahun ini, diharapkan para siswa menampilkan karya terbaiknya. Dengan cara itu akan tumbuh rasa percaya diri dan optimisme akan kemampuannya. Dari berbagai literatur psikolog disebutkan, remaja yang memiliki rasa percaya diri akan bisa menerima dirinya sendiri, siap menerima tantangan, membantu untuk menghadapi situasi di dalam pergaulan dan untuk

menangani berbagai tugas dengan lebih mudah. Remaja yang percaya diri juga mampu menahan godaan untuk tidak terpengaruh lingkungan seperti tawuran, bullying, pornoaksi dan perilaku negatif lainnya. Bayangkan, bila program tersebut terlaksana, akan terjadi kerja sama yang sinergis antara orang tua dan pihak sekolah dalam mendidik karakter anak, kapasitas orang tua dalam mendidik anak meningkat, anak termotivasi, serta punya rasa percaya diri yang tinggi dan optimis. ■





## POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH (PPKD)

***Kit a ingin agar kebudayaan menjadi nafas dari kelangsungan hidup bangsa, menjadi darah kepribadian, menjadi mentalitas dan nilai nilai kebangsaan anak didik kita (Joko Widodo, Presiden RI)***

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Atas dasar amanat tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 2017 (selanjutnya disebut sebagai UU No.5/2017) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari amanat pemajuan kebudayaan nasional Indonesia. UU No.5/2017 menyatakan bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

*“Isu terpenting dari strategi pemajuan kebudayaan adalah kepemilikan. Untuk itu, mekanisme penyusunan strategi kebudayaan dimulai dari masyarakat, bukan dari pemerintah pusat. Jangan terlalu rumit. Jangan dijadikan beban. Bukan tebal tipisnya PPKD yang*

*menjadi ukuran. Tetapi identifikasi yang benar-benar ada di masing-masing daerah”*

jas Direktorat Jenderal

Kebudayaan, Bapak Hilmar Farid.

Upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan merupakan langkah strategis guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Terlebih lagi, pada Pasal 7 UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan “pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan”. Pengarusutamaan kebudayaan dilakukan melalui pendidikan karena pendidikan sejatinya merupakan upaya strategis dalam rangka membangun bangsa dan manusia-manusia Indonesia yang berjati diri dan berkarakter. Pendidikan karakter adalah titik temu utama antara pendidikan dan kebudayaan dalam upaya tersebut.

Dalam pendidikan karakter, kebudayaan ditempatkan sebagai sumber dari karakter dan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivasi atau pembudayaan

karakter tersebut. Tentunya diperlukan suatu pedoman diperlukan untuk dapat melaksanakan mandat pemajuan kebudayaan melalui pendidikan. Pedoman tersebut diatur dalam Pasal 8 UU No.5/2017 yang menyebutkan bahwa Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:

1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
2. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
3. Strategi Kebudayaan; dan
4. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pasal tersebut memberikan amanat pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan pemajuan kebudayaan berupa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan kemudian dirangkum dalam dokumen Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat. Hingga saat ini telah terlaksana 47 PPKD. “Dengan adanya data yang akan dibuat oleh tim PPKD, kita ingin tahapan dan cara pembinaannya lebih terprogram, terencana dan hasilnya lebih bagus. Data seni dan budaya merupakan aset bangsa dan aset daerah sebagai pijakan pengembangan seni dan budaya” jelas Wasto, Sekretaris Daerah Kota Malang. ■



## PENETAPAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA

***Yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia bukanlah wujud wayang, keris dan batik sebagai sebuah benda. Namun, cerita cerita, nilai nilai filosofi dan sisi humanis yang terkandung dalam wayang, keris, dan batik itulah yang diakui sebagai sebuah warisan budaya yang patut dilestarikan.***

Warisan budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni. Warisan budaya dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat dan mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi.

Warisan budaya takbenda atau intangible cultural heritage bersifat tidak dapat dipegang (intangible/abstrak), seperti konsep dan teknologi serta sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman, seperti bahasa, musik, tari, upacara, dan berbagai perilaku terstruktur lain.

Pada Tahun 2003, Indonesia telah meratifikasi Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage yang kemudian didukung Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 yang mengatur tentang konvensi perlindungan terhadap warisan budaya takbenda Indonesia. Warisan budaya takbenda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan konkret dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, kepercayaan, dan adat istiadat.

Pada saat International Gamelan Festival (IGF) di Benteng Vastenburg, Solo, beberapa waktu

lalu, Bapak Muhadir Effendy menyampaikan,

*“Pada kesempatan ini kami sampaikan juga bahwa Kemendikbud dan tim penilai untuk pengusulan warisan budaya tak benda Indonesia ke Unesco telah menetapkan gamelan untuk diajukan sebagai nominasi Indonesia yang akan dikirim ke Sekretariat Unesco pada Maret 2019 dan nantinya akan dibahas Tahun 2021.” ■*



# REGISTRASI NASIONAL CAGAR BUDAYA

Sebagai warisan budaya bersifat kebendaan, cagar budaya perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah.



Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, baik yang ada di darat maupun di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, diperlukan pencatatan aset cagar budaya untuk melestarikan keberadaannya. Salah satu caranya adalah membuat daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa cagar budaya.

Registrasi Nasional (Regnas)

Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa cagar budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. R Regnas Cagar Budaya merupakan pencatatan aset cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Pentingnya sistem registrasi ini juga diungkapkan oleh Arif Tyahyano, Kepala Dinas Kebudayaan Jember. “Setiap benda cagar budaya adalah sumber sejarah. Agar nilai sejarahnya tetap melekat pada benda itu, diperlukan sistem registrasi untuk memberikan perlindungan atas benda, situs, dan kawasan cagar budaya” jelas beliau.

Kegiatan ini adalah pendukungan pendaftaran cagar budaya di

kabupaten/kota melalui jejaring internet.

*“Sistem laman Regnas dibuat agar masyarakat mengetahui bahwa pemerintah mencoba membantu melakukan penetapan (cagar budaya) melalui sistem ini,”*

sebagaimana dijelaskan oleh Desse Y, Kasubdit Regnas. Sebagai upaya pelestarian keberadaan warisan budaya bersifat kebendaan, Regnas ini tentunya memberikan manfaat kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Hingga saat ini, sebanyak 8.146 cagar budaya telah teregistrasi. ■







Kegiatan Belajar Bersama Maestro

## BELAJAR BERSAMA MAESTRO 2018

***Para maestro inilah yang membuat kebudayaan Indonesia bisa bernapas sampai sekarang. Dari situ akan lahir satu barisan anak muda yang bersemangat dan berdedikasi yang bisa mengikuti jejak para maestro pada masa yang akan datang. (Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan)***

Belajar Bersama Maestro (BBM) merupakan program yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengisi waktu liburan siswa sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan (SMK). Dalam program ini, para siswa akan belajar kepada maestro mengenai makna budaya, nilai budaya, dan kearifan lokal, serta motivasi untuk berprestasi dalam bidang kesenian.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pembelajaran tentang seni budaya kepada generasi muda (siswa) langsung dari maestro yang berpengalaman.

Tujuan dari kegiatan Belajar Bersama Maestro, antara lain membangkitkan dan meningkatkan wawasan siswa terhadap seni budaya, menyerap pengetahuan serta keahlian dari maestro secara langsung, menghargai proses berkesenian dari seorang maestro, memberikan motivasi untuk berprestasi di bidang seni, serta membentuk karakter bangsa secara umum.

Para maestro yang bergabung dalam kegiatan BBM 2018 adalah seniman yang dinilai mumpuni di bidang seni tari, musik, teater, rupa, dan media, serta sukses secara artistik dan sosial. Mereka

juga merupakan seniman yang telah memperoleh reputasi atau pengakuan tingkat nasional dan internasional. Dengan begitu, siswa dapat belajar banyak dari sosok-sosok inspiratif tersebut.

Sebanyak dua puluh maestro yang akan menjadi pembimbing dalam kegiatan BBM 2018. Mereka adalah Didik Ninik Thowok, Gilang Ramadhan, Manteb Soedharsono, Ayu Laksmi, Djaduk Ferianto, Djoko Pekik, Arief Yudhi, Putu Sutawijaya, Dindon WS, Miroto, Angki Purbandono, Nasirun, Ni Nyoman Tjandri, Wangi Indriya, Hanafi, Irwansyah Harahap, Iswadi Pratama, Ni Ketut

Arini, Fendi Siregar, dan Made Sidi. Setiap maestro akan mengajar lima belas siswa. Peserta BBM akan tinggal di lingkungan tempat maestro bermukim. Ada enam provinsi berdasarkan domisili kedua puluh maestro tersebut, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, Lampung, dan Sumatra Utara. Pelaksanaan kegiatan BBM berlangsung selama dua minggu, yaitu 2—15 Juli 2018.

Peserta BBM adalah siswa kelas X dan XI SMA/SMK/ sederajat yang belum pernah mengikuti kegiatan BBM, baik dari sekolah swasta maupun negeri. Peserta juga harus memiliki dasar pengetahuan di bidang seni, mampu menggunakan media sosial secara aktif, serta menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan/ video. “Mereka akan mempelajari banyak hal, terutama sangat mungkin tiga puluh persen adalah persoalan-persoalan mengenai bagaimana sebuah proses hidup dilakukan. Proses penghayatan pada kebudayaan atau proses penghayatan seluruh hal yang kita jalani selama tiga puluh Tahun lebih yang dirangkum menjadi sepuluh hari,” ungkap Imam Soleh, seorang maestro seni teater.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran BBM, antara lain peserta harus membuat tulisan sebanyak tiga ratus kata dengan tema “Hubungan Seni dan Penguatan Karakter”. Peserta juga harus membuat video promosi diri tentang motivasi mengikuti kegiatan BBM dengan durasi dua



Aktifitas peserta Belajar Bersama Maestro

menit. Tidak hanya mendapat kesempatan emas untuk belajar dari maestro, peserta pun berkesempatan membina silaturahmi dengan sesama peserta dari seluruh nusantara. Hal tersebut tentunya merupakan suatu kesempatan yang seru dan menyenangkan bagi peserta, sebagaimana disampaikan oleh Gerardus Angger,

siswa kelas XI SMKN 2 Bandar Lampung, “Acara ini menyenangkan. Saya bisa mendapatkan teman baru dari berbagai daerah di Indonesia. Kita semua menjadi satu.” Pada Tahun 2018 ini, target peserta 100% terpenuhi dengan jumlah peserta mencapai tiga ratus siswa. ■





Program Revitalisasi Rumah Adat



## REVITALISASI DESA ADAT

***Desa desa adat sebagai warisan budaya yang aktif dan masih ada hingga saat ini (living heritage) merupakan kekayaan budaya Indonesia sebagai bukti identitas budaya.***

Keberadaan desa adat sebagai pewaris, pelestari, serta pelaku aktif kearifan lokal sangat potensial dalam mempertahankan identitas budaya dan membangun kesadaran akan keberagaman budaya di Indonesia. Oleh karena itu, desa adat merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang wajib dilestarikan. Salah satu upaya pelestariannya adalah dengan melakukan revitalisasi.

Desa adat memiliki hak asal usul serta hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Desa adat memiliki susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang spesifik (otonom). Desa adat ditandai dengan adanya sekelompok orang yang berada pada wilayah teritorial tertentu dengan sistem aktivitas ekonomi yang beragam serta adanya keterikatan genealogis. Selain itu, desa adat juga memiliki prinsip hidup, pola interaksi berkelanjutan dalam aktivitas sehari-hari, serta memiliki seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dipatuhi bersama. Di samping keseragaman aktivitas ekonomi, sebuah desa adat juga sering

ditandai dengan keseragaman sistem kepercayaan berikut upacara adat, pola dan gaya hidup, serta pola arsitektur bangunan.

Dalam rangka penguatan identitas budaya di masyarakat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui kegiatan Revitalisasi Desa Adat memberikan bantuan pemerintah untuk merevitalisasi desa-desa adat dalam rangka melestarikan kebudayaan masyarakat setempat. Dalam implementasinya, bantuan pemerintah dalam kegiatan Revitalisasi Desa Adat ini digunakan untuk merevitalisasi, memberdayakan, dan meningkatkan kualitas

desa-desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan. Revitalisasi Desa Adat merupakan sebuah kegiatan yang didesain dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat sebagai pemangku kebudayaan setempat. Pemerintah memfasilitasi dukungan kebijakan agar desa-desa adat sebagai suatu kesatuan hidup setempat dapat terus melestarikan kebudayaan.

Agar program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, diperlukan adanya sebuah petunjuk teknis yang mengatur sasaran, mekanisme, penggunaan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan bantuan pemerintah revitalisasi desa adat. Petunjuk teknis ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai acuan dalam pelestarian kebudayaan.

Bentuk kegiatan ini adalah pemberian bantuan dana tunai kepada desa adat untuk digunakan dalam revitalisasi

bangunan adat yang mempunyai fungsi sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keberadaan desa adat sebagai ujung tombak pelestarian kebudayaan. Desa adat dalam hal ini adalah kesatuan hidup setempat yang mempunyai wilayah, aturan, serta kepemimpinan adat yang masih menjalankan pola hidup tradisional. Dana bantuan saat ini sudah dicairkan dan telah sampai ke rekening desa adat. Pada tahap pertama telah terlaksana revitalisasi di tujuh puluh desa adat.

Orientasi Revitalisasi Desa Adat ini, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hilmar Farid, bertujuan untuk menghidupkan kembali akar budaya yang selama ini sudah mulai ditinggalkan masyarakat yang tinggal pada era modernisasi.

*“Berhenti pada memperbaiki apa*

*yang rusak. Padahal revitalisasi bukan hanya soal fisik. Melainkan kesadaran. Karena masalah fisik (bangunan-red) adalah konsekuensi dari kesadaran,”*

sebagaimana disampaikan lebih lanjut oleh beliau.

Manfaat revitalisasi desa ini tentunya juga dirasakan oleh komunitas desa adat. Kepada Desa Pematang Purba mengungkapkan,

*“Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Pematang Purba semakin terangkat karena adanya kios-kios suvenir di sekitar lokasi Rumah Adat Bolon Pematang Purba.” ■*





## LAWATAN SEJARAH NASIONAL

***Sejarah memberi kita pemahaman: kita datang dari mana, sekarang berada di mana, dan akan menuju ke mana? Sejarah memberi kita arah. Ini sangat diperlukan dalam proses pembentukan karakter. (Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan)***

Tentunya kita setuju dengan pernyataan Bapak Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan, tersebut. Sejarah berperan besar dalam proses pembentukan karakter. Dengan mempelajari sejarah yang menampilkan teladan dan motivasi yang kuat untuk menanamkan karakter, generasi muda diharapkan dapat terinspirasi untuk mencintai dan mengabdikan pada bangsa dan negara. Berangkat dari hal tersebut, Direktorat Sejarah mengajak generasi muda untuk berperan serta dalam kegiatan Lawatan Sejarah

Nasional (Lasenas) dan Internalisasi Nilai Kebangsaan (Inti Bangsa). Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 27 April hingga 2 Mei 2018 di Provinsi Aceh dengan tema “Peran Guru dan Siswa dalam Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Sejarah”.

Lawatan sejarah adalah suatu kegiatan perjalanan mengunjungi situs bersejarah yang merupakan bagian dari simpul-simpul perekat yang berorientasi pada nilai-nilai perjuangan dan persatuan untuk memperkuat integrasi bangsa. Kegiatan Lasenas dan Inti Bangsa

diharapkan mampu memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para peserta.

Kegiatan Lasenas yang diadakan di Aceh ini menjadi wadah untuk mengenal dan mengalami langsung keberagaman bangsa.

*“Mudah-mudahan dengan mengenal Aceh lebih dalam, Bapak, Ibu, dan Anak-Anak kami semua semakin bangga dengan keberagaman yang ada di negeri kita.”*

ungkap Hilmar Farid (Dirjen Kebudayaan). Hal ini juga didukung oleh pernyataan Laisani, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh,

*“Sebagai daerah yang memiliki banyak objek bersejarah dan budaya, Aceh memang tempat yang tepat untuk program Lawatan Sejarah Nasional.”*

Para perwakilan siswa dari Sabang sampai Merauke yang tergabung dalam Lasenas akan melakukan serangkaian kegiatan

mulai dari kunjungan ke berbagai situs bersejarah, lomba karya tulis, temu tokoh sejarah, dan pentas seni. Melalui kegiatan ini, selain belajar sejarah, para siswa akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan teman-teman yang luar biasa pula.

Dalam kegiatan ini, para peserta generasi muda yang berjumlah 250 siswa diajak mengunjungi beberapa situs sejarah meliputi: Makam Pahlawan Nasional Teungku Chik Di Tiro, Teuku Nyak Arief, Masjid Indrapuri, Museum Negeri Aceh, Replika Pesawat RI 001 Seulawah, Museum Tsunami, dan Masjid Raya Baiturrahman. Lawatan juga dilakukan di Aceh

Besar dengan mengunjungi Makam Pahlawan Nasional Laksamana Keumalahayati, Benteng Iskandar Muda, Benteng Indra Patra, dan Rumah Cut Nyak Dhien. ■





## PAMERAN BESAR SENI RUPA

Ragam budaya yang dimiliki Indonesia dari berbagai suku yang ada tentunya memiliki kekhasan tersendiri. Tiap karya yang diawakan akhirnya membawa cita rasa dari daerah masing-masing. Sebagai bentuk apresiasi atas keragaman budaya, Kemendikbud mengadakan Pameran Besar Seni Rupa (PBSR) pada tanggal 18 September--12 Oktober 2018 di Batu, Malang, Jawa Timur.

Melalui PBSR, Kemendikbud mencoba merangkum kekayaan budaya dan karya seni Indonesia, sekaligus menjadi ajang apresiasi hasil kebudayaan dan seni rupa yang kreatif dari para perupa di seluruh Indonesia. Dalam pameran ini ditampilkan karya para seniman Indonesia dengan eksotisme karya yang hadir dari berbagai provinsi di Indonesia. Karya yang disajikan adalah hasil kreasi puncak budaya dalam karya seni rupa dari para seniman yang memiliki kompetensi dan reputasi baik dari setiap wilayah di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan karya-karya tersebut dapat menjadi semacam mozaik manusia kreatif

dari berbagai wilayah Nusantara yang memiliki kekhasan karakter etnisitas masing-masing di tanah air.

Pameran ini diikuti oleh para perupa wakil dari 34 provinsi di Indonesia. Karya-karya yang dipamerkan adalah karya lukis, kriya, patung, fotografi, mural, dan instalasi. PBSR diadakan dengan harapan mendukung perkembangan karya-karya perupa wakil seluruh provinsi di Indonesia dan meningkatkan apresiasi publik melalui presentasi karya-karya mutakhir para perupa Indonesia. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kreativitas perupa Indonesia, menanamkan sikap apresiatif yang sehat, serta mendorong para perupa untuk berperan aktif dalam pergaulan seni.

Semangat tersebut juga dirasakan oleh perupa seni Timbul Raharjo.

*“Bahkan, dimungkinkan juga membentuk sebuah wadah atau asosiasi yang dapat*

*dipakai sebagai sarana komunikasi antarseniman di Indonesia.”*

jelas beliau. Melalui Pameran Besar Seni Rupa ini para perupa dari berbagai daerah akan saling berkomunikasi, bertukar pengalaman, dan saling mengapresiasi karya mereka. Dengan demikian, PBSR diharapkan akan menumbuhkan rasa saling pengertian terhadap kekhasan budaya masing-masing suku, ras, agama, dan etnis di Nusantara.

Langkah semacam ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebinekaan sekaligus integrasi nasional antarsesama anak bangsa. “Membuka saluran PBSR melalui mekanisme open call ini adalah upaya menjaring kekuatan kreatif lokal sekaligus dapat menunjukkan daya kritis dalam memanfaatkan modal kultural dan modal alam dalam berkarya,” ungkap Restu Gunawan, Direktur Kesenian. PSBR ini dihadiri 100 peserta dari hasil seleksi open call dan undangan. ■







Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid menyambut murid baru pada kegiatan Upayana Samskara di Bali



## FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA

*Keberadaan komunitas budaya menjadi sangat penting dalam upaya memelihara nilai-nilai warisan budaya dan tradisi nusantara agar tidak hilang dimakan waktu.*

Komunitas budaya adalah kesatuan sosial yang masih memegang tradisi, memiliki kesadaran wilayah sebagai kesatuan daerah teritorial, dan identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, dan aturan, serta memiliki berbagai aktivitas sosial menurut pola tertentu. Oleh karena itu, keberadaan komunitas budaya menjadi sangat penting dalam upaya memelihara nilai-nilai warisan budaya dan tradisi nusantara agar tidak hilang dimakan waktu. Keberadaan komunitas budaya juga menjadi media strategis bagi upaya interaksi masyarakat pendukungnya, sosialisasi, dan pendidikan nilai-nilai budaya kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Adapun yang dimaksud dengan komunitas budaya adalah sanggar seni, keraton, komunitas adat, lembaga adat, organisasi kepercayaan, dan komunitas tradisi. Komunitas budaya tersebut dinilai sebagai pelaku aktif dalam melestarikan tradisi. Namun, kondisi komunitas budaya tersebut saat ini cukup memprihatinkan karena keterbatasan sarana dan prasarana yang mereka miliki. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat. Melalui kegiatan

ini, komunitas budaya dapat memanfaatkan dana bantuan untuk perbaikan sanggar atau pusat kegiatan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan upacara adat. “Mudah-mudahan ke depannya komunitas budaya di Indonesia semakin meningkat dan terus berkembang demi budaya bangsa Indonesia yang maju,” ungkap Nono Adya S., Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.

Kegiatan Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat ini sejalan dengan Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan



Republik Indonesia. Fokus kegiatan ini adalah membantu komunitas budaya yang belum berkembang, terutama yang berada di daerah terluar atau terdepan. Melalui kegiatan ini, pelaku komunitas budaya juga dapat berkontribusi dalam pendidikan karakter lewat kegiatan seni budaya. Selain itu, komunitas budaya juga dapat menyajikan atraksi budaya yang berkualitas dalam mendukung program pengembangan pariwisata, khususnya di wilayah destinasi pariwisata prioritas. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu penerima manfaat, Ade Sopandi dari Komunitas Budaya Mandala Sekar. “Program ini

merupakan program pertama kalinya yang diterima Komunitas Budaya Mandala Sekar dan program ini merupakan awal titik terang dari segala kondisi keterbatasan komunitas, baik dari segi sarana dan prasarana maupun legalitas dalam mendukung pelestarian budaya” jelas Ade.

Bentuk kegiatan ini adalah pemberian bantuan pemerintah berupa dana tunai kepada komunitas budaya untuk digunakan dalam pengadaan sarana dan prasarana, seperti kostum dan alat musik tradisional. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keberadaan komunitas budaya di masyarakat dalam

upaya pelestarian kebudayaan. Komunitas budaya yang menjadi sasaran adalah komunitas budaya yang melestarikan kebudayaan tradisional. Adapun bentuk komunitas budaya yang difasilitasi adalah sanggar seni, organisasi kepercayaan, keraton, komunitas adat, lembaga adat, dan komunitas tradisi. “Saya berharap semoga bidang yang terkait dapat kerja sama dengan masyarakat untuk terus mengembangkan kelestarian budaya di masing-masing daerah,” ungkap Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid. ■

## INDONESIANA

***Indonesiana fokus pada konsolidasi untuk peningkatan standar tata kelola kebudayaan melalui penyelenggaraan festival di daerah daerah.***

Indonesiana adalah program khusus Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk memperkuat ekosistem kebudayaan Indonesia melalui pembuatan landasan atau platform yang terkonsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam hal tata kelola kebudayaan. Melalui ekosistem kebudayaan yang sehat akan berlangsung kehidupan budaya yang berkualitas, terutama proses kreativitas dari bawah, baik yang bertopang pada khazanah budaya yang sudah ada sebagai bagian dari tata sosiokultural masyarakat penyangganya maupun karya-karya cipta budaya baru dan otentik. Selain itu, juga proses pengembangan nilai-nilai dan pengetahuan bertumpu pada kekayaan budaya lokal dalam proses interaksi dengan budaya-budaya di ranah nasional ataupun internasional.

Program ini berfokus pada konsolidasi untuk peningkatan standar tata kelola kebudayaan melalui penyelenggaraan festival di daerah-daerah. Festival seni dan budaya adalah manifestasi dari rangkaian kerja kebudayaan yang mencakup dimensi kreativitas, wahana perlindungan, penyebaran dan pertukaran nilai dan pengetahuan, ajang pembelajaran sumber daya manusia pengelola kebudayaan, fasilitasi

komunitas budaya, serta kegiatan pembinaan kebudayaan lainnya. Festival sebagai puncak dari rangkaian konsolidasi kerja kebudayaan dapat dilihat dalam kebiasaan berbagai masyarakat adat, misalnya festival pangan sebagai penutup rangkaian kerja bercocok tanam ataupun puncak rangkaian kerja kebudayaan dalam masyarakat modern sebagai wahana pertemuan dari berbagai pelaku karya cipta budaya dengan publik. Oleh karena itu, festival memiliki posisi strategis dalam kerja konsolidasi kebudayaan.

Penyelenggaraan festival-festival seni dan budaya di berbagai daerah selama ini berlangsung secara fragmentatif, dalam arti dilakukan secara terpisah-pisah dengan orientasi dan tujuan yang

berbeda-beda. Hal itu inheren dengan karakteristik sosiokultural yang beragam. Keragaman tersebut memang menunjukkan kekayaan budaya Indonesia. Berbagai festival seni dan budaya yang dikelola secara terpisah itu harus diletakkan di atas landasan yang terkonsolidasi dengan baik, yaitu landasan bersama untuk optimalisasi sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan utama seperti komunitas-komunitas seni dan budaya.

Indonesiana sebagai landasan bersama sekaligus mekanisme pengelolaan terpadu bertujuan untuk meningkatkan perbaikan tata kelola festival, baik festival yang sudah ada maupun festival baru yang relevan dengan potensi

*“Di Indonesiana ini kita mencoba untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas tata kelola kita melalui tindakan.*

*Ini ditekankan karena semangat kita bukan hanya melaksanakan kegiatan. Kita sering bilang kegiatan-kegiatan kita bisa mendunia. Namun kalau hanya terus berkatut di lingkungan sendiri dan senang pada kegiatan sendiri hanya akan jadi katak dalam tempurung. Harus tumbuh kesadaran bahwa ada dunia yang besar di luar sana. Jadi semangat kita bukan sedang berlomba-lomba membuat festival,”*

*jelas Direktur Jenderal Kebudayaan.*



Pembukaan Lasenas 2018 di Aceh pada tanggal 27 April – 2 Mei 2018



dan karakter budaya di daerah atau kawasan masing-masing. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas manajemen penyelenggara festival, perluasan akses dan penguatan jejaring budaya, fasilitasi pertukaran budaya (silang budaya) yang produktif di tataran lokal, regional, nasional dan internasional, serta distribusi dan pengembangan sumber daya manusia pengelola kebudayaan yang berkualitas di seluruh Indonesia. Selain itu, fokus utama Indonesiana yang lainnya adalah pengembangan promosi dan pengembangan jaringan ataupun kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan budaya di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dengan peningkatan

standar manajemen penyelenggaraan festival yang lebih baik, keunggulan dan karakteristik setiap budaya dapat dikelola secara lebih optimal sehingga membawa dampak kultural yang lebih besar. “Platform Indonesiana sangat membantu Kabupaten Belu untuk semakin memperkenalkan potensi yang ada di sini, salah satunya adalah mengangkat Festival Fulan Fehan menjadi salah satu dari 100 festival terbaik yang ada di Indonesia,” sebagaimana dirasakan oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay. Melalui Indonesiana akan terbangun koherensi tata kelola festival sebagai ekspresi budaya. Selain itu, juga sebagai mata rantai peran dan fungsi maupun multitrelasi yang efisien dan produktif

dari masing-masing pemangku kepentingan dalam menyusun agenda-agenda yang diturunkan menjadi program-program penguatan kreativitas kebudayaan secara umum yang sistemik di tingkat pusat dan daerah. Indonesiana adalah salah satu pengejawantahan dari agenda Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran melalui kebudayaan. Azas yang digunakan adalah gotong-royong agar Indonesia terus bergerak menyatu dengan kuat untuk memperluas ruang-ruang kebinekaan dalam semua lini kehidupan. Keberagaman tidak ada artinya tanpa rekatan persatuan dan kebersamaan. Kita harus kembali menyatu untuk menjadi Indonesia baru. ■



Pelaksanaan GSMS di beberapa wilayah di Indonesia

## GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH

*elain aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, aspek sosial dan emosional pada anak pun harus diperhatikan agar tercipta keseimbangan demi mencapai kecerdasan yang holistik.*

Sekolah sebagai institusi formal selama ini telah berusaha menjalankan fungsi akademisnya dengan mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Namun, keseimbangan pada aspek lain, yaitu sosial dan emosional harus diperhatikan pula. Keseimbangan tersebut merupakan hak anak sebagai peserta didik yang memiliki beragam kecerdasan, minat, dan bakat sehingga mampu mengembangkan kecerdasannya secara komprehensif dan utuh (holistik). Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS)

yang diharapkan mampu menginspirasi, memenuhi pendidikan anak seutuhnya, membangun iklim sekolah yang menyenangkan, mengasyikan, mencerdaskan, dan menguatkan. Kegiatan GSMS diharapkan juga mampu menciptakan warga sekolah yang dapat mengapresiasi seni budaya yang ada di masyarakat dan memperluas akses terhadap kesenian, sebagaimana diungkapkan oleh Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan, “Daripada menunggu jumlah guru di bidang kesenian meningkat, pemerintah berinisiatif mengisi kekurangan tersebut dengan mendelegasikan seniman masuk sekolah. Kata kuncinyam yaitu memperluas akses anak-anak terhadap kesenian,”

GSMS merupakan

implementasi dari penguatan pendidikan karakter (PPK) berbasis masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam dunia pendidikan. Program GSMS dapat membantu dan memfasilitasi keterbatasan sekolah dalam menghadirkan guru seni budaya yang selama ini menjadi kendala di satuan pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK. Seperti disampaikan oleh Restu Gunawan, Direktur Kesenian, seniman hadir mengisi kegiatan di luar jam sekolah. “Meski masuk sekolah, mereka (seniman) tetap non-PNS. Ini kegiatan ekstrakurikuler di luar jam sekolah.”

Semangat GSMS sebagai upaya pemerintah yang bersifat menyeluruh dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat







Pelaksanaan GSMS di beberapa wilayah di Indonesia

dapat menyaring budaya asing yang mengikis moral generasi muda dengan memicu dan memacu kapasitas seni budaya yang kaya dan beragam di Indonesia. GSMS ini juga diharapkan dapat menjangkau untuk daerah-daerah yang termasuk daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan). Sebagai sebuah model pada tingkat nasional, kegiatan ini diharapkan bisa diadopsi oleh pemerintah daerah.

Melalui GSMS, Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hadir dalam mengupayakan pembinaan kesenian. Kegiatan ini merupakan implementasi dari kegiatan peningkatan kompetensi seni pertunjukan, antara lain: seni tari, musik, teater, rupa, dan media di tingkat dasar. Hal ini juga dirasakan oleh salah seorang penerima manfaat, Hari Djyaningrat

dari Bandarlampung, “Saya berharap lahir siswa yang kompeten dan dapat meraih prestasi yang gemilang untuk Provinsi Lampung dalam bidang seni musik, tari, teater, rupa, media, dan sastra.” Kegiatan ini sekaligus merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Kesenian, yaitu sebagai fasilitator dan pemberi bimbingan dalam bidang kesenian. ■



Pegiat seni mengajarkan pembuatan alat musik tiup dari buah pohon nyamplung di Desa Kemujan, Karimun Jawa

## SENIMAN MENGAJAR

***Kegiatan ini berlaku khusus bagi seniman yang peduli, bermental tangguh, siap mengambil tantangan, dan bernyali terhadap kondisi di daerah 3T. (Direktur Kesenian, Kemendikbud)***

Seniman Mengajar adalah program kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berupa kegiatan residensi seniman di sepuluh lokasi dengan berdurasi selama tiga puluh hari. Seniman dituntut untuk berbaur dan berinteraksi

dengan masyarakat setempat untuk membangun jejaring dan ekosistem seni di tempat tersebut dengan cara membuat program seni bersama masyarakat, memberikan workshop singkat tentang kesenian, membuat karya yang bernapaskan tradisi dan kesenian lokal dengan melibatkan masyarakat setempat, dan membuat

riset seni dari tradisi setempat dengan melibatkan komunitas seni, komunitas kemasyarakatan, seniman lokal, dan masyarakat setempat. Dampak yang diharapkan dalam kegiatan Seniman Mengajar adalah munculnya kesadaran akan seni di masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam praktik seni.



Kegiatan Seniman Mengajar Tahun 2018 ini sendiri dilaksanakan di sepuluh titik, yaitu Kota Sabang (Aceh), Jatigede (Sumedang, Jawa Barat), Sume-nep, Madura (Jawa Timur), Kamu- jan (Karimun Jawa, Jawa Tengah), Pulau Mendanau (Selat Nasik, Bangka Belitung), Ke'Te Kesu Dan Londa (Toraja Utara, Sulawesi Selatan), Lewoleba (Lembata, Nusa Tenggara Timur), Barikin (Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Timur), Painan (Pesisir Selatan, Sumatra Barat), dan Keijan dan Sungai Enam (Bintan, Kepulauan Riau). Kegiatan Seniman Men- gajar adalah upaya menciptakan ruang-ruang dialog, kolaborasi, dan partisipasi antara seniman dan masyarakat (komunitas seni/ komunitas kemasyarakatan) untuk berinteraksi, bertukar informasi, pengetahuan, berkarya, serta membangun jejaring dengan tu- juan sebagai berikut.

1. Mendukung proses penciptaan karya artistik dan ekspresi budaya;
2. Mendukung berkembangnya wisata-budaya; dan
3. Mendukung perkembangan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah dan kearifan lokal.

Seniman dalam kegiatan Seni- man Mengajar adalah individu atau kelompok yang memiliki latar belakang seni, baik secara akade- mik maupun non-akademik, baik yang telah memiliki pengalaman dalam dunia seni maupun yang baru lulus kuliah, Sementara itu, yang dimaksud dengan mengajar dalam kegiatan Seniman Men- gajar adalah memberikan ilmu/

pengetahuan, baik seni, tradisi, maupun budaya secara dua arah dari seniman dan masyarakat setempat. Kegiatan Seniman Mengajar tidak berfokus pada kehadiran peserta ajar di ruang kelas layaknya mengajar dalam dunia pendidikan, tetapi lebih pada pendidikan kemasyarakatan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat setempat.

Seniman Mengajar dilak- sanakan dengan metode residensi selama tiga puluh hari ditambah dengan orientasi lapangan se- lama tujuh hari. Pelaksanaan orientasi lapangan bertujuan agar para seniman dapat memiliki ruang untuk beradaptasi sebelum melaksanakan kegiatan. Pada Ta- hun 2018 ditargetkan lima puluh seniman yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia terlibat dalam kegiatan Seniman Mengajar.

Kegiatan Seniman Mengajar dilaksanakan pada bulan Ju- li--Agustus secara serentak di sep- uluh lokasi yang telah ditentukan. Selama kegiatan berlangsung para seniman didampingi oleh dua orang pemandu daerah yang ber- asal dari pihak pemerintah (Balai Pelestarian Nilai Budaya atau Dinas kebudayaan) setempat dan dari warga atau seniman setem- pat pada lokasi tempat peserta tinggal. Pemandu daerah bertu- gas untuk membantu kebutuhan peserta selama kegiatan Seniman Mengajar berlangsung.

*“Jadilah seniman yang mampu berbagi dan peduli terhadap bangsa. Segeralah bergabung untuk menjadi bagian*

*pengembangan potensi di daerah dalam kegiatan seniman mengajar. Kegiatan ini berlaku khusus bagi seniman yang peduli, bermental tangguh, siap mengambil tantangan, dan bernyali terhadap kondisi daerah.”*

pesan Direktur Kesenian, Kemendikbud. Seniman yang berpartisipasi juga merasakan manfaat luar biasa dari kegiatan ini.

*“Dengan adanya program Seniman Mengajar ini, saya sebagai pelaku seni dan masyarakat lokal sebagai peserta belajar mendapatkan impact yang sangat luar biasa. Berkat adanya program ini, saya bisa mengeksplorasi lagi kesenian dan budaya Indonesia yang begitu banyak,”*

jelas Ardi Firyasah, seniman yang turut berpartisipasi. ■



DIREKTORAT KESENIAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



# SENIMAN MENGAJAR 2018



**PENDAFTARAN 30 APRIL - 2 JUNI 2018**  
**PELAKSANAAN 26 JULI - 27 AGUSTUS 2018**

**“Bersama komunitas untuk keragaman Indonesia”**

Seniman Mengajar adalah program kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berupa kegiatan residensi seniman di 10 (sepuluh) lokasi di Indonesia, selama 30 (tiga puluh) hari. Seniman dituntut untuk berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk membangun jejaring dan ekosistem seni di tempat tersebut dengan cara membuat program seni bersama masyarakat/ memberikan workshop singkat tentang kesenian/ membuat karya yang bernafaskan tradisi dan kesenian lokal dengan melibatkan masyarakat setempat/ membuat riset seni mengenai tradisi setempat, dengan melibatkan komunitas seni/komunitas kemasyarakatan, seniman lokal, dan masyarakat setempat.

**PENDAFTARAN**

Tata cara pendaftaran Seniman Mengajar dapat dilihat melalui website:

**senimanmengajar.kemdikbud.go.id**

Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi panitia Seniman Mengajar 2018:

☎ Hary Mahardika : 081808262109	📠 Kantor : 021-5725518
☎ Hana Nabilah : 087786252790	✉ E-mail : senimanmengajar@kemdikbud.go.id
☎ Hilda Yulianti : 085711405934	🌐 Website : senimanmengajar.kemdikbud.go.id

\*) Belum termasuk potong pajak.  
Kegiatan Seniman Mengajar tidak memungut biaya apapun selama seleksi ataupun pelaksanaan di lokasi tujuan.





Kongres Kebudayaan Indonesia Tahun 1918



Presiden Joko Widodo Menghadiri Puncak Kongres Kebudayaan Indonesia Tahun 2018

## KONGRES KEBUDAYAAN INDONESIA 2018

Kongres Kebudayaan pertama kali diselenggarakan pada 1918. Diselenggarakan di Surakarta, kongres pertama tersebut memang terbatas untuk kebudayaan Jawa. Akan tetapi, untuk pertama kalinya ada keinginan kolektif untuk merumuskan arah perjalanan kebudayaan. Sastrowijono menyatakan pada pembukaan kongres tersebut:

*“Apabila sebuah bangsa mengesampingkan kebudayaannya sendiri serta tidak menghargai apa yang diwariskan nenek moyangnya, maka bangsa itu tidak layak untuk maju.”*

Kongres kebudayaan di masa kemerdekaan diselenggarakan pada Tahun 1948. Tujuan dari diadakannya kongres ini terkait dengan upaya seniman, cendekiawan, dan budayawan untuk meletakkan dasar pembangunan bangsa yang berwawasan budaya. Tujuannya, sebagaimana yang ditulis dalam Majalah Indonesia Tahun 1960 adalah “mengupas, meninjau, memecahkan segala soal, pula mengumpulkan segala anasir yang berguna sebagai pokok yang mengakibatkan lancarnya perjuangan kita. Titik berat, kita letakkan kepada hari kemudian, untuk itu perlu dipakai pangkalan keadaan yang sekarang yang sebagai di atas diterangkan, tidak pula dapat dilepaskan dengan sekaligus dari keadaan yang telah lampau”. Pada kelanjutannya kongres kebudayaan

ini ditetapkan sebagai konggres kebudayaan yang pertama.

Menjadi penting kemudian untuk melihat kebudayaan secara faktual dan aktual sebagaimana amanat UU no 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lebih-lebih sebagian besar dari anak negeri tidak pernah mengetahui dengan pasti terdapat lebih dari puluhan ribu cagar budaya dan karya budaya yang tersedia di negeri ini. Bahkan, tidak semua orang Indonesia menjadi bangga mengenakan pakaian Batik, mengingat Batik adalah Warisan Dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Karenanya, arah kongres kebudayaan nantinya bukan sekedar merayakan kekayaan budaya Indonesia, tetapi juga membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah super power kebudayaan. Pada 31 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun strategi kebudayaan dengan mengacu

pada Trisakti, yakni dengan memperhatikan bagaimana asas berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan dapat menjadi roh dari pengelolaan kebudayaan nasional. Strategi kebudayaan tersebut juga diharapkan dapat menghimpun masukan dari berbagai sektor dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan bidang kebudayaan. Instruksi ini, bersama dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, membuat penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 menjadi begitu berbeda dari seluruh kongres kebudayaan sejak 100 Tahun yang lalu

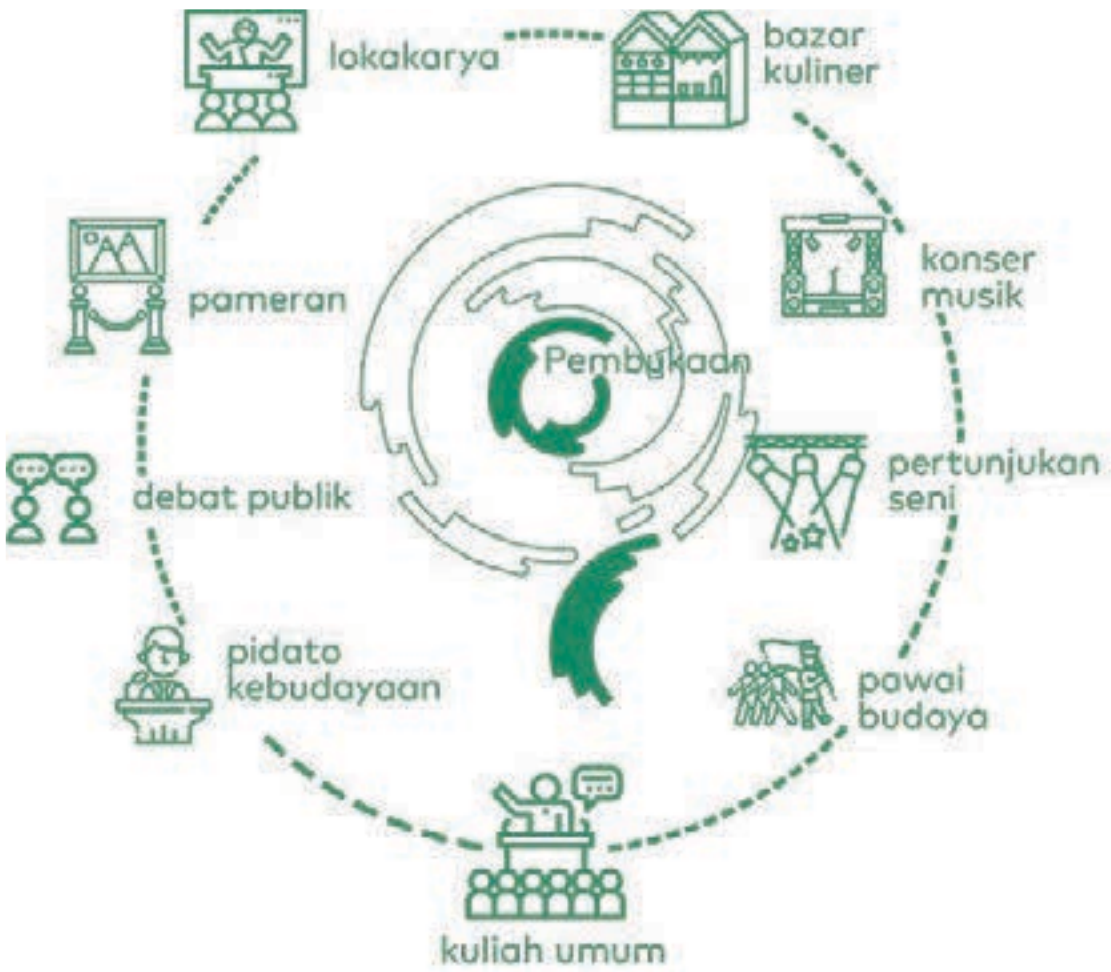
Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 berbeda dari kongres-kongres kebudayaan sebelumnya. Apabila dalam kongres-kongres kebudayaan sebelumnya, proses diskusi dan pembahasan berlangsung hanya selama 2-3 hari dan melibatkan ratusan orang yang



hadir dalam forum, maka dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 pembicaraan tersebut berlangsung selama sembilan bulan dan melibatkan ribuan orang di seantero Republik Indonesia.

Kongres Kebudayaan Indonesia 5-9 Desember 2018 membuka ruang untuk penyempurnaan Strategi Kebudayaan. Lebih penting lagi, kegiatan tersebut menjadi upaya untuk mengkomunikasikan rancangan Strategi Kebudayaan secara efektif kepada khalayak. Kegiatan 5-9 Desember 2018 secara khusus ingin memberi tempat lebih leluasa kepada mereka yang kurang terwakili dalam diskusi-diskusi tentang strategi kebudayaan selama ini, yakni kalangan muda, perempuan, masyarakat adat, pelaku seni, kalangan difabel, dan seterusnya. Hal ini penting karena Strategi Kebudayaan dirancang dengan agenda memajukan kebudayaan yang inklusif, melibatkan semua pihak. Untuk menunjang pengejawantahan dari semangat tersebut, Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 didesain

sebagai suatu perayaan atas kerja bersama memajukan kebudayaan. Dalam rangkaian acara tersebut, akan diselenggarakan aneka rupa kegiatan seni dan budaya, mulai dari 12 forum debat publik mengupas topik-topik paling hangat dan terkini di bidang kebudayaan, 13 forum kuliah umum dari para tokoh pemikir dan penggerak kebudayaan yang legendaris, 4 forum pidato kebudayaan dari para tokoh bangsa, 8 pertunjukan seni dan budaya mulai peragaan busana dari sampai pagelaran wayang kulit, konser musik kekinian yang menampilkan 18 band ternama, 12 forum inspiratif dari para pelopor di bidangnya, 2 pameran objek-objek pemajuan kebudayaan, serangkaian aktivitas mural bersama seniman street art, belasan lokakarya budaya dan bazar rakyat bertema kuliner maritim. Keseluruhan acara ini menghadirkan Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 bukan saja sebagai forum musyawarah tetapi juga suatu festival budaya.



Gotong royong antara pemerintah dan masyarakat adalah hal yang menandai menandai proses Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Melalui forum kongres ini, dijalankan perumusan Strategi Kebudayaan yang melibatkan tim perumus yang terdiri atas unsur pemerintah dan para ahli dan pegiat kebudayaan. Dengan cara berjenjang dan gotong royong ini, dokumen Strategi Kebudayaan yang akan dihasilkan dapat betul-betul berdasar pada permufakatan orang banyak, buah dari pikiran kolektif bangsa Indonesia. Tim Perumus menyepakati 7 Agenda Strategis Pemajuan Kebudayaan berikut ini.

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif.
  - a. Melindungi kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
  - b. Mendorong interaksi budaya lintas kelompok dan daerah dengan semangat persatuan dan kebersamaan
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional.
  - a. Meningkatkan perlindungan terhadap nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional
  - b. Memperkuat kedudukan dan memberdayakan lembaga, komunitas dan masyarakat tradisional
  - c. Mempromosikan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional yang berkontribusi bagi pengayaan kebudayaan nasional
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional.
  - a. Memfasilitasi pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk memperkuat promosi Indonesia di dunia internasional
  - b. Meningkatkan dan memperkuat diplomasi budaya Indonesia
4. Memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - a. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.

- b. Memperkuat mekanisme perlindungan kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan kesenian, pengetahuan dan teknologi tradisional
  - c. Meningkatkan pariwisata berbasis pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang mengindahkan kaidah pelestarian
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem.
    - a. Mengembangkan tata ruang yang memperhatikan ketersambungan antara agenda pelestarian alam, pelestarian cagar budaya dan agenda pemajuan kebudayaan
    - b. Mengangkat ekspresi dan pengetahuan tradisional tentang geologi dan geografi Indonesia serta masalah kebencanaan
  6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan.
    - a. Reformasi kelembagaan di bidang kebudayaan
    - b. Mengoptimalkan anggaran di bidang kebudayaan
    - c. Menyelaraskan kebijakan pusat maupun daerah untuk pemajuan kebudayaan.
  7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan dengan menjamin data dukung yang terpadu dan berkelanjutan, pemerataan akses atas sarana-prasarana budaya serta peningkatan SDM kebudayaan.
    - a. Membangun Sistem Data Kebudayaan Terpadu yang bersifat terbuka dan kredibel
    - b. Memastikan perluasan dan pemerataan akses masyarakat pada sarana dan prasarana kebudayaan
    - c. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia bidang kebudayaan.
- Ketujuh Agenda Strategis ini merupakan bagian dari dokumen lengkap Strategi Kebudayaan. Dokumen lengkap Strategi Kebudayaan sedang dalam proses untuk menjadi Peraturan Presiden. Rilis resmi dokumen tersebut akan dicantumkan di situs kongres.kebudayaan.id.





Selain itu, berdasarkan keseluruhan diskusi yang terjadi selama KKI 2018 dalam semua forum termasuk aspirasi para peserta yang ditempelkan pada 7 Dinding Aksi, Tim Perumus berhasil menyarikan 7 Rencana Aksi Pemajuan Kebudayaan sebagai Resolusi KKI 2018. Ketujuh Rencana Aksi itu adalah sebagai berikut:

1. Melembagakan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai platform aksi bersama yang meningkatkan memastikan peningkatan interaksi kreatif antar budaya.
2. Memastikan terjadinya alih pengetahuan dan regenerasi melalui pelindungan dan pengembangan karya kreatif untuk kesejahteraan para pelaku budaya, serta pelibatan maestro dalam proses pendidikan dan pembelajaran formal.
3. Meningkatkan diplomasi kebudayaan dengan memperkuat perwakilan luar negeri sebagai pusat budaya Indonesia, meningkatkan jumlah dan mutu program pertukaran dan residensi untuk seniman, peneliti dan pelaku budaya, dan menjadikan diaspora Indonesia sebagai ujung tombak pemajuan kebudayaan Indonesia di luar negeri.
4. Membangun pusat inovasi yang

mempertemukan kemajuan teknologi dengan warisan budaya di tiap daerah melalui sinergi antara pelaku budaya dan penggerak ekonomi kreatif guna memanfaatkan kekayaan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Membangun mekanisme pelibatan seniman dan pelaku budaya dalam kebijakan kepariwisataan berkelanjutan dan ekonomi kreatif yang berbasis komunitas, kearifan lokal, ekosistem budaya, pelestarian alam, dan pemanfaatan teknologi sebagai jalan keluar dari pendekatan industri ekstraktif.
6. Membentuk Dana Perwalian Kebudayaan guna memperluas akses pada sumber pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.
7. Memfungsikan aset publik (seperti gedung terbengkalai, balai desa, gedung kesenian) dan fasilitas yang telah ada (taman budaya dan museum) sebagai pusat kegiatan dan ruang-ruang ekspresi kebudayaan, guna memperluas dan menjamin pemerataan akses masyarakat pada kebudayaan. ■





# SKB KOTA SUKABUMI: MENDULANG PRESTASI MENGUATKAN JATI DIRI



Kondisi Prasarana dan kegiatan pembelajaran akademik di SKB Kota Sukabumi

*“Tidak ada bedanya SMA dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tidak ada bedanya SMP dengan SKB. Jadi bagi teman-teman, adik-adik yang tidak bisa masuk sekolah, masuklah ke SKB”.*

Sejatinya, itulah jati diri SKB sebagai satuan pendidikan nonformal. Selain memberikan bekal kecakapan akademik yang dapat bersaing dengan anak sekolah formal, peserta didik nonformal juga sangat potensial untuk diberikan bekal keterampilan yang berfungsi di masyarakat dan dunia kerja (fungsional) untuk memiliki sikap dan kepribadian yang mampu menguatkan dan meningkatkan sistem nilai/norma yang berlaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Kedua tujuan PNF tersebut sudah dibuktikan oleh SKB Kota Sukabumi. Secara akademik SKB Kota Sukabumi telah mampu menjawab harapan remaja dan orang dewasa pinggiran kota untuk dapat mengikuti pendidikan sampai tingkat SMP dan SMA seperti orang kota lainnya. Tidak kurang dari 335 peserta didik dari kelompok masyarakat marginal kota telah mengikuti program Kelompok Bermain (KB), Paket A, Paket B, dan Paket C.

Hal tersebut tidak terlepas dari kegigihan kepala dan para pengelola SKB untuk memperoleh dukungan dan bantuan pendanaan dari Pemerintah Kota Sukabumi serta unsur masyarakat lain yang peduli pendidikan.

Predikat akreditasi A telah dicapainya untuk satuan/program PAUD, sedangkan akreditasi untuk program Paket B dan Paket C sedang proses akreditasi sehingga diharapkan dapat diselenggarakannya ujian nasional baik untuk peserta didiknya maupun untuk peserta didik dari satuan PNF lain yang belum terakreditasi. Berbagai prestasi telah dicapai oleh pamong belajar/tutor dan peserta didik SKB, antara lain (1) Juara Lomba Karya Nyata Pamong Belajar/Tutor Tingkat Jawa Barat Tahun 2013, 2015, 2016, dan 2017; (2) Juara Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Tahun 2017, dan (3) beasiswa kuliah (Universitas Trisakti) atas nama Alfaz Fairuz angkatan 2016/2017.

Nilai plus yang sangat kontras dari layanan pendidikan di SKB Kota Sukabumi adalah bahwa mereka mampu mengembangkan sisi lain dari pendidikan nonformal dalam bentuk pengembangan keterampilan peminatan dan pengembangan karakter. Hal ini sangat sesuai dengan roh pendidikan nonformal untuk memberikan keterampilan fungsional dan sikap kepribadian profesional di samping pembekalan kompetensi akademik. Kegiatan peminatan yang sudah dikembangkan, antara lain (1) keterampilan kerja untuk mata pencaharian, seperti tata kecantikan rambut, menjahit/busana, aplikasi perkantoran (komputer); (2) ekstra/kokurikuler, seperti pramuka, drum band, olahraga; (3) seni budaya lokal/unik seperti batik Langka (lukisan

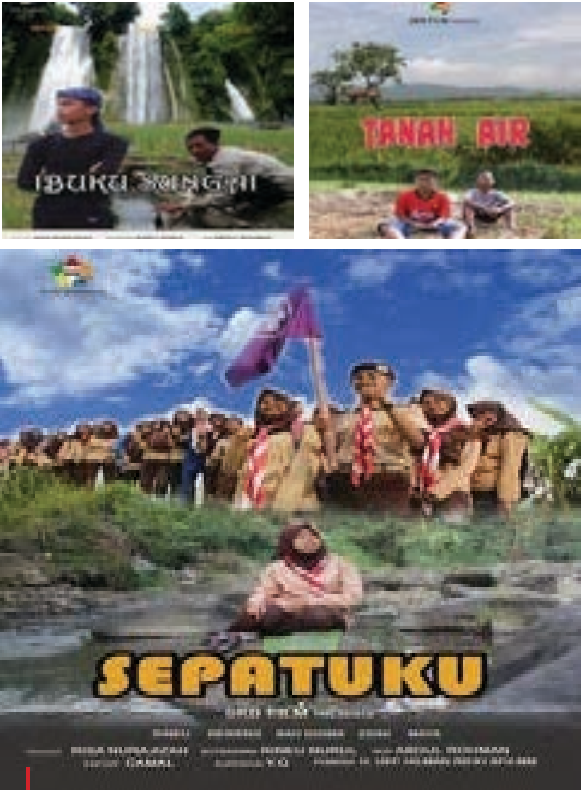
angka), wayang sukuraga, penyiaran (broadcasting), dan pembuatan film pendek.

Pembekalan kompetensi keterampilan kerja sangat diminati peserta didik karena di samping menarik, sederhana, dan juga memberikan kepastian peluang untuk menjadi mata pencaharian atau berwirausaha. Kegiatan ini sangat diminati juga karena SKB Kota Sukabumi memiliki TUK, khususnya untuk bidang menjahit/busana, tata kecantikan (rambut, kulit), dan rias pengantin. Kegiatan ekstrakurikuler telah memberikan kebanggaan dan jiwa korsa bagi peserta didik dan para pendidik karena mampu bersaing dengan sekolah formal bahkan menjadi juara lomba. Hal itu menjadikan mereka memiliki percaya diri yang tinggi sebagai satuan pendidikan yang berprestasi.

Keseriusan seluruh pengelola SKB dalam penguatan karakter peserta didik melalui kegiatan seni budaya patut diacungi jempol. SKB Kota Sukabumi berhasil memperoleh pengakuan dan dukungan material dari Pemerintah Kota Sukabumi. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi beserta seluruh jajarannya mengagumi pengembangan pendidikan karakter tersebut yang sejatinya merupakan program prioritas Kemendikbud. Untuk mengefektifkan kegiatan penguatan pendidikan karakter (PPK) tersebut, SKB Kota Sukabumi menggandeng para seniman lokal yang kreatif dan para sineas asli Sukabumi yang sudah lama berkiprah lama di dunia film nasional.

Hasilnya cukup mencengangkan. Para pamong belajar/tutor, peserta didik, dan para pegiat seni Sukabumi mampu mengembangkan produk batik berbentuk lukisan angka (batik Langka) dengan bantuan perangkat lunak (software) CorrellDraw yang dapat dioperasikan secara sederhana melalui telepon genggam. Selain itu, peserta didik secara bertahap mampu

melakukan internalisasi sistem nilai budaya Sunda melalui pelatihan keterampilan gamelan khas Sunda (karawitan, musik bambu) dan tarian upacara adat. Lebih membanggakan lagi karena tutor dan peserta didik bisa dicetak menjadi aktor dan aktris “semiprofesional” yang diwujudkan dalam bentuk film pendek yang bermutu. Beberapa judul film pendek yang sudah dibuat para sineas dengan melibatkan peserta didik antara lain “Runtah” (sampah), “Ibuku Sungai”, “Tanah Airku”, dan “Sepatuku”. Kegiatan yang mereka lakukan tentunya bukan hal yang biasa-biasa saja, tetapi suatu keseriusan untuk membangun pendidikan nonformal yang berkualitas. ■



Beberapa judul film pendek yang sudah diproduksi oleh SKB dan penghargaan untuk SKB



# GERAKAN LITERASI NASIONAL

*Sa ya sangat surprise, sangat kagum, sangat kaget bahwa bermacam macam cara dilakukan oleh Bapak, Ibu pegiat literasi ini dan ini sebuah gerakan yang menurut saya sangat bagus sekali. Tidak disentuh oleh pemerintah, tetapi mereka bergerak sendiri. Hal ini disampaikan oleh Joko Widodo, Presiden RI, saat menerima pegiat gemar membaca di Istana Negara, 2 Mei 2017.*

*... Aspek itu bukan cuma baca tulis, tapi harus cerdas berliterasi dalam bidang teknologi informasi, hukum, politik, ekonomi, budaya, termasuk di media sosial. (Muhadjir Effendy)*

*Ma syarakat jarang mau baca. Akibatnya, mereka mudah sekali mendapatkan informasi negatif, hoaks, dan konten lainnya tanpa lebih dahulu melakukan verifikasi kepada sumber yang sah. Literasi ini sangat perlu terutama untuk masyarakat dengan level yang harus lebih ditingkatkan lagi. (Men teri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara)*

Kepala badan pengembangan dan pembinaan bahasa, Dadang Sunendar memberikan KBBI kepada Ketua Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia, Sutrisna Wibawa



Untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, pemerintah melakukan berbagai program. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah men-canangkan sebuah gerakan besar, yaitu Gerakan Literasi Sekolah (yang kemudian menjadi gerakan besar bernama Gerakan Literasi Nasional). Gerakan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun

2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Pemerintah yang menjadi bagian dalam pendidikan karakter bangsa merasa harus ikut ambil bagian dalam gerakan ini. Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat menciptakan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berorientasi pada penumbuhan budi pekerti. Sejalan dengan itu, jauh sebelum Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 ditetapkan, Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 ayat (5) pun telah menyatakan bahwa mencerdaskan bangsa dilakukan melalui pengembangan budaya baca, tulis, dan hitung bagi segenap warga masyarakat.

Dalam kerangka itu pulalah, pada tanggal 18 Agustus 2015, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 meluncurkan suatu gerakan penumbuhan budaya baca-tulis yang bertajuk Gerakan Literasi Sekolah dengan tema “Bahasa Penumbuh Budi Pekerti”. Langkah, cara, dan strategi penting untuk penumbuhan budaya baca tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Peraturan yang menginisi-asi kegiatan membaca 15 menit bagi siswa sebelum masuk ke kelas-kelas mata pelajaran itu adalah bagian penting dari pemu-laan penumbuhan budaya literasi bangsa. Pada Tahun 2017, selain menjadi koordinator Gerakan



Literasi Nasional, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tetap memegang peran strategis dalam penyediaan bahan bacaan literasi. Tingginya kebutuhan bahan bacaan bermutu menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan itu. Bahan bacaan tersebut diharapkan membantu anak bangsa menjadi generasi emas berbudi pekerti. Penyediaan bahan bacaan literasi yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan pada Tahun 2017 dilakukan melalui sayembara penulisan bahan bacaan literasi. Tema buku dalam sayembara, di antaranya, pelajaran penting dari tokoh-tokoh Indonesia, kuliner Indonesia, lanskap dan perubahan sosial masyarakat perdesaan dan perkotaan, arsitektur tradisional

Indonesia, dan kekayaan bahasa daerah. Buku yang ikut serta dalam sayembara penulisan ini berjumlah 727. Kegiatan penulisan bahan bacaan literasi dirancang melalui berbagai tahapan, yaitu penjurian dan penilaian naskah oleh tim pakar, pertemuan penulis tahap I sebagai sarana penyempurnaan naskah sebelum dinilai oleh Puskurbuk, penyuntingan naskah untuk penyempurnaan kebahasaan, pencetakan terbatas untuk penilaian Puskurbuk, pertemuan penulis Tahap II sebagai sarana perbaikan naskah berdasarkan rekomendasi penilai Puskurbuk, penyelarasaan akhir sebelum naskah menjadi buku, dan tahap terakhir adalah uji keterbacaan. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Puskurbuk, buku yang dinyatakan layak berjumlah 138 buku dari 266

buku yang didaftarkan. Pada Tahun 2018, kegiatan penyediaan bahan bacaan literasi dilakukan melalui dua metode, penulis undangan yang diminta menulis langsung serta sayembara penulisan. Selain tema yang diangkat kembali dari Tahun 2017, terdapat satu tema tambahan, yaitu cerita tentang anak Indonesia. Buku yang ikut serta dalam sayembara berjumlah 1.135. Jumlah tersebut meningkat drastis dari Tahun 2017. Hal tersebut menandakan semakin antusiasnya masyarakat untuk menulis. Kegiatan penulisan bahan bacaan literasi Tahun 2018 dirancang melalui berbagai tahapan, yaitu penjurian dan penilaian naskah oleh tim pakar, pertemuan penulis tahap I sebagai sarana penyempurnaan naskah sebelum dinilai oleh Puskurbuk, penyuntingan naskah



untuk penyempurnaan kebahasaan, pencetakan terbatas untuk penilaian Puskurbuk, pertemuan penulis Tahap II sebagai sarana perbaikan naskah berdasarkan

rekomendasi penilai Puskurbuk, penyalarsaan akhir sebelum naskah menjadi buku, dan tahap terakhir adalah konsinyasi untuk mengujikan keterbacaan naskah.

Pada Tahun 2018 diharapkan seluruh buku yang dinilai oleh Puskurbuk dapat dinyatakan layak. ■



# WILAYAH TERBINA PENGGUNAAN BAHASA DI RUANG PUBLIK

*Karena bahasa bukan hanya menunjukkan bangsa, tanpa bahasa mungkin tak terbentuk Indonesia. (Najwa Shihab, Duta Baca Nasional)*

*Kalau bahasa dirusak, sebenarnya yang kita rusak bukan hanya alat komunikasi. Bahasa itu memiliki dimensi, membentuk kepribadian, dan etika. (Anhar Gonggong, Pakar Sejarah)*

*Anda tidak akan pernah memahami Indonesia selama Anda tidak pernah memahami bahasanya dan kesukubangsanya. (Anhar Gonggong, Pakar Sejarah)*

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa hingga September 2018 telah mengidentifikasi sebanyak 36 kabupaten/kota dari 14 provinsi terkait dengan penggunaan bahasa di ruang publik. Data penggunaan bahasa di ruang publik dikumpulkan dan dihimpun dari sepuluh lembaga di sepanjang jalan protokol kabupaten/kota. Sepuluh lembaga itu terdiri atas lembaga pendidikan (40%), lembaga satuan kerja

pemerintah (20%), dan lembaga usaha (swasta) berbadan hukum Indonesia (40%). Dari setiap lembaga pengguna bahasa itu diambil sepuluh data objek foto yang mewakili tujuh objek penggunaan bahasa negara dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Tulisan nama lembaga dan (jika ada) gedung utama sebanyak dua data.
2. Tulisan nama sarana umum sebanyak dua data.

3. Tulisan nama ruang pertemuan sebanyak satu data.
4. Tulisan nama produk barang/jasa sebanyak satu data.
5. Tulisan nama jabatan sebanyak satu data.
6. Tulisan penunjuk arah atau rambu umum sebanyak satu data.
7. Tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sebanyak dua data.





Untuk kegiatan pemantauan, data yang digunakan berjumlah 100 objek (10 lembaga x 10 objek) dalam satu format penilaian untuk satu wilayah penggunaan bahasa. Provinsi yang menjadi sasaran pengutamaan bahasa negara, yaitu Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara. Target semula adalah 104 kabupaten/kota di yang ditetapkan 14 provinsi

tersebut adalah 104 kabupaten/kota, karena tetapi data yang terkumpul hanya dari 36 kabupaten/kota atau 34,6% dari target yang telah ditetapkan.

Dari data yang terkumpul terdapat 17 kabupaten/kota dengan keterkendalian A, yaitu kategori yang menunjukkan wilayah penggunaan bahasa di ruang publiknya sangat terkendali: : secara fisik tidak ditemukan bahasa asing yang melemahkan; hampir sepenuhnya berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang sangat baik; 15 kabupaten/

kota dengan keterkendalian B, yaitu kategori yang menunjukkan wilayah penggunaan bahasa di ruang publiknya cukup terkendali: secara fisik tidak didominasi bahasa asing yang melemahkan; jauh lebih banyak berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang makin baik; dan 4 kabupaten/kota tidak teridentifikasi disebabkan data yang tidak lengkap atau kurang dari 100 foto dan nilai keterkendalian di bawah 1.399. Data hasil pemantauan pada 12 provinsi adalah sebagai berikut:

Data penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nilai	Terkendali
1	Jawa Barat	Kota Bandung	2798	A
2	Jawa Barat	Kota Sukabumi	2481	B
3	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	2634	A
4	Jawa Barat	Kabupaten Bandung	2361	B
5	Jawa Barat	Kota Cimahi	1967	Tidak Teridentifikasi
6	Jawa Barat	Kabupaten Subang	2655	A
7	Jawa Barat	Kabupaten Tasikmalaya	2768	A
8	Jawa Barat	Kabupaten Sumedang	2704	A
9	Jawa Barat	Kabupaten Bandung Barat	2463	B
10	Jawa Barat	Kabupaten Garut	2775	A
11	DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	2683	A
12	Jawa Tengah	Kabupaten Sragen	2585	B
13	Jawa Tengah	Kabupaten Wonogiri	2701	A
14	Jawa Tengah	Kabupaten Blora	2806	A
15	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap	2806	A
16	Jawa Tengah	Kabupaten Kudus	2074	Tidak Teridentifikasi
17	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	2443	B
18	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	2657	A
19	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Utara	2152	Tidak Teridentifikasi

20	Bali	Kota Denpasar	2691	A
21	Sumatra Selatan	Kota Palembang	2218	B
22	Jawa Timur	Kota Surabaya	2386	B
23	Jawa Timur	Kota Malang	2418	B
24	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	1793	Tidak Teridentifikasi
25	Lampung	Kota Bandarlampung	2484	B
26	Lampung	Kota Metro	2598	B
27	Lampung	Kabupaten Tanggamus	2678	A
28	Lampung	Kabupaten Waykanan	2677	A
29	Lampung	Kabupaten Lampung Tengah	2561	B
30	Lampung	Kabupaten Lampung Utara	2677	A
31	Lampung	Kabupaten Pesawaran	2552	B
32	Lampung	Kabupaten Pringsewu	2434	B
33	Lampung	Kabupaten Tulangbawang	2817	A
34	Lampung	Kabupaten Tulangbawang Barat	2591	B
35	Lampung	Kabupaten Lampung Timur	2712	A
36	Sulawesi Utara	Kota Manado	2487	B

Ibukota Provinsi

Keterangan:

Terkendali A :

Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya sangat terkendali: secara fisik tidak ditemukan bahasa asing yang melemahkan; hampir sepenuhnya berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang sangat baik.

Terkendali B :

Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya cukup terkendali: secara fisik tidak didominasi bahasa asing yang melemahkan; jauh lebih banyak berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang makin baik.

Terkendali C :

Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya kurang terkendali: secara fisik masih didominasi bahasa asing yang melemahkan; mulai lebih banyak berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang mulai baik.

Terkendali D :

Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya sangat kurang terkendali: secara fisik sangat didominasi bahasa asing yang melemahkan; sangat sedikit berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang kurang baik.

Skor ≤ 1.399 dikualifikasi dalam kategori belum terkendali karena terlalu dominan bahasa asing yang melemahkan dengan penerapan kaidah dan tipografi yang sangat buruk.

Tidak teridentifikasi dikualifikasi dalam kategori karena kurangnya data.

Selain 14 provinsi tersebut, terdapat 15 provinsi lain yang memantau penggunaan bahasa di ruang publik. Data yang terkumpul berasal dari 45 kabupaten/kota. Dengan melihat hasil yang ada, data dan temuan tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan bahwa metode yang digunakan seragam dan data yang digunakan akurat. ■





Kepala Biro PKLN Suharti dalam pembukaan World Indonesia Scholarship Forum 2018

## PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PROGRAM BEASISWA UNGGULAN

Program Beasiswa Unggulan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ditujukan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menyediakan bantuan pendidikan dan pelatihan, baik melalui jalur gelar maupun non-gelar. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kemendikbud, program ini bertujuan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan sehingga bantuan pendidikan dan pelatihan ini lebih diprioritaskan untuk bidang-bidang yang relevan dengan pengembangan pendidikan dan kebudayaan.

Program Beasiswa Unggulan yang merupakan salah satu program prioritas Kemendikbud, juga mendukung upaya pemerintah untuk memperkecil kesenjangan capaian pendidikan antarkelompok masyarakat. Program ini diharapkan dapat memberikan peluang lebih besar

kepada masyarakat kurang mampu dan/atau yang tinggal di daerah tertinggal. Komitmen pemerintah dalam memperkecil kesenjangan terlihat dari alokasi anggaran pada program ini yang semakin meningkat dari Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2018 ini, penerima Beasiswa Unggulan mencapai lebih dari 2.500 orang untuk jenjang S-1, S-2, dan S-3.

Beasiswa Unggulan diberikan kepada putra putri Indonesia yang ingin melanjutkan studi S-1, S-2, dan S-3 di Indonesia. Hal tersebut dirasakan oleh Indra Budi Setiawan, staf Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (Paska) Kemendikbud yang kini sedang cuti studi untuk melanjutkan pendidikannya. “Saat ini, saya terdaftar sebagai mahasiswa S-2 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Sudah sejak lama saya ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi untuk dapat meningkatkan kompetensi saya di bidang

pendidikan. Saya sangat beruntung bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan Beasiswa Unggulan dari Kemendikbud untuk meringankan beban biaya yang timbul selama studi. Beasiswa Unggulan memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa lebih berkonsentrasi menyelesaikan pendidikan tanpa terganggu masalah pembiayaan pendidikan. Terima kasih Beasiswa Unggulan,” jelas beliau. Selain itu, Beasiswa Unggulan juga diberikan kepada mahasiswa asing yang ingin melanjutkan studi S-2 dan S-3 di Indonesia. Pemberian beasiswa

ini untuk memperkuat hubungan dengan negara asal penerima beasiswa sekaligus mempromosikan bahasa, seni dan budaya Indonesia di kancah internasional.

Untuk meningkatkan akuntabilitas proses seleksi penerimaan Beasiswa Unggulan, mulai Tahun 2017, Kemendikbud bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri untuk memperbaiki sistem perekrutan calon penerima beasiswa. Perbaikan tersebut mulai dari proses pendaftaran hingga proses penerimaan Beasiswa Unggulan. ■

Jumlah Penerima Beasiswa Unggulan 2016-2018

Tahun	Penerima Beasiswa Unggulan			Jumlah
	S1	S2	S3	
2016	210	1169	127	1506
2017	1923	816	103	2842
2018 (estimasi)	1733	511	141	2385





## PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI WIRAUSAHA

***Wirausahawanlah yang akan menghasilkan banyak peluang kerja baru untuk berbagai profesi. (Joko Widodo)***

Jumlah wirausahawan di negeri ini memang masih tergolong rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengusaha di Indonesia pada Tahun 2016 hanya 3,1 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Dibandingkan dengan Tahun 2015, jumlah wirausahawan memang mengalami peningkatan, yaitu hanya 1,65 persen dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2017 tercatat sebesar 27.771.220 jiwa dari total penduduk di Indonesia. Dengan demikian, persentase penduduk miskin sebesar 11.64% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Pada bulan Februari 2016 data BPS menunjukkan bahwa angkatan kerja Indonesia mencapai 127.671.809 jiwa, sedangkan pengangguran terbuka masih ada 7.024.127 jiwa.

Meski begitu dibandingkan dengan negara tetangga, jumlah wirausahawan Indonesia masih tertinggal jauh. Di Malaysia saja, misalnya, jumlah wirausahawan sudah mencapai 5 persen, sedangkan di Singapura angkanya lebih tinggi, yakni 7 persen. Di negara maju, jumlah wirausahawan lebih banyak lagi. Di Jepang, jumlah wirausahawan sudah mencapai 11 persen, sedangkan di Amerika Serikat mencapai 12 persen.

Namun, minat masyarakat Indonesia untuk menekuni wirausaha ternyata cukup tinggi. Setidaknya hasil survei yang dilakukan Global Entrepreneurship Monitor (GEM) menunjukkan bahwa keinginan berwirausaha masyarakat Indonesia menempati posisi tertinggi kedua di ASEAN.

Sejalan dengan hal tersebut, pada Tahun 2017 Kemendikbud melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Ditbinsuslat) memiliki program prioritas, yaitu program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKWU). Melalui program ini, Kemendikbud bertekad ingin mengentaskan pengangguran dengan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan kepada peserta didik melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Proses pembelajaran program ini dilaksanakan selama 150 sampai dengan 200 jam: sekitar 50 jam materi kewirausahaan dan 150 jam materi keterampilan. Materi kewirausahaan yang diberikan kepada peserta didik harus berbasis pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berwirausaha. Untuk itu, kurikulum dan bahan ajar yang digunakan lembaga penyelenggara mencakup membangun pola pikir kewirausahaan,

membangun dan meningkatkan sikap dan perilaku usaha, memberikan pedoman manajemen usaha, dan memberikan keterampilan produksi barang atau jasa yang akan menjadi rintisan usaha lulusan program.

Ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi oleh LKP untuk bisa mengakses program ini. Beberapa prasyarat bagi LKP yang akan menyelenggarakan PKWU, yaitu LKP tersebut memiliki kerja sama dengan lembaga mitra yang bersedia menjadi “bapak angkat” dan menyediakan mentor rintisan usaha bagi lulusan program. Bahkan, lembaga penyelenggara juga wajib memiliki unit usaha sesuai dengan program keterampilan yang diajarkan.

Selain itu, dalam melaksanakan program tersebut, lembaga yang menyelenggarakan program PKWU wajib menggunakan metode 4 in 1 (dalam penyelenggaraan program, lembaga harus mengacu pada Input, Proses, Output, dan Outcome), misalnya, lembaga penyelenggara harus mengidentifikasi peluang usaha. Lembaga penyelenggara juga harus mengidentifikasi potensi sumber daya lokal (produk barang atau jasa) yang dapat dikembangkan menjadi usaha baru sesuai dengan peluang pasar. Jenis keterampilan yang diu-sulkan dalam program PKWU juga tidak sembarangan. Setidaknya, jenis keterampilan tersebut memiliki peluang usaha, baik produk barang maupun jasa yang laku untuk dijual dan layak untuk dijadikan usaha mandiri atau kelompok. Beberapa jenis keterampilan tersebut adalah bidang kuliner, fashion, otomotif, kecantikan, dan kerajinan tangan.

Bahkan, lembaga penyelenggara program juga diwajibkan untuk memberikan pendampingan usaha bagi peserta didik yang merintis usaha sesuai dengan keterampilan yang dikuasai. Pendampingan yang dilakukan lembaga penyelenggara minimal selama tiga bulan. Bentuknya berupa fasilitasi akses dana ke lembaga keuangan, kemitraan dengan mitra usaha, pemasaran hasil produksi, dan pemagangan usaha.

Adapun sasaran program PKWU ini diprioritaskan bagi masyarakat yang tidak mampu, masih menganggur, dan putus sekolah dengan usia berkisar antara 16 hingga 40 Tahun.

Ditbinsuslat menargetkan minimal 90 persen dari jumlah peserta didik yang mengikuti program ini dapat menyelesaikan program pelatihan dengan tuntas.

Selain itu, minimal 80 persen dari peserta didik yang lulus program PKWU dapat merintis usaha dan mendapat pendampingan dan bantuan dari mentor dan “bapak angkat”. Peserta didik yang merintis usaha memiliki penghasilan minimal sebesar upah minimum setempat yang dicapai dalam waktu satu Tahun.

Seperti yang diungkapkan oleh Ny. Ida Farida (pengelola LKP Mira di Cianjur yang mengajarkan keterampilan tata kecantikan rambut),

*“Peserta didik yang mengikuti program PKWU di lembaga kami kini telah memiliki penghasilan dari usaha kelompok yang dirintisnya. Nilainya memang belum besar. Baru berkisar antara 500 ribu hingga 1 juta rupiah per bulan. Meskipun demikian, kami optimis bahwa kelompok usaha program PKWU binaan kami akan berkembang. Setidaknya, pada Tahun kedua dan ketiga usaha tersebut sudah bisa menghidupi anggota kelompoknya. Bahkan, nantinya setiap anggota kelompok didorong untuk memiliki usaha masing-masing.”*

Selama Tahun 2017 tercatat sebanyak 40.035 peserta didik sudah memperoleh pendidikan kecakapan wirausaha, sedangkan peserta didik yang mengikuti program unggulan sebanyak 335 orang. Program ini telah dilaksanakan di sejumlah lembaga kursus dan pelatihan di seluruh Indonesia dengan berbagai jenis keterampilan, mulai dari menjahit, otomotif, tata rias pengantin, tata kecantikan rambut, hingga desain grafis. Hasilnya, peserta kini telah memiliki usaha sebagai upaya mengentaskan kemiskinan melalui wirausaha.



# SENSOR MANDIRI WUJUD KEPRIBADIAN BANGSA

Mewujudkan masyarakat sadar sensor, adalah salah satu upaya untuk mendukung Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni penguatan karakter bangsa dan memperteguh kebhinekaan Indonesia. Presiden Joko Widodo, saat menjelaskan perpres penguatan karakter bangsa dihadapan para ulama dan pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Rabu (13/9/2017), menyampaikan :

*“Diharapkan Perpres penguatan karakter bisa memberikan sebuah dasar dan fondasi bagi masyarakat kita, bagi santri-santri kita, bagi anak-anak didik kita, membentengi mereka dari intervensi budaya-budaya luar, budaya-budaya yang kita khawatirkan bersama bisa menggerus budaya-budaya baik yang kita punyai, baik yang berkaitan dengan kesopanan, kesantunan, integritas, kejujuran, hormat kepada ulama, para kiai, para ustaz, para gurunya,”*

Sebagai sebuah pertunjukan yang bersifat audio-visual, film dapat memberi pengaruh terhadap sikap dan perilaku penontonnya. Film dapat memberi dampak positif, namun juga dapat memberi dampak negatif bagi masyarakat. Diantara dampak positif film adalah ketika film dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi dan inovasi yang baik, berperan strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa, sekaligus menjadi sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, dan wahana promosi Indonesia di dunia internasional. Di sisi lain, film akan berdampak negatif apabila ditonton oleh penonton yang usianya tidak sesuai dengan klasifikasi usianya, sehingga dapat meninggalkan kesan berkepanjangan pada memori penonton. Khususnya bagi usia penonton anak, oleh karena anak mempunyai kecenderungan untuk meniru

apa yang dilihat dan didengarnya.

Menurut hasil sebuah hasil penelitian terhadap 30 film Barat yang diputar di India, film ternyata berdampak terhadap prilaku masyarakat di India, antara lain: (i) menumbuhkan perilaku konsumtif; (ii) mengubah cara pandang dalam menggunakan obat; (iii) mendorong tumbuhnya perilaku serba “kecanduan”; (iv) mendorong berkembangnya seks bebas; (v) merangsang tumbuhnya jiwa petualangan yang negatif; (vi) mempengaruhi pola makan, model pakaian, rumah, tata hubungan; (vii) merupakan serangan budaya, invasi budaya, ambiguitas budaya, amerikanisasi, dan transformasi budaya yang dominan; (viii) menyerang prinsip-prinsip kepatuhan yang dimiliki bangsa India; (ix) mencampuradukkan antara saklar dan profan; dan (x) melecehkan agama, sekolah, guru, pendeta, pastur, orang tua; dan lain-lain.

Berkenaan dengan hal tersebut, Lembaga Sensor Film (LSF) menyosialisasikan pentingnya Sensor Mandiri sebagai salah satu cara untuk meminimalisir pengaruh negatif film, menjaga nilai luhur budaya bangsa dari pengaruh budaya asing yang belum tentu sesuai dengan budaya bangsa. Sensor Mandiri adalah perilaku sadar dalam memilah dan memilih film yang akan diproduksi, dipertunjukkan, dan/atau ditonton. Salah satu upayanya adalah melakukan gerakan Budaya Sensor Mandiri yang dimulai dari Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan Perfilman, yakni adanya kesadaran terhadap peruntukan dan klasifikasi usia film sesuai peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari terbangunnya kesadaran budaya sensor mandiri dalam kegiatan usaha perfilman. Masyarakat penonton film pada sisi lain juga diberi pemahaman bagaimana caranya memilah dan memilih film yang sesuai dengan klasifikasi usianya. Apabila semua pihak menjalankan fungsi sensor mandiri, maka apa yang disebut masyarakat sadar sensor telah terwujud.

Terdapat 3 (tiga) target dari penguatan Budaya Sensor Mandiri, yaitu terbangunnya sinergitas dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM), semakin banyaknya produktifitas film yang memenuhi harapan masyarakat dan sesuai dengan tuntutan regulasi dan kesadaran masyarakat (pendidik dan orang tua) untuk menjadi pendamping bagi keluarganya. Untuk itu, Kemendikbud bersama dengan Lembaga Sensor Film (LSF), pada Tahun 2017 dan 2018, melakukan beberapa langkah penguatan budaya sensor mandiri.

## Kolaborasi dan Gerakan Bersama Budaya Sensor Mandiri

Kolaborasi dan gerakan bersama Budaya Sensor Mandiri adalah upaya penyebarluasan dan penginternalisasian Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (SBSM) secara terstruktur dan sistematis yang dilakukan bersama-sama antara Lembaga Sensor Film dan para ahli atau pakar di berbagai bidang ilmu dan komponen masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Fokus penguatan budaya sensor mandiri pada Tahun 2017 dan 2018 adalah membangun pemahaman budaya sensor mandiri di kalangan orang tua dan masyarakat pendidik. Melalui kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan, orang tua, guru, dosen, pelajar dan mahasiswa, diajak untuk bersama-sama memberikan pemahaman pentingnya Budaya Sensor Mandiri di lingkungan keluarga maupun lingkungan pendidikan tempat mereka berada. Hal ini dilakukan mengingat keluarga dan lembaga pendidikan merupakan gerbang utama pembentukan karakter bangsa. Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan ini dilaksanakan di beberapa kota/kabupaten yang tersebar pada 33 provinsi di Indonesia.

Besarnya dukungan terhadap budaya sensor mandiri tercermin dari pernyataan Bupati Kabupaten Blitar, Drs. H. Rijanto MM, saat menerima Kunjungan LSF, beliau mengapresiasi adanya upaya memasyarakatkan Budaya Sensor Mandiri yang disampaikan pemerintah melalui Kemendikbud dan LSF. Harapannya adalah

upaya pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud dan LSF untuk membangun karakter bangsa melalui film dapat tersampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten blitar.

## Penguatan Media Komunikasi Sebagai Sarana Kampanye Budaya Sensor Mandiri

Berdasarkan Laporan Tetra Pak Index di Tahun 2017, mencatatkan ada sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia. Sementara hampir setengahnya adalah pengguna media sosial, atau berkisar di angka 40%. Angka ini meningkat dibanding Tahun 2016, kenaikan pengguna internet di Indonesia berkisar 51% atau sekitar 45 juta pengguna, diikuti dengan pertumbuhan sebesar 34% pengguna aktif media sosial. Sementara pengguna yang mengakses sosial media melalui mobile berada di angka 39%.

Melihat pertumbuhan pengguna internet dan sosial media yang cukup besar, pada Tahun 2017 dan 2018, kampanye budaya sensor mandiri melalui sosial media menjadi salah satu prioritas Lembaga Sensor Film. Untuk mendorong kesadaran pengguna sosial media, yang umumnya adalah generasi milenial, pada Tahun 2017 diselenggarakan lomba penulisan artikel, pembuatan poster dan iklan layanan masyarakat, bertema Sensor Mandiri Wujud Kepribadian Bangsa.

Lomba diikuti peserta dari berbagai daerah di 33 provinsi, menjadi pemenang pertama dalam lomba penulisan karya tulis, seorang anak muda dari kota Makassar, bernama Fadly Yashari Soumena. Pemenang lomba pembuatan Poster, juga seorang pemuda yang berasal dari Bali, bernama Ferry Firmansyah. Terakhir, pemenang lomba pembuatan iklan layanan masyarakat, kembali jatuh pada pemuda dari Sukabumi, bernama Hegar. Antusiasme anak muda bangsa cukup menggembirakan, ini menunjukkan adanya kepedulian anak muda terhadap pentingnya budaya sensor mandiri di tengah masyarakat. Hasil karya dari pemenang lomba menjadi konten publikasi budaya sensor mandiri melalui media sosial yang dikelola oleh Lembaga Sensor Film.





# TERROR

## VIRTUAL

**SENSOR MANDIRI UNTUK MASA DEPAN SANG GENERASI PENERUS**  
 PULP TAYAMAN YANG SESUAI USA & JAMA TERBUKA BUKAN KETIKA BERHASIL MENONTON TV DISPLEY DAN JAKUAN DET TV

[illegible]

Mari Dukung Gerakan Sensor Mandiri Di Rumah Dengan Memilih Tayangan Yang Baik Untuk Anak Kita.

**#AYO  
SENSOR  
MANDIRI**



*Juara 1 lomba poster*



Melihat antusiasme dan kesuksesan pelaksanaan lomba penulisan artikel, pembuatan poster dan iklan layanan masyarakat pada Tahun 2017, maka di Tahun 2018, lomba bertema budaya sensor mandiri kembali digelar dengan menambah kategori lomba baru, yakni lomba pembuatan film pendek.

Perkembangan pengguna media digital yang begitu cepat, tidak menyebabkan penggunaan media konvensional menjadi ditinggalkan. Hasil studi Nielsen pada bulan Februari Tahun 2018 sebagaimana telah di publis melalauai laman [www.kompas.com](http://www.kompas.com), menyebutkan bahwa konsumsi media digital dan media konvensional kini saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja, porsinya berbeda-beda pada tiap generasi. Misalkan Generasi Z (10–19 Tahun), sebanyak 97 persen Generasi Z masih menonton televisi, 50 persen mengakses internet, 33 persen mendengarkan radio, 7 persen menonton televisi berbayar dan 4 persen membaca media cetak. Pada Generasi Milenial (20 – 34

Tahun), 96 persen dari mereka menonton televisi dan 58 persen mengakses internet. Sedangkan Generasi X (35-49 Tahun) yang menonton televisi (97 persen), mendengarkan radio (37 persen) dan mengakses internet (33 persen). Sementara, 95 persen dari Generasi Baby Boomers (50 – 64 Tahun) menonton televisi, 32 persen mendengarkan radio dan 9 persen mengakses internet.

Melihat potensi penonton televisi yang masih cukup besar, Tahun 2018 secara intensif LSF membangun komunikasi dengan beberapa lembaga penyiaran televisi sebagai mitra kerja, untuk bersama-sama turut mengkampanyekan budaya sensor mandiri di internal lembaga penyiaran itu sendiri, maupun ke luar kepada masyarakat umum, melalui penayangan iklan layanan masyarakat, talkshow, dan tayangan berita pada program siaran stasiun televisi.



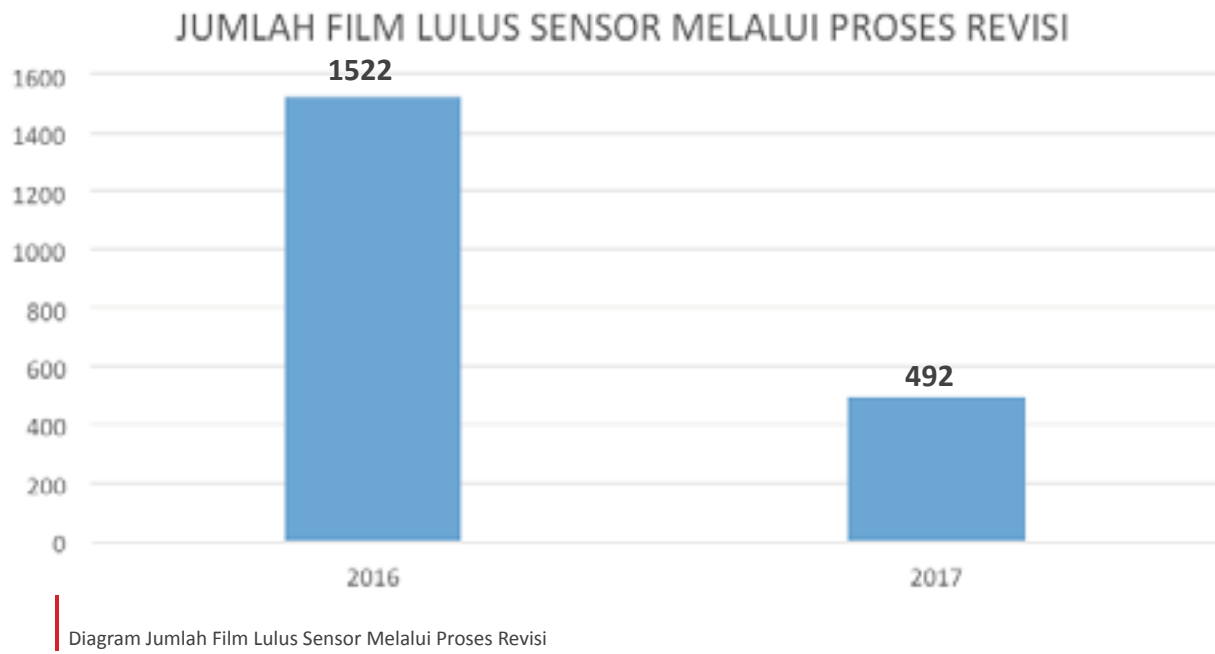
Kampanye budaya sensor mandiri melalui stasiun televisi

**Pemberian Penghargaan dan membuka ruang dialog**, berdasarkan data Tahun 2017, film yang lulus sensor melalui proses revisi mengalami penurunan jika dibandingkan data Tahun 2016. Bila Tahun 2016 film layar lebar maupun televisi yang lulus melalui proses revisi berjumlah 1.522 materi, maka



Kampanye budaya sensor mandiri melalui stasiun televisi

pada Tahun 2017 terjadi pengurangan drastis sebanyak 1.030 materi, sehingga pada Tahun 2017 film yang lulus sensor melalui proses revisi hanya berjumlah 492 materi. Hal ini menunjukkan semakin tumbuhnya kesadaran sensor mandiri di kalangan pelaku usaha dan kegiatan perfilman.



Kemendikbud sendiri sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini, berupaya meningkatkan animo dari masyarakat perfilman untuk memproduksi film berkualitas, khususnya perspektif adanya kesadaran sensor mandiri pada proses produksi karya filmnya, maka pada Tahun 2017 untuk pertama kalinya diselenggarakan Anugerah Lembaga Sensor Film bertema “Sensor Mandiri Wujud Kepribadian Bangsa”. Anugerah LSF adalah ajang penghargaan bagi tayangan bioskop dan tv yang telah lulus sensor dan mematuhi pedoman dan aturan terkait konten film, sekaligus perhelatan Anugerah LSF ini menjadi ajang untuk sosialisasi budaya sensor mandiri kepada msyarakat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dalam sambutannya pada Acara Malam Anugerah LSF Tahun 2017 di Balai Kartini, Jakarta, mengatakan:

*“Tugas dan tanggung jawab LSF sebagai garda budaya bangsa untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film, terutama dikalangan generasi muda dan anak didik perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya sungguh berharap hendaknya proses penyensoran terhadap film-film yang berpotensi ditonton oleh anak-anak haruslah benar-benar*

*memperoleh perhatian LSF dan juga para pengusaha dan pegiat perfilman pada umumnya. Terkait dengan film-film yang bernilai edukatif untuk konsumsi pelajar, kami merasakan masih sangat terbatas adanya baik kuantitas maupun kualitas. Kekosongan dan kekurangan ini saya harap mendapat perhatian kita semua. Jangan sampai dengan adanya kekosongan ini menjadikan anak-anak kita lari menonton film-film asing yang kontennya belum tentu sesuai dengan budaya bangsa kita dan dapat merusak dari segi pendidikan anak.”*

*Silariang, film garapan sutradara Rere Art2Tonic, menjadi pemenang pada Anugerah Lembaga Sensor Film 2017 untuk kategori film bioskop. Untuk kategori tayangan televisi, apresiasi tertinggi diberikan kepada Film TV berjudul Na-maku Sugeng Rawuh. Sedangkan untuk kategori sinetron, film Para Pencari Tuhan produksi Demi Gisela menjadi penerima Anugerah LSF 2017.*





Film Silariang, pemenang Anugerah LSF 2017 kategori film bioskop

Perhelatan Anugerah LSF akan kembali digelar Tahun 2018. Sebagaimana Tahun 2017, dalam Anugerah LSF kali ini akan ada pemberian Award atau penghargaan untuk film-film terbaik, ditambah kategori penghargaan baru bagi Stasiun Televisi dan Bioskop yang aktif berpartisipasi dalam mensukseskan budaya sensor mandiri.

“LSF akan memberikan Award untuk film bioskop, film serial, FTV, stasiun televisi dan eksibitor,” kata Rommy Fibri, Ketua Panitia Pelaksana Anugerah LSF 2018, di Jakarta (2/7). Keseluruhan rangkaian kegiatan ini dibingkai dalam tema besar “Sensor Mandiri, Wujud Kepribadian Bangsa”.

Menurut Rommy, Sensor Mandiri adalah program literasi media yang dilakukan Lembaga Sensor Film (LSF) periode 2015-2019. Inti dari “Sensor Mandiri” adalah ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pelaku perfilman, eksibitor, lembaga penyiaran dan masyarakat luas dalam memilih dan memilih film yang akan dibuat, dipertunjukkan dan ditonton. “Oleh karena itu, seluruh aspek penilaian Award dan lomba didasarkan pada ide besar tentang Sensor Mandiri,” ujar Anggota yang juga Juru Bicara LSF itu.

Menurut data LSF, jumlah produksi film nasional yang disensor menunjukkan tren yang meningkat. Film Nasional yang disensor pada 2017 berjumlah 159 judul film. Hal ini meningkat dari dua Tahun sebelumnya yakni 142 judul pada 2015 dan 154 judul pada 2016. “Film nasional terus menggeliat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas,” katanya. Ia menuturkan, Anugerah LSF 2018, akan menilai seluruh film nasional yang tayang di bioskop maupun televisi pada periode 1 September 2017 hingga 31 Agustus 2018.

Pada akhirnya, film selalu mempunyai nilai strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai strategisnya tergambar dari dampaknya, baik dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu negara bertanggungjawab dalam melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film, sekaligus dalam membina dan membangun perfilman nasional yang semakin maju, berdaya saing dan berbasis pada nilai budaya bangsa. Kemendikbud dan LSF berupaya mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah dengan membangun kesadaran dan kemampuan sensor mandiri pada masyarakat. ■





# LEMA DALAM KAMUS DAN PENGEMBANGAN ISTILAH

*Kamus adalah salah satu ukuran tingkat peradaban sebuah bangsa.*  
(Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum., Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa)



Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kamus yang dijadikan sumber acuan umum oleh masyarakat dari berbagai kelompok. Hingga saat ini, dapat dikatakan bahwa KBBI merupakan satu-satunya kamus umum yang disusun dan diterbitkan oleh badan pemerintah, dalam hal ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyusunan KBBI bertujuan untuk menyediakan sumber rujukan yang mutakhir dan terpercaya yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam setiap kesempatan secara cepat dan mudah.

KBBI telah diterbitkan dalam lima edisi. Edisi pertama, yang diterbitkan pada Tahun 1988, sampai dengan edisi keempat terbit dalam format cetak. Penggunaan KBBI format cetak ini bersifat terbatas dan ketersebarannya tidak merata. Keterbatasan tersebut dapat dilihat dari jumlah terbitan KBBI yang wilayah jangkauannya hanya terbatas pada kota-kota besar saja. Pada edisi-edisi sebelum KBBI V, penyusunan kamus dilakukan secara manual mulai dari pengumpulan sampai penyimpanan data. Melalui cara yang manual, proses penyusunan kamus membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh sebab itu,

diperlukan pembaharuan dalam pengumpulan data dan sistem penyimpanan data. Untuk mengatasi permasalahan di atas, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menerbitkan KBBI V dalam tiga format yang berbeda, yaitu format cetak, luar jaringan atau luring (offline), dan dalam jaringan atau daring (online). KBBI Edisi Kelima diluncurkan pada tanggal 28 Oktober 2016 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam versi cetak terbatas dan daring. Ketika diluncurkan, KBBI V memuat lebih dari 108.000 lema yang terdiri atas lebih dari 126.000 makna. Versi luring dengan basis Android

dan iOS diluncurkan kemudian pada bulan November 2016. Sejak pertama kali diluncurkan hingga bulan September 2018, jumlah pencarian di KBBI Daring sudah mencapai lebih dari 22.000.000 dengan rata-rata angka pencarian sebesar 33.000 per hari. Jumlah total usulan yang masuk ke tim redaksi adalah lebih dari 41.000 usulan. Salah satu keunggulan KBBI V dari edisi-edisi sebelumnya adalah penambahan lema yang berjumlah 18.000 lema baru dan format penyajian melalui daring dan luring. KBBI Daring adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna kamus mengakses informasi melalui laman kbbi.kemdikbud.go.id setiap saat selama terhubung dengan internet. Selain fitur pencarian, KBBI Daring juga dilengkapi dengan fitur usulan yang memungkinkan pengguna ikut berpartisipasi dalam pengembangan bahasa Indonesia. Untuk memudahkan pengguna, KBBI

juga dibuat dalam versi luring. KBBI Luring merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna mengakses KBBI tanpa jaringan internet melalui ponsel pintar dengan basis Android dan iOS. Untuk mendukung pengembangan bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa setiap Tahun melaksanakan program pengayaan bahasa Indonesia di berbagai provinsi dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemangku/anggota komunitas adat, dosen, mahasiswa/pelajar, wartawan/jurnalis, pegiat media sosial/blogger, pengembang program aplikasi, pegiat/pemerhati bahasa, anggota komunitas Forum Bahasa Media Massa (FBMM), masyarakat perorangan, penulis, pekamus/leksikograf, pengembang istilah/terminolog, penerbit, Pustekkom, kepala balai/kantor bahasa, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan/mentor, dan Kepala Badan Pengembangan dan

Pembinaan Bahasa. Selain data yang terus diperbaharui, untuk meningkatkan performa KBBI, aplikasi KBBI Daring dimutakhirkan secara bertahap setiap Tahun. Pada Tahun 2018, pemutakhiran laman dilakukan pada desain, fitur untuk penyunting, dan sistem keamanan. Pada Tahun 2019, aplikasi KBBI akan dilengkapi dengan fitur audio sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui pelafalan setiap kata. Pada Tahun 2020, melalui aplikasi KBBI Daring, pengguna tidak hanya dapat melakukan pencarian dan mengusulkan kata baru melainkan juga memperoleh informasi relevan seperti, tata bahasa, ejaan, frekuensi, korpus, dan kamus. Kemudian, pada Tahun 2021, aplikasi KBBI Daring akan memuat informasi etimologis setiap kata. Pada Tahun 2024, aplikasi KBBI Daring dibuat berbayar untuk mengakses fitur-fitur tingkat lanjut. ■





# PEMETAAN BAHASA SEBAGAI UPAYA PELINDUNGAN KHAZANAH BAHASA DAERAH INDONESIA

***Sa ya sendiri dapat berbicara dalam bahasa daerah Jawa. Bahasa daerah apa yang kamu kuasai? Masih berbicara dengan bahasa itu? (Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)***

Sebagai langkah awal dalam upaya perlindungan dan pengukuhan terhadap kekayaan khazanah bahasa-bahasa daerah Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa, dulu bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) merancang pemetaan bahasa melalui penelitian pemetaan bahasa-bahasa di Indonesia dan hubungan kekerabatannya. Pemetaan bahasa ini merupakan program inventarisasi dan identifikasi bahasa-bahasa daerah di Indonesia secara komprehensif. Ada dua hal yang ingin dicapai dari program pemetaan bahasa ini, yaitu (a) penentuan jumlah, varian, dan

sebaran geografis bahasa,; serta (b) penentuan hubungan kekerabatan antarbahasa dan pengelompokan bahasa. Produk yang dihasilkan dari pemetaan bahasa ini adalah buku Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia.

Badan Bahasa hingga Oktober 2017 telah mengidentifikasi sebanyak 652 bahasa daerah—tidak termasuk dialek dan subdialek—yang diperoleh dari hasil verifikasi dan validasi data pemetaan bahasa yang diambil di 2.452 daerah pengamatan (DP) di seluruh Indonesia. Hasil pemetaan itu diterbitkan dalam Cetakan IV. Jumlah tersebut tentunya akan bertambah seiring

bertambahnya jumlah DP dalam pemetaan berikutnya. Artinya, masih banyak bahasa daerah yang belum dipetakan. Pada Tahun 2018, diperkirakan jumlah bahasa yang terpetakan akan bertambah sebanyak sembilan bahasa dari dua belas DP.

Jumlah bahasa daerah yang telah teridentifikasi terus mengalami penambahan. Hal ini dapat terlihat dari jumlah bahasa daerah yang teridentifikasi pada buku cetakan-cetakan sebelumnya. Pada bBuku Cetakan I (2008) memuat 442 bahasa, Cetakan II (2013) memuat 578 bahasa, dan Cetakan III (2016) memuat 646 bahasa. Pemetaan bahasa ini sangat penting

untuk menentukan upaya-upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa. Moh Fifik Syafiudin, Kepala Bidang Toponim dari Badan Informasi Geospasial (BIG), mengatakan, “Pemetaan bahasa berperan penting dalam mengenal, memahami ciri dan karakter demografi bangsa, serta memperkuat wawasan kebangsaan.” Dalam tataran praktis, sebagai seorang yang bergerak di dunia penyiaran, Asep Nurisa Mahendra (Kepala Bidang Siaran Stasiun Siaran Luar Negeri di LPP RRI) mengatakan,

*“Sebagai seorang yang sehari-hari berkecimpung di bidang penyiaran, manfaat dari peta bahasa sangat banyak, antara lain, kita mendapatkan pengetahuan luas tentang berbagai kekayaan bahasa yang dimiliki setiap daerah. Kita bisa tepat sasaran dalam memberikan informasi kepada pendengar melalui bahasanya.”*

Lebih lanjut, Asep menambahkan bahwa

*“... selama ini kita mendekatkan diri kepada pendengar dengan memberikan informasi melalui bahasa daerah. Dengan adanya peta bahasa ini RRI dapat terbantu dalam*

*penyampaian informasi, mana yang cocok dengan kearifan lokal sehingga informasi edukasi dan hiburan tidak terbuang percuma. Di samping itu, kita juga mengenalkan kepada dunia bahwa tiap daerah memiliki kekayaan bahasa daerah yang beragam, bukan hanya segi keindahan alamnya semata.”*

Selain itu, pemetaan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menjelajahi berbagai kemungkinan fungsi bahasa (ranah penggunaan), akuisisi (transmisi lintas generasi), kebijakan pemerintah mengenai penetapan status dan korpus bahasa, serta bahan pertimbangan untuk melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap bahasa pada suatu kelompok masyarakat. Hasil inventarisasi, deskripsi, dan pemetaan bahasa mempunyai manfaat secara umum sebagai berikut.

1. Hasil pemetaan bahasa dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran guna menciptakan rasa persatuan di tengah situasi kebinekaan bahasa dan budaya di Indonesia.
2. Deskripsi tentang jumlah bahasa di Indonesia dapat dijadikan sarana untuk menelusuri jati diri bangsa dalam rangka mengukuhkan rasa persatuan warga di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang

terdiri atas berbagai suku bangsa.

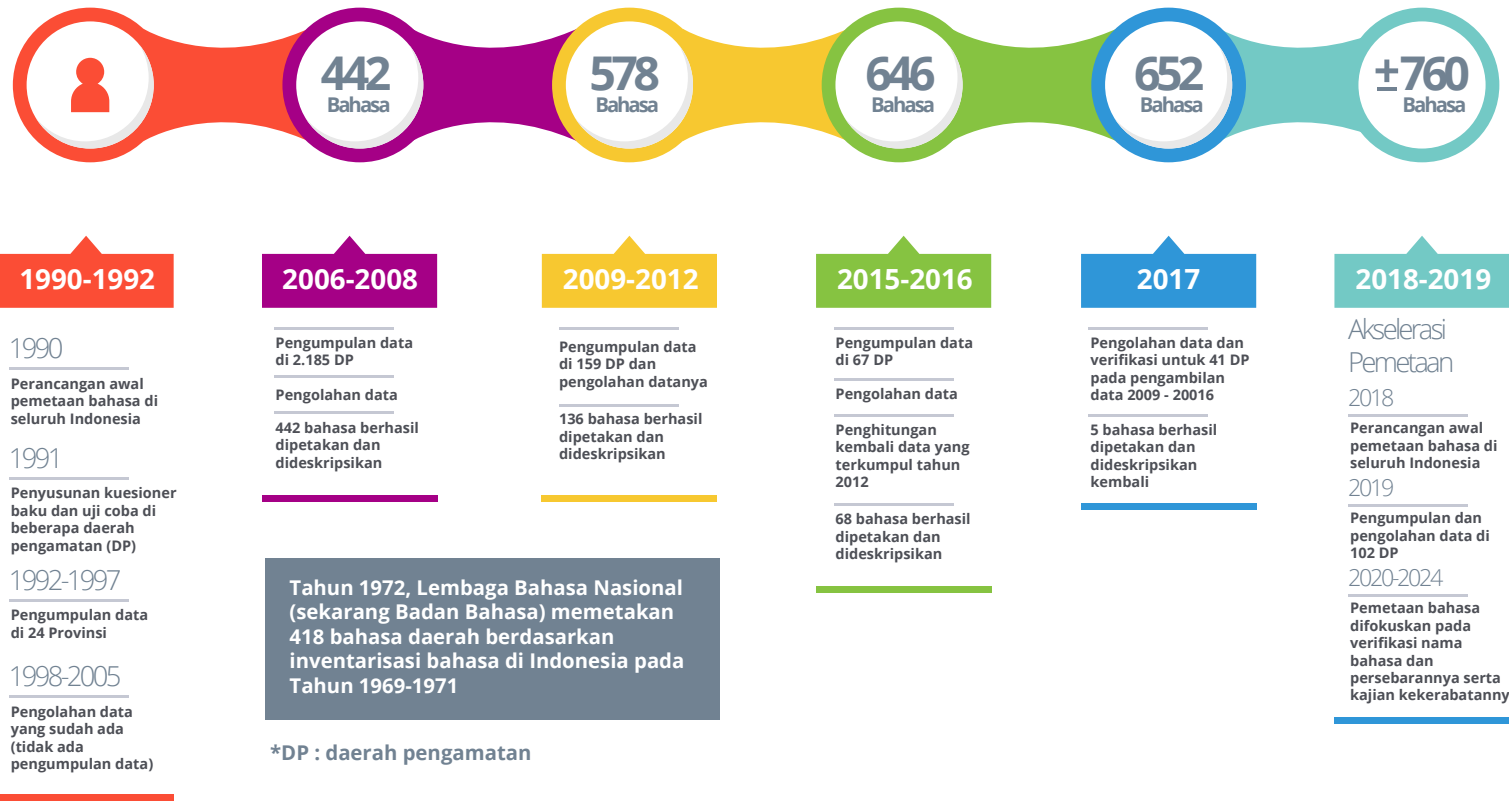
3. Inventarisasi bahasa di Indonesia dapat membantu masyarakat untuk semakin memahami budaya dan kearifan lokal yang terdapat di wilayah pakai dan persebaran bahasa di Indonesia.
4. Peta bahasa dapat dimanfaatkan oleh dinas kesehatan untuk membuat ramalan peta penyebaran wabah penyakit karena batas penyebaran epidemi pada umumnya sejalan dengan batas bahasa/dialek dan epidemi mudah berjangkit pada orang-orang yang sering melakukan kontak.
5. Informasi pada peta bahasa juga dapat dimanfaatkan oleh bidang ilmu sosial untuk melokalisasi suatu konsep budaya tertentu. Hal ini disebabkan pada saat informan memberikan konsep bahasa secara tidak langsung juga memberikan informasi budaya sehingga dapat mendeteksi wilayah budaya yang ada di Indonesia.
6. Peta bahasa dapat memperlihatkan informasi mengenai migrasi penduduk dan distribusi penduduk sehingga dapat membantu menentukan pemekaran wilayah dengan memperhatikan batas bahasa atau dialek. ■

## PETA BAHASA DARING (ONLINE)





PEMETAAN BAHASA DI INDONESIA



HARI FILM NASIONAL 2018

Perfilman Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Hal ini ditandai dengan kehadiran bioskop pertama di Indonesia pada tanggal 5 Desember 1900. Lebih dari dua dekade setelahnya, pada Tahun 1926 film lokal pertama yang bertajuk “Loetoeng Kasaroen” dirilis. Film bisu ini disutradarai oleh sutradara Belanda G. Kruger dan L. Hueveldorp. Pada Tahun 1928 pekerja film dari Shanghai datang ke Indonesia untuk menggarap film “Lily Van Shanghai”. Meski menggunakan banyak aktor lokal, kedua film pertama tersebut mencerminkan adanya dominasi Belanda dan Cina dalam sejarah perkembangan film di Tanah Air. Tidak berhenti di situ, pada Tahun 1940-an, perfilman Indonesia dijadikan alat propaganda politik oleh Jepang selama kurang lebih 7 Tahun lamanya.

Pada masa ini itu film Indonesia tidak memiliki izin produksi karena hanya film politik Jepang dan film Indonesia lama yang diperbolehkan boleh ditayangkan. Titik terang kebangkitan film nasional pun akhirnya terlihat. Sutradara Indonesia Usmar Ismail berhasil memproduksi sebuah film berjudul “Darah dan Doa” atau “The Long March of Siliwangi” melalui perusahaan film miliknya sendiri, yaitu Perfini.

Hari pertama pengambilan gambar tersebut jatuh pada tanggal 30 Maret 1950. Tanggal inilah yang kemudian dipilih oleh Dewan Film Nasional sebagai Hari Film Nasional. Ada alasan khusus mengapa film ini dijadikan sebagai penanda bangkitnya industri perfilman Indonesia. “Darah dan Doa” menceritakan perjalanan

panjang (long march) prajurit Indonesia dan keluarga mereka dari Yogyakarta ke pangkalan utama mereka di Jawa Barat.

Perjalanan ini dipimpin oleh Kapten Sudarto, yang menjadi tokoh utama di dalam film ini. Kapten Sudarto diceritakan bukan tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai seorang manusia yang rawan membuat kesalahan. Di dalam perjalanannya, ia dipertemukan oleh dengan seorang pengungsi wanita berdarah

Indo-Belanda, dan sang komandan pun menaruh hati kepadanya meskipun ia telah beristri. Film berakhir ketika Indonesia berdaulat di pada Tahun 1950. Meski memiliki bumbu romansa, film ini sukses menggambarkan ideologi yang dimiliki orang-orang Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan mereka. Oleh karena itu, “Darah dan Doa” dianggap film pertama yang mencerminkan ciri khas Indonesia dan pantas menjadi titik bangkitnya perfilman Tanah Air.

Dimulai dari hal tersebut, Hari Film Nasional menjadi rutin diperingati pada tanggal 30 Maret setiap Tahun. Lebih lanjut, Hari Film Nasional

2018 cukup berbeda dengan Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2017 terdapat rangkaian kegiatan, seperti pemutaran film di Gedung A Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Workshop Animasi di Kota Malang, dan Perayaan Acara Puncak dengan mengadakan Pameran pameran di Perum Produksi Film Negara Jakarta. Pada Tahun ini terdapat beberapa rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Film Nasional 2018. Pada tanggal 16



Poster film Darah dan Doa





Mendikbud dengan Presiden RI bersama-sama menonton film Yowis Ben pada hari film nasional

Maret 2018, Pusbang film Film mengadakan talkshow bersama BKLM mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh Pusbang film Film untuk meramaikan Hari Film Nasional. Selain itu, pada tanggal yang sama, Pusbang film Film melaksanakan Taklimat taklimat media di lounge XXI Plaza Senayan yang berisikan ajakan kepada masyarakat untuk menonton film karya anak bangsa. Taklimat media ini turut melibatkan Parfi56, Badan Perfilman Indonesia, serta beberapa aktor kawakan Indonesia.

Kemudian pada tanggal 21 Maret 2018, Pusbang Film mengadakan kegiatan Bincang-Bincang Film bersama Mendikbud dan jajarannya dengan mengundang beberapa sineas dan komunitas perfilman, termasuk guru dan siswa SMK yang ada di dalamnya. Dalam kesempatan tersebut, beberapa undangan dilibatkan dalam pembahasan mengenai wajah perfilman Indonesia pada masa mendatang, termasuk strategi yang tepat untuk meningkatkan kompetensi tenaga perfilman dari level sekolah menengah.

Acara puncak Hari Film Nasional dilaksanakan di Cinemaxx Malang Town Square, Malang pada tanggal

30 Maret 2018. Dalam perayaan acara puncak ini, Presiden RI turut hadir untuk menonton film “Yowis Ben” yang didampingi oleh Mendikbud. Melalui perayaan Hari Film Nasional, Presiden Joko Widodo turut menyampaikan ajakan untuk terus mendukung film Indonesia,

*“Semoga film nasional tumbuh pesat yang berdampak pada meluasnya lapangan kerja. Ayo nonton film Indonesia.”*

ujarnya.

Selain menonton film “Yowis Ben”, Mendikbud juga memberikan penghargaan dan juga Sertifikasi Asesor kepada sineas dan pegiat film, yaitu Film Terlaris 2017, Film Indonesia Berprestasi di Luar Negeri, dan Penghargaan Kesetiaan bagi pegiat perfilman termasuk wartawan film. Sertifikasi Asesor diberikan kepada asesor yang telah mengikuti pelatihan asesor dari Pusbang Film. ■



## FASILITASI PENGEMBANGAN PERFILMAN

***Peran budaya dalam membangun bangsa sangat mendasar karena menyangkut nilai-nilai kehidupan yang melandasi sebuah tatanan masyarakat. (Presiden Joko Widodo, 11 Juni 2018)***

Kemajuan Korea Selatan adalah sebuah contoh nyata bagaimana kebudayaan mereka berhasil dikapitalisasi menjadi produk-produk industri kreatif. Hal ini hanya dimungkinkan jika nilai-nilai budaya mereka telah mengakar kuat sebagai sendi kehidupan masyarakat. Artinya, rakyat Korea adalah masyarakat yang menjadikan tradisi dan budaya mereka sebagai landasan dalam setiap sendi kehidupan.

Lebih lanjut, film merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam perkembangan kebudayaan Indonesia. Film merupakan salah satu media yang dapat menyampaikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia dan paling mudah diakses oleh seluruh warga, bahkan warga dunia. Lebih lanjut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pembukaan Apresiasi Film Indonesia di Manado pada tanggal 8 Oktober 2016 menyampaikan, “Misi suci dari film adalah mengemban pendidikan bangsa. Kita harus mendorong, mengawasi, dan memberi peringatan untuk masa depan film yang lebih baik”. Dari pentingnya peran film dalam kemajuan pendidikan, dapat diketahui bahwa pemerintah perlu turut serta mengembangkan perfilman Indonesia.

Dalam upaya memberikan kesempatan bagi

komunitas film dan masyarakat untuk berkarya, meningkatkan kapasitas, dan memperkaya pengalaman di bidang perfilman, Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melaksanakan program Fasilitasi Pengembangan Perfilman bagi Komunitas dan Masyarakat Tahun Anggaran 2018. Hal ini merupakan bentuk solusi dari permasalahan yang kerap dihadapi para sineas, masyarakat perfilman, dan juga komunitas film saat ini. Salah satu masalah yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur dan hal-hal yang terkait dengan kendala secara finansial. Untuk dapat mempertahankan keberlangsungan eksistensi dan aktivitas berkarya melalui film, mereka perlu dukungan yang nyata, terutama dari pemerintah. Dengan begitu, Pusat Pengembangan Perfilman hadir untuk menjalankan peran dan tanggung jawab dalam memberikan fasilitasi pengembangan masyarakat bagi komunitas dan masyarakat. Fasilitasi Pengembangan Perfilman merupakan program pemberian bantuan kepada sineas dan komunitas masyarakat film untuk digunakan dalam rangka menyelenggarakan berbagai kegiatan perfilman.

Program Fasilitasi terdiri atas bantuan fasilitasi



pengembangan film bagi komunitas, bantuan fasilitasi festival dalam negeri, bantuan fasilitasi pekan film di luar negeri, dan bantuan fasilitasi keikutsertaan insan film Indonesia di Festival Luar Negeri. Bantuan ini diberikan sebagai wujud dukungan pemerintah yang bersifat stimulus terhadap aktivitas atau proses kreatif para pelaku perfilman, baik untuk perseorangan maupun kelompok dalam upaya memajukan perfilman Indonesia. Jenis kegiatan dan bentuk bantuan perfilman yang diberikan meliputi fasilitasi produksi film, apresiasi, eksibisi, dan peredaran film, dan juga peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia. Program fasilitasi ini sudah berjalan sejak Pusbang Film

berdiri, yakni dari Tahun 2015. Jumlah penerima fasilitasi ini kini sudah mencapai 41 dukungan atau bantuan yang terakumulasi dari Tahun 2015 hingga 2017. Prinsip dasar dari pelaksanaan Program Fasilitasi Pengembangan Perfilman bagi Komunitas dan Masyarakat adalah harus tetap berada pada koridor mengemban misi pembangunan karakter bangsa, penguatan budaya, dan sejalan dengan gerakan Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden RI. Saat pelaksanaan pada Tahun 2018, terdapat delapan belas penerima bantuan fasilitasi pengembangan perfilman untuk Gelombang I dan berikut adalah daftar penerima fasilitasi tersebut.

No.	Judul Proposal/Jenis Kegiatan	Instansi	Tanggal Kegiatan
1	Lubuklinggau Student Short Movie Festival 2018	Benny Institute	Mei--Juli 2018
2	Seminar Sehari dan Coaching Clinic Film Pendek "Warna Keberagaman Sumbawa"	Komunitas Sumbawa Cinema Society	5 Mei 2018
3	Produksi Film (Pra Produksi) Pengembangan dan Riset Skenario "Pulang"	Lajar Tantjap Film	April--Juli 2018
4	Praproduksi Film Anak Tanean Lanjeng	Independen Film Surabaya (Infis)	April--Juni 2018
5	Sekolah Lapang Managemen Produksi dan Videografi	Budak Kadub Jambi	30 April--1 Mei 2018
6	Pemutaran Film Bioskop Outdoor dalam Ekspedisi 17 Kaki Gunung di Pulau Jawa	Aksa Bumi Langit	20 April--10 Juni 2018
7	Festival Film Pelajar Krakatau II	Dewan Kesenian Lampung	5--6 Mei 2018
8	Sosialisasi ke Sekolah Sultan Agung The Untold love Story 2018	Moryati Soedibyo Cinema	April--Mei 2018
9	Festival Film Banten 2018	Kremov Pictures	Mei--Juli 2018
10	Produksi Film Pendek Fiksi "SIKO"	Komunitas Film Kupang	Maret--Mei 2018
11	Kegiatan Boemboe Forum 2018	Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia	13--14 Juli 2018
12	Festival Film Kalimantan Barat	Komunitas Film Sintang	5--6 Mei 2018
13	Desain Produksi Film Fiksi "Baca 4/4" (MACAPAT)	Alamanda	23 Maret--20 April 2018
14	Workshop Produksi Film Pendek "Hitam Putih"	Forum Lenteng	10 April--20 Juni 2018
15	Riset Film Dokumenter "Harta Harimau Sumatra"	Dennis Angga Hermawan	Maret--Mei 2018
16	Exibition dan Workshop Film Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Umum	Komunitas Dongeng Dakocan	1--3 Juli 2018
17	Festival Film Surabaya	SMK Dr. Soetomo	27--29 April 2018
18	Produksi Film Sinelayu	Komunitas Sinema Melayu	Januari--Juni 2018

Daftar penerima fasilitasi pengembangan perfilman

Salah seorang penerima fasilitasi pengembangan perfilman, Manuel Alberto Maia, mengatakan bahwa program tersebut sangat membantu, terlebih lagi bagi insan perfilman yang ingin berkarya, tetapi jauh dari akses kemudahan melakukan produksi film.

*“Menurut saya sangat membantu terutama bagi yang memiliki akses produksi yang jauh, akses terhadap modal dan alat sehingga sangat meringankan dan saya rasa program ini perlu ditingkatkan jumlah penerimanya,”*

ujarnya. Dukungan lain pemerintah adalah dalam bentuk beberapa sarana sebagai bentuk pengambangan perfilman, antara lain, sebagai berikut.

1. Mobil bioskop keliling yang tersebar di 34 provinsi. Pada Tahun 2017, boiling sudah diberikan ke 10 provinsi dan 10 kabupaten/kota yang berada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani perfilman. Tujuannya adalah memperluas akses/jangkauan masyarakat dalam mendapatkan tontonan yang mendidik dan berkualitas, terutama di daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan bioskop.
2. Peralatan pemutar film pada 2017 diberikan kepada 20 SKPD di kabupaten/kota dan 14 provinsi yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap film Indonesia, terutama di daerah 3T: tertinggal, terdepan, dan terluar.
3. Peralatan produksi film pada 2017 diberikan untuk 9 SMA, 22 SMK, 24 kabupaten/kota di 13 Provinsi dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam hal pembuatan atau produksi film. ■





# AKREDITASI SEBAGAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

## Peran Akreditasi dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/ atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (22). Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, akreditasi dilakukan terhadap sekolah/ madrasah. Sekolah/ madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), sekolah luar biasa (SLB), satuan pendidikan kerja sama (SPK), dan satuan pendidikan formal lain yang sederajat. Akreditasi sekolah/ madrasah bertujuan untuk memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/ madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; memberikan pengakuan peringkat kelayakan; menetapkan mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;

dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai bentuk akuntabilitas publik. Hasil penilaian dalam pelaksanaan akreditasi diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.

Proses akreditasi dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Penilaian akreditasi sekolah/ madrasah dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/ M). BAN-S/ M merupakan badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/ atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Peran BAN-S/ M dalam penjaminan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran kegiatan akreditasi sebagai unsur eksternal yang hasilnya (baik berupa peringkat akreditasi maupun rekomendasi tindak lanjut) disampaikan kepada setiap satuan pendidikan dan berbagai instansi

penyelenggara dan pembina satuan pendidikan sebagai masukan untuk perbaikan, pengembangan, dan penyempurnaan mutu dalam rangka penjaminan mutu pendidikan. Peran BAN-S/ M dalam penjaminan mutu pendidikan saat ini telah mengalami kemajuan cukup pesat. Hal tersebut tercapai karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap arti pentingnya akreditasi dalam peningkatan mutu sekolah/ madrasah. Dilihat dari aspek pemanfaatan hasil akreditasi, kesadaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan pentingnya akreditasi menjadikan hasil akreditasi sebagai dasar atau acuan utama dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan program di bidang peningkatan mutu sekolah/ madrasah.

## Mekanisme Akreditasi

Mekanisme akreditasi merupakan alur kerja yang memuat tahapan dalam pelaksanaan program akreditasi sekolah/ madrasah. Pada Tahun 2018, BAN-S/ M telah menetapkan delapan langkah pelaksanaan akreditasi sekolah/ madrasah sebagaimana yang dapat dilihat dalam gambar berikut



## Penerapan Aplikasi Penilaian Akreditasi secara Online

Pada Tahun 2018, kelembagaan BAN-S/ M mengalami proses transformasi yang cukup signifikan. Di samping karena transisi keanggotaan BAN-S/ M Periode 2012-2017 ke periode 2018-2022, juga karena pelaksanaan akreditasi menggunakan Aplikasi Penilaian Akreditasi secara online menggunakan Sispena. Sispena-S/ M yang telah diperkenalkan sejak Tahun 2017 ini merupakan terobosan BAN-S/ M untuk menyederhanakan proses pelaksanaan akreditasi. Penerapan akreditasi melalui online ini merupakan implementasi dari Permendikbud No 13 Tahun 2018 tentang BAN-S/ M

dan BAN PAUD dan PNF. Dalam Pasal 19 ayat (1) diatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya BAN menggunakan data yang terintegrasi dengan Kementerian. Dengan ketentuan tersebut, diharapkan dapat mendorong upaya pengelolaan manajemen satu data dalam menunjang tata kelola dan informasi yang terpadu.

Dengan Sispena-S/ M, asesor pada akhirnya didorong untuk melakukan asesmen yang secara langsung bersentuhan dengan mutu satuan pendidikan. Upaya ini akan dilakukan melalui dukungan kebijakan integrasi data yang dilakukan antara Sispena-S/ M dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta *Education Management Information*

*System* (EMIS) Kementerian Agama.

## Sertifikat Akreditasi Elektronik

Pada Tahun 2018, BAN-S/ M menetapkan kebijakan terkait Penerbitan Sertifikat Akreditasi dan Sertifikat Asesor secara elektronik. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga Validitas dan efisiensi anggaran. Kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Kessepekatan Kerja Sama (MoU) antara Balitbang Kemendikbud dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk Kerjasama terkait Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik. Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan selama 2 Tahun dan akan diperpanjang dan diperbaharui di kemudian hari.



Dengan adanya MoU tersebut, maka saat ini BAN-S/M sudah bisa mengeluarkan Sertifikat dalam bentuk elektronik.

Hasil akreditasi Sekolah/ madrasah Tahun 2012 sd. 2017

BAN-S/M selama periode Tahun 2012-2017 ini telah berhasil mengakreditasi sebanyak 228.184 sekolah/madrasah dengan sebaran diperlihatkan dalam Tabel 1 berikut ini. Apabila dibandingkan dengan kuota akreditasi APBN Kemendikbud Tahun 2012-2017 yang jumlahnya sebesar 197.771 sekolah/madrasah, maka pelaksanaan akreditasi Tahun 2012-2017 telah melampaui target dengan tingkat pencapaian sebesar 115%.

Hasil akreditasi sekolah/ma-  
drasah Tahun 2012-2017 untuk seluruh jenjang (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan SLB) berdasarkan peringkat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Persentase dengan peringkat A sebanyak 30,8%;
- b. Persentase dengan peringkat B sebanyak 53,5%;
- c. Persentase dengan peringkat C sebanyak 14,3%;
- d. Persentase dengan peringkat TT sebanyak 1,4%.

Dari data tersebut, peringkat akreditasi setiap jenjang menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana persentase peringkat A dan B untuk seluruh jenjang mencapai 84,3%. Hasil ini menunjukkan bahwa target pemerintah yang tercantum dalam Renstra

Kemendikbud 2015-2019 di mana Sekolah dan Madrasah minimal 80% harus terakreditasi A dan B telah terpenuhi. Namun demikian, masih ada 15,7% yang belum memenuhi target Renstra kemendikbud. Berdasarkan data populasi sekolah/madrasah, maka sekolah/madrasah yang belum diakreditasi ada sebanyak 37.350 S/M dan ditambah jumlah S/M yang berstatus Tidak Terakreditasi sebanyak 3.642. Jadi target yang harus dituntaskan pada Tahun yang akan datang adalah sebanyak 40.992 S/M. ■

TAHUN	KUOTA	REALISASI	PERSENTASE
2012	44.640	47.711	107 %
2013	23.110	21.984	95 %
2014	21.223	28.572	135 %
2015	30.735	36.693	119 %
2016	44.377	51.860	117 %
2017	33.686	40.561	120 %
Total	197.771	228.184	115 %

Realisasi Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Secara Nasional Tahun 2012-2017

NO	Jenjang	A	B	C	TT	Jumlah Yang divitasi	Jumlah keseluruhan S/M
1	SD/MI	42.538	91.344	21.690	2.060	157.632	174.224
	SD	37.630	82.271	20.133	1.983	142.017	148.372
	MI	4.908	9.073	1.557	77	15.615	25.852
2	SMP/MTS	16.698	23.747	8.317	832	49.594	57.673
	SMP	12.459	14.551	5.424	515	32.949	39.104
	MTS	4.239	9.196	2.893	317	16.645	18.569
3	SMA/MA	7.680	8.310	2.975	372	19.337	22.518
	SMA	5.621	4.459	1.432	165	11.677	13.488
	MA	2.059	3.851	1.543	207	7.660	9.030
4	SLB	467	807	164	36	1.474	2.179
5	SMK *	11.433	12.509	3.314	342	27.598	36.391
	Jumlah	78.816	136.717	36.460	3.642	255.635	292.985
	Persentase (dalam persen)	30,8	53,5	14,3	1,4		

Realisasi Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Secara Nasional Tahun 2012-2017



Pengukuhan anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah





Mendikbud memberikan penghargaan kepada Duta Terbaik Rumah Belajar

## DUTA RUMAH BELAJAR: AMBASSADOR PROVINSI DALAM PEMANFAATAN TIK UNTUK PEMBELAJARAN

***Men jadi Duta Rumah Belajar adalah anugerah karena dibekali dengan berbagai ilmu dan pelatihan untuk menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Meilita Salamon, Duta Rumah Belajar 2017 Provinsi Maluku***

Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sudah selayaknya menjadi hal yang umum untuk diterapkan. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena peran teknologi pada setiap aspek kehidupan terus meningkat seiring dengan tuntutan industri masa kini, tidak terkecuali pada sektor pendidikan. Pada proses pembelajaran, teknologi membantu guru untuk menciptakan atmosfer baru dalam proses

pembelajaran yang lebih atraktif karena keberagaman media yang dapat dimanfaatkan, baik melalui audio maupun visual. Di samping itu, siswa terdorong untuk lebih kreatif untuk memperoleh sumber belajar alternatif. Salah satunya melalui pendayagunaan internet. Teknologi membuka gerbang menuju pembelajaran yang lebih berkualitas. Pemanfaatan internet dan gawai sudah selayaknya dapat

dirasakan oleh guru dan siswa di kelas.

Untuk menyosialisasikan hal ini, terutama Rumah Belajar (<https://belajar.kemdikbud.go.id>) sebagai platform pembelajaran yang dikembangkan oleh Kemendikbud, sejak Tahun 2017, Pustekkom menggelar program Duta Rumah Belajar. Duta ini terdiri atas guru terpilih yang dianggap mampu untuk menjadi

ambasador untuk menyebarkan informasi terkait Rumah Belajar dan media pembelajaran berbasis TIK lainnya kepada guru-guru di provinsi masing-masing. Program Duta Rumah Belajar berhasil melahirkan guru-guru berpotensi yang memiliki motivasi tinggi dalam pemanfaatan dan pengembangan TIK untuk proses belajar-mengajar di kelas.

Pendaftaran untuk menjadi Duta Rumah Belajar dilakukan dengan sistem terbuka dan mandiri. Harapannya adalah guru-guru yang terlibat merupakan peserta yang memiliki motivasi tinggi dalam pengembangan diri khususnya di bidang pembelajaran berbasis TIK karena bersedia mengikuti proses atas dasar kemauan dan kehendak masing-masing. Proses seleksi dikombinasi dengan sistem pelatihan berjenjang pembuatan bahan ajar TIK sehingga proses seleksi tidak hanya sekadar memilih guru terbaik, tetapi juga melatih guru-guru yang terbukti memiliki semangat untuk maju.

Pada Tahun 2018, terdapat 6.809 guru yang mendaftar pada level ke-1, lalu terseleksi menjadi 2.743 guru pada level ke-2. Keduanya dilakukan secara daring.

Selanjutnya, setelah melalui penilaian penugasan yang ada di level ke-2, peserta terjaring lagi menjadi 1.020 guru pada level ke-3. Pada level ini, Pustekkom mengadakan secara tatap muka. Guru-guru dibekali dengan kompetensi untuk mengembangkan bahan ajar berbasis multimedia.

Selain melewati serangkaian bimbingan teknis dan ujian yang dilaksanakan baik secara daring dan tatap muka, peserta pada level ke-3 dibekali ilmu dan keterampilan. Bekal itu digunakan untuk mengembangkan konten pembelajaran mereka secara mandiri dan membuat kelas daring melalui fitur Kelas Maya yang ada pada portal Rumah Belajar yang pada akhirnya akan diterapkan di kelas masing-masing.

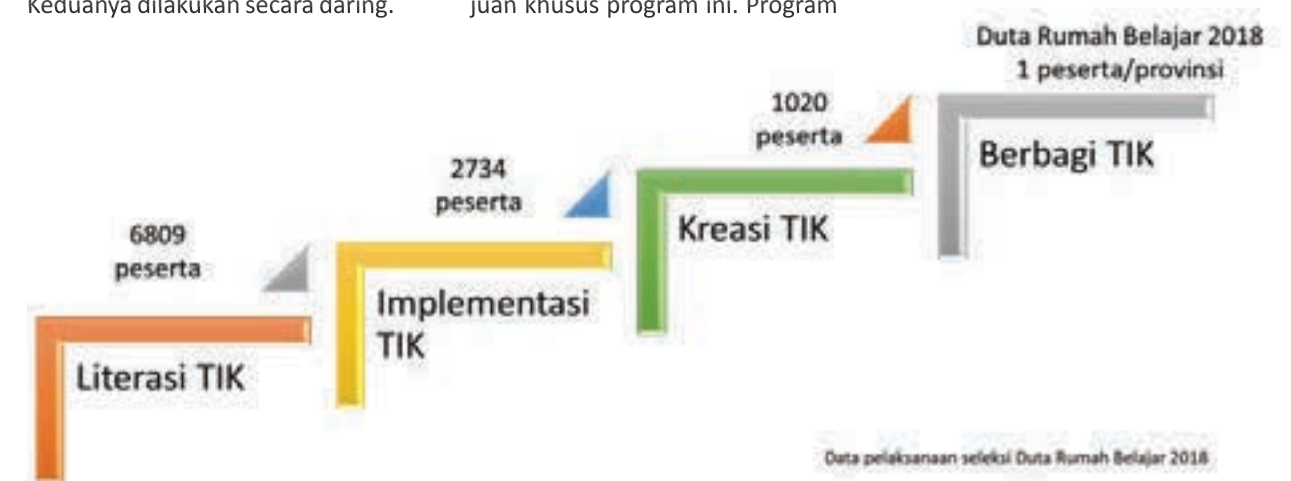
Duta Rumah Belajar terpilih akan dilibatkan oleh Kemendikbud, khususnya melalui Pustekkom, pada kegiatan yang terkait dengan pengembangan konten, sosialisasi, dan peningkatan kompetensi di bidang TIK untuk pendidikan dan kebudayaan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Lahirnya guru-guru yang berprestasi merupakan salah satu tujuan khusus program ini. Program



Testimoni para Duta Rumah Belajar

Duta Rumah Belajar merupakan salah satu bentuk kerja Kemendikbud untuk memberikan apresiasi kepada guru-guru sehingga mereka akan terus termotivasi untuk mengembangkan diri. Dengan meningkatnya kualitas para guru, mereka diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan melahirkan generasi emas Indonesia demi mewujudkan prestasi bangsa. ■





# PENGIRIMAN TENAGA PENGAJAR BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA) SEBAGAI WUJUD DIPLOMASI BAHASA

**Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa Indonesia yang harus ditunjukkan dan dipromosikan kepada dunia internasional. Tenaga pengajar BIPA yang bertugas di luar negeri adalah duta bahasa negara yang harus memperjuangkan kepentingan nasional agar bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional pada kemudian hari. (Prof. Dr. Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan).**

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional telah terbukti ampuh mempersatukan bangsa Indonesia yang bineka. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi identitas jati diri bangsa dan sarana negara untuk menunjukkan kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia yang wajib diperkenalkan kepada warga dunia. Tidak hanya supaya mereka memahami Indonesia, upaya itu juga bertujuan agar nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tersebar ke seluruh penjuru dunia. Nilai-nilai keindonesiaan yang telah membangun dan merajut kebinekaan Indonesia yang menjunjung tinggi perdamaian semestinya dapat ditanamkan di benak setiap bangsa demi dunia yang penuh kedamaian.

Atas dasar pemikiran itu serta untuk mewujudkan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sesuai dengan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Kemendikbud melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah mengembangkan kegiatan pengiriman pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) untuk luar negeri sebagai wujud pelaksanaan diplomasi kebahasaan.

Upaya diplomasi kebahasaan itu selaras dengan salah satu misi pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025, yaitu mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional yang ditandai dengan penguatan dan promosi identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional. Sebagai identitas nasional,

bahasa Indonesia sepatutnya dipromosikan demi mendukung kepentingan nasional dalam persahabatan antarbangsa.

Dalam sesi pembekalan calon tenaga pengajar BIPA yang akan bertugas pada Tahun 2019, Mendikbud menyatakan bahwa tugas tenaga pengajar BIPA di luar negeri tidak hanya membuat warga dunia mampu berbahasa Indonesia dan mengenal budaya Indonesia, tetapi juga menunaikan tugas sebagai duta bahasa negara yang memanfaatkan bahasa dan budaya Indonesia sebagai sarana diplomasi untuk mengembangkan dan membina hubungan baik antarbangsa dan antarnegara. Diplomasi kebahasaan dan kebudayaan sebagai bagian dari upaya diplomasi lunak (soft diplomacy) merupakan upaya strategis untuk menciptakan saling pengertian antarbangsa demi mewujudkan perdamaian dunia.

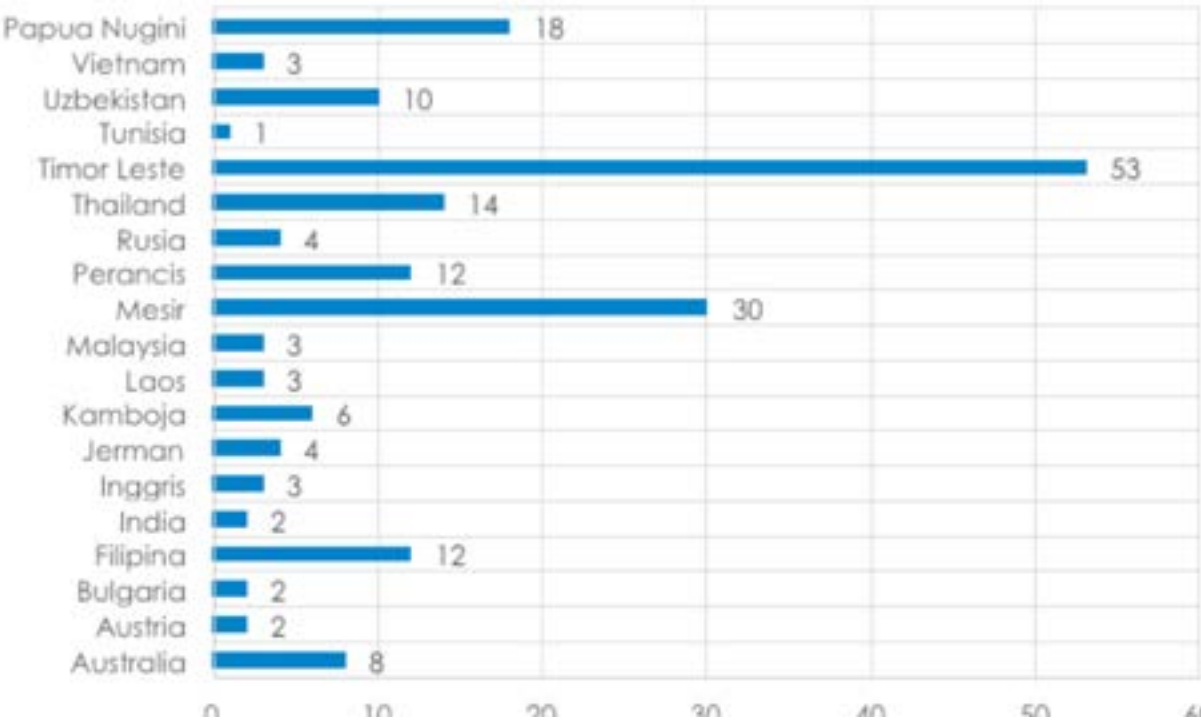
Kegiatan pengiriman dan penugasan tenaga pengajar BIPA untuk luar negeri merupakan upaya fasilitasi terpadu dalam penyelenggaraan pengajaran BIPA di luar negeri. Penerima manfaat program ini, terutama ialah lembaga penyelenggara program BIPA dan pemelajar BIPA di luar negeri. Lembaga penyelenggara program BIPA merupakan lembaga di luar negeri yang menyelenggarakan program BIPA, baik Perwakilan Republik Indonesia, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, hingga komunitas. Bagi lembaga penyelenggara program BIPA, kehadiran tenaga pengajar BIPA dari Kemendikbud tidak hanya bermanfaat untuk mengajar, tetapi juga untuk memberikan bimbingan teknis bagi tenaga pengajar lokal. Bagi pemelajar BIPA, kehadiran tenaga pengajar BIPA dari Indonesia sangat bermanfaat untuk memperoleh pembelajaran yang menarik

dan bermakna serta untuk memperoleh pemahaman yang sah tentang budaya Indonesia langsung dari sumber aslinya.

Sejak Tahun 2015 hingga Oktober 2018 tidak kurang dari 400 penugasan tenaga pengajar BIPA telah dilaksanakan ke sejumlah negara di kawasan ASEAN, Asia, Pasifik, Australia, Afrika, Amerika, dan Eropa. Melalui kegiatan itu, dalam kurun waktu tiga Tahun puluhan

ribu warga negara asing, dari anak usia sekolah dasar hingga dewasa, mendapat kesempatan belajar bahasa Indonesia di negara masing-masing dengan pengajar ahli yang merupakan penutur asli bahasa Indonesia.

Grafik  
Pengiriman dan Penugasan 190 Tenaga Pengajar BIPA untuk Luar Negeri 2018 (Januari – Oktober)



“Saya sangat gembira dengan adanya program (pengiriman pengajar BIPA) ini. Saya bisa mengenal orang dari Indonesia dan kemampuan berbahasa Indonesia saya lebih bagus. Setelah lulus dari Darul Maaref, saya ingin melanjutkan belajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta di Indonesia. Program ini sangat membantu saya untuk belajar bahasa Indonesia, sebelum saya pergi ke sana untuk belajar.”

Humaidah Napalen (Pemelajar BIPA dari Darul Maaref School, Satun, Thailand)



*“Program BIPA menjadi salah satu pintu diplomasi unggulan RI. Saya melihat dan menyaksikan rakyat dan bangsa Thailand dewasa ini makin berminat untuk belajar Bahasa Indonesia, tidak saja di sekolah-sekolah, kampus, tetapi juga di level masyarakat dan lembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah.*

*Bagi saya dan pimpinan perwakilan RI Bangkok, hal ini terjadi di samping karena hubungan Indonesia dan Thailand yg harmonis di kawasan ASEAN dan global, juga karena kesadaran rakyat dan bangsa Thailand bahwa Indonesia merupakan pasar besar. Penutur bahasa Indonesia lebih dari separuh penduduk ASEAN sehingga kemahiran berbahasa Indonesia akan memudahkan mereka berbisnis di empat negara sekaligus, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.”*

*Prof. Dr. Mustari, M.Pd. (Atase Pendidikan dan Kebudayaan, KBRI Bangkok, Thailand)*

*“Saya merasa kehadiran pengajar BIPA Badan Bahasa sangat membantu, dan dengan adanya pengajar BIPA Badan Bahasa saya bisa menjamin bahwa standar dan mutu mahasiswa kami bisa naik dan menjadi lebih bagus.”*

*Prof. Antonia Soriente (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Italia)* ■



Leon Waltermann, penutur dari Jerman yang sedang berpidato menggunakan Bahasa Indonesia



Mahasiswa Thailand sedang bermain gamelan



Kegiatan pembelajaran BIPA Vanimo Papua Nugini



Salah satu adegan Pagar Kawat Beduri yang telah direstorasi

## RESTORASI FILM PAGAR KAWAT BERDURI

Untuk menjaga dan memelihara aset sejarah dan budaya nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) melakukan restorasi film nasional. Tahun 2017 ini Pusbangfilm melakukan restorasi terhadap film Pagar Kawat Berduri arahan sutradara Asrul Sani yang diproduksi Tahun 1961.

*“Tahun ini sebagai*

*langkah awal kita lakukan restorasi terhadap salah satu film bersejarah, yaitu Pagar Kawat Berduri. Hasil restorasi ini nanti akan kita putar tanggal 20 Desember 2017,”*

kata Kepala Bidang Apresiasi dan Tenaga Perfilman Pusbangfilm, Sanggupri, di Jakarta, Senin (11/12/2017). Film hasil restorasi

ini rencananya akan diputar di Pusat Perfilman Usmar Ismail Jakarta, dan akan dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dan sejumlah tokoh perfilman nasional.

Tujuan program restorasi film nasional ini adalah mengembalikan kualitas arsip film sedekat mungkin dengan kualitas awalnya dan juga merupakan upaya pelestarian budaya Indonesia. “Selain



itu juga untuk mengembalikan dan meningkatkan minat generasi muda untuk mengenal sejarah bangsa melalui film,” kata Sanggupri.

Pekerjaan restorasi film nasional dikerjakan pihak ketiga melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Pemenang lelang adalah PT Render Digital Indonesia, yang bertugas menyelesaikan restorasi dalam jangka waktu 100 hari. Rizka F. Akbar dari PT Render Digital Indonesia menjelaskan bahwa proses restorasi terdiri dari tiga tahap yaitu: 1. prarestorasi, 2. restorasi, dan 3. pascarestorasi.

*“Pada tahap prarestorasi kita melakukan riset, kurasi, dan assessment terhadap koleksi film.*

*Kemudian tahap restorasi yaitu pembersihan dan reparasi fisik master film serta digitalisasi yaitu proses scanning dan telecine,”*

jelas Rizka.

Di tahap pascarestorasi dilakukan restorasi digital untuk gambar dan koreksi warna, restorasi digital untuk suara, serta digital film mastering.

Film Pagar Kawat Berduri adalah film pertama yang kegiatan restorasinya difasilitasi oleh Pusat Pengembangan Film (PUSBANG Film) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang baru terbentuk pada September 2015. Film ini terpilih untuk direstorasi berdasarkan

hasil kurasi yang dilakukan oleh para kurator, yang ditugaskan khusus untuk memilih judul film untuk direstorasi.

Film Pagar Kawat Berduri dinilai memiliki cerita menarik, relevan dan dibuat dengan kualitas sinematografi yang baik. Ditulis oleh Trisnojuwono, pengarang kenamaan kala itu yang juga adalah mantan anggota RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat - Kini Kopassus), Pagar Kawat Berduri mungkin dapat disebutkan sebagai karya film bertema revolusi yang terbaik dibandingkan dengan film bertema serupa lainnya, pada zamannya. Pemain, kerja kamera, lampu, maupun penata artistik, tampil dengan baik menciptakan suasana yang mendukung cerita. Mungkin terlalu berlebihan, tapi



Mendikbud dalam screening Film Pagar Kawat Berduri

banyak yang mengatakan film ini adalah film terbaik yang pernah dibuat oleh Asrul Sani.

Film ini berusia 56 Tahun, memiliki pandangan “humanisme universal”, karena mampu membuat masyarakat bersimpati pada sesama, dalam cerita ini kepada Belanda. Sehingga film ini mengalami penolakan luar biasa, salah satu tokoh yang menolak, adalah Sutan Takdir Alisjahbana. Padahal, film ini mengandung nilai-nilai budaya, sejarah, kearifan lokal. Sehingga tidak salah jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Pusat Pengembangan Perfilman merestorasi film ini.

Film ini mengisahkan tentang perjuangan para pejuang-pejuang Republik Indonesia yang berada di kamp Belanda sebelum masa kemerdekaan, karena nekat menyuarkan revolusi. Awalnya para pejuang yang ditawan ingin

melarikan diri dari kamp, namun penjagaan yang ketat, bahkan dipagari dengan kawat berduri membuat peluang untuk lari sangat tipis sekali.

Film ini bercerita bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh para pejuang kita agar mendapat simpati dari penjaga-penjaga Belanda. Adalah Parman (diperankan Sukarno M Noor), memilih strategi untuk ber-kawan karib (berpura-pura menjilat dan tunduk) kepada pimpinan Kamp Belanda, Kampinan Koenen (diperankan Bernard Ijzerdraat/ Suryabrata), sehingga dianggap teman-temannya adalah penghianat. Tetapi Parman tidak peduli, terus menjalin komunikasi, menarik simpati Belanda dengan melarang setiap teman-temannya akan melakukan perlawanan kepada Belanda.

Riska F. Akbar, dari Render

Digital Indonesia mulai membeberkan rahasia, kenapa Pagar Kawat Berduri mendapat kesempatan direstorasi, karena: (1) Kondisi fisik film yang harus segera diselamatkan; (2) Sutradara yang mewakili zamannya; (3) Film memiliki nilai-nilai (sejarah) pada Zamannya; (4) Film yang memiliki nilai inspiratif bagi pengembangan pendidikan karakter; (5) Film yang tidak akan direstorasi oleh pemilik hak cipta-nya; (6) Kondisi teknis film yang masih memiliki negatif lebih mudah dikerjakan.

Yang paling membuat film hasil restorasi karya anak bangsa ini semakin sempurna, ketika dibawa ke Bangkok untuk pemutaran perdana. Disana film ini dipuja, kualitasnya mendekati sempurna, mereka takjub dan menyarankan agar audio-visualnya diperbaiki. ■



Perbandingan cuplikan film yang belum dan telah direstorasi





Pengarahan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, pada Acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2018



Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberikan sesi inspirasi pada RNPK Tahun 2018

## PERAN PEMERINTAH DALAM RNPK 2018

Salah satu kegiatan terbesar dan strategis yang selalu dinanti oleh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota adalah Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan yang digelar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan yang biasa disebut Rembuknas Dikbud atau disingkat RNPK digelar setahun sekali pada bulan Januari atau Februari.

Sebagai agenda rutin awal Tahun, Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) diikuti oleh seluruh unit utama di lingkungan Kemendikbud serta

seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, baik di pusat maupun di daerah, termasuk organisasi sosial dan komunitas penguat pendidikan dan pemaju kebudayaan. RNPK mengangkat tema strategis sesuai dengan isu, kebijakan, dan program nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan yang akan diangkat dan diperkuat pada Tahun anggaran berjalan. RNPK digelar dengan harapan menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan untuk berbagi informasi terkait dengan permasalahan dan praktik baik di bidang pendidikan dan kebudayaan serta mencari

alternatif solusi untuk pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan secara lebih baik. RNPK merupakan forum yang diselenggarakan sebagai komitmen pemerintah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

RNPK 2018 dihadiri 1.050 peserta, antara lain, terdiri atas kepala dinas pendidikan dan kepala dinas kebudayaan provinsi/kabupaten/kota, organisasi profesi guru, mitra kerja Kemendikbud, dan atase pendidikan dan kebudayaan (atdikbud).

Pada Tahun 2018, perhelatan akbar RNPK kembali digelar di kampus Pusdiklat Pegawai

Kemendikbud. Alasan dipilihnya kampus ini sebagai lokasi RNPK 2018, antara lain, karena kampus Pusdiklat Pegawai Kemendikbud memiliki gedung pertemuan yang kapasitasnya mampu menampung seluruh peserta; fasilitas akomodasi yang mampu menampung tiga ratusan pejabat, narasumber, peserta, dan panitia pelaksana; dapur yang mampu menyediakan makanan serta kudapan bagi seluruh peserta, panitia, dan petugas; dan area parkir yang luas untuk kendaraan bermotor roda dua dan empat.

Selama perhelatan RNPK 2018, kegiatan pelatihan dasar (prajabatan), kepemimpinan (struktural), teknis, dan fungsional bagi PNS unit utama dan satuan kerja Kemendikbud di pusat dan

unit pelaksana teknis di daerah dikosongkan jadwalnya.

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud juga menyediakan posko kesehatan, ruang akupuntur, ruang refleksi, ruang makan Paramita, ruang taklimat media, ruang media center, poska CCTV, ruang musala, dan masjid untuk dimanfaatkan oleh peserta, panitia, dan petugas RNPK 2018.

Semua persiapan, komunikasi, koordinasi, konsolidasi intensif lintas satker Sekretariat Jenderal, lintas unit utama Kemendikbud, lintas kementerian/lembaga negara, lintas pemerintah daerah, dan lintas institusi pertahanan (militer), serta keamanan (polisi) telah dimulai sejak awal Januari 2018. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua skenario

kegiatan RNPK 2018 termasuk rencana kehadiran Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator PMK, dan menteri-menteri di forum RNPK 2018 dapat berjalan aman, tertib, khidmat, dan sukses.

RNPK 2018 dibuka oleh Presiden RI dan ditutup oleh Wakil Presiden RI sehingga Pusdiklat Pegawai Kemendikbud semakin meningkatkan pelayanannya untuk menjawab tantangan sekaligus tuntutan persiapan, pelaksanaan, dan purnakegiatan yang lebih aman, nyaman, bermutu, meriah, dan berkesan dibandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya.

Dalam RNPK Tahun 2018, Presiden Jokowi menegaskan kembali pentingnya sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan karakter





Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Pimpinan Eselon 1 Kemendikbud memberikan arahan terkait kebijakan Kemendikbud 2018 kepada peserta RNPk

bagi anak bangsa. Presiden menyampaikan, “Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara tidak menjamin kesejahteraan dan kesuksesan sebuah bangsa. Pada intinya, yang memajukan sebuah negara adalah SDM-nya. Ini berada pada tanggung jawab yang besar sekali di pundak Bapak/Ibu dan Saudara-Saudara yang hadir di sini.”

Terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber daya alam yang kaya. Akan tetapi, jangan sampai kekayaan tersebut justru

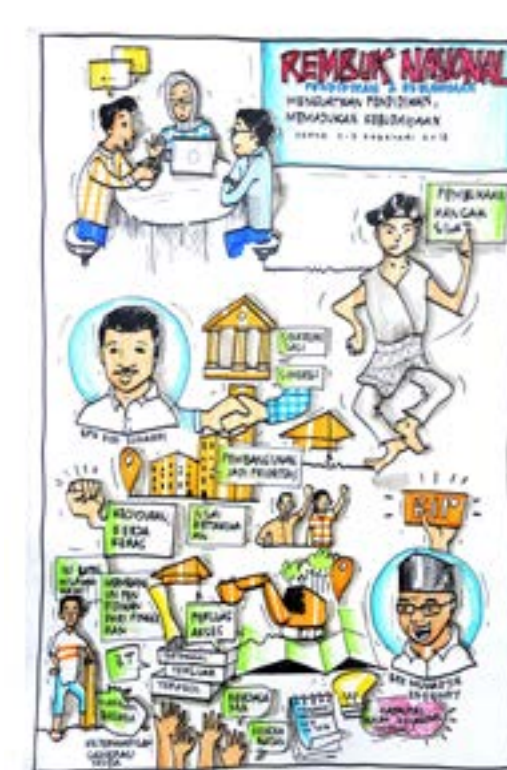
memanjakan dan membutuhkan kita atau membuat kita lemah sehingga tidak lagi membuat inovasi dan kreasi. SDM yang dimiliki suatu negara harus memiliki pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi. Dengan begitu, negara tersebut akan mampu memenangkan persaingan atau kompetisi dengan negara lain.

Menurut Presiden Jokowi, pendidikan membuat masyarakat sadar akan kepentingan bersama dan solidaritas sosial. Pendidikan mengajarkan kejujuran, kebersamaan, kesantunan, nilai-nilai, dan budi pekerti kepada anak-anak bangsa. Pendidikan juga

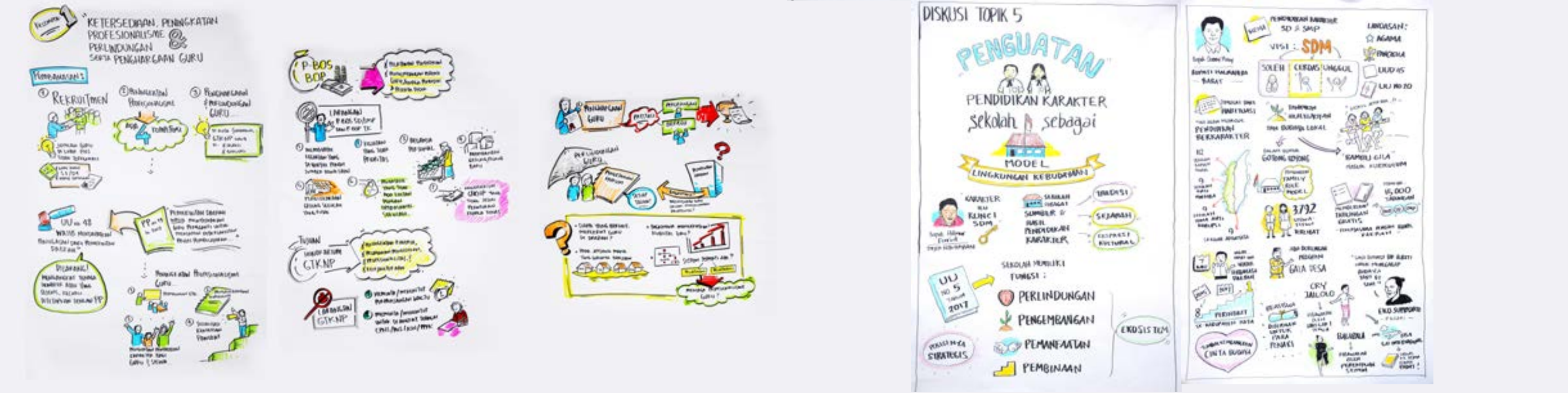
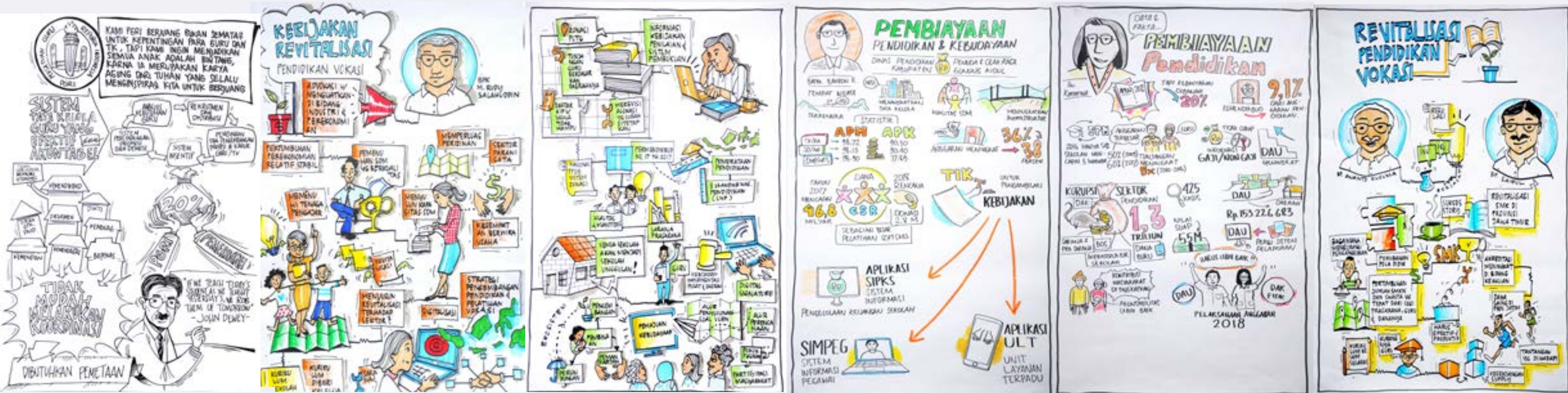
harus mengajarkan daya juang dan membangun watak pembelajar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga berpesan bahwa,

*“Tidak ada kesejahteraan bangsa tanpa kecerdasan. Tidak ada negara maju tanpa cerdas bangsanya, tanpa maju bangsanya dan pendidikannya.”* ■









# NERACA PENDIDIKAN DAERAH (NPD)

**Ucap selamat dan apresiasi atas dikeluarkannya Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. NPD ini dapat mendukung transparansi data dalam mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui berbagai saluran pendanaan pemerintah pusat ke daerah. Yanuar Nugroho, Deputy II Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP)**

Tugas Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) diatur dalam Pasal 766 Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015, yaitu melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan, pengelolaan isu dan masalah strategis kementerian, serta pemantauan dan evaluasi target rencana kerja kementerian. Berdasarkan tugas tersebut, PASKA menjalankan lima fungsi yang salah satu di antaranya adalah pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kemendikbud. Sinkronisasi kebijakan ini tidak hanya perlu dilakukan di kalangan internal Kemendikbud, tetapi juga sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo melalui keterangan tertulisnya, yaitu bahwa hubungan tata kelola pusat dan daerah itu harus sinkron, bahwa gubernur ini adalah tangan kanan presiden di daerah dan dipilih langsung rakyat, dan bahwa sinergi sinkronisasi ini harus selalu match.

Arahan Mendikbud, Bapak Muhadjir Efendy, berkaitan dengan NDP adalah sebagai berikut.

*“Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan*

*ikhtiar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan gambaran mutakhir tentang kondisi dan capaian pendidikan suatu provinsi/kabupaten/kota. NPD 2016 ini diterbitkan dengan memperhatikan masukan daerah dan para pengguna sehingga terdapat perubahan dalam beberapa komponen yang sebelumnya ditampilkan pada NPD 2015. Sebagai instrumen input dan output pendidikan, NPD dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan pendidikan, khususnya di daerah, sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan. Lebih dari itu, masyarakat luas dapat memanfaatkan NPD sebagai alat untuk*

*berkontribusi penuh dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan pendidikan demi mewujudkan pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.”*

Berangkat dari itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan menyusun Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang berisi kumpulan informasi terkait dengan pendidikan di daerah yang memuat potret pendidikan daerah, gambaran umum semua jenjang pendidikan, dan beberapa capaian pendidikan di daerah masing-masing. Dengan kata lain, NPD berisi anggaran pendidikan yang dialokasikan, data pokok pendidikan, dan indikator mutu yang menjelaskan situasi dan kondisi pendidikan di daerah, antara lain kompetensi dan kualifikasi guru, sarana dan prasarana serta kondisi ruang kelas, status akreditasi, capaian Ujian Nasional (UN), dan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN).



Presiden Joko Widodo mengapresiasi NPD 2017 di acara Rembug Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2018

## 1. Perjalanan NPD

NDP pertama kali disusun Tahun 2015 dan diberi nama NPD 2015, lalu diluncurkan pada saat Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2016. NPD 2015 ini memuat beberapa indikator, antara lain Anggaran Pendidikan (APBD dan APBN), Persentase Penduduk Tuna Aksara Tahun 2014, Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014, Data Guru D4/S1 (Sertifikasi/Kualifikasi/ Belum Kualifikasi), Rerata Ujian Kompetensi Guru Per Jenjang 2015, Rerata Uji Kompetensi Guru 2015 (Profesional dan Pedagogik) Nasional, Jumlah Siswa, Rerata Ujian Nasional 2015, Rerata Indeks

Integritas Ujian Nasional 2015, Perbandingan Guru : Siswa dan Kelas : Siswa, Kondisi Sarana dan Prasarana (Satuan Pendidikan), dan Akreditasi Satuan Pendidikan.

Alhamdulillah, NPD 2015 mendapat respons yang sangat positif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga Kantor Staf Presiden (KSP). Untuk menindaklanjuti tanggapan dan respons baik dari semua pemangku kepentingan pendidikan tersebut, PASKA menyusun Neraca Guru dan Tenaga Kependidikan (NGTK) 2016 dan NPD 2016 dengan beberapa perubahan, seperti perbandingan capaian pendidikan

dengan Tahun 2015, penambahan rincian dana transfer daerah, perbandingan skor indeks pembangunan manusia dalam lima Tahun terakhir, penambahan jumlah kelas per jenjang, pengurangan tema tunaakasa, kondisi ruang kelas, penggantian perbandingan kelas : siswa menjadi rombongan belajar : siswa. Pada Tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelesaikan penyusunan NPD 2017.

Sebagaimana Tahun sebelumnya, NPD 2017 merupakan ikhtiar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan gambaran mutakhir tentang kondisi dan capaian pendidikan



suatu provinsi/kabupaten/kota. NPD 2017 ini diterbitkan dengan memperhatikan masukan daerah dan para pemangku kepentingan terkait sehingga terdapat perubahan dalam beberapa komponen yang sebelumnya ditampilkan pada NPD 2015 dan NDP 2016. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pemangku kepentingan pendidikan, NPD 2017 juga dilengkapi informasi yang terkait dengan skor indeks pembangunan manusia di daerah, beserta komponen skor rerata lama sekolah, dan harapan lama sekolah selama lima Tahun terakhir di daerah dimaksud. Sebagian indikator pendidikan di NPD 2017 ditampilkan sebagai perbandingan dengan data di NPD 2016.

Dalam menyikapi saran dan tanggapan yang berkembang di masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan terhadap penyusunan NPD 2017, informasi tentang guru dan tenaga

kependidikan yang dimasukkan ke dalam NPD 2017 tidak disusun tersendiri sebagaimana Tahun 2016, yaitu NGTK 2016. Pemberian gambaran umum kondisi dan pencapaian kinerja guru dan tenaga kependidikan di daerah yang berbasis data secara sederhana dimasukkan ke dalam NPD ini. Informasi ini dapat digunakan sebagai acuan analisis kebutuhan dan peta pengembangan guru ke depan. Para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan pendidikan di pusat dan daerah dapat memanfaatkannya sebagai referensi dalam menentukan prioritas program peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. NPD 2017 juga menampilkan gambaran jumlah guru dan tenaga kependidikan berdasarkan status pegawai, kelompok usia, nilai UKG, dan pangkat/golongan. Dari penggambaran jumlah guru berdasarkan kelompok usia, dapat dilihat berapa jumlah guru yang

akan pensiun dalam lima Tahun ke depan sebagai masukan untuk perencanaan kebutuhan guru di daerah. Untuk lebih memudahkan para pemangku kepentingan dalam memanfaatkannya, NPD 2017 tidak hanya dibuat dalam versi cetak, tetapi juga telah dibuat versi aplikasi yang bisa diakses di alamat <http://npd.kemdikbud.go.id>. Dalam aplikasi ini, selain bisa mengunduh NPD 2017 versi cetak, pengguna juga dapat membandingkan indikator NPD antardaerah, baik dalam provinsi maupun lintas provinsi, sehingga akan lebih mudah bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

Sebagaimana NPD sebelumnya, NPD 2017 juga diluncurkan pada saat Rembug Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 yang dibuka oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo.

2. Diskusi Kelompok  
Terpumpun (DKT) Sebagai  
Gerakan Perubahan

NPD diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan pendidikan, serta penguatan sinergitas antarpemangku kepentingan dalam peningkatan mutu pendidikan. NPD akan terasa manfaatnya apabila semua pemangku kepentingan dapat membaca dan memahami data dan informasi yang ada dalam NPD tersebut. Untuk itu, PASKA melakukan DKT Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah. Kegiatan ini melibatkan DPRD, Bappeda, dinas pendidikan, dewan pendidikan, media, praktisi pendidikan, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan. DKT ini dapat dijadikan jembatan komunikasi yang dalam pelaksanaannya peserta dapat menemukan solusi, saling mencerahkan, dan berbagi praktik baik sehingga dihasilkan sebuah gerakan perubahan. Gerakan perubahan yang dimaksud di sini adalah semua pemangku kepentingan yang terlibat secara bersama-sama menyikapi permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di daerah dengan komitmen untuk menyelesaikan secara bersama-sama pula berdasarkan data yang ada. Pada Tahun 2018 sampai bulan Agustus sudah dilaksanakan DKT di 7 provinsi, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Papua, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Sebelumnya, DKT sudah dilaksanakan pada Tahun

2016 di 14 provinsi dan Tahun 2017 di 13 provinsi.

Dalam mengawali rangkaian kegiatan DKT, Kemendikbud secara rutin mengadakan audiensi dengan gubernur bertempat di kantor gubernur guna memperkenalkan NPD. Keberadaan NPD diharapkan menjadi pemacu bagi pemerintah provinsi untuk memaksimalkan pembangunan bidang pendidikan di daerahnya masing-masing.

Pada Kamis, 26 Juli 2018, dilakukan audiensi dengan Gubernur Gorontalo yang dalam kesempatan ini diterima oleh Wakil Gubernur Gorontalo, H. Idris Rahim, di rumah jabatan Wakil Gubernur Gorontalo. Rombongan Kemendikbud terdiri atas Tim PASKA dan para kepala UPT Kemendikbud yang ada di Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pembangunan Karakter, Dr. Arie Budhiman. Agenda yang diusung dalam acara ini adalah membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan pendidikan. Selain itu, diperkenalkan juga UPT Kemendikbud yang ada di Provinsi Gorontalo.

Pada kesempatan ini Staf Ahli Kemendikbud menjelaskan bahwa Neraca Pendidikan Daerah berisi indikator-indikator pendidikan di daerah, yang antara lain menyajikan data terkait pendanaan urusan pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, neraca ini juga berisi data realisasi program Indonesia Pintar, angka partisipasi kasar (APK) dan angka

partisipasi murni (APM), akreditasi, serta data guru dan siswa di Provinsi Gorontalo.

Wakil Gubernur Gorontalo, H. Idris Rahim, mengapresiasi kegiatan Kemendikbud yang dinilainya sangat mendukung program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bidang pendidikan. Terkait data pada Neraca Pendidikan Daerah, khususnya menyangkut anggaran pendidikan, Wagub Gorontalo menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah berupaya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengamanahkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Idris mengatakan, data-data yang disajikan dalam Neraca Pendidikan Daerah tersebut dapat menjadi bahan masukan yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo untuk merumuskan perencanaan program kegiatan di bidang pendidikan.

Dengan agenda yang sama, pada Kamis, 2 Agustus 2018, Tim Kemendikbud yang dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Hubungan Pusat dan Daerah, Dr. James Moudow, beraudiensi dengan Gubernur Papua dan diterima oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Noak Kapis. “Saya menyambut baik keberadaan NPD yang mampu mengakses data bidang pendidikan baik di provinsi, kabupaten, dan kota,” katanya. Keberadaan NPD dinilainya sangat positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Hal ini karena untuk



Tampilan web aplikasi NPD. <http://www.npd.kemdikbud.go.id>





Audiensi dengan Pemerintah Provinsi Papua terkait NPD

mengambil sebuah anggaran pada bidang pendidikan ke depan, mesti didasarkan pada data NPD.

*"Tentunya masih perlu disinkronkan data-data kita ini sebagai gambaran untuk mengetahui posisi kita di mana dan ke depan apa yang akan kita perbaiki,"*

tambahnya.

Setelah di Provinsi Papua, DKT dilanjutkan di Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya tanggal 8 Agustus 2018. Dalam kesempatan ini, Tim Kemendikbud beraudiensi dengan Gubernur Sulawesi Barat yang dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pembangunan Karakter, Dr. Arie Budhiman. Tim diterima langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, di rumah jabatannya. Dalam kesempatan ini, Arie Budhiman menyampaikan,

*"Audiensi adalah salah satu kegiatan untuk memperkenalkan NPD. Keberadaan NPD juga diharapkan menjadi pemacu bagi pemerintah provinsi untuk memaksimalkan pembangunan dunia pendidikan di daerahnya masing-masing."*

Disampaikan pula bahwa dalam rangka menyosialisasikan kebijakan-kebijakan strategis Kemendikbud dan Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud mengadakan diskusi kelompok terpusat (DKT) dengan mengundang unsur-unsur dari DPRD, Bappeda, dinas pendidikan, dewan pendidikan, media, praktisi pendidikan, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan terkait koordinasi dan sinkronisasi hubungan

antara pusat dan daerah untuk pembangunan pendidikan.

Salah satu hal penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam membangun bidang pendidikan adalah transparansi serta ketersediaan data dan informasi pendidikan. Data dan informasi pendidikan ini tidak hanya bermanfaat bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, tetapi juga bagi publik dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat tercipta harmonis dan secara bersama-sama membentuk gerakan perubahan dalam membangun dan meningkatkan kualitas Pendidikan, karena kerja kita adalah prestasi bangsa. ■



Bapak Wagub Gorontalo (H. Idris Rahim) Sedang Mempelajari NPD Saat Audiensi Berlangsung



# NERACA PENDIDIKAN NASIONAL 2017



## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA 2016



## APBN 2017

TOTAL BELANJA NEGARA  
Rp2.080,45 T



## DATA PENDIDIKAN DAERAH

Satuan Pendidikan **414.361**

PAUD →	197.652
SD →	148.278
SMP →	38.943
SMA →	13.521
SMK →	13.753
SLB →	2.214

Peserta Didik **51.588.171**

PAUD →	6.240.159
SD →	25.460.414
SMP →	10.078.136
SMA →	4.780.513
SMK →	4.901.723
SLB →	127.226

Ruang Kelas **1.710.468**

SD →	1.049.116
SMP →	347.592
SMA →	145.079
SMK →	143.175
SLB →	25.506

Guru **3.268.623**

PAUD →	316.453
SD →	1.630.204
SMP →	664.590
SMA →	321.112
SMK →	310.341
SLB →	25.923

Sumber: POSPK, verifikasi November 2017

Sumber: Diklat GTK, November 2017

## PERSENTASE REALISASI PROGRAM INDONESIA PINTAR

	SD	SMP	SMA	SMK
Penerima	48,7%	48,1%	59,6%	54,3%
Anggaran	50,3%	53,8%	63,4%	59,2%

Sumber: apipr.web.id, Desember 2017

## RASIO PENDIDIKAN GURU:SISWA

SD	SMP	SMA	SMK
1:16	1:15	1:15	1:16

## GURU PNS:SISWA

SD	SMP	SMA	SMK
1:27	1:29	1:29	1:50

## ROMBEL:SISWA

SD	SMP	SMA	SMK
1:23	1:29	1:30	1:28

Sumber: POSPK, November 2017

## SEKOLAH RINTISAN PELAKSANA PPK

SD	SMP	TOTAL
1.083	1.623	2.706

Sumber: Kemendikbud, September 2017

## SMK PILOTING VOKASI

Sumber: Diklatmen, 2017

## BAHASA DAERAH

Sumber: BPPB, November 2017

## GURU KEAHLIAN GANDA

Sumber: Diklat GTK, November 2017

## GURU GARIS DEPAN

Sumber: Diklat GTK, November 2017

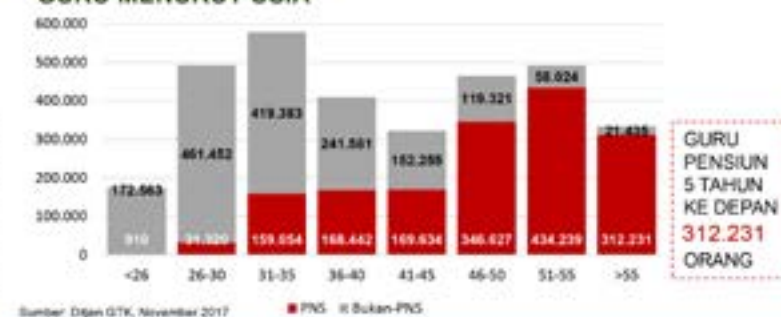
## SKOR A.K.S.I.

BACA	MAT	SAINS
39,90	31,53	34,75

## KUALIFIKASI GURU



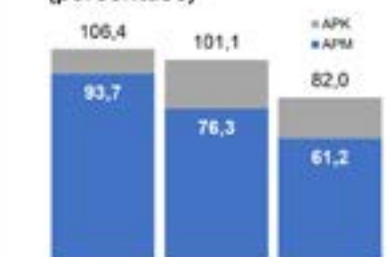
## GURU MENURUT USIA



## UJI KOMPETENSI GURU 2015 PER JENJANG



## APK DAN APM 2016/2017 (persentase)

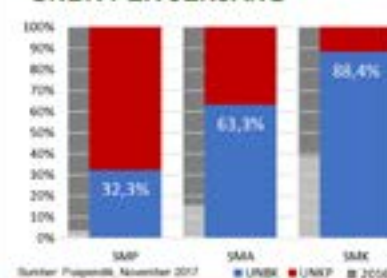


## SISWA PUTUS SEKOLAH DAN MENGULANG

	PUTUS SEKOLAH	MENGULANG
SD	39.213	361.215
SMP	38.702	23.449
SMA	36.419	7.340
SMK	72.744	9.841

Sumber: POSPK, November 2017

## PERSENTASE PESERTA UNBK PER JENJANG



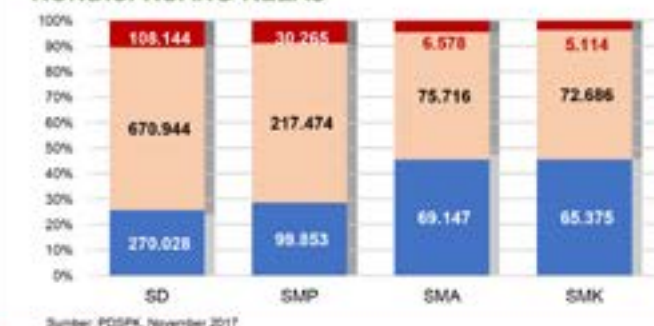
## HASIL UN



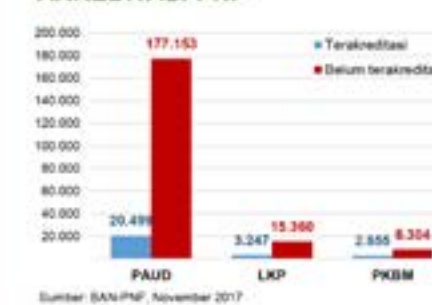
## SKOR IIUN



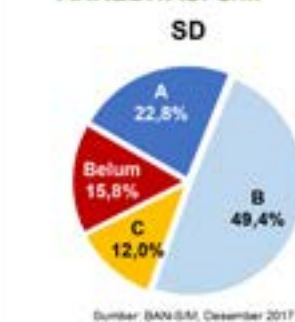
## KONDISI RUANG KELAS



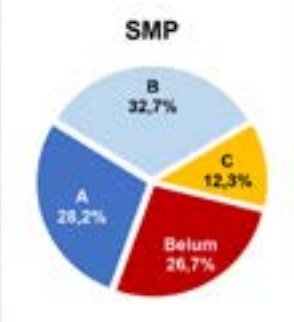
## AKREDITASI PNF



## AKREDITASI S/M



## SMP



## SMA



## SMK





# PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF MELALUI UNIT LAYANAN TERPADU (ULT)

*Rakyat menginginkan pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat* **Joko Widodo**

Tiga Tahun sudah Unit Layanan Terpadu (ULT) melayani masyarakat. Aspirasi, pujian, dan kritikan terhadap layanan Kemendikbud kerap menghiasi rutinitas pekerjaan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan pelayanan di berbagai segi, tak terasa budaya melayani benar-benar meresap di jiwa para petugas.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana, pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang sebelumnya ditangani oleh tiap-tiap unit kerja di lingkungan Kemendikbud dikelola secara terpadu satu pintu yang dikoordinasikan oleh

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kemendikbud.

Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pelayanan terpadu satu pintu dinamakan Unit Layanan Terpadu (ULT) yang mulai beroperasi pada tanggal 9 Maret 2015. Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan langsung atau tatap muka dan pelayanan tidak langsung, seperti melalui SMS, pos-el, pusat panggilan (call center), portal lapor, dan portal ULT.

Masyarakat sering mengeluhkan betapa sulit dan rumitnya mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan birokrasi. Belum lagi ditambah dengan antrean yang panjang, petugas yang terkadang harus dinas luar sehingga masyarakat yang sudah

jauh-jauh datang harus mengalami kekecewaan karena tidak dapat dilayani. Namun, ketidakpastian itu tidak perlu lagi dialami oleh masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha berbenah diri dan menampilkan wajah baru dalam hal pelayanan. Dengan adanya ULT, Kemendikbud membuktikan kepedulian dalam melayani kebutuhan para pelaku pendidikan.

ULT adalah pelayanan kepada publik dan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan; dan mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan pasti.



No.	Pelayanan	2015	2016	2017
1.	Pelayanan Langsung ke ULT	15.225	31.954	41.849
2.	Pelayanan Tidak Langsung (Telp, SMS, Pos-el, Portal ULT, dan Portal Lapor)	8.057	32.862	26.895

## PELAYANAN YANG DIBERIKAN ULT SAAT INI MENCAKUP



Galuh, guru TK Bhinneka Tunggal Ika dari Mojokerto, menyampaikan apresiasi untuk ULT Kemendikbud. Beliau sudah dua kali datang ke ULT dan merasa puas atas layanan yang diberikan.

*“Petugas ULT ramah, cepat tanggap, dan komunikatif. Permasalahan yang saya utarakan langsung diberikan solusinya.”*

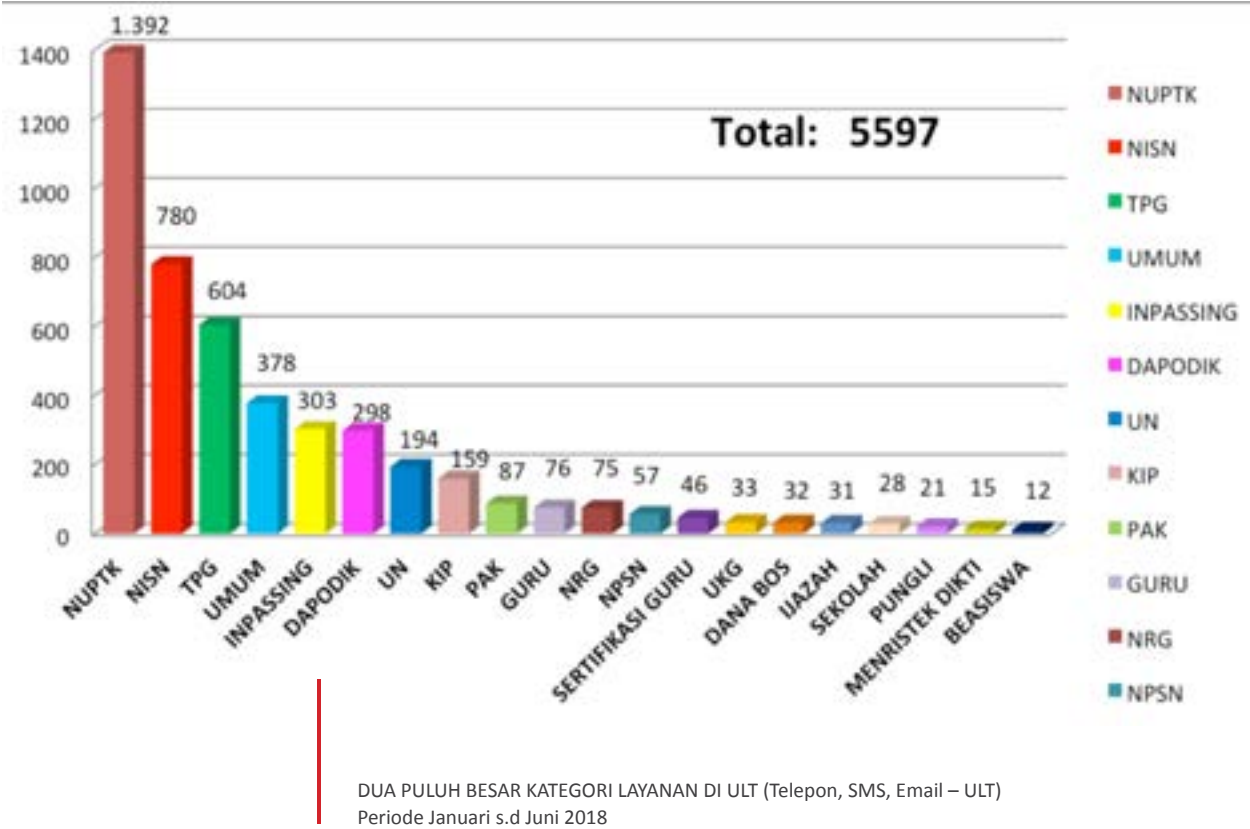
katanya.

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Surya Adi Ulfa, operator sekolah dari UPTD SD Negeri Banyone Laok 2, Madura. Selain menyampaikan permasalahan, beliau mengaku terkadang hanya sekadar bertandang ke ULT. “Saya sudah tiga kali datang ke ULT. Permasalahan yang saya sampaikan ada tanggapan bahkan aspirasi atau keluhan yang saya bawa dari teman-teman di sekolah bisa mendapatkan

pencerahan yang memperingan beberapa persyaratan yang dianggap terlalu berat bagi guru,” jelasnya.

Lain halnya dengan Yuni dan Iin, guru dari TK Kartika Bekasi, yang baru pertama kali datang ke ULT. Mereka mengatakan bahwa selain petugas yang ramah (dari resepsionis, satpam, sampai petugas pelayanan Penyetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNs TK), fasilitas yang diberikan sangat memadai. Beliau menyebutkan





bahwa ruangan yang nyaman, mesin kopi, sistem antrean terintegrasi, dan media informasi eletronik menjadikan layanan di ULT terlihat sangat baik. Keseriusan Kemendikbud dalam melayani masyarakat terus dibuktikan dengan adanya pengembangan di berbagai segi. Perluasan area pelayanan dan pengembangan aplikasi pelayanan secara luring (*offline*) ataupun daring (*online*) telah dilakukan ULT Kemendikbud untuk dapat memberikan layanan prima bagi para pengunjung, khususnya pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pengembangan dilakukan oleh ULT Kemendikbud untuk memangkas birokrasi yang selama ini

dianggap rumit oleh masyarakat. Misalnya, pelayanan bagi masyarakat yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id/> dalam hal permohonan informasi, pengaduan, dan lainnya. Inovasi terbaru yang juga dilakukan adalah mengembangkan aplikasi layanan konsultasi daring bagi guru. Aplikasi yang diuji coba pertama kali pada bulan Oktober 2017 di BP PAUD Dikmas Jawa Timur dibuat sebagai upaya peningkatan pelayanan Kemendikbud kepada masyarakat. Kemudahan mengakses aplikasi tersebut berefek pada efisiensi, yang dalam hal ini guru di daerah tak perlu lagi jauh-jauh datang ke Jakarta untuk berkonsultasi tentang

masalah yang sedang dihadapi. Pelayanan konsultasi daring untuk guru adalah pelayanan dua arah. Guru dan petugas dapat langsung berinteraksi dan mendapat kepastian mengenai solusi dari permasalahan mereka. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ari Santoso, mengatakan bahwa aplikasi konsultasi daring ini dikembangkan dengan melihat fakta yang terjadi di ULT. Beberapa kasus seperti pengurusan tunjangan profesi guru (TPG), inpassing, dan penerbitan NUPTK menyebabkan panjangnya antrian di ULT Kemendikbud. Mereka yang antre adalah para guru yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Ari mengatakan

bahwa pelayanan kepada guru merupakan salah satu prioritas Kemendikbud. Untuk itu, dengan pertimbangan luas wilayah yang berimbas pada konsekuensi biaya dan waktu, harus dicari solusi agar para guru tetap terlayani, walaupun berada jauh dari Jakarta. “Kami merasa tidak adil sehingga perlu ada terobosan untuk melayani seluruh guru,” katanya. Dalam menggunakan pelayanan ini, para guru akan dipandu oleh petugas dari Lembaga Pendidikan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk memverifikasi berkas yang dibutuhkan dalam pengurusan. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang datang ke Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud semakin meningkat dari Tahun 2015 sampai dengan 2017. Mereka datang dari berbagai daerah kabupaten/kota/provinsi se-Indonesia. Mayoritas pengunjung yang datang adalah guru untuk konsultasi terkait dengan Dapodik, tunjangan profesi pendidik, NUPTK dan informasi dan pengaduan. Hal inilah yang menyebabkan Kemendikbud ingin lebih lagi memberikan kemudahan pelayanan kepada pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan dengan mengaktifkan pelayanan publik di daerah melalui salah satu unit pelaksana teknis (UPT), yakni Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Tujuan didirikannya ULT di LPMP adalah meringankan beban masyarakat dari segi biaya, waktu, dan jarak, mengoptimalkan peran UPT LPMP Kemendikbud dalam pelayanan publik, dan memberikan

kemudahan pelayanan kepada pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan. Pembentukan ULT LPMP ini juga diperkuat dengan Surat Edaran Sesjen Nomor 2898/A.5.4/HM/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Pembentukan Unit Layanan Percontohan ULT di LPMP. Ada lima daerah yang menjadi proyek percontohan (pilot project) pembentukan ULT LPMP, yaitu LPMP di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Riau. Pelayanan ULT LPMP ini ke depannya diharapkan dapat mendekatkan pelayanan pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di daerah, khususnya guru. Dengan mempermudah sistem pelayanan diharapkan dapat mempercepat penyelesaian aduan dan memudahkan pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan dalam penyelesaian urusan pendidikan dan kebudayaan, khususnya pelayanan Dapodik, tunjangan profesi pendidik, NUPTK, dan pelayanan informasi. **Membangun Tata Kelola Kemendikbud Melalui Keterbukaan Informasi Publik** “Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.” (Jokowi-Jusuf Kalla)

Peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia setiap 28 September merupakan momentum bagi masyarakat untuk mengetahui dan menyadari bahwa mereka memiliki hak dan kebebasan dalam mengakses informasi publik, termasuk di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal itu sejalan dengan asas demokrasi Indonesia yang mendukung hak publik tersebut sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) wajib membuka diri dan menjalankan kewajiban memberikan informasi publik. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi sesuai dengan Pasal 28F dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, keterbukaan informasi publik (KIP) juga menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam Nawacita. Wapres Jusuf Kalla menyampaikan bahwa sebelum masyarakat menerima informasi yang keliru tentang badan publik bahkan hingga tersebar luas, akan lebih baik badan publik membuka informasinya kepada publik lebih dahulu. “Keterbukaan informasi itu tentu penting. Pemerintah, lembaga, dan badan publik lainnya harus menyiapkan informasi yang baik, memberikan informasi yang akurat, dan akuntabilitasnya dapat diperiksa kita semua,” ujarnya saat memberikan sambutan pada acara



Penganugerahan Pemingkatan KIP 2017 di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Dalam mendukung hal tersebut, Kemendikbud pun terus berupaya melayani dan menyajikan informasi publik di bidang pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya peringkat ke-9 dari 27 kementerian dalam ajang Penganugerahan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik 2017 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Tahun-Tahun sebelumnya, Kemendikbud tidak pernah masuk peringkat 10 besar dalam ajang tersebut.

Keterbukaan informasi publik itu kini menjadi keniscayaan sebuah instansi dalam hal pelayanan publik saat ini hingga masa mendatang. Oleh karena itu, saat ini Kemendikbud sedang mengembangkan dan memutakhirkan konten-konten yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui laman dengan alamat e-ppid.kemdikbud.go.id sehingga masyarakat terlayani kebutuhan informasinya di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Survei Kepuasan Masyarakat sebagai Basis Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Sejak Tahun 2011, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Sekretariat Jenderal (Setjen) melakukan survei kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders satisfaction survey/SSS*). Pada awalnya survei ini hanya mengukur bidang pendidikan, tetapi setelah bidang kebudayaan bergabung ke

Kemendikbud, pada Tahun 2013 SSS mulai mengukur bidang kebudayaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan dan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal satu kali setahun. Dengan merujuk peraturan tersebut, Kemendikbud melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala setiap Tahunnya.

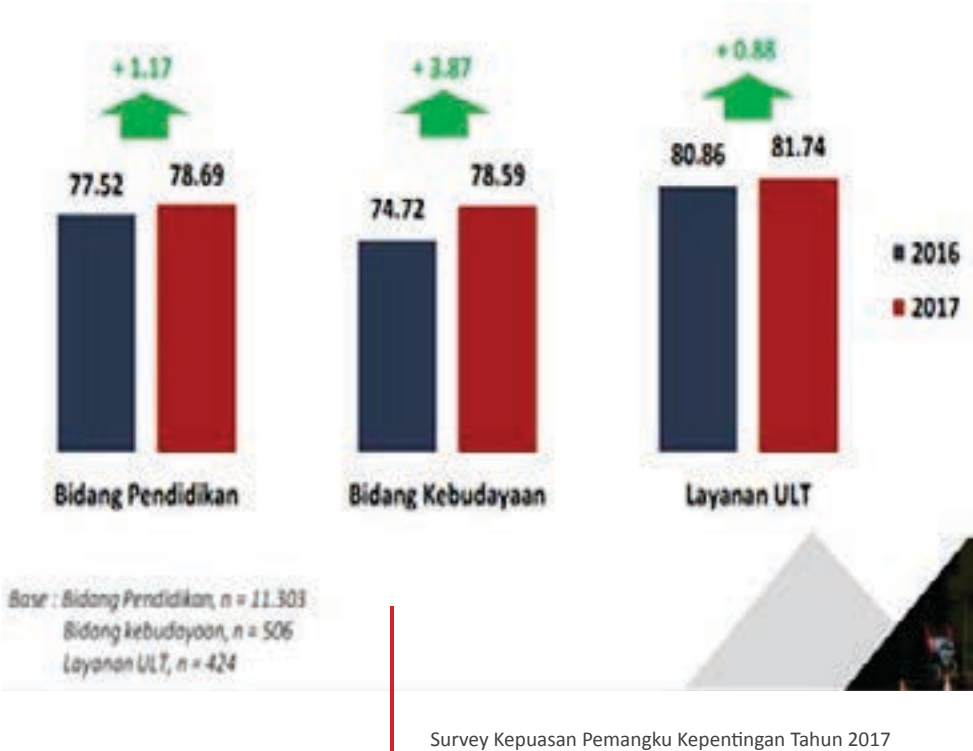
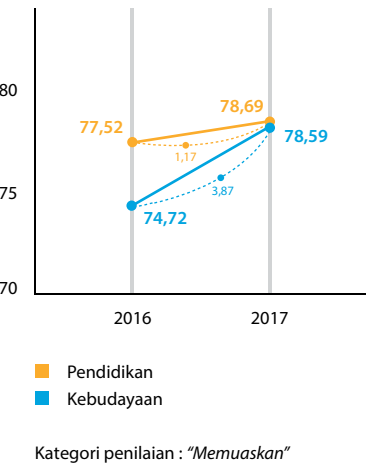
Maksud utama pelaksanaan kegiatan survei kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders satisfaction survey/SSS*) ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap layanan yang sudah diberikan oleh Kemendikbud. Hasil dari survei kepuasan ini dapat dijadikan alat ukur bagi Kemendikbud dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan serta program kerja dan kebijakan dari Kemendikbud secara nasional.

Hasil survei juga digunakan sebagai salah satu pedoman evaluasi reformasi birokrasi internal pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2014 pada Lampiran 1 yang menyebutkan bahwa peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh tiap-tiap instansi pemerintah merupakan target yang ingin dicapai

melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hasil kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kemendikbud terus meningkat setiap Tahunnya. Bidang pendidikan pada Tahun 2017 mendapat skor 78,69, meningkat 1,17 dari Tahun 2016 yang memperoleh hasil 77,52. Bidang kebudayaan juga mengalami kenaikan sebesar 3,87 poin dari Tahun 2016 sebesar 74,72 menjadi 78,59 pada Tahun 2017. Hasil ini masuk ke dalam kategori memuaskan.

Sementara itu, pelayanan langsung melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) pada 2017 memperoleh 81,74, meningkat 0,88 poin dari Tahun sebelumnya sebesar 80,86. Kepuasan pengunjung ULT ini masuk ke dalam kategori sangat puas.



Peningkatan kepuasan masyarakat ini mengindikasikan bahwa Kemendikbud selalu mengevaluasi dan meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. Laporan hasil survei kepuasan masyarakat digunakan sebagai dasar penyusunan indeks kepuasan masyarakat secara nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil survei kepuasan masyarakat ini juga secara teratur dipublikasikan oleh Kemendikbud melalui laman Kemendikbud.

Layanan Perpustakaan sebagai Gudang Ilmu dan Informasi

Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan perpustakaan utama di lingkungan Kemendikbud yang secara resmi dibuka pada 29 November 2004 oleh Menteri Pendidikan Nasional. Perpustakaan ini diharapkan

menjadi referensi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dengan menyediakan akses informasi yang lengkap, baik dalam koleksi tercetak maupun digital.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa Perpustakaan Kemendikbud ini dapat menjadi pusat dari penguatan perpustakaan sekolah. "Tidak hanya fisiknya saja yang baru, tetapi fungsinya juga harus diperluas," tuturnya. Ia berharap peran perpustakaan dapat mengafirmasi daerah tertinggal. "Kita prioritaskan sarana-sarana penunjang di sekolah, termasuk perpustakaan, karena perpustakaan merupakan nyawa dari pendidikan," ujar Mendikbud.

Perpustakaan Kemendikbud terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan selalu memperbaharui koleksi dan

memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Perpustakaan Kemendikbud sejak 2007 membuat aplikasi pengelolaan perpustakaan, yaitu SLiMS (*Senayan Library Management System*). Hingga saat ini, SLiMS sudah mengalami perkembangan hingga versi yang 8, yaitu akasia.

SLiMS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk pengelolaan perpustakaan mulai dari aktivitas manajemen koleksi, keanggotaan, sirkulasi, inventarisasi koleksi terbitan berkala, pelaporan, dan penelusuran katalog (*Online Public Access Catalog*). Saat ini aplikasi SLiMS telah digunakan dan dikembangkan oleh berbagai perpustakaan serta komunitas SLiMS yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara.





Loket pelayanan masyarakat di Unit Layanan Terpadu Kemendikbud

Selain koleksi tercetak, Perpustakaan Kemendikbud juga memiliki koleksi digital hasil terbitan/publikasi di lingkungan Kemendikbud. Koleksi digital dapat diakses melalui repositori.perpustakaan.kemdikbud.go.id. Hingga saat ini, terdapat 4.985 koleksi dan telah diunduh sebanyak 439.761. Melalui repositori perpustakaan ini, pemustaka dapat mendapatkan informasi yang terkait dengan terbitan di lingkungan Kemendikbud secara gratis dan teks lengkap (full text).

Perpustakaan Kemendikbud juga mengembangkan Katalog Induk Perpustakaan di Lingkungan Kemendikbud. Katalog induk ini bertujuan untuk mengintegrasikan perpustakaan-perpustakaan di lingkungan Kemendikbud yang menggunakan aplikasi SLiMS. Dengan adanya integrasi,

baik perpustakaan di UPT (unit pelaksana teknis) maupun pemustaka dapat mengetahui koleksi yang dibutuhkan berada dimana. Bagi perpustakaan UPT yang menggunakan aplikasi SLiMS hanya perlu mengatur id dan kata sandi (password) yang diberikan Perpustakaan Kemendikbud di SLiMS perpustakaan mereka. Jika sudah bergabung, secara otomatis, data koleksi perpustakaan tersebut akan masuk ke dalam Katalog Induk Perpustakaan menggunakan UCS (Union Cataloging System). Saat ini telah bergabung 82 perpustakaan di lingkungan Kemendikbud. Terdapat 159.456 koleksi dapat diakses oleh masyarakat melalui perpustakaan.kemdikbud.go.id/ucs.

Tidak hanya itu, perpustakaan juga mengembangkan aplikasi SLiMS untuk perpustakaan

sekolah. Aplikasi ini diberi nama Schils. Schils ini dikembangkan Perpustakaan Kemendikbud dengan menambahkan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan perpustakaan sekolah seperti menu bebas pustaka, cetak label warna, cetak kantong buku, cetak slip tanggal kembali, dan masih banyak lagi. Di dalam Schils juga sudah disediakan buku cerita dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta buku Kurikulum 2013 dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan secara elektronik sesuai dengan jenjang pendidikannya, SD, SMP, dan SMA. Schils dapat diunduh di pusbsekolah.kemdikbud.go.id/schils.

Banyaknya perpustakaan sekolah yang menggunakan SLiMS dan Schils di seluruh Indonesia membuat Perpustakaan Kemendikbud tertantang untuk

mengintegrasikan seluruh perpustakaan sekolah tersebut melalui Katalog Induk Perpustakaan Sekolah atau lebih dikenal dengan Kamaya (Pustaka Maya). Kamaya dapat diakses di pusbsekolah.kemdikbud.go.id/kamaya. Saat ini telah tergabung 169 sekolah di Kamaya dengan jumlah koleksi 45.149.

Menyaring Aspirasi Publik Melalui Media Sosial

Tingkat penetrasi internet yang mencapai lebih dari 50 persen membuat transfer informasi antarindividu di belahan dunia berlangsung seketika. Pertukaran informasi yang cepat dan luas menjadi kebutuhan bagi setiap orang sehingga pertumbuhan penggunaan internet pun melaju dengan cepatnya. Menyebarkan informasi dan menghubungkan pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan pun dilakukan oleh Kemendikbud dengan media sosial. Ini pun sejalan dengan tujuan untuk membentuk ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berdasarkan gotong royong. Oleh karena itu, keberadaan kementerian di dalam jejaring media sosial pun diperkuat.

Kemendikbud melalui Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) menyosialisasikan penggunaan media sosial secara bijak kepada pengikut (followers), terutama generasi muda, yaitu para siswa. Kemendikbud mengajak para siswa menggunakan media sosial untuk hal-hal yang produktif melalui unggahan konten di media sosial ataupun pertemuan langsung dalam sebuah kegiatan

sosialisasi. Melalui media sosial, Kemendikbud juga menyaring dan menampung aspirasi publik mengenai permasalahan dan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Urusan pendidikan dan kebudayaan memang tak hanya menja di urusan pemerintah, tetapi juga urusan semua pihak sehingga pelibatan publik sangat diperlukan. Kementerian perlu memberitakan kerja keras yang telah dilakukan. Kementerian juga perlu memperhatikan perbincangan publik yang tengah hangat di dunia maya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini menjadi kementerian dengan jumlah followers yang besar di media sosial jika dibandingkan dengan kementerian dan lembaga pemerintah lain. Hal ini terbukti dengan per tanggal 10 September 2017, fanpage Facebook Kemendikbud (fb.com/Kemendikbud.ri) memiliki 1.953.575 fans, Twitter dengan 1.476.018 pengikut, Instagram 347.421 pengikut, serta Youtube 15.378 subscribers.

Dengan jumlah tersebut, semua akun media sosial Kemendikbud menduduki peringkat lima besar di antara seluruh kementerian dan lembaga. Keempat akun tersebut juga telah terverifikasi secara resmi. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memunculkan rasa percaya masyarakat terhadap informasi yang berasal dari media sosial Kemendikbud. Dengan jumlah pemangku kepentingan terbesar, peran media sosial akan sangat efektif dalam

proses penyampaian informasi ke masyarakat. Berbagai kanal media sosial Kemendikbud berperan sebagai saluran utama dalam menyosialisasikan kebijakan pemerintahan khususnya Kemendikbud, juga sebagai wadah dalam menerima aspirasi, baik dalam bentuk kritikan maupun tanya-jawab dengan masyarakat.

Terhitung tanggal 31 Oktober 2017, Kemendikbud melalui Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat mengevaluasi perkembangan secara statistik keempat media sosialnya. Secara keseluruhan dari jumlah pengikut, baik Facebook, Twitter, Instagram, maupun Youtube terus mengalami peningkatan yang baik.

### Facebook

Hingga saat ini, sebanyak 1.953.575 pengguna Facebook telah menyukai akun fanpage Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang beralamatkan di fb.com/Kemendikbud.ri. Akun ini menduduki peringkat pertama dari seluruh kementerian/lembaga. Berdasarkan data keaktifan pengguna, penyuka akun @Kemendikbud.RI rata-rata aktif memantau fanpage Kemendikbud mulai pukul 06.00 hingga 21.00 WIB. Frekuensi terbesar terjadi antara pukul 20.00 hingga 21.00 WIB.

### Twitter

Akun Twitter resmi Kemendikbud yang bernama @Kemendikbud\_RI dibuat sejak Juli 2012. Saat ini (data per 10 September 2018), akun Twitter @Kemendikbud\_RI telah memiliki 1.476.018



pengikut. Jumlah ini menjadikan Kemendikbud menduduki posisi ke-2, dalam pemeringkatan akun Twitter kementerian dan lembaga pemerintah. Fungsi tanda pagar (tagar) yang berguna untuk menandai suatu topik juga kerap digunakan dalam konten yang dikirimkan oleh @Kemendikbud\_RI. Dengan fungsi ini, kita dapat mencari suatu topik tertentu dan menganalisis bagaimana respons warganet terhadap topik tersebut. Beberapa tagar yang digunakan dan sempat melejit menjadi trending topic di Twitter, antara lain #Hardiknas2018. Selain itu, untuk sapaan terhadap pemangku kepentingan, @Kemendikbud\_RI menggunakan tagar #SahabatDikbud, sedangkan untuk artikel berita menggunakan #BeritaDikbud.

### Instagram

Kemendikbud resmi menggunakan platform Instagram sejak Tahun 2015 dengan nama akun @Kemendikbud.ri. Hingga 10 September 2018, akun ini telah mengunggah 2.528 konten. Pengikut dari akun ini berjumlah 347.421 pengikut. Dengan jumlah ini, @Kemendikbud.ri menduduki peringkat pertama di antara kementerian/lembaga. Performa Instagram Tahun ini melesat jika dibandingkan dengan Tahun lalu yang hanya menduduki peringkat ke-5 dengan jumlah pengikut sekitar 82.000. Kenaikan pengikut terbesar di Instagram Kemendikbud terjadi pada bulan Maret hingga April 2018 saat penyelenggaraan ujian nasional (UN). Kenaikan tersebut mencapai 100 persen lebih, dari jumlah pengikut

sebesar 128.135 pada bulan Maret 2018 menjadi 234.861 pengikut. Sebagian besar pengikut Instagram Kemendikbud adalah generasi muda yang kebanyakan berusia sekolah, yaitu siswa SMP, SMA, dan SMK, sehingga mereka aktif menyuarakan aspirasinya saat musim UN. Berdasarkan data statistik di Instagram, lima lokasi terbanyak dari pengikut Instagram Kemendikbud berturut-turut berasal dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Tangerang.

### Youtube

Pada Januari 2018, jumlah subscribers Youtube KEMENDIKBUD RI sebanyak 2.250 orang. Kemudian, naik pada bulan Februari 2018 menjadi 6.545. Kenaikan secara drastis terjadi pada bulan Maret 2018, yakni mencapai 11.507 subscribers. Melonjaknya subscribers Youtube Kemendikbud tersebut diduga karena ada unggahan video yang dibuat bekerja sama dengan Youtuber muda terkenal lulusan SMK, yaitu Bayu Skak. Pada Januari 2018, Kemendikbud mengunggah video klip berjudul “Ojo Bolos Pelajaran” yang dibintangi Bayu Skak. Saat ini (data per 10 September 2018), subscribers Youtube Kemendikbud berjumlah 15.435 orang. Dengan jumlah tersebut, Youtube Kemendikbud menduduki peringkat ketiga (sebelumnya di peringkat ketujuh pada Tahun 2017). Sebagian besar pengunjung Youtube Kemendikbud adalah laki-laki (59 %), sedangkan sisanya perempuan. Berdasarkan waktu tayang, sebagian besar penonton berasal dari Indonesia (96 %), Malaysia (0,9

%), Saudi Arabia (0,6 %), Amerika Serikat (0,5 %), dan Singapura (0,3 %).

Berdasarkan situs analisis Alexa, www.kemdikbud.go.id menduduki peringkat 48 di Indonesia. Posisi ini menempatkan laman resmi Kemendikbud ini di peringkat teratas dari 34 kementerian dan lembaga negara. Rata-rata waktu kunjungan di laman ini adalah 1 menit 27 detik dengan bounce rate 75,85 %. Hal ini sesuai dengan komposisi tulisan yang rata-rata terdiri atas 6 hingga 7 paragraf. Sebanyak 57,7 % dari pengunjung laman adalah pengunjung baru. ■

Proses pelayanan di Unit Layanan Terpadu



## PERKUAT DARI DALAM UNTUK CEGAH KORUPSI

**Pesan saya, jangan ada yang dikorupsi satu rupiah pun dari APBN kita (Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)**

Korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena dampak kerusakan yang ditimbulkannya sangat luas dan berimplikasi jangka panjang. Telah banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi, termasuk memperkuat pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Sebagai unit pengawas, Inspektorat Jenderal melakukan berbagai upaya dalam mencegah terjadinya korupsi di Kemendikbud, upaya yang dilakukan antara lain:

### 1. Tunas Integritas

“Banyak bangsa, banyak negara harus mendapatkan takdir sejarahnya menjadi negara yang gagal karena telah gagal pula untuk menjaga integritas, menjaga kejujuran bangsanya. Prestasi yang dilandasi dengan kejujuran dan kerja keras itulah yang akan membawa bangsa ini maju bukan hanya bangsa yang berdaulat dalam bidang politik, mandiri dalam bidang ekonomi namun juga berkepribadian dalam kebudayaan, seperti yang kita cita-citakan bersama,” ucap Presiden Joko Widodo ketika bersilaturahmi dengan 503 kepala sekolah penerima Anugerah

Integritas Ujian Nasional Terbaik selama lima Tahun berturut-turut di Istana Negara, Senin 21 Desember 2015.

Terdapat beberapa pendekatan alternatif dalam mencegah tindak kejahatan korupsi, salah satunya adalah dengan menumbuhkan tekad yang kuat dari dalam diri seseorang untuk menolak melakukan korupsi. Pendekatan ini disebut dengan istilah dari dalam ke luar (inside out) yang merupakan cikal bakal upaya pencegahan korupsi yang didasarkan pada kesadaran diri penuh dan mendalam. Pola ini disebut dengan nama integritas, yaitu kesatuan utuh antara pola pikir, sikap, kata, dan tindak.

Dalam rangka mendukung pencegahan korupsi di lingkungan Kemendikbud, Inspektorat Jenderal Kemendikbud bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan program Workshop Tunas Integritas. Workshop ini bertujuan untuk menginternalisasi dan membangun karakter antikorupsi para pejabat struktural dan pegawai yang berpotensi sebagai agen perubahan di lingkungan kementerian. Target jumlah tunas integritas adalah 10% dari jumlah pegawai Kemendikbud.

Workshop Tunas Integritas diselenggarakan dengan maksud

untuk membentuk tunas-tunas integritas sebagai agen perubahan di lingkungan Kemendikbud. Pada workshop ini, tunas integritas akan diperkaya dan dimantapkan terkait reformasi birokrasi, wilayah bebas dari korupsi, pengendalian gratifikasi, konflik kepentingan, dan manajemen risiko.

Para lulusan kegiatan ini diharapkan mempunyai kesamaan persepsi mengenai upaya pencegahan korupsi dengan pendekatan penanaman nilai-nilai dan perubahan budaya organisasi. Lulusan juga diharapkan dapat berperan sebagai agen penggerak integritas (API) dan agen penggerak perubahan (agent of change). Selain itu, para lulusan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kemendikbud. Dengan jumlah tunas integritas yang semakin meningkat, diharapkan Kemendikbud menjadi organisasi yang integritasnya semakin meningkat dari hari ke hari.

Sampai dengan Agustus 2018, alumnus Tunas Integritas Kemendikbud berjumlah 924 orang dengan rincian sebagai berikut.



Tahun	Jumlah Angkatan	Jumlah Alumni
2013	1	19
2014	3	34
2015	4	87
2016	14	400
2017	11	305
2018	3	79
Total	36	924

Tabel Rekap Jumlah Alumni Tunas Integritas Kemendikbud Per Agustus 2018

Tabel Rekap Jumlah Alumni Tunas Integritas Kemendikbud Per Agustus 2018

Unit Utama	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf JFU	Staf JFT	Mantan Pejabat	Jumlah
Sekretariat Jenderal	1	2	33	90	54	6	15	201
Inspektorat Jenderal	0	3	4	8	47	40	8	110
Ditjen GTK	0	3	22	37	28	3	3	96
Ditjen PAUD dan Dikmas	1	4	11	18	41	0	5	80
Ditjen Dikdasmen	1	3	24	66	89	0	11	194
Ditjen Kebudayaan	0	4	36	13	33	0	3	89
BPP Bahasa	0	3	12	20	33	7	3	78
Balitbang	0	3	16	11	22	9	5	66
Mutasi Kemenristek Dikti							10	10
Total	3	25	158	263	347	65	63	924

2. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

“Pertama, *hati-hati dalam mengelola keuangannya, baik APBD dan APBN. Itu adalah uangnya rakyat, hati-hati. Yang kedua juga yang berkaitan dengan gratifikasi, hati-hati. Semuanya hati-hati.*” (Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Salah satu upaya pencegahan korupsi adalah dengan

mengendalikan penerimaan gratifikasi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan penyelenggara negara. Kemendikbud telah menerbitkan peraturan terkait pengendalian gratifikasi, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2012 tentang Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Istilah gratifikasi sendiri menurut Permendikbud tersebut adalah pemberian uang, barang,

rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/ fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.

Penerima gratifikasi wajib melaporkan kepada UPG dalam waktu paling lama 25 hari setelah menerima gratifikasi. Pelapor mengisi formulir pelaporan gratifikasi, baik melalui surat maupun

REKAPITULASI LAPORAN GRATIFIKASI TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PER JULI 2018											
NO	TAHUN	Jumlah Laporan	Nilai	Menurut Jenis Yang Dilaporkan			Menurut Jenis Pelaporan				
				Barang	Nilai	Uang	Nilai	Lap. Biasa	Nilai	Lap. PERNIKAHAN	Nilai
1	2012	25	Rp 64,987,500.00	19	Rp 1,800,000.00	6	Rp 61,187,500.00	25	Rp 64,987,500.00	-	-
2	2013	148	Rp 32,345,000.00	145	Rp 25,845,000.00	3	Rp 6,500,000.00	148	Rp 32,345,000.00	-	-
3	2014	74	Rp 1,451,891,000.00	59	Rp 332,145,000.00	15	Rp 1,119,746,000.00	72	Rp 356,868,000.00	2	Rp 1,094,629,000.00 Yen Jepang : 20.000 Dolar Amerika : 1.000 Dolar Selandia Baru : 350 Ringgit Malaysia : 350
4	2015	51	Rp 27,060,000.00	45	Rp 11,990,000.00	6	Rp 15,070,000.00	51	Rp 27,060,000.00	-	-
5	2016	37	Rp 16,685,000.00	34	Rp 11,675,000.00	3	Rp 5,010,000.00	37	Rp 16,685,000.00	-	-
6	2017	30	Rp 249,935,650.00	26	Rp 37,058,650.00	4	Rp 212,877,000.00	29	Rp 60,858,650.00	1	Rp 189,077,000.00
7	2018	13	Rp 13,200,000.00	10	Rp 5,100,000.00	3	Rp 8,100,000.00	13	Rp 13,200,000.00	-	-
TOTAL		365	Rp 1,842,506,150.00	328	Rp 422,513,650.00	37	Rp 1,419,992,500.00	362	Rp 558,804,150.00	3	Rp 1,283,702,000.00 Yen Jepang : 20.000 Dolar Amerika : 1.000 Dolar Selandia Baru : 350 Ringgit Malaysia : 350

pos elektronik. Kemudian, formulir tersebut diberikan kepada UPG yang berada di Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Pelaporan melalui pos elektronik dapat disampaikan melalui <http://itjen.kemdikbud.go.id> atau [upg@kemdikbud.go.id](mailto:upg@kemdikbud.go.id). Selanjutnya, UPG akan meneruskan laporan tersebut ke KPK melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL). Pelapor juga dapat langsung melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui aplikasi GOL yang ditembuskan kepada UPG Kemendikbud. Laporan yang masuk aplikasi GOL akan diverifikasi oleh UPG atau KPK.

Salah satu tugas UPG adalah mengendalikan segala bentuk gratifikasi yang diterima oleh pejabat dan PNS di lingkungan Kemendikbud. Penerimaan laporan gratifikasi yang diterima oleh UPG Kemendikbud dari Tahun 2012 sampai dengan bulan Juli 2018 sebanyak 365 laporan dengan nilai barang sebesar Rp422.513.650,00 dan uang sebesar Rp1.419.992.500,00

Dengan adanya UPG diharapkan tidak ada lagi penerimaan/ pemberian gratifikasi yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas. Inspektorat Jenderal Kemendikbud sebagai penanggung jawab UPG telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan pemberian gratifikasi. Upaya yang telah dilakukan antara lain sosialisasi kepada pegawai Kemendikbud, sosialisasi kepada kepala sekolah, guru, dan komite sekolah terkait jenis gratifikasi. Pada Tahun 2018 ini, Inspektorat Jenderal Kemendikbud akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh satker Kemendikbud.

3. Pakta Integritas

Mengutip dari sebuah tulisan pada Indonesia Corruption Watch bahwa pakta integritas merupakan salah satu alat Transparency International sejak Tahun 1900-an sebagai pengejawantahan konsep besar pulau-pulau integritas (islands of integrity) pencegahan

korupsi. Keberadaan pakta integritas dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel jika pihak-pihak yang menandatangani benar-benar berintegritas menjalankannya serta diterapkan secara serius dan menyeluruh,

Pakta integritas merupakan sebuah dokumen yang berisi pernyataan diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan menandatangani pakta integritas, pegawai dengan sadar mengetahui bahwa mereka berkewajiban untuk menghindari konflik-konflik kepentingan yang dapat menimbulkan tindakan KKN.

Penandatanganan pakta integritas dilaksanakan oleh seluruh pegawai Kemendikbud pada setiap awal Tahun anggaran. Penandatanganan ini bertujuan untuk



membentuk lingkungan pengendalian internal yang kondusif, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Penandatanganan pakta integritas ini diharapkan dapat: 1) memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi; 2) menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran; 3) memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel; serta 4) mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila.

4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)

Dalam beberapa Tahun belakangan ini, Kemendikbud terus aktif menjalankan program Reformasi Birokrasi (RB) untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitas penyediaan layanan publik. Sudah banyak kemajuan dan perubahan yang dilakukan Kemendikbud sehingga dampak layanannya telah dirasakan publik. Kemendikbud terus berupaya membuka diri terhadap masukan dan saran untuk memperbaiki mutu layanannya secara berkesinambungan.

Kemendikbud mengacu pada Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN dan RB) sebagai koordinator reformasi birokrasi kementerian/lembaga yang telah menetapkan tujuan RB meliputi: 1) penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2) pelayanan publik yang berkualitas; 3) kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; serta 4) profesionalisme sumber daya manusia aparatur. Untuk mencapai tujuan pertama, Kemen-PAN dan RB mendorong kementerian/lembaga agar mengajukan satuan kerja untuk menjadi unit percontohan menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK).

Dalam rangka menuju WBK, Kemendikbud menggunakan enam area perubahan yang ditetapkan Kemen-PAN dan RB untuk kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Enam area perubahan yang menjadi tujuan WBK meliputi aspek manajemen pemerintahan yang diprioritaskan untuk mendapatkan perbaikan dan pembenahan. Penerapan program WBK ini diharapkan dapat menjadi faktor pengungkit yang akan berimplikasi terhadap terwujudnya tata kelola yang baik dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparan, berkeadilan, serta bebas dari praktik KKN. Keenam program WBK tersebut meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja,

penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada Tahun 2017, Kemendikbud telah mengusulkan 35 satuan kerja (satker) untuk memperoleh predikat WBK dari Kemen-PAN dan RB, tetapi baru tiga satker yang telah memperoleh predikat tersebut, yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa tengah, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Jawa Timur, dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika (PPPPTK BOE) Malang. Pada Tahun 2018, Kemendikbud kembali mengusulkan 45 satker kepada Kemen-PAN dan RB untuk dikukuhkan menjadi satker WBK yang 29 di antaranya ditetapkan menjadi satker menuju wilayah bebas dari korupsi Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 203/P/2018.

2017		2018	
Usulan	Predikat	Usulan	Predikat
35	3	45	*

Tabel Capaian Predikat WBK Satuan Kerja Kemendikbud

Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang Diberikan oleh Kemen-PAN dan RB kepada Pusat Pengembangan PAUD dan Dikmas Jawa Timur pada Tahun 2017



Untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi program WBK, Kemen-PAN dan RB telah menetapkan suatu alat pemantau khusus yang diberi nama Penilaian Mandiri WBK. Filosofi penilaian mandiri yang dilakukan oleh instansi dalam mengukur sejauh mana implikasi dari penerapan program WBK terhadap peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan publik. Kemen-PAN dan

RB memberikan kepercayaan kepada Inspektorat Jenderal Kemendikbud untuk mengoordinasikan pelaksanaan penilaian supaya dapat berjalan secara objektif dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan jumlah satker Kemendikbud yang mendapatkan predikat WBK, Inspektorat Jenderal Kemendikbud terus berupaya untuk melakukan pendampingan-pendampingan

terhadap satker Kemendikbud. Upaya-upaya yang dilakukan, antara lain melakukan sosialisasi buku Pedoman Membangun WBK, pendampingan penyusunan dan pelaksanaan program kerja WBK, bimbingan teknis pemenuhan indikator WBK, verifikasi dan konfirmasi atas penilaian mandiri, serta pemantauan keterlaksanaan program WBK. ■



# LIMA TAHUN BERTURUT – TURUT DENGAN PREDIKAT WTP

*Stempel opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak boleh menjadikan kementerian atau lembaga berpuas diri* **Joko Widodo**

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini dengan predikat tertinggi bagi kementerian/lembaga. Opini WTP (unqualified opinion) adalah opini audit yang diberikan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan (1) standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian internal.

Pada tanggal 8 Juni 2018, Anggota VI BPK-RI, Dr. Harry Azhar Azis, telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2017. Laporan ini diterima oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, di Gedung Tower BPK RI, Jakarta Selatan. Harry Azhar Azis menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 2017 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Prestasi WTP diperoleh Kemendikbud selama lima tahun berturut-turut sejak Tahun 2013.

Bukan hal yang mudah bagi kementerian/lembaga untuk memperoleh predikat WTP dari BPK RI. Berbagai pemeriksaan yang mendalam atas Laporan Keuangan Kemendikbud dilakukan oleh BPK untuk memberikan predikat ini.

Prestasi ini merupakan upaya dan kerja sama seluruh satker Kemendikbud sehingga dapat mempertahankan WTP selama 5 Tahun berturut-turut. Laporan Keuangan Kemendikbud yang mendapatkan opini WTP Tahun 2017 merupakan konsolidasi dari 365 satker di lingkungan Kemendikbud yang terdiri atas 64 satker pusat, 152 satker daerah, 128 satker dekonsentrasi, dan 21 satker tugas pembantuan dengan jumlah anggaran sebesar Rp37,97 triliun.

Pada penyerahan tersebut, Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa opini WTP tersebut diharapkan dapat memberikan semangat bagi seluruh jajaran Kemendikbud. Semangat ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan dalam rangka peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas.

Lebih lanjut Mendikbud menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kemendikbud Tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp36,87 triliun atau 97,10 % dari pagu sebesar Rp37,97 triliun. Anggaran ini

sebagian besar untuk membiayai program-program prioritas nasional antara lain untuk Program Indonesia Pintar (PIP), tunjangan fungsional guru, bantuan untuk rehab ruang belajar, serta pembangunan USB, RKB, laboratorium, dan perpustakaan.

Mendikbud Muhadjir Effendy juga menyampaikan bahwa Kemendikbud terus berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan negara dan aset. Pengawasan dan pengendalian ini tentu dengan memperhatikan kualitas pemanfaatannya dan terus mendorong untuk lebih terbuka, lebih efektif, dan lebih akuntabel.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diperoleh Kemendikbud diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya pada Tahun-Tahun mendatang. Berbagai langkah strategi yang dilakukan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sebagai upaya mempertahankan WTP, yaitu dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara akuntabel dan transparan serta menyiapkan SDM yang profesional dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan. ■



Mendikbud menerima laporan keuangan Kemendikbud Tahun 2017 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



# PENINGKATAN AKUNTABILITAS DALAM PENGADAAN LANGSUNG

*Dengan menggunakan teknologi informasi, saya yakin seluruh proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan lebih mudah, lebih sepadan, lebih transparan.*  
**Joko Widodo**

Berawal dari menjalankan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang ketiga, yaitu pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik, Kemendikbud berusaha meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Strategi ketiga yang lebih dikenal dengan Reformasi Birokrasi tersebut diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa melalui pengadaan langsung secara elektronik.

Gagasan pengadaan langsung secara elektronik ini juga merupakan upaya mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 yang mengarahkan agar seluruh pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik. Implementasi gagasan ini menjadi penting dilaksanakan oleh Kemendikbud, mengingat besarnya total nilai pengadaan langsung di Kemendikbud, yaitu lebih dari tiga triliun pada Tahun 2017. Dalam pengelolaan dana yang begitu besar dibutuhkan peningkatan akuntabilitas, pengawasan, baik melalui pengawasan maupun audit, sistem pelaporan yang lebih baik, serta penstandaran proses.

Implementasinya sendiri menjadi sebuah tantangan bagi Kemendikbud, karena saat gagasan ini diinisiasi pada pertengahan Tahun 2017, belum ada infrastruktur berupa aplikasi yang dapat digunakan. Namun, mengingat implementasi pengadaan langsung secara elektronik nantinya akan membawa perubahan pada manajemen, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan tata laksana, Kemendikbud memutuskan untuk bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah memiliki platform untuk mengimplementasikan gagasan tersebut.

Kerja sama antara Kemendikbud dan Kemenkeu itu tertuang dalam Nota Kesepahaman Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung atau yang lebih dikenal dengan SIMPeL. SIMPeL merupakan sistem informasi yang dapat memfasilitasi proses pengadaan

langsung secara elektronik. Aplikasi ini dikembangkan oleh Kemenkeu sejak Tahun 2013. Kemendikbud merupakan kementerian ketiga yang menggunakan aplikasi ini, selain Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara.

**Elektronik versus Konvensional**

Penggunaan SIMPeL menawarkan berbagai kemudahan dalam proses pengadaan langsung jika dibandingkan dengan metode konvensional menggunakan kertas. Aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi proses pengadaan langsung. Peningkatan akuntabilitas tersebut dapat dilihat dari proses yang telah dilakukan dalam sistem yang merupakan terjemahan dari petunjuk teknis pengadaan langsung.

“Saya pribadi mengajak teman-teman untuk menggunakan aplikasi ini agar akuntabilitas kementerian kita juga akan semakin baik. Memang yang saya ingat tujuan pemakaian SIMPeL itu terkait akuntabilitas,” ujar Anton Wibisono, pejabat pengadaan di Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, salah satu satuan kerja pusat dengan jumlah paket pengadaan langsung terbanyak pada aplikasi SIMPeL.

Peningkatan transparansi dapat dilihat dari adanya pengumuman hasil pemilihan penyedia pengadaan langsung melalui laman aplikasi SIMPeL sehingga khalayak umum dapat mengetahui pengadaan langsung yang telah dilaksanakan oleh Kemendikbud. Bentuk transparansi lainnya adalah dimungkinkannya setiap pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan (PP) untuk melihat harga satuan dan penyedia beserta tinjauannya dari satuan kerja yang berbeda. Hal ini berpotensi untuk menurunkan harga satuan dari setiap jenis komoditas yang kerap dibelanjakan oleh satuan kerja sehingga terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Manfaat yang diperoleh oleh PPK dan PP dari penggunaan SIMPeL tidak hanya itu. Bagi Bastian Derajat

Pulungan, PPK di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatra Utara, SIMPeL membantu koordinasi antara PPK, PP, dan penyedia. Sebagai PPK pada salah satu satuan kerja daerah yang memiliki jumlah paket terbanyak, beliau menyampaikan kemudahan lainnya adalah pada fasilitas penyimpanan dokumen yang lebih mudah dan baik.

Berbicara tentang efisiensi, banyak yang bisa dihadirkan oleh aplikasi SIMPeL untuk penggunaanya.

Namun, efisiensi yang paling mudah diperoleh oleh para penggunaanya, terutama bagi PP adalah adanya simplifikasi proses bisnis karena telah terbantu oleh sistem. Melalui aplikasi ini, PP dapat menghemat waktu pelaksanaan pengadaan langsung hingga 65% jika dibandingkan dengan perhitungan beban kerja yang terdapat di Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2013.

Perbandingan Waktu Penyelesaian Paket Pengadaan Langsung dengan Cara Konvensional dan Menggunakan SIMPeL

No	Tahapan Pengadaan Langsung	Waktu Penyelesaian	
		Perka LKPP (Pengadaan Langsung Konvensional)	Data Empiris Implementasi SIMPeL
1	Penyusunan Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	1,75 jam	1,75 jam
2	Pemeriksaan Dokumen Spesifikasi		
	- Beres	1,00 jam	1,0 jam
	- Konsultasi	5,00 jam	5,0 jam
	- Tes Lainnya	1,00 jam	1,0 jam
	- Tes Konsultasi	3,00 jam	3,0 jam
3	Pembuatan Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	1,00 jam	0,5 jam
4	Pengumuman Harga Perkiraan Sendiri (PPS) Barang/Jasa	0,75 jam	0,5 jam
5	Pengumuman Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	1,25 jam	0,5 jam
6	Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pengada Barang/Jasa*		
	- Pengadaan Langsung	2,0 jam	0,5 jam
	- Pengadaan Konstruksi	4,0 jam	1,0 jam
	- Jasa Lainnya	2,0 jam	0,5 jam
	- Pengadaan Jasa Konsultansi	4,0 jam	1,0 jam
7	Pembukaan Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa	2,50 jam	0,25 jam
8	Evaluasi Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa*		
	- Pengadaan Barang	2,0 jam	0,5 jam
	- Pengadaan Konstruksi	4,0 jam	1,0 jam
	- Pengadaan Jasa Lainnya	2,0 jam	0,5 jam
	- Pengadaan Jasa Konsultansi	4,0 jam	1,0 jam
9	Penetapan dan Pengumuman Pemenang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	2,00 jam	0,25 jam
10	Kualifikasi dan Negosiasi Penawaran Penyedia Barang/Jasa	1,00 jam	0,5 jam
11	Kualifikasi dan Negosiasi Penawaran Jasa Konsultansi	3,00 jam	2,0 jam
	Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	0,25 jam	0,25 jam



Implementasi, Pengembangan, dan Integrasi Aplikasi

Implementasi selalu menjadi tantangan yang lebih besar dibandingkan menghasilkan suatu gagasan. Penerapan pengadaan langsung secara elektronik menjadi tantangan yang lebih besar lagi karena Kemendikbud memiliki 200 satuan kerja yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Walaupun pada awalnya direncanakan untuk diimplementasikan secara bertahap, Didik Suhardi, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, memutuskan untuk menerapkan gagasan ini secara serentak di seluruh Indonesia.

Melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1773/A. A6.3/LK/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Implementasi Pengadaan Langsung Secara Elektronik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disampaikan bahwa penggunaan SIMPeL menjadi kewajiban mulai 1 Maret 2018. Kewajiban tersebut semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang diundangkan pada 28 Maret 2018.

Tidak hanya melalui peraturan tertulis, Sekretariat Jenderal yang secara khusus bertanggung jawab atas implementasi gagasan ini juga bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbud untuk menjadikan penggunaan aplikasi ini sebagai salah satu penilaian kepatuhan satuan kerja. Hal ini membuat penerapan pengadaan langsung secara elektronik meningkat secara tajam di lingkungan Kemendikbud.

“Kesadaran teman-teman di sini semakin baik dalam penggunaan SIMPeL, jadi bukan saya semata-mata sebagai pejabat pengadaan yang menggunakan SIMPeL, pejabat pengadaan lain pun di Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya juga menggunakan SIMPeL,” ujar Wibisono, PP sekaligus Kepala Seksi Pengelolaan di Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud.

Semenjak diwajibkannya implementasi pengadaan langsung secara elektronik, hingga Agustus 2018 sebanyak 126 satuan kerja telah menggunakan aplikasi SIMPeL dengan jumlah paket pengadaan lebih dari 1600 paket, baik paket pengadaan langsung dengan surat perintah kerja (SPK) maupun paket pembelian langsung. Walaupun terlihat lebih sedikit dari jumlah

satuan kerja yang ada di Kemendikbud, progres penerapan ini dapat dikatakan berhasil dan berlangsung dengan sangat cepat. Keberhasilan ini, bahkan telah diakui oleh N.E. Fatimah, Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan.

Tidak hanya berhenti sampai implementasi, untuk peningkatan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, Kemendikbud, melalui kerja sama yang telah terbangun dengan Kementerian Keuangan, juga melihat ada potensi pengembangan yang lebih besar lagi dibandingkan bentuk aplikasi yang sudah ada. Salah satu bentuk pengembangan yang sedang direncanakan adalah pengembangan aplikasi untuk memfasilitasi pengadaan yang dilaksanakan di luar negeri. SIMPeL untuk pengadaan luar negeri ini mulai dikembangkan karena Kemendikbud memiliki 18 satuan kerja yang berada di luar negeri. Pengembangannya akan dilandasi oleh peraturan menteri luar negeri yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Rencana pengembangan lainnya adalah aplikasi untuk pengadaan barang dan jasa di sekolah yang nantinya akan menjembatani antara aplikasi perencanaan dan pembayaran yang saat ini sudah terbangun.

Hal penting lainnya yang menjadi salah satu bagian pengembangan aplikasi ini adalah integrasi antara aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Aplikasi-aplikasi tersebut, antara lain Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik LKPP, e-Planning milik Kemendikbud, dan aplikasi keuangan milik Kementerian Keuangan.

Aplikasi SIMPeL yang belum terintegrasi sendiri bisa mengefisiensi waktu hingga 65% jika dibandingkan dengan perhitungan beban kerja yang terdapat di Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2013. Waktu yang dapat diefisiensi tersebut tentu bisa ditingkatkan jika ada integrasi dalam setiap sistem informasi yang sudah ada. Jika terhubung dengan aplikasi e-Planning dan SIRUP, PPK akan lebih mudah dalam membuat paket karena cukup menarik data dari kedua aplikasi tersebut tanpa melakukan penginputan data secara berulang. Jika terhubung ke aplikasi keuangan, PPK akan lebih mudah melihat progres pekerjaan dan pengguna aplikasi keuangan juga dapat lebih mudah dalam menginput data-data pembayaran. Oleh karena itu, tidak hanya waktu pekerjaan pengadaan langsung yang dapat

dijadikan lebih efisien, tapi juga waktu untuk proses keuangan.

Data dan Informasi untuk Perencanaan Pengadaan

Didik Suhardi, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, melihat potensi manfaat dari penggunaan aplikasi ini lebih luas lagi. Dari data yang diperoleh melalui aplikasi ini, beliau berharap dapat memperoleh informasi mengenai pola pengadaan langsung, jenis belanja, serta ketepatan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh setiap satuan kerja.

Dengan total nilai pengadaan langsung di Kemendikbud yang lebih dari tiga triliun pada Tahun 2017, keberadaan SIMPeL menjadi sangat diperlukan dalam mengawal proses pengadaan langsung agar sesuai dengan kebijakan dan tepat sasaran. Bagi beliau, informasi yang nantinya dihadirkan oleh SIMPeL akan mempermudah Kemendikbud untuk menentukan alokasi dana untuk setiap satuan kerja yang peruntukannya akan sesuai dengan tugas dan fungsi dari satuan kerja tersebut. Di sinilah kita dapat lihat bahwa SIMPeL dapat meningkatkan efektivitas di dalam pengadaan.

Pola pengadaan langsung oleh satuan kerja ini

akan membantu Kemendikbud untuk merencanakan pengadaan ke depannya. Komoditas pengadaan yang sifatnya berulang dan banyak dibeli oleh satuan kerja dapat dikonsolidasikan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengadaan.

Efisiensi melalui konsolidasi ini tidak hanya terkait penekanan harga karena pembelian dilakukan dalam jumlah yang besar, tetapi juga dari segi waktu dan biaya administrasi. Satu komoditas yang sebelumnya diadakan dengan metode pengadaan langsung oleh setiap satuan kerja atau PPK dapat digabungkan. Waktu yang dibutuhkan untuk memilih penyedia pada satu paket tentu lebih efisien jika dibandingkan pada banyak paket. Biaya administrasi juga dapat ditekan karena tidak harus membayar terlalu banyak orang ataupun tim untuk proses tersebut.

Dari keseluruhan manfaat yang ditawarkan oleh pengadaan langsung secara elektronik adalah penghematan hingga 25%. Dana hasil penghematan dapat digunakan untuk program yang lebih penting dan waktu yang dihemat bisa digunakan untuk fokus pada pengembangan-pengembangan program yang akan datang.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penggunaan Aplikasi SIMPeL antara Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (kiri) dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kanan) pada Desember 2017.







Road Map Pengadaan Langsung Secara Elektronik dan pengembangan aplikasi serupa untuk satuan kerja luar negeri dan satuan Pendidikan.

# RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT ASESMEN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN) sudah diterapkan di negara negara maju. Oleh karena itu, sistem ini perlu segera diterapkan juga di Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pejabat tinggi. Dengan sistem merit tersebut, kita berharap nantinya tidak ada lagi penempatan jabatan pimpinan tinggi yang berdasarkan penilaian subjektif. (Asman Abnur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), 14 Maret 2018)*

Terwujudnya ASN profesional merupakan bagian dari cita-cita reformasi birokrasi yang telah di-rintis sejak Tahun 2010. Aparatur sipil negara diharapkan mampu menjalankan pelayanan publik secara profesional. Untuk menuju cita-cita tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 telah menegaskan bahwa manajemen sumber daya manusia (SDM) di lingkungan

instansi pemerintah harus berlandaskan pada prinsip meritokrasi, yakni didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kesesuaian individu terhadap kompetensi merupakan syarat untuk menduduki jabatan. Sebagai konsekuensi, pengelola SDM dituntut untuk mampu melakukan pengukuran yang valid dan reliabel tingkat kesesuaian kompetensi invididu terhadap standar kompetensi jabatan. Tuntutan ini mendorong organisasi

untuk membangun sebuah sistem penilaian kompetensi terbaik. Untuk itu, Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah merintis pembangunan Pusat Asesmen Kemendikbud, yang akan menerapkan Pusat Asesmen sebagai metode penilaian. Alasan penggunaan metode ini karena metode ini merupakan teknik penilaian dengan tingkat validitas tertinggi dibandingkan teknik penilaian lain.

Sally Walker. Assessment Center

Metode Pengukuran	Validitas
Assessment Center	0.65
Work Sample Test	0.54
Cognitive Ability Test	0.53
Modern Personality Test	0.39
Biodata	0.38
References	0.23
Interviews	0.19





Implementasi Pusat Asesmen sebagai metode penilaian kompetensi di lingkungan Kemendikbud membutuhkan proses awal, yakni penyiapan infrastruktur pendukung, pedoman, SDM, serta sistem informasi. Pada Tahun 2018 ini, seluruh persiapan tersebut telah dirintis dan masih terus berjalan. Ruang Pusat Asesmen telah mulai dibangun dan hampir selesai. Pembangunan ruang dan fasilitas pendukung ruangan asesmen tersebut dilakukan sesuai spesifikasi standar kebutuhan ruang Pusat Asesmen, yang mengacu pada hasil studi banding ke beberapa instansi, seperti PT Telkom, Tbk, PT PLN Persero, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara, dan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan pedoman juga telah mulai dirintis dan masih dalam proses untuk menghasilkan peraturan menteri tentang pedoman Pusat Asesmen. Untuk mempersiapkan SDM, Kemendikbud telah melakukan pelatihan asesor bagi 35 orang pegawai, sedangkan dalam rangka penyiapan sistem telah dilakukan inventarisasi kebutuhan modul sebagai langkah awal dalam pengembangan aplikasi Pusat Asesmen. Saat ini aplikasi tersebut sudah memasuki tahap uji kelayakan. Proses persiapan menuju implementasi Pusat Asesmen Kemendikbud akan terus dilakukan hingga tuntas karena kontribusinya mutlak diperlukan untuk mendukung ketersediaan data

kompetensi pegawai sebagai salah satu sumber data mutlak dalam penerapan manajemen ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja atau manajemen berbasis sistem merit. Keberhasilan pembangunan Pusat Asesmen yang rencananya akan diluncurkan secara utuh pada Tahun 2019 akan berkontribusi besar dalam mendukung kesuksesan sistem merit Kemendikbud untuk menghasilkan ASN profesional, sebagaimana tuntutan reformasi birokrasi. Lahirnya ASN profesional akan mendorong kinerja organisasi yang nantinya juga mendorong kinerja instansi. Kinerja terbaik instansi merupakan prestasi yang dapat diberikan untuk kemajuan bangsa. ■



Peserta Darmasiswa melakukan pawai

## DARMASISWA

*The Darmasiwa Program allows people from all over the world to connect. Whilst cemented in Indonesia, these connections will benefit the world: increasing connections around the world benefit all areas of politics, business, media, and the internet (Peserta Darmasiswa Tahun 2017/2018 dari Inggris)*

Darmasiswa tidak hanya membangun koneksi, sebagaimana disampaikan oleh peserta Darmasiswa dari Inggris pada Tahun ajaran 2017/2018 di atas, tetapi juga menghasilkan alumni yang diharapkan bisa menjadi duta Indonesia. Darmasiswa merupakan program beasiswa yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Beasiswa Darmasiswa diperuntukkan bagi warga negara asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia serta seni dan budaya di berbagai perguruan tinggi di

Indonesia selama satu Tahun. Beasiswa yang sudah diinisiasi sejak Tahun 1974 ini telah menghasilkan lebih dari 8.000 alumni yang berasal dari kurang lebih 90 negara. Pada Tahun ajaran 2018/2019, peserta Darmasiswa yang diterima berjumlah 679 orang dari 93 negara dan ini merupakan peserta Darmasiswa terbanyak sejauh ini. Mengingat manfaat yang dihasilkan oleh program, yakni menumbuhkan duta-duta Indonesia di setiap negara peserta Darmasiswa berasal, menjadikan program beasiswa ini menjadi salah satu program prioritas di Kemendikbud. ■



## ONE SINGLE SUBMISSION (OSS)

**Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik. (Nawacita nomor 2 Presiden Joko Widodo).**

Pemerintah terus berinovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus izin melalui penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk nyata pemerintah dalam penyederhanaan regulasi dan birokrasi yang menghambat pelaksanaan berusaha, baik di kementerian/lembaga maupun di daerah. Langkah ini diambil pemerintah untuk memangkas waktu perizinan yang biasanya dibutuhkan investor. Misalnya, semula pengurusan memerlukan waktu beberapa Tahun menjadi hanya beberapa bulan saja sehingga mendukung pertumbuhan investasi. Sistem *Online Single Submission* (OSS) tersebut nantinya akan terintegrasi pada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah serta mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden kepada seluruh Menteri Kabinet Kerja dan kepala lembaga dalam sidang kabinet tentang Peluncuran Online Sistem Submission pada tanggal 16 Mei 2018.

*“Supaya mendapatkan perhatian dari seluruh menteri dan kepala lembaga nonkementerian. Yang pertama, saya perintahkan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang semuanya nanti terintegrasi dengan online single submission. Ini betul-betul mempersiapkan diri, baik infrastruktur teknologinya maupun dari sisi sumber daya manusianya dan yang paling penting adalah dalam mengubah kultur birokrasi yang kita miliki. Saat OSS ini diluncurkan harus betul-betul sudah hilang yang namanya egosektoral, tidak ada prosedur lagi yang ribet, yang berbelit-belit, berlama-lama. Semuanya harus terintegrasi lebih cepat dan lebih sinergi antara kementerian/ lembaga dan pemda yang kita miliki.”*  
(Presiden Joko Widodo, 2018).

Guna menjalankan amanah Presiden tersebut, Kemendikbud membuat sistem perizinan Sican- tik (Aplikasi Cerdas Layanan Per- izinan Terpadu untuk Publik) dan perizinan dengan sistem OSS.

### 1. Sican- tik

Dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, Ke- menterian Pendidikan dan Kebu- dayaan selaku lembaga pembantu Presiden yang menangani urusan pendidikan dan kebudayaan telah melakukan Reformasi Perizinan Berusaha, yaitu dengan memang- kas jumlah birokasinya, yaitu yang semula berjumlah 16 menjadi 6 serta turut berkontribusi bersama dengan K/L lain dalam mengem- bangkan sistem Sican- tik yang dib- uat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. K/L terkait ter- masuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai peran dalam melakukan peny- usunan dan penetapan standar Perizinan Berusaha di sektornya masing-masing, yaitu berupa norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha, dan fasilitasi Perizinan Berusaha. Sistem Sican- tik merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem Cloud yang dapat digunakan oleh instansi

Tahun	Penerima Beasiswa	Jumlah Negara Peserta
2016/2017	580	78
2017/2018	637	89
2018/2019	679	93

Jumlah Penerima Program Darmasiswa 2016-2018

Peserta Darmasiswa melakukan pertunjukan kebudayaan Indonesia



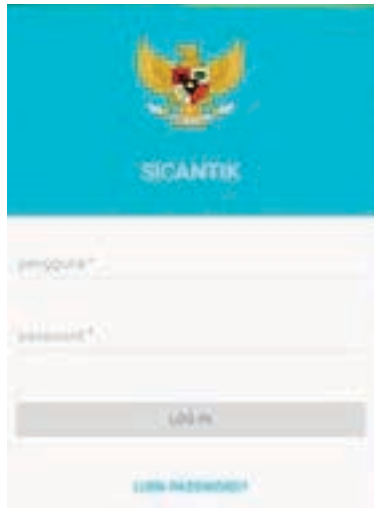




pemerintah secara gratis untuk mempercepat proses pendaftaran perizinan. Sistem Sicantik ini berbentuk aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) untuk perizinan berusaha dan layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dengan adanya sistem Sicantik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama K/L terkait telah sejalan dengan salah satu program Presiden yang tercantum dalam Nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik.

Terinspirasi dengan tema “Kerja Kita Prestasi Bangsa” yang identik dengan kata energi dan kerja, sistem Sicantik ini merupakan capaian seluruh pihak terkait termasuk Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan dalam mengerahkan seluruh energi dalam bekerja demi kemajuan bangsa. Kemajuan yang dimaksud dalam hal mendukung percepatan perizinan melalui sistem yang terpadu dan terintegrasi. Sistem ini dibuat pada Tahun 2013 oleh Direktorat e-Government, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan perizinan online dan terintegrasi pada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah.



Aplikasi ini dikembangkan dengan teknologi yang terpasang pada PC/laptop/ponsel pintar dengan cara memasukkan alamat url <http://sicantik.oss.go.id/>.

Setelah memasukkan alamat url diatas pada browser, maka akan tampil halaman awal aplikasi seperti gambar dibawah.

Pada halaman awal aplikasi terdapat kolom login untuk dapat melanjutkan masuk kedalam aplikasi.

Selain itu, bagi yang belum memiliki akun dapat melakukan pendaftaran dengan memasukkan data dan identitas user melalui kolom registrasi pemohon.

Setelah Login, user dapat mengakses beberapa fitur yang terdapat dalam Aplikasi SiCantik, antara lain :

1. Pendaftaran izin secara online,
2. *Tracking* status perizinan;
3. Pengaduan online;
4. Pelaporan yang dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan;
5. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan

6. Perhitungan retribusi dan rekomendasi dari tim teknis.

Aplikasi Sicantik telah dimanfaatkan oleh beberapa daerah, antara lain, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Agam, Kota Cimahi, dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Pada Tahun 2016, daerah-daerah tersebut telah menjadi rujukan *success story* pelaksanaan perizinan online oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khusus untuk Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Firmansyah Lubis selaku Direktur e-Government Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam *Training of Trainer* (ToT) Pemanfaatan Sistem Perizinan Online.

*“Daerah-daerah tersebut telah menjadi rujukan success story pelaksanaan perizinan online oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khusus untuk Provinsi Jawa Barat.”*

(Firmansyah Lubis, Direktur E-Government, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016).

Perkembangan Aplikasi Sicantik ini telah melakukan penyempurnaan dari versi sebelumnya dan yang terakhir adalah Aplikasi Sicantik v.5 dengan beberapa keunggulan, yaitu satu sistem dapat digunakan oleh banyak instansi, dapat mengakomodasi

berbagai jenis perizinan dengan aturan yang berbeda, alur proses yang fleksibel dan performa yang tetap terjaga, serta dapat berbagi pakai data dengan sistem yang lain, dan dipersiapkan untuk penggunaan tanda tangan digital.

### 2. Perizinan dengan Sistem OSS

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 18 Tahun 2018, salah satu tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Perfilman adalah melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pemberian izin kegiatan dan usaha perfilman, yang terdiri atas Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF), Izin Usaha Perfilman (IUP), Tanda Daftar Usaha Perfilman (TDUP), Surat Izin Pembuatan Perfilman bagi Orang Asing (SIP), dan Surat Rekomendasi Impor Film (SRIF) sejak Tahun 2017 hingga Juni 2018. Akan tetapi, untuk merealisasikan Nawacita Presiden RI dalam pemberian layanan kepada masyarat, yaitu agar terciptanya layanan yang mudah, cepat, dan transparan, Pusbangfilm melakukan perubahan dalam skema perizinan. Perizinan yang semula dilakukan melalui aplikasi yang berada di Pusbangfilm, tetapi sejak Juli 2018 ini para pelaku usaha perfilman harus beralih menggunakan aplikasi perizinan perfilman yang terintegrasi melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerinah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Selain itu, aktivitas perizinan

pun dilanjutkan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap izin yang telah diterbitkan oleh *Online Single Submission*. OSS saat ini berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terintegrasi dengan Pusat Pengembangan Perfilman di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan proses administrasi dan pembuatan nomor induk perusahaan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan verifikasi dan perizinan. Berikut ini adalah data perizinan Pusat Pengembangan Perfilman yang terverifikasi melalui OSS. (Sumber: aplikasi OSS interface Pusbangfilm) ■



# JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

***Usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini, akan tetapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan dari masa lampau. (Menteri Kehakiman, 1975)***

Perkembangan hukum dari masa lampau hingga saat ini merupakan suatu proses dan kesatuan yang dapat memberikan pandangan luas bagi kalangan hukum. Hal ini karena hukum pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri dan senantiasa dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan. Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari hukum masa lampau dan dasar bagi hukum masa yang akan datang. Namun, keadaan yang ada seakan berbeda. Inkonsistensi dan disharmoni peraturan menjadi gambaran klasik hukum di Indonesia. Tumpang tindihnya peraturan terjadi karena para pembuatnya tidak merujuk dan membaca peraturan lain yang sudah mengatur terlebih dahulu. Salah satu penyebab utama adalah sulitnya mengakses peraturan lama dan belum adanya pangkalan data peraturan yang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum belum memadai sehingga membutuhkan suatu terobosan yang mampu memuat pangkalan data yang lengkap, akurat, dan mudah diakses. Hadirnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) diharapkan dapat

menjawab semua permasalahan yang ada, khususnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga semua produk hukum yang ada dapat diinformasikan secara luas serta mudah diakses oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Konsep JDIH pertama kali dikemukakan dalam Seminar Hukum Nasional III di Surabaya pada Tahun 1974. Seminar tersebut merekomendasikan bahwa perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk mulai menyusun suatu Sistem JDIH agar dapat segera berfungsi. Rekomendasi tersebut dikeluarkan karena keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum di Indonesia pada saat itu kurang mendapat perhatian.

Berdasarkan hasil Seminar Hukum Nasional III tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memprakarsai beberapa lokakarya, yang di antaranya dilaksanakan di Jakarta (1975), Malang (1977), dan Pontianak (1977). Agenda pokok pembahasan dalam lokakarya tersebut adalah mewujudkan sistem JDIH serta menentukan program-program pendukung pelaksanaan

pemikiran yang dicetuskan dalam Seminar Hukum Nasional III.

Pada Tahun 1978, dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta, menyepakati bahwa BPHN adalah Pusat JDIH berskala nasional, sedangkan anggotanya adalah biro-biro hukum di departemen, lembaga pemerintah nondepartemen (LPND), lembaga tertinggi/tinggi negara, pemerintah daerah tingkat I (berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999). Namun, sistem JDIH belum dapat berjalan dengan efektif karena dalam pelaksanaannya hanya berdasarkan pada kesepakatan bersama dan belum memiliki landasan hukum yang mengikat. Sejak saat itu, dimulailah perjuangan dari beberapa instansi yang merasa telah siap dengan melakukan aktivitas yang mendukung, seperti membentuk koordinasi struktur organisasi, menyusun perencanaan program kegiatan, mewujudkan sarana fisik, mengumpulkan koleksi peraturan, melatih dan mendidik sumber daya manusia berkaitan dengan sistem JDIH, serta menyusun anggaran untuk semua kegiatan tersebut.

Setelah berbagai kegiatan

yang mendukung munculnya Sistem JDIH berjalan lebih dari dua puluh Tahun, pemerintah akhirnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional. Keputusan Presiden tersebut kemudian menjadi landasan hukum untuk memacu dan mengembangkan Sistem JDIH ke arah yang lebih baik dan lebih maju untuk kepentingan bangsa dan negara.

Program pengembangan sistem JDIH terus berkembang. Pada Tahun 2012, presiden telah menetapkan kembali tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. Di dalam Peraturan Presiden tersebut, yang dimaksud dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dokumentasi terhadap sebuah produk hukum

menjadi kewenangan setiap instansi, baik pemerintah maupun swasta. Namun, diperlukan keintegrasian antarinstansi agar informasi hukum yang diberikan adalah informasi yang benar.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 juga mengatur tentang Organisasi JDIHN yang terdiri atas Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN. Salah satu anggota JDIHN adalah biro hukum dan/atau unit kerja pada instansi pemerintah/pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum.

Kemendikbud sebagai sebuah instansi pemerintah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan di Indonesia mempunyai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan berupa peraturan menteri, keputusan menteri, surat edaran menteri, nota kesepahaman, dan lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat diakses oleh seluruh elemen ekosistem pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pelayanan informasi hukum di bidang pendidikan dan kebudayaan serta menjalankan peran sebagai salah satu anggota JDIHN, Kemendikbud melalui pemanfaatan teknologi informasi menciptakan laman yang berisikan produk hukum dengan alamat <http://jdih.kemdikbud.go.id>. JDIH

Kemendikbud dibuat pada Tahun ??? oleh Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kemendikbud yang menyelenggarakan kegiatan terkait dokumentasi hukum dan telah beberapa kali mengalami penyempurnaan, terakhir pada Tahun 2018. Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut atas evaluasi sistem JDIH Kemendikbud.

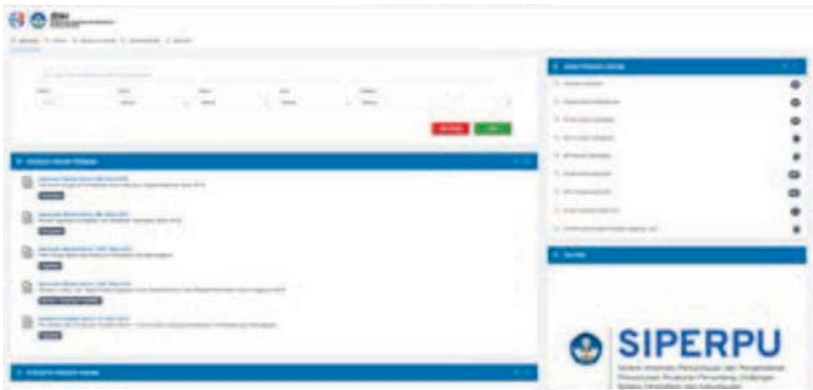
Selain memberikan kecepatan dan kemudahan mengakses untuk mendapatkan layanan informasi hukum, JDIH Kemendikbud juga mendukung penyebaran informasi hukum, terutama peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum bidang pendidikan dan kebudayaan secara mudah, tertib, terpadu, serta berkesinambungan.

Aplikasi di JDIH pertama kali dikembangkan pada Tahun []. Aplikasi ini berisikan informasi mengenai berbagai bentuk peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan

Aplikasi ini dapat diakses melalui komputer personal/laptop/telepon seluler pintar dengan cara memasukkan alamat laman <http://jdih.kemdikbud.go.id>. Setelah memasukkan alamat laman tersebut pada peramban, akan tampil halaman beranda aplikasi seperti gambar berikut ini.



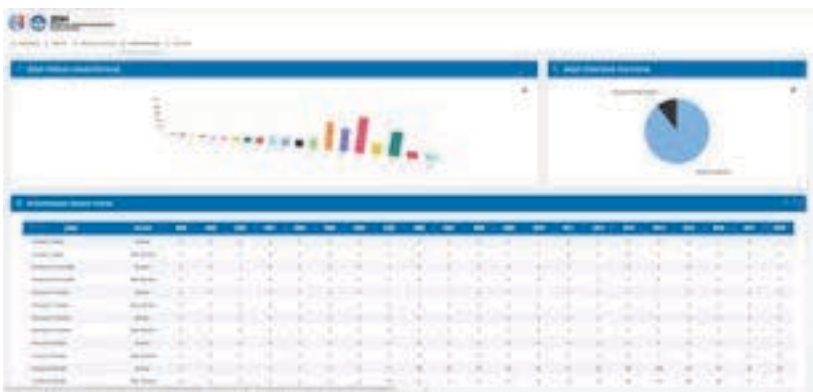
Pada halaman beranda terdapat informasi umum terkait peraturan perundang-undangan, seperti jumlah peraturan menteri, jumlah keputusan menteri, serta pencarian produk hukum bidang pendidikan dan kebudayaan.



Di sisi lain, terdapat kolom produk hukum yang memuat peraturan terbaru dan rekapitulasi peraturan berdasarkan kategori administrasi, bahasa, buku, pendidik dan tenaga pendidik, organisasi, pengawasan, pengelolaan satuan pendidikan, penyelenggaraan satuan pendidikan, urusan pemerintah dan pemerintah daerah bidang pendidikan, bantuan atau pendanaan pendidikan, kebudayaan, serta perizinan.



Selain itu, terdapat kolom inventarisasi peraturan yang Selain itu, terdapat pula kolom inventarisasi peraturan yang memuat rekapitulasi peraturan Tahun berjalan perbulan dan inventarisasi peraturan berdasarkan Tahun serta jenis peraturan perundang-undangan dari Tahun 1999 hingga saat ini. ■



# SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SIPERPU)

*Untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, bukan hanya butuh perubahan karakter, mentalitas atau perubahan pola pikir di kalangan birokrasi pemerintahan dan badan badan publik  
(Presiden Joko Widodo, 2016)*

Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki tugas menyusun peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Peraturan perundang-undangan tersebut diusulkan dalam bentuk rancangan oleh pimpinan unit utama untuk ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah diusulkan, rancangan tersebut akan diproses di Biro Hukum dan Organisasi. Namun pada saat proses penyusunan peraturan perundang-undangan, sering kali pimpinan unit utama pengusul dan pimpinan unit kerja kesulitan untuk memantau kemajuan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah diusulkan. Ketaktersediaan informasi tersebut terkadang menimbulkan pertanyaan bagi unit kerja pengusul dan para pemangku kepentingan lainnya. Pada akhirnya, pertanyaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik internal Kemendikbud.

Dalam rangka menjawab permasalahan dan mewujudkan cita-cita pemerintahan yang terbuka, Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud terinspirasi untuk melakukan pembaruan dan inovasi dalam memberikan layanan terbaik terkait informasi penyusunan peraturan perundang-undangan kepada para pemangku kepentingan di lingkungan Kemendikbud.

Sejak Tahun 2011 hingga saat ini, satu per satu sistem berbasis elektronik dibuat dan disempurnakan oleh Kemendikbud. Hal ini merupakan langkah nyata pengembangan tata kelola Kemendikbud dalam menjawab tantangan zaman. Upaya ini merupakan salah satu wujud Reformasi Birokrasi Internal (RBI) yang merupakan langkah awal dari cita-cita besar Presiden Joko Widodo untuk kebangkitan bangsa pada era digital.

Presiden Joko Widodo pernah menegaskan, untuk mewujudkan pemerintahan terbuka dibutuhkan perubahan pola pikir di kalangan birokrasi pemerintahan.

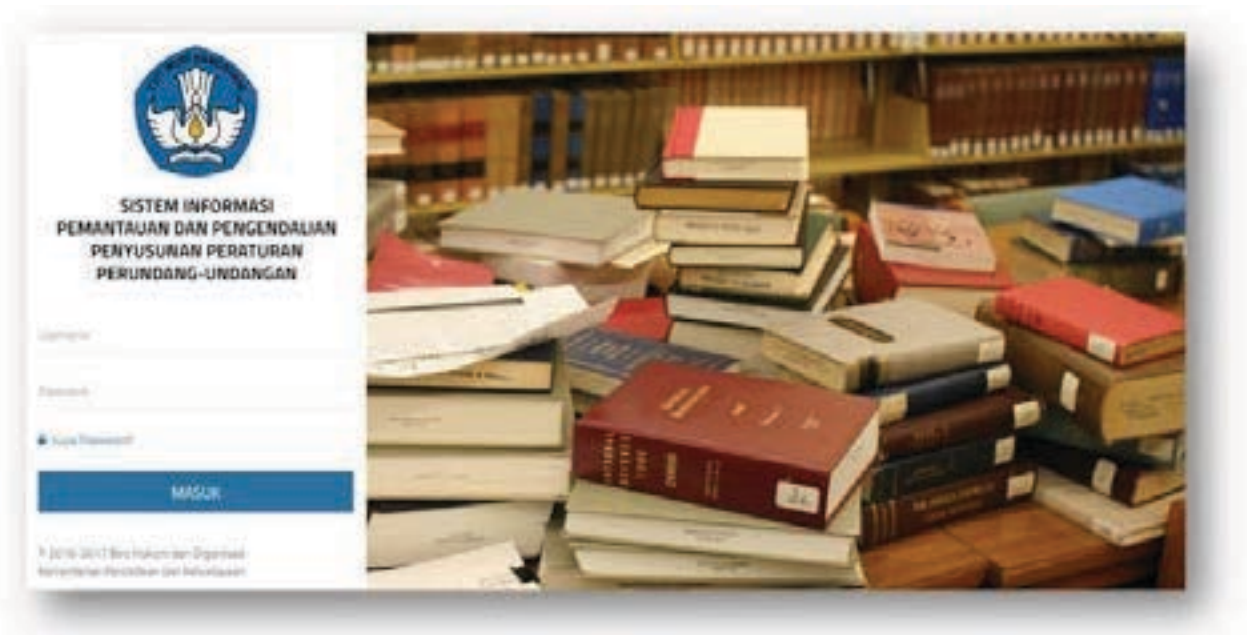
Kemendikbud berkomitmen penuh untuk mengembangkan sistem tata kelola elektronik serta berusaha maksimal memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Buah nyata dari sistem elektronik adalah penghematan anggaran, efisiensi waktu, dan transparansi data. Salah bentuk nyata tersebut adalah Sistem Informasi Pemantauan dan Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undang (SIPERPU) yang dibuat pada Tahun 2017. Melalui sistem ini, pejabat terkait serta unit kerja pengusul dapat memantau dan melihat penyusunan peraturan perundang-undangan. Biro Hukum dan Organisasi sebagai penanggung jawab akan terus mengembangkan sistem informasi ini agar tata kelola di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dapat terlaksana lebih efektif dan efisien. Hal ini juga merupakan salah satu langkah Kemendikbud dalam mereformasi birokrasi agar dapat lebih transparan.

Sejak diluncurkan pada Tahun 2017, SIPERPU telah dimutakhirkan secara terus-menerus oleh Biro Hukum dan Organisasi agar ramah pengguna serta mampu mengakomodasi kebutuhan informasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam pelaksanaannya, aplikasi ini membantu memberikan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kemendikbud, mulai dari pejabat eselon, staf khusus menteri, staf ahli menteri, hingga menteri.

Aplikasi ini dapat diakses melalui komputer personal/laptop/telepon seluler pintar dengan cara memasukkan alamat laman <http://siperpu.kemdikbud.go.id>.

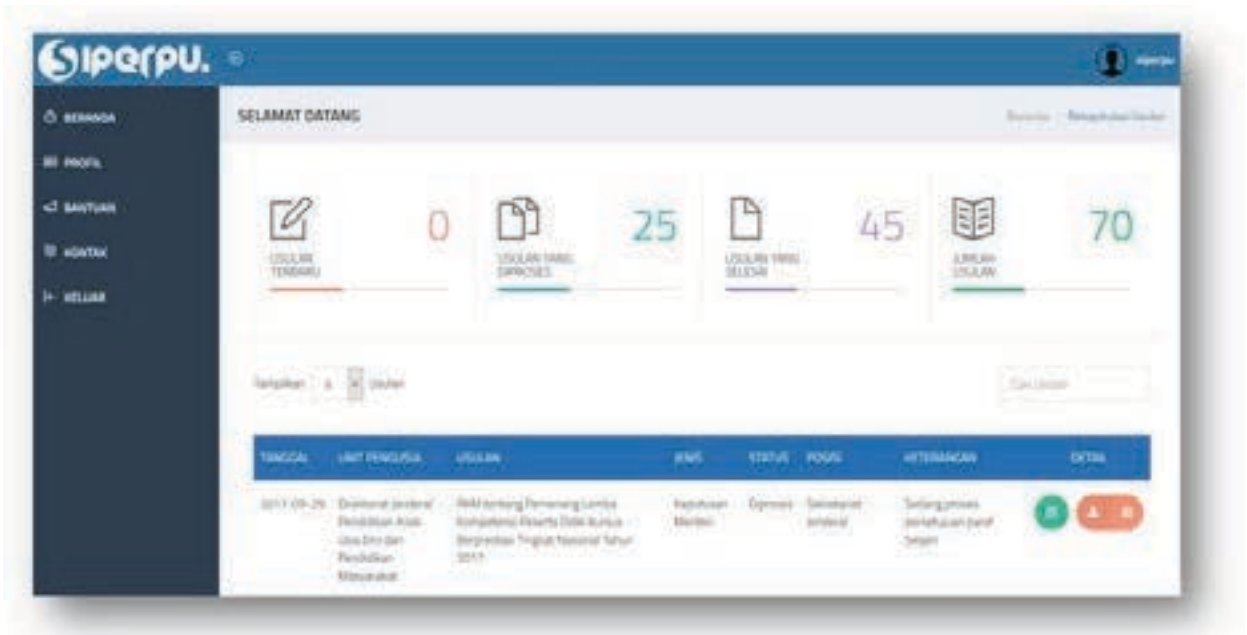


Setelah memasukkan alamat laman tersebut pada peramban, akan tampil halaman awal aplikasi seperti gambar berikut ini.



Pada halaman awal aplikasi terdapat kolom login untuk dapat masuk ke dalam aplikasi. Karena aplikasi ini dibuat hanya untuk kalangan internal Kemendikbud, username dan password hanya diberikan oleh

administrator kepada kalangan internal Kemendikbud. Setelah pengguna berhasil login, akan muncul halaman beranda. Halaman ini berisi informasi kumulatif data yang terdapat pada aplikasi.



Pada halaman beranda ini terdapat informasi umum tentang usulan peraturan perundang-undangan, seperti peraturan menteri dan keputusan menteri yang sedang diproses oleh Biro Hukum dan Organisasi. Selain dapat melihat jumlah usulan peraturan

perundang-undangan, pengguna juga dapat melihat daftar usulan peraturan perundang-undangan di halaman beranda. Berikut adalah contoh detail usulan peraturan perundang-undangan.



Gambar tersebut adalah salah satu usulan peraturan perundang-undangan. Informasi yang terdapat dalam detail usulan adalah sebagai berikut:

1. Tanggal adalah informasi waktu termutakhir perkembangan proses usulan terkait.
2. Unit pengusul adalah informasi unit utama eselon satu di lingkungan Kemendikbud yang mengajukan usulan peraturan.
3. Usulan adalah informasi yang berisi judul usulan peraturan yang sedang diusulkan.
4. Jenis adalah informasi jenis usulan peraturan, seperti peraturan menteri, keputusan menteri, dan lain-lain.
5. Status adalah informasi status terakhir yang menjelaskan usulan peraturan, seperti diterima, diproses, dan salinan.
6. Posisi adalah informasi posisi terakhir usulan peraturan.
7. Keterangan adalah keterangan terakhir dari usulan peraturan.
8. Riwayat status usulan.

Kehadiran SIPERPU saat ini tidak hanya mempermudah pemangku kepentingan untuk memantau perkembangan proses penyusunan peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk menjadi alat yang dapat menjadi sarana bagi pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan secara lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka mempercepat pemanfaatan aplikasi ini, Kemendikbud telah melakukan sosialisasi secara khusus mengenai SIPERPU kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kemendikbud. Tidak hanya sosialisasi khusus mengenai SIPERPU, tetapi juga penyebaran informasi mengenai pemanfaatan SIPERPU oleh pimpinan di Biro Hukum dan Organisasi dalam setiap forum pertemuan internal Kemendikbud.

Biro Hukum dan Organisasi tidak hanya melakukan sosialisasi pemanfaatan SIPERPU, tetapi juga mengevaluasi SIPERPU yang telah dikembangkan dan menindaklanjuti hasil evaluasi sehingga SIPERPU menjadi lebih mutakhir dan informatif. ■



# APLIKASI NASKAH DINAS ELEKTRONIK: INOVASI UNTUK BIROKRASI YANG LEBIH BAIK

*Kit a harus berani membuat terobosan. Jangan rutinitas, Jangan monoton. Harus selalu ada pembaharuan dan inovasi. (Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)*

### Sejarah dan Latar Belakang

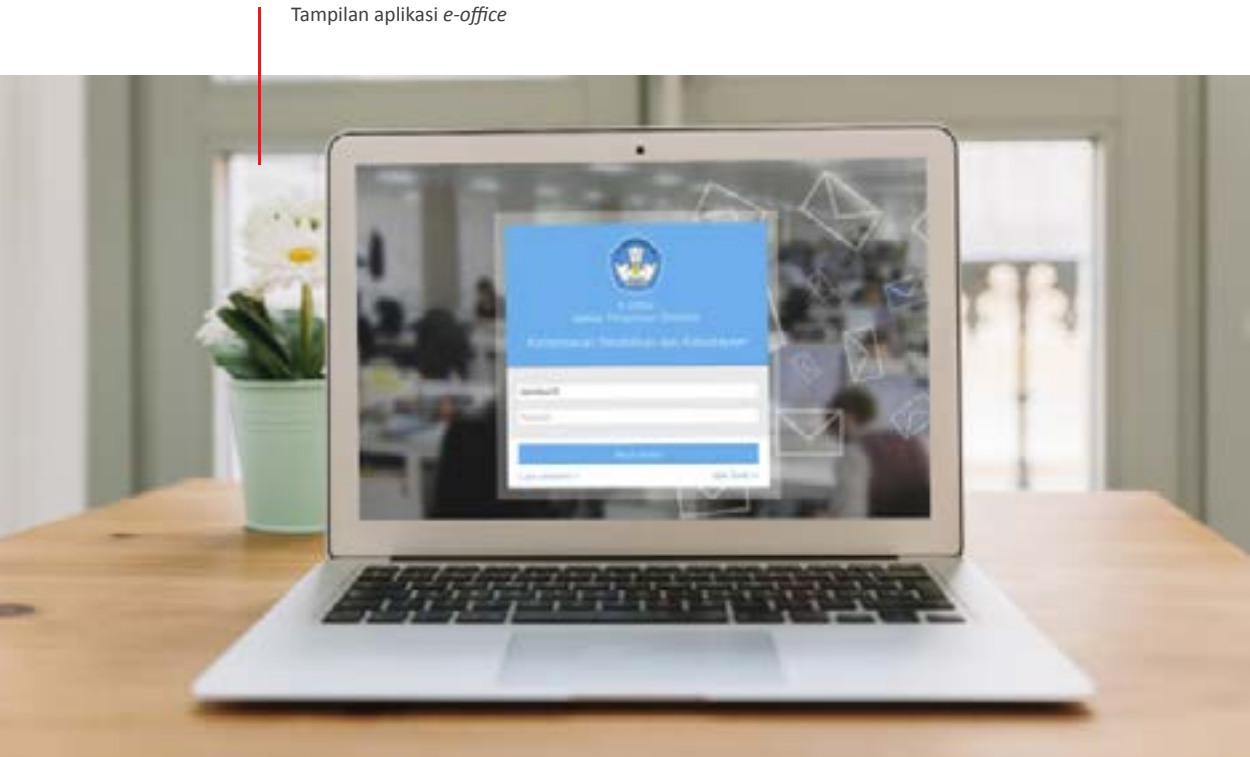
Pembaruan dan inovasi adalah dua hal yang menggambarkan semangat dalam mengembangkan sistem pengelolaan naskah dinas elektronik atau yang lebih dikenal dengan aplikasi e-office oleh para pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Selain itu, sejalan dengan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi, aplikasi ini juga mendukung perbaikan dalam

aspek penataan tata laksana demi menghadirkan sistem administrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam menunjang keberlangsungan organisasi serta mempercepat proses penyusunan kebijakan.

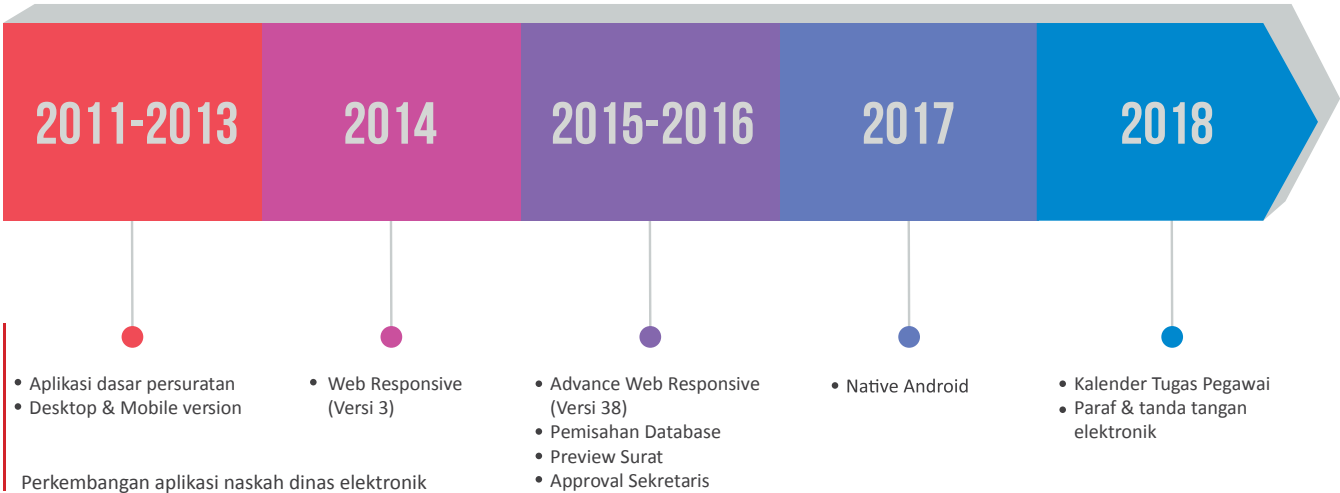
Secara historis, kebijakan ini merupakan implementasi dari amanat Kementerian PAN dan RB melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan ini menjadi tonggak baru dimulainya

pengelolaan naskah dinas secara elektronik di instansi pemerintahan Indonesia.

Sejak diluncurkan pada Tahun 2011, aplikasi e-office telah dimutakhirkan secara terus-menerus oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) dan Biro Umum Kemendikbud agar ramah pengguna serta mampu mengakomodasi kebutuhan administratif seluruh satuan kerja di kementerian dalam implementasinya. Dalam pelaksanaannya, aplikasi



Tampilan aplikasi e-office



ini membantu pengelolaan administrasi bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kemendikbud, mulai dari pejabat eselon, staf ahli menteri, staf khusus menteri, hingga menteri.

Pada Tahun 2017, seiring dengan semakin masifnya pemanfaatan aplikasi di telepon seluler pintar oleh para pengguna, Pustekkom Kemendikbud juga mengembangkan aplikasi pengelolaan naskah dinas elektronik dalam platform Android dan iOS. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan aplikasi mampu menjangkau lebih banyak lagi pemangku kepentingan dan memudahkan pengelolaan naskah dinas serta tindak lanjut draf kebijakan oleh para pimpinan karena prosesnya dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun. Pertimbangan lain yang juga mendasari pengembangan aplikasi ini adalah banyaknya satuan kerja Kemendikbud yang tersebar di seluruh Indonesia. Komunikasi yang lebih efektif dan efisien dapat terjembatani dengan jaringan telepon seluler.

Hingga kini, upaya pengembangan aplikasi oleh Pustekkom dan substansi oleh Biro Umum

terus dilakukan. Dalam waktu dekat, Kemendikbud akan mulai menerapkan autentifikasi naskah dinas dengan menggunakan tanda tangan elektronik agar proses pembuatan kebijakan dan proses administrasi dapat terselenggara dengan lebih efisien. Selain itu, Kemendikbud juga akan mengembangkan aplikasi layanan dasar perkantoran lainnya yang terintegrasi dalam satu portal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para pengguna dalam menggunakan beragam aplikasi guna memberikan layanan prima bagi para pemangku kepentingan di sektor pendidikan dan kebudayaan.

### Strategi Percepatan Perluasan Pemanfaatan Aplikasi

Sebagai bagian dari komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal Kemendikbud, Sekretariat Jenderal memfokuskan diri dalam upaya mempercepat perluasan pemanfaatan aplikasi pengelolaan naskah dinas elektronik di seluruh satuan kerja baik pusat maupun daerah. Namun, mengingat jumlah satuan kerja yang banyak

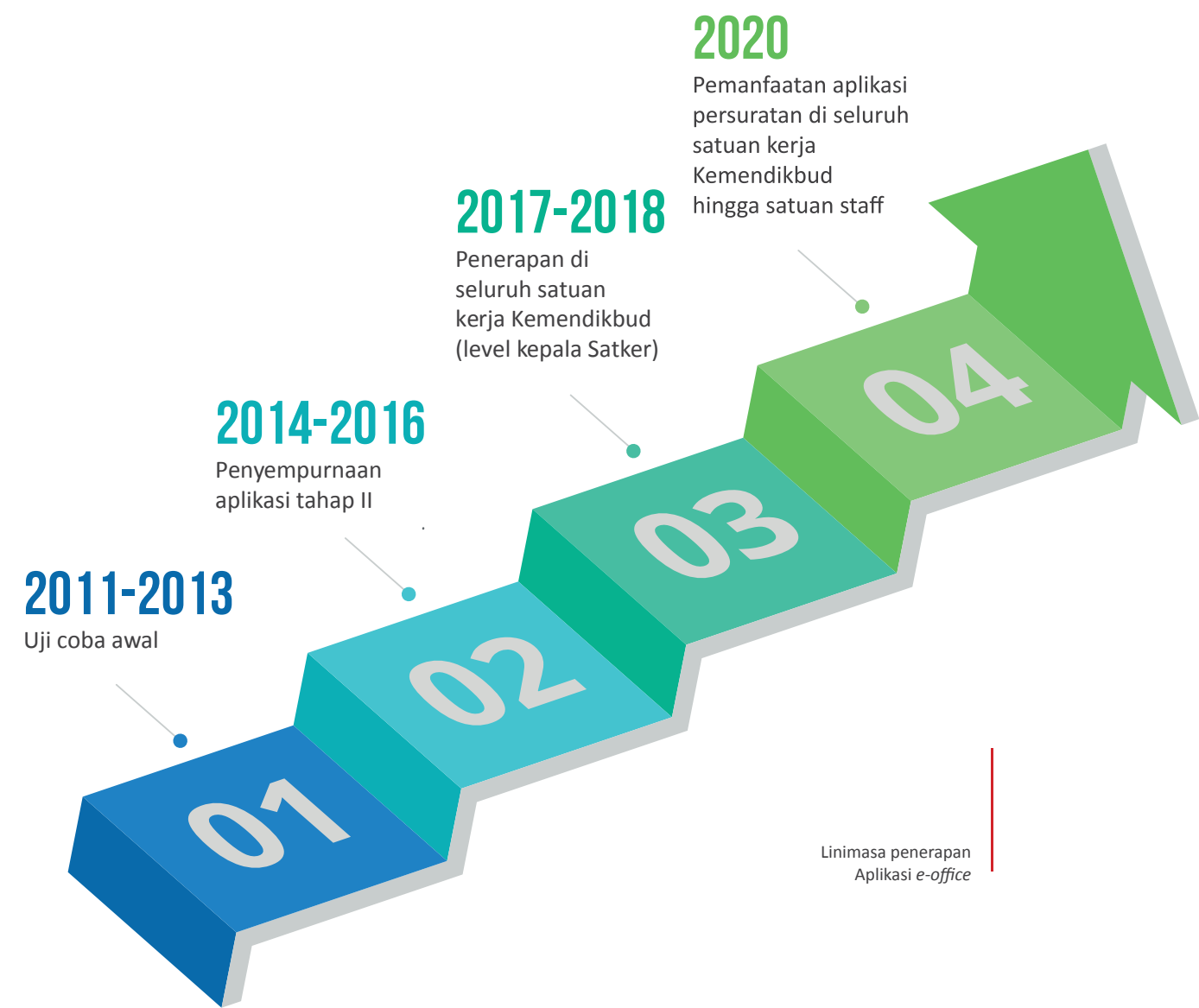
serta luasnya wilayah Indonesia, ada beberapa strategi yang saat ini dilakukan oleh Sekretariat Jenderal melalui Pustekkom dan Biro Umum untuk mencapai target ini.

Untuk mencapai target dalam lini masa tersebut, sejak Tahun 2017 hingga saat ini, Kemendikbud secara intensif melakukan tiga strategi dalam percepatan perluasan pemanfaatan aplikasi pengelolaan naskah dinas elektronik, yaitu:

#### A. Bimbingan Teknis

Metode pertama yang dilakukan adalah melaksanakan bimbingan teknis regional dengan melibatkan para pejabat struktural yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan persuratan serta administrator unit yang akan bertanggung jawab mengelola aplikasi di satuan kerjanya sendiri. Strategi ini dipilih untuk mengoptimalkan kegiatan bimbingan teknis sehingga menjangkau banyak satuan kerja dari berbagai provinsi dalam satu kegiatan.





Kegiatan Bimbingan Teknis, Batam (2017)

Sejak Tahun 2017 hingga pertengahan 2018, Biro Umum, Sekretariat Jenderal telah melakukan bimbingan teknis di empat provinsi, yakni di Batam (Kepulauan Riau), Denpasar (Bali), DI Yogyakarta, dan Makassar (Sulawesi Selatan).

**B. Asistensi Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik**

Kegiatan asistensi pengelolaan naskah dinas elektronik dilaksanakan dengan mekanisme asistensi. Mekanisme ini dilakukan dengan mengirimkan tim teknis yang secara langsung mendatangi satuan-satuan kerja di daerah, baik yang sudah masuk dalam perencanaan Tahunan maupun yang secara insidental meminta bantuan ke Sekretariat Jenderal. Dalam asistensi, selain

memberikan pendampingan untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala teknis yang dihadapi, tim juga memberikan pelatihan bagi seluruh pegawai, mulai dari level staf hingga pimpinan di satuan kerja yang dikunjungi. Pada Tahun 2017, Biro Umum telah melakukan asistensi ke 42 satuan kerja di 21 Provinsi. Sementara itu, hingga Agustus 2018, kegiatan asistensi telah dilakukan pada 17 satuan kerja di 18 Provinsi.

Selain pendampingan langsung, kegiatan pendampingan juga dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pimpinan dan staf dari semua satuan kerja yang ada di suatu provinsi. Hingga pertengahan 2017, Sekretariat Jenderal telah melakukan mekanisme ini di dua provinsi, yakni di Ternate (Maluku Utara) dan Papua.

Berkaca pada pengalaman kegiatan asistensi yang dilakukan pada Tahun-Tahun sebelumnya yang dinilai belum optimal, Biro Umum melakukan perubahan skema pelaksanaan kegiatan asistensi dari yang semula pelatihan secara parsial yakni pimpinan dan bawahan menerima pelatihan terpisah, menjadi pelatihan menyeluruh yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari level staf hingga pimpinan dalam waktu dan tempat yang sama. Metode ini dirasakan lebih efektif dalam membangun kesepahaman sekaligus meningkatkan motivasi dan komitmen satuan-satuan kerja untuk mengimplementasikan aplikasi pengelolaan naskah dinas elektronik ini.



C. Penilaian Pemanfaatan Aplikasi secara Berkala

Metode lain yang juga efektif dalam mempercepat perluasan pemanfaatan aplikasi pengelolaan persuratan elektronik adalah dengan penilaian pemanfaatan aplikasi di seluruh satuan kerja secara rutin setiap bulan. Sejak Desember 2017, Sekretariat Jenderal mengevaluasi aktivitas seluruh kepala satuan kerja dalam pemanfaatan aplikasi dan memberi predikat A hingga F sesuai parameter yang telah ditetapkan. Hasil penilaian ini kemudian secara berkala disosialisasikan dalam forum-forum strategis, seperti rapat pimpinan ataupun kegiatan lain

yang melibatkan satuan kerja. Strategi ini cukup efektif dalam memotivasi satuan-satuan kerja untuk mengoptimalkan pengelolaan naskah dinas melalui aplikasi e-office. Dalam penilaian pertama pada Bulan Desember 2017, hanya 73 satuan kerja (36,14%) yang masuk dalam kategori A dan B, sedangkan 129 satuan kerja (63,86%) masih mendapat nilai C hingga F. Pada bulan Juli 2018 tercatat 177 satuan kerja (87,62%) mendapat predikat A dan B serta 25 satuan kerja (12,38%) mendapat predikat C—F. Berdasarkan penilaian Juli 2018 pula diketahui hanya 2 satuan kerja lagi yang belum menggunakan aplikasi

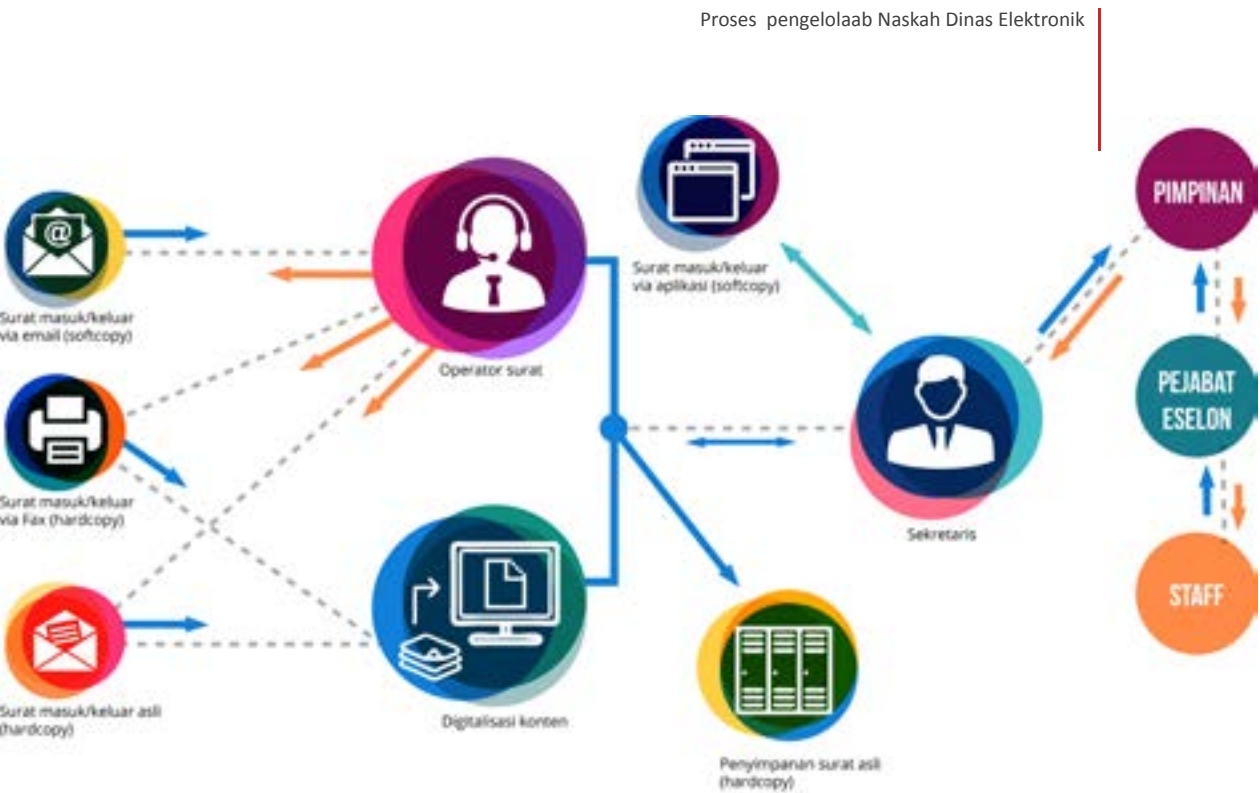
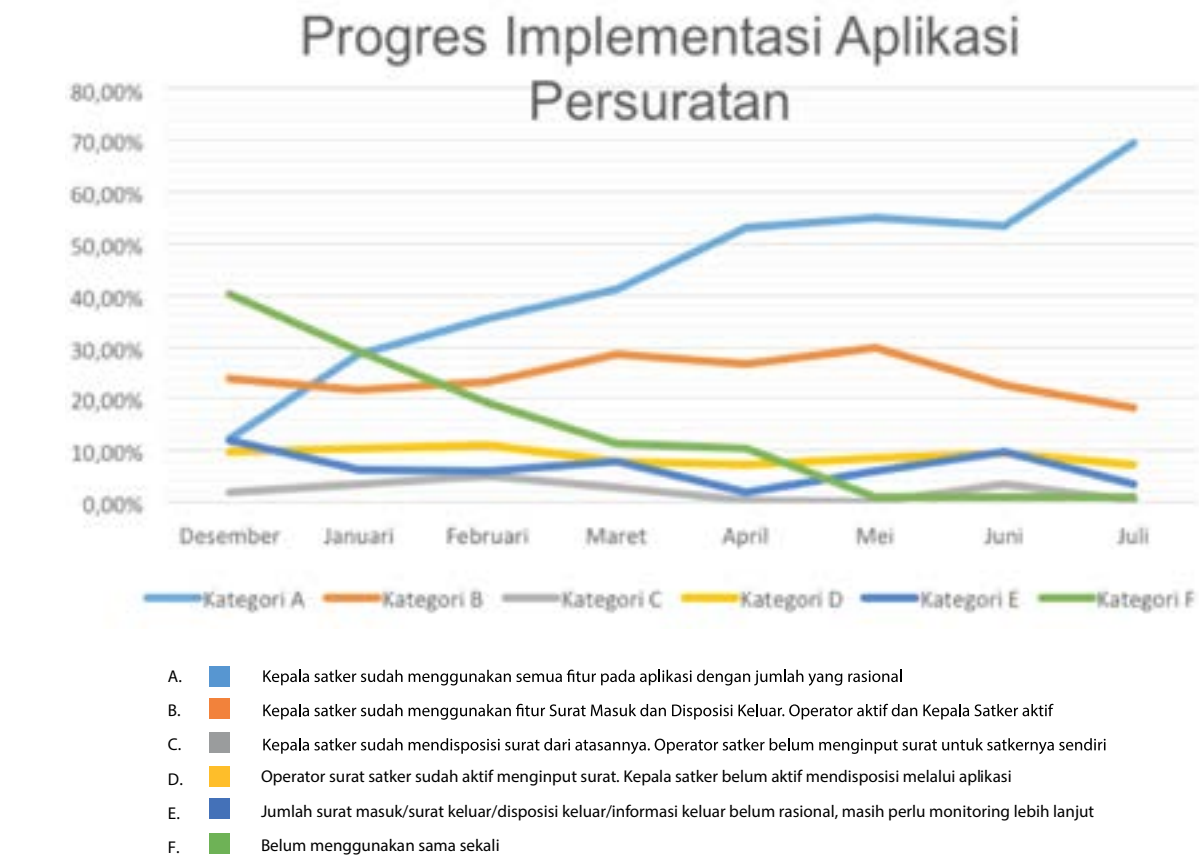
(predikat F). Hal lain yang menunjang capaian luar biasa dalam waktu satu semester ini adalah dukungan penuh Sekretaris Jenderal yang secara rutin mengirimkan surat teguran bagi kepala satuan kerja yang memperoleh predikat C—F. Teguran ini merupakan indikasi perhatian besar dan komitmen serius Sekretariat Jenderal dalam mengajak semua satuan kerja untuk mengelola naskah dinasnya melalui aplikasi. Selain itu, hasil penilaian ini juga menjadi dasar pemilihan satuan kerja yang mendapatkan pendampingan dari tim Biro Umum dan Pustekkom.

Upaya strategis pengembangan pengelolaan naskah dinas elektronik

Sebagai bagian dari upaya pengembangan pengelolaan naskah dinas elektronik secara berkesinambungan, terdapat empat aspek yang akan menjadi fokus utama yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kemendikbud. Pertama, penyusunan peraturan perundangan sebagai payung hukum pemanfaatan aplikasi pengelolaan naskah dinas elektronik di lingkungan Kemendikbud. Saat ini, rancangan peraturan tersebut dalam pemrosesan dan diharapkan akan segera diterbitkan dalam waktu dekat. Kedua, penyusunan prosedur operasional standar

generik pengelolaan naskah dinas di lingkungan Kemendikbud. Hal ini penting karena banyaknya satuan kerja yang ada di lingkungan Kemendikbud dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dengan standarisasi proses bisnis ini, diharapkan kualitas pengelolaan naskah dinas, baik di satuan kerja pusat maupun daerah setara. Ketiga, perbaikan kualitas infrastruktur. Sejauh ini hampir seluruh satuan kerja telah memiliki infrastruktur dasar yang mendukung pengelolaan naskah dinas elektronik. Namun, permasalahan yang paling sering dihadapi adalah kualitas konektivitas internet yang lamban sehingga menghambat pekerjaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kemendikbud akan mengoptimalkan penggunaan

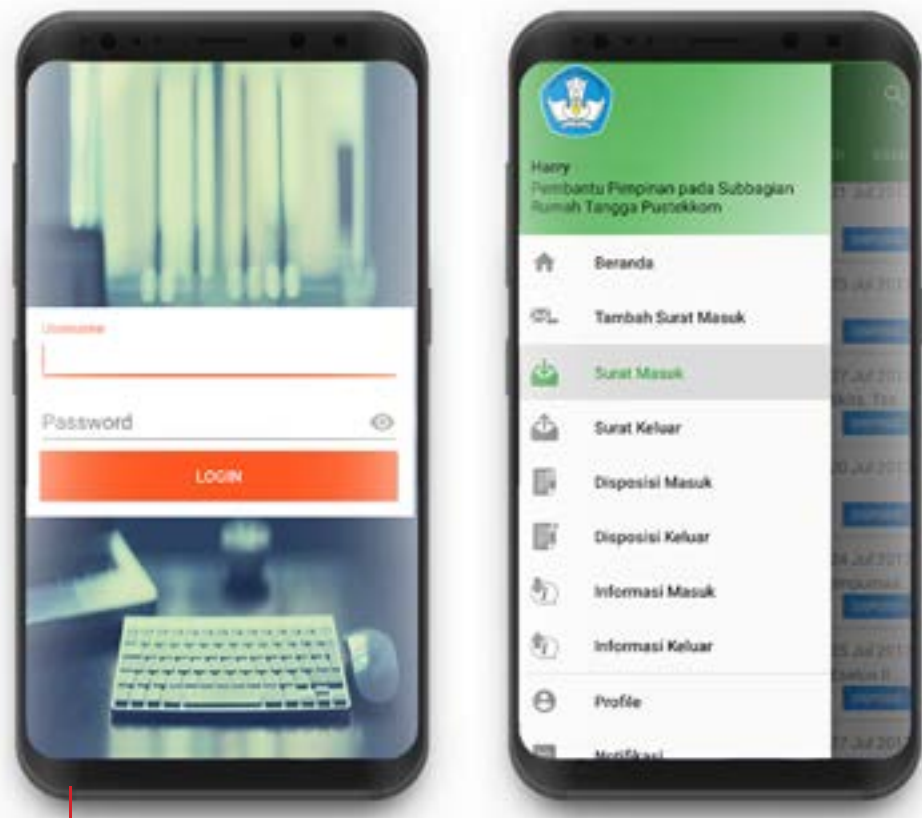
koneksi Jardiknas yang sudah tersedia di setiap satuan kerja. Selain itu, secara terus-menerus juga memberikan pemahaman kepada kepala satuan kerja bahwa pengelolaan persuratan saat ini juga menuntut adanya koneksi internet yang cukup baik demi memperoleh dukungan dan komitmen para pimpinan untuk memfasilitasi hal tersebut. Di sisi aplikasi, Kemendikbud akan terus memutakhirkan aplikasi dalam versi luar jaringan (luring) dalam platform Android & iOS sehingga dapat tetap nyaman diakses walaupun menggunakan koneksi internet yang tidak terlalu baik. Pustekkom dan Biro Umum juga akan menyiapkan petugas teknis penanganan gangguan dan bantuan bimbingan melalui telepon





# KERJA KITA PRESTASI BANGSA: MENUJU SMART ASN

*Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja SMART ASN harus didasarkan pada budaya pelayanan yang baik, mulai dari penguasaan sosiokultural, bahasa, dan yang terutama adalah penguasaan TI untuk menghadapi kondisi persaingan global. Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB (www.lan.go.id, 19 Juli 2016)*



Tampilan aplikasi naskah dinas elektronik pada platform Android  
Sumber: Pustekkom Kemendikbud (2018)

atau *Whatsapp*, untuk membantu pengguna jika mengalami kendala dalam mengoperasikan aplikasi. Keempat, terkait peningkatan kapasitas SDM, Sekretariat Jenderal akan melanjutkan kegiatan asistensi dan bimbingan teknis sebagaimana yang selama ini

dilakukan. Hal ini dilaksanakan bukan hanya untuk memberikan pendampingan teknis dalam pengelolaan naskah dinas elektronik, tetapi juga mengidentifikasi permasalahan dan menjangkau masukan untuk pengembangan aplikasi. Selain itu, Sekretariat

Jenderal juga akan secara rutin membuat forum administrator unit seluruh satuan kerja sebagai upaya peningkatan kapasitas para penanggung jawab teknis aplikasi serta penyampaian informasi terkait pemutakhiran sistem dan rencana pengembangannya. ■

Penganugerahan BKN Award diberikan dalam Rakornas Kepegawaian 2018 yang dihelat Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Gedung Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang pada 11 Juli 2018.

Ketetapan instansi pemerintah pemenang BKN Award 2018 tertuang dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 68/KEP/2018 tentang Nama-Nama Instansi Pemerintah Pemenang BKN Award Tahun 2018 bertanggal 22 Juni 2018. Kemendikbud ditetapkan sebagai pemenang Pengelolaan Kepegawaian Terbaik Kategori Kecil berdasarkan hasil penilaian terhadap tujuh kriteria yang sudah ditentukan. Ketujuh kriteria tersebut adalah:

1. Perencanaan formasi telah didasarkan anjab dan ABK, serta telah merencanakan kebutuhan pegawai lima Tahun

ke depan berbasis teknologi informasi (TI);

2. Pelayanan pengadaan, kepegawaian, dan pensiun didukung oleh komitmen Kemendikbud dalam penyampaian usul tepat waktu dan penyelesaian layanan;
3. Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) telah terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian Kemendikbud;
4. Pemanfaatan Computer Assisted Test (CAT) BKN dalam seleksi pengadaan pegawai baru;
5. Penilaian kompetensi aparatur sipil negara (ASN) telah dilaksanakan secara bertahap dari Tahun 2016 hingga 2018;
6. Implementasi penilaian kinerja telah dilaksanakan oleh seluruh pegawai Kemendikbud melalui aplikasi e-SKP (web)

dan Sistem Informasi SKP Berbasis Android (Sibandro); dan 7. Komitmen pengawasan dan pengendalian ditunjukkan Kemendikbud dalam kepatuhan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN, serta komitmen melaksanakan penjatuh hukuman disiplin dan/atau pemberhentian terhadap PNS yang melakukan kejahatan jabatan.

Penghargaan ini menunjukkan komitmen Kemendikbud dalam pengelolaan aparatur sipil negara yang profesional dan berkinerja tinggi, serta diharapkan mampu memberikan motivasi kepada jajaran pengelola kepegawaian untuk lebih meningkatkan layanan melalui kinerja, kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan TI. ■



# PENILAIAN KINERJA SECARA DARING DAN MOBILE ANDROID

***Terdapat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai dasar untuk mengevaluasi kelayakan sebagai pejabat, apakah nantinya akan diangkat kembali atau diganti dengan pejabat lain dan itu (SKP) nggak sulit. Didik Suhardi, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, 23 Februari 2017***

Penilaian kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi suatu organisasi. Melalui penilaian kinerja dapat diperoleh informasi tentang kemajuan pekerjaan dan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Sejak Tahun 2016, Kemendikbud telah menerapkan sistem penilaian kinerja secara daring (online) dengan menggunakan aplikasi e-SKP. Hingga saat ini, 14.832 pegawai telah menggunakan aplikasi SKP. Dengan adanya aplikasi e-SKP ini, dapat dimonitor proses penilaian kinerja yang dilakukan oleh unit kerja Kemendikbud dan nilai kinerja pegawai dapat diketahui secara cepat.

Untuk memenuhi kebutuhan pegawai dengan mobilitas penugasan yang cukup tinggi, telah dikembangkan aplikasi berbasis mobile/Android dengan nama Sistem SKP Berbasis Android atau yang disingkat Sibandro. Aplikasi

ini terintegrasi dengan aplikasi E-SKP sebelumnya yang berbasis web. Aplikasi ini untuk mempermudah pegawai melakukan pengisian log harian, pengajuan realisasi, penilaian kinerja kapan saja dan di mana saja yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat selama ada sinyal telepon genggam/HP di tempat tersebut. Sejak pertama digunakan pada bulan Juli 2018 hingga saat ini, aplikasi Sibandro telah digunakan oleh 1.941 pegawai.

## Pemonitoran Presensi/Kehadiran Melalui Dashboard

Penggunaan mesin presensi/kehadiran dengan sidik jari (fingerprint) telah terintegrasi untuk seluruh satuan kerja dan UPT di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang jumlah pegawainya tercatat pada aplikasi sebanyak 15.870 orang. Data kehadiran pegawai dapat dimonitor secara waktu nyata (realtime) melalui sebuah dashboard

kehadiran yang menampilkan informasi tentang persentase dan peringkat tertinggi atau terendah dalam kehadiran, penugasan, alpa, dan keterlambatan. Data kehadiran pada dashboard berguna untuk memacu unit kerja meningkatkan disiplin dan pembinaan pegawai serta untuk memonitor penugasan pegawai dan pencatatannya dalam aplikasi secara tepat waktu. ■

# KILAS KINERJA 2018 BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

## Tour of Duty dan Tour of Area

*“Ciptakan kepemimpinan yang menyejukkan dan demokratis sehingga menumbuhkan kreativitas dan produktivitas kerja.” (Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan).*

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 8 unit utama dan 201 unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengelola kementerian dengan dibantu oleh 1.244 pejabat struktural, yang terdiri atas 12 pejabat pimpinan tinggi madya, 65 pejabat pimpinan tinggi pratama, 350 pejabat administrator, dan 817 pejabat pengawas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggulirkan kebijakan tour of duty dan tour of area dalam rangka pengayaan: memperkaya pengalaman dan pengetahuan pejabat, memberi rangsangan agar pejabat berupaya meningkatkan karir, serta sebagai alat untuk mendorong semangat berkompetisi dan berprestasi (membongkar *comfort zone*). Pada awal Tahun 2018, kebijakan ini telah mulai dilaksanakan dengan target pejabat administrator

dan pejabat pengawas yang telah menduduki jabatan yang sama lebih dari 5 Tahun. Sampai dengan saat ini, dalam rangka tour of duty dan tour of area, Menteri telah memutasi 947 orang pejabat dengan rincian: rotasi sejumlah 578 orang dan promosi 369 orang.

Kebijakan ini diambil sebagai salah satu pembinaan karir pejabat yang dimaksudkan untuk membantu dan memperlancar proses pencapaian tujuan organisasi.

Penerima manfaat dari kebijakan ini adalah organisasi dan pejabat yang bersangkutan. Bagi organisasi, *tour of duty* dan *tour of area* menjadi sarana untuk penguatan organisasi dan penyiapan kader untuk jabatan yang lebih tinggi. Sementara itu, bagi pejabat yang dimutasi, *tour of duty* dan *tour of area* menjadi sarana untuk menambah pemahaman dan gambaran utuh tentang kementerian sehingga ke depan para pejabat akan mampu menyelesaikan masalah kementerian secara lebih komprehensif.

## Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Pengisian jabatan secara terbuka dan kompetitif ini adalah salah satu perubahan yang dilakukan dalam proses reformasi birokrasi yang sedang menjadi fokus perhatian pemerintah. Proses pengisian

jabatan pada instansi pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan secara tertutup sekarang diatur pelaksanaannya melalui seleksi terbuka dengan sistem merit.

Mekanisme pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kemendikbud berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari KASN terkait dengan perangkat seleksi, seperti susunan panitia seleksi, kompetensi, tahapan, dan jadwal pelaksanaan seleksi. Setelah mendapatkan rekomendasi, panitia seleksi yang telah mendapatkan persetujuan KASN melakukan tugasnya untuk mengumumkan jabatan yang akan diseleksi secara terbuka lengkap dengan persyaratan dan tata cara pelamarannya.

Seluruh tahapan pelamaran dilakukan secara daring melalui laman <http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/jpt>. Media daring mempermudah pelamar memperoleh informasi terbaru terkait dengan seleksi dan mengajak masyarakat ikut berperan aktif mengawal proses seleksi terbuka.

Pada Tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, yaitu





Kepala Perpustakaan Nasional dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengisi tiga jabatan. Tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk mengisi jabatan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

dan dua kali seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengisi 12 jabatan. Pada Tahun 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk mengisi jabatan Inspektur Jenderal dan tiga kali seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

untuk mengisi 13 jabatan. Jumlah pelamar yang ikut serta dalam proses seleksi sejak 2016–2018 berjumlah 248 pelamar untuk 31 jabatan.





PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PEJABAT FUNGSIONAL

Dalam rangka menjalankan amanat dari Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 jo Nomor 21 Tahun 2017, setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diangkat sumpah dan janji jabatannya menurut agama

atau kepercayaannya kepada Tuhan YME. Berdasarkan Keputusan Nomor 060/P/2018 tentang Pejabat yang Ditunjuk untuk Melantik dan Mengambil Sumpah/Janji Pejabat Fungsional di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mendelegasikan pelaksanaan pelantikan kepada pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengangkat dan melantik serta mengambil sumpah /janji jabatan pejabat fungsional dengan rincian sebagai berikut.

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Pranata Hubungan Masyarakat	20
2	Pustakawan	1
3	Analisis Kepegawaian	1
4	Pengembang Teknologi Pembelajaran	39
5	Pranata Komputer	9
6	Widyaiswara	5
Jumlah		75

Jumlah Pejabat Fungsional yang dilantik 2018

Jabatan fungsional berbeda dengan jabatan struktural. Jabatan ini melekat pada profesi dan mandiri sehingga kenaikan jabatan juga tidak bergantung pada

masa kerja, tetapi pada kinerja yang dinilai dalam bentuk angka kredit. Pelaksanaan pelantikan bagi pejabat fungsional ini diharapkan dapat memberikan motivasi

bagi pegawai dalam bidangnya masing-masing secara profesional. ■

PKTBT BERBASIS E-LEARNING: SAHABAT CALON PNS MILENIAL YANG PROFESIONAL

Salah satu fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbud sebagaimana tercantum pada Pasal 816 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja adalah penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan pegawai.

Terdapat empat jenis program pelatihan, yaitu (1) pelatihan dasar (latsar), (2) pelatihan kepemimpinan, (3) pelatihan teknis, dan (4) pelatihan fungsional.

Terkait dengan pengembangan program pelatihan, Pusdiklat Pegawai Kemendikbud telah mengembangkan pelatihan pembentukan

karakter calon pegawai negeri sipil Kemendikbud dan penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang terintegrasi dalam latsar Tahun 2018. Sesuai dengan regulasi, calon PNS wajib mengikuti latsar. Mengacu pada Perka LAN Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Latihan Dasar Golongan III, Pusdiklat Pegawai membangun struktur program Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) dalam bentuk pelatihan berbasis dalam jaringan (e-learning) dan klasikal. Penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelatihan merupakan suatu keniscayaan. Teknologi informasi bermanfaat bagi peningkatan tata kelola dan

kualitas pelatihan, terutama bagi generasi milenial dengan tingkat literasi digital yang baik. Pada akhir Tahun 2017 Pusdiklat Pegawai mulai membangun pelatihan PKTBT melalui kerja sama dengan Pustekkom serta unit utama terkait.

Pelatihan PKTBT bagi calon PNS Golongan III merupakan upaya menyiapkan PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional dan berkarakter pada sektor pendidikan dan kebudayaan. Hal ini sejalan dengan target yang ingin dicapai pada Tahun 2024 dalam kebijakan Reformasi Birokrasi, yaitu terwujudnya Aparatur Birokrasi Kelas Dunia yang melayani masyarakat secara profesional. Struktur Kurikulum PKTBT dibangun dengan merujuk pada pembentukan karakter pegawai Kemendikbud dan kompetensi bidang tugas. Kode Etik dan Tata Nilai PNS Kemendikbud merupakan tatanan dasar yang melekat pada diri PNS Kemendikbud.

Struktur Kurikulum PKTBT Calon PNS Golongan III disajikan pada tabel berikut.



Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan PKTBT Berbasis E-Learning di Lingkungan Kemendikbud



No.	Kompetensi dan Mata Pelatihan	Jam Pelatihan (JP)	
		e-Learning*	Klasikal**
A. Kompetensi Teknis Umum/Administrasi		37	158
1	Renstra Kemendikbud dan Program Prioritas	2	4
2	OTK Kemendikbud, Peta Proses Bisnis dan Uraian Tugas Jabatan	4	13
3	Surat Menyurat Kedinasan		
	a. Tata Naskah Dinas	2	6
	b. Bahasa Indonesia untuk Surat Menyurat Kedinasan	-	6
4	e-Government (Tata Kelola TIK, Surel, e-Office)	2	6
5	Penilaian Prestasi Kerja (e-SKP) dan Tunjangan Kinerja	3	6
6	Kode Etik Pegawai dan Tata Nilai Pegawai Kemendikbud	2	6
7	Keterampilan Manajerial Abad 21		
	a. Komunikasi		
	1) Teknik Komunikasi	3	6
	2) Komunikasi dalam bahasa Inggris	10	90
	3) Presentasi dalam bahasa Inggris		
	b. Berpikir Kreatif dan Kolaborasi	3	6
	c. Manajemen Waktu, Manajemen Perubahan, Manajemen Konflik, dan Pengambilan Keputusan	6	9
B. Kompetensi Substantif		400 JP (40 hari)	
Aktualisasi di tempat kerja dan magang lintas unit kerja		dikoordinasikan oleh Biro SDM dan satuan kerja Calon PNS	
Pengembangan keprofesian berkelanjutan PKTBT Berbasis e-Learning di lingkungan Kemendikbud			

Pembelajaran PKTBT calon PNS Golongan III dilakukan melalui dua tahap kegiatan. Tahap pertama berbasis e-learning atau pembelajaran daring selama 37 JP (jam pelatihan) atau setara dengan tujuh hari dan tahap kedua berbasis klasikal tatap muka di Pusdiklat Pegawai selama 158 JP atau 18 hari.

E-learning PKTBT memberikan banyak manfaat bagi 293 calon PNS generasi millenial sebagai peserta untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara mandiri dan terintegrasi. Pembelajaran, baik materi, tugas, maupun diskusi dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka langsung antara peserta dan fasilitator (widyaiswara/tutor). Sistem pembelajaran lebih mudah diserap karena

400 JP (40 hari) dikoordinasikan oleh Biro SDM dan satuan kerja Calon PNS menggunakan fasilitas multimedia berupa gambar, teks, animasi, suara, atau video. Bagi calon PNS penyandang disabilitas (low vision, tuna netra, dan tuna grahita), PKTBT berbasis e-learning ini juga dapat diikuti dengan baik.

Menurut Ni Komang Suryani Wulandari, S.E. calon PNS peserta Latsar 2018, pelatihan PKTBT merupakan salah satu langkah

strategis untuk mempercepat terwujudnya aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan berdaya guna dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berkelas dunia dan memiliki daya saing. Suatu ketika Ni Komang Suryani Wulandari terjebak kemacetan lalu lintas dalam perjalanan pulang dari tempat kerja dan saat itu bertepatan dengan jadwal untuk mengikuti forum diskusi dengan pengajar. Berkat e-learning, ia tetap dapat mengikuti kegiatan diskusi salah satu mata pelatihan PKTBT di tengah-tengah kemacetan dengan menggunakan ponsel pintarnya. Sementara itu, Dimas Prasetyo Muharam, S.Hum., calon PNS peserta Latsar 2018 yang tuna netra, menyatakan bahwa pelatihan PKTBT dapat diikuti dengan baik dan ia tidak mengalami kesulitan yang berarti. Dengan aplikasi screen reader yang terpasang di laptopnya, Dimas dapat “membaca” materi, mengerjakan tugas, dan menjawab soal-soal kuis pada modul pelatihan serta berdiskusi dengan fasilitator, widyaiswara, narasumber, dan praktisi pengampu mata pelatihan. Hal ini membuktikan bahwa pelatihan PKTBT berbasis e-learning ramah bagi peserta difabel dan inklusif.

**Pengakuan Kualitas dan Penghargaan**

Pusdiklat Pegawai Kemdikbud telah memiliki sistem manajemen mutu. Di samping itu, penjaminan mutu pelatihan dalam bentuk akreditasi lembaga pelatihan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah mengantarkan Pusdiklat Pegawai Kemdikbud mendapat akreditasi A untuk



Pelatihan PKTB berbasis e-Learning bagi CPNS Kemendikbud 2018

Latsar Golongan II dan akreditasi B untuk Diklat Kepemimpinan dan Latsar Golongan III. Tahun 2018 reakreditasi lembaga pelatihan oleh LAN sedang berlangsung untuk Latsar Golongan III, Diklatpim Tingkat III, Diklatpim Tingkat IV, serta akreditasi Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Pada tanggal 6 Agustus 2018, Pusdiklat Pegawai Kemdikbud, melalui proses seleksi, terpilih sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat Terbaik I dalam bidang Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan dan Dasar CPNS Tahun 2018. Ajang lomba ini diselenggarakan oleh LAN. Program unggulan pelatihan PKTBT berbasis e-learning dan klasikal, platform SIMDIKLAT untuk layanan pelatihan, dan penerapan EDMODO dalam coaching (widyaiswara dengan peserta pelatihan) dapat dikatakan sebagai praktik baik yang diapresiasi oleh LAN. Penghargaan ini menjadi momentum

penting bagi Pusdiklat Pegawai Kemendikbud untuk terus bekerja cerdas dan berinovasi mengembangkan kompetensi SDM sekaligus mempertahankan prestasi sebagai penyelenggara terbaik dalam pelatihan berbasis TI di antara 54 satuan kerja penyelenggara pendidikan dan pelatihan di 35 kementerian/lembaga.

Pada Tahun 2018 Pusdiklat Pegawai Kemendikbud juga sedang mengembangkan dan menyelenggarakan dua pelatihan berbasis e-learning dan klasikal, yaitu Pelatihan Teknis Perencanaan Pendidikan Tingkat Dasar dan Pelatihan Fungsional bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP).



# SIMDIKLAT: E-LAYANAN PRIMA UNTUK PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Berawal dari tindak lanjut hasil evaluasi terhadap proses pengumpulan dan pengelolaan data calon peserta dan alumni pelatihan yang dikerjakan secara manual serta memperhatikan keluhan calon peserta pelatihan pada proses registrasi dan keluhan peserta pelatihan mengenai layanan sarana prasarana di kampus Pusdiklat Pegawai Kemendikbud pada Tahun 2015, melalui proyek perubahan dari pejabat struktural yang sedang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, manajemen mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan atau SIMDIKLAT Versi 1.0.

Aplikasi SIMDIKLAT berbasis laman (web) ini memiliki fitur layanan: a) penyiapan jenis pelatihan; b) waktu pelatihan; c) lokasi kelas pelatihan; d) penugasan operator; e) penetapan panitia (ketua, sekretaris, LO); f) penetapan peserta; g) penetapan widyaiswara; h) penetapan mata pelatihan; i) pencetakan kelengkapan (formulir dan tanda peserta); j) pemasukan data evaluasi peserta; k) pemasukan data evaluasi widyaiswara; l) tes akhir; m) penetapan kelompok peserta; n) penetapan coach; o) pemasukan data presensi; p) pemasukan data kompetensi; q) pemasukan data nilai presentasi; r) pemasukan data nilai *post test*; s) evaluasi penyelenggaraan; dan t) cetak sertifikat.

Kemudian dalam upaya peningkatan fungsi pemantauan dan pengendalian pelatihan, pada Tahun 2017 dikembangkan fitur pada aplikasi SIMDIKLAT Versi 2.0 berupa layanan: a) monitoring dan evaluasi; b) rekapitulasi biaya perjalanan dinas peserta; dan c) penetapan asrama dan kamar peserta pelatihan.

Pada Tahun 2018, Pusdiklat Pegawai kembali mengembangkan aplikasi SIMDIKLAT Versi 2.0 menjadi Versi 3.0 dengan menambahkan fitur layanan penanganan keluhan peserta pelatihan (complaint handling system) berbasis ponsel pintar (mobile application) Android dan pencetakan sertifikat yang telah dilengkapi dengan QR code (*Quick Response Code*) yang dapat diunduh dalam format PDF.

Melalui aplikasi ini peserta pelatihan dapat menyampaikan laporan atau keluhan terkait dengan sarana prasarana, penyelenggaraan, dan pengajar pada saat mengikuti pelatihan di Pusdiklat Pegawai. Terdapat 21 butir layanan yang dapat dilaporkan oleh peserta kapan saja dan di mana saja selama berada di Pusdiklat Pegawai. Layanan sarana prasarana meliputi penyejuk ruangan, air bersih, listrik, air minum, asrama/wisma, kebersihan, gedung, kamar tidur, masjid, dan internet. Sarana prasarana yang terkait dengan pembelajaran/ akademik meliputi perlengkapan kelas/ruang belajar, bahan ajar, satgas panitia, dan ruang kelas. Sarana prasarana lain meliputi keamanan, menu makanan, fasilitas olahraga, perpustakaan, dan poliklinik.

SIMDIKLAT Versi 3.0 tersedia di Google Play dalam dua aplikasi, yaitu aplikasi SIMDIKLAT Peserta untuk peserta pelatihan dan SIMDIKLAT Pegawai untuk pejabat struktural, widyaiswara, dan pegawai pelaksana yang bertanggung jawab atas 21 layanan pelatihan yang tersedia di Pusdiklat Pegawai. Melalui aplikasi SIMDIKLAT Peserta, peserta pelatihan dapat melaporkan dan mengeluhkan ketidaknyamanan atau ketidakamanan yang terjadi selama mengikuti pelatihan di Pusdiklat Pegawai melalui ponsel pintar masing-masing. Sementara itu, pegawai pelaksana, widyaiswara, dan pejabat struktural dapat menerima notifikasi setiap laporan dan keluhan peserta pelatihan melalui aplikasi SIMDIKLAT Pegawai. Notifikasi pertama yang diterima oleh pegawai pelaksana atau teknisi yang sedang bertugas ditangani sesuai dengan waktu tanggap (*response time*) dan jika belum terselesaikan/tersolusikan selama waktu tanggap, laporan dan keluhan peserta pelatihan dieskalasi kepada pejabat struktural terkait sesuai dengan waktu resolusi (*resolution time*) untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*). Tim teknisi dengan siaga bertugas shift pagi dan malam untuk memastikan terwujudnya layanan prima bagi peserta pelatihan di kampus Pusdiklat Pegawai Kemendikbud. ■





# HABITUASI DAN MAGANG CPNS

**P ara CPNS harus kepo setidaknya terhadap lima hal. Kelima hal itu adalah perkembangan iptek, inovasi, dinamika zaman, aspirasi dan keinginan masyarakat. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia (Presidential Lecture Istora Senayan Jakarta dalam acara Bersatu dalam Harmoni: Menuju Birokrasi Berkelas Dunia 2024 pada 27 Maret 2018)**

Calon pegawai negeri sipil (CPNS) saat ini merupakan generasi muda era milenial yang memahami teknologi informasi. Mereka pada umumnya cerdas karena dilimpahi dengan banyak informasi dari berbagai sumber. CPNS merupakan talenta positif karena telah melewati tes kompetensi dasar dan TKB dengan mekanisme CAT yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, CPNS perlu dibekali pengetahuan dengan kombinasi metode antara pelatihan, mentoring, coaching, e-learning, dan magang.

CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) formasi Tahun 2017 berjumlah 298 orang. Mereka diwajibkan untuk mengikuti program pelatihan dasar (Latsar) selama 113 hari dengan komposisi 70% pembelajaran dari aktualisasi/pengalaman (experiential learning) dan 30% klasikal. Program ini berlangsung sejak bulan Maret hingga November 2018. Hal ini berarti bahwa CPNS harus menjalani masa percobaan selama satu Tahun sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). CPNS diberikan haknya menerima gaji dan tunjangan kinerja sebesar 60%. Partisipasi dan kinerja CPNS selama program Habitiasi dan Magang akan menentukan diangkat atau tidaknya mereka menjadi PNS.

Sebelum pelaksanaan Latsar, CPNS juga diwajibkan untuk mengikuti Peningkatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT). Program ini bertujuan untuk membekali CPNS dengan materi orientasi tentang Kemendikbud yang meliputi organisasi, tata nilai, rencana strategis, dan program utama. Program Latsar dan PKTBT Tahun 2018 merupakan program baru dan inovatif bagi CPNS. Pada periode sebelumnya, CPNS hanya diwajibkan untuk mengikuti Diklat Prajabatan yang masa pelatihannya tidak sepanjang Latsar 2018.

Tujuan Latsar adalah untuk mempercepat proses adaptasi dan internalisasi CPNS sehingga CPNS dapat langsung bekerja secara produktif pada saat ditempatkan di unit kerjanya. Program klasikal Latsar mencakup tiga agenda, yaitu bela negara, nilai-nilai dasar PNS, serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, sedangkan program aktualisasi terdiri atas Habitiasi dan Magang.

Program Habitiasi dijalani selama 40 hari di unit kerja penempatan asal CPNS. Program ini merupakan penerapan nilai-nilai dasar PNS, yaitu ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, dan Anti Korupsi). CPNS diharapkan dapat mengubah kebiasaannya sebelum Latsar menjadi kebiasaan baru

yang sudah disisipkan dengan nilai-nilai ANEKA. Dalam masa habituasi, CPNS akan melakukan kunjungan kerja (visitasi) ke unit di luar Kemendikbud, tetapi masih relevan dengan tugasnya.

Program Magang terdiri atas Magang I selama 20 hari dan Magang II selama 20 hari di luar unit kerja penempatan. Program Magang memberi kesempatan kepada CPNS untuk mengenal lingkungan Kemendikbud sehingga CPNS memiliki wawasan luas dan tidak hanya mengetahui unit kerja penempatannya. CPNS diharapkan dapat mengetahui cakupan wilayah Kemendikbud sebagai salah satu kementerian terbesar di antara kementerian/ lembaga lainnya.

Mekanisme magang diawali dengan temu awal antara pejabat eselon II, III, dan IV dengan para CPNS. Mentor dan pembimbing menyusun kontrak kerja yang menjadi pegangan selama proses magang. Kontrak kerja memuat tugas yang harus dilaksanakan dan produk kerja yang akan dihasilkan. Mentor dan pembimbing akan memberikan penugasan kepada CPNS sesuai dengan kontrak kerja. CPNS diwajibkan menyusun laporan harian dan laporan magang. Laporan dan produk kerja akan dievaluasi dan diberikan penilaian oleh mentor dan pembimbingnya.

Baik program Habitiasi maupun Magang merupakan implementasi dari kegiatan pembelajaran sambil bekerja (on the job training). Komunikasi sangat penting untuk menunjang keberhasilan program Habitiasi dan Magang. Para pejabat struktural diberikan peran sebagai penanggung jawab, mentor, dan pembimbing yang bertanggung jawab untuk memberikan tugas dan memandu CPNS dalam bekerja selama habituasi dan magang. Tugas-tugas yang diberikan mengacu pada rincian pekerjaan sesuai

dengan nama jabatan CPNS.

Penerima manfaat dari program Habitiasi dan Magang adalah para pejabat struktural yang tidak perlu lagi membimbing dan mengarahkan pegawai dalam waktu yang lama karena pegawai sudah mendapatkan bekal yang memadai selama menjalani Latsar. Di sisi lain, CPNS juga dapat mengenal Kemendikbud sebagai suatu kementerian besar dengan struktur organisasi dan cakupan program serta wilayah kerja yang luas. CPNS juga bisa memahami tentang isu dan program strategis

serta tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka.

Program Habitiasi dan Magang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai. Pembekalan memadai selama Latsar diharapkan dapat membangun kompetensi pegawai sehingga dapat langsung bekerja secara efektif saat mulai bekerja di unit penempatan. Program ini juga diharapkan dapat membentuk karakter pegawai yang berintegritas, tangguh, dan profesional sebagai pelayan masyarakat.■

Penyambutan dan pengarahan CPNS di lingkungan Kemendikbud formasi Tahun 2017





TESTIMONI PROGRAM  
HABITUASI DAN MAGANG  
CPNS

Belina Octasari – Inspektorat  
Jenderal

CPNS yang akrab disapa Bela ini ditugaskan magang di Biro SDM selama 20 hari. Bela adalah analis organisasi di Inspektorat Jenderal. Bela memberikan pendapatnya mengenai pelaksanaan Habitulasi dan Magang CPNS angkatan 2017.

“Menurut saya, pelaksanaan Latsar CPNS on campus perlu perbaikan kualitas widyaiswara dalam penyampaian materi dan cara membangun suasana belajar agar lebih kondusif dan tidak membosankan.”

Saat ditanya tentang kesan pelaksanaan latsar off campus dan magang,

“Pelaksanaan magang dan habituasi masih perlu perbaikan komunikasi dan koordinasi, agar CPNS maupun unit yang ditempatkan lebih siap,”

jawab Bela.

“Program ini sangat bermanfaat, menurut aku, karena aku merasakan kompetensi meningkat, bisa memberikan gambaran praktik kerja yang sesungguhnya, bisa

mengimplementasikan apa-apa yang telah dipelajari on campus, dan juga ANEKA -Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi- bisa diaktualisasikan”,

demikian tanggapan Bela saat ditanya tentang manfaat program ini.

“menurut saya perlu berlanjut untuk CPNS angkatan selanjutnya.”tutup Bela.

Dery Abdurrahim – Biro Sumber  
Daya Manusia

CPNS angkatan 2017 yang akrab disapa Dery mengikuti latsar 2018 dengan metode magang terlebih dahulu baru kemudian pembelajaran. Dery adalah Analis Perencanaan Pegawai di Biro Sumber Daya Manusia. Dery ditugaskan magang di Subbagian Kepegawaian Ditjen GTK pada 20 hari pertama, kemudian di Subbagian Kepegawaian Setditjen Balitbang pada 20 hari berikutnya.

“Program ini cukup baik untuk pengayaan bagi pegawai, terutama mereka yang belum punya pengalaman kerja,”

kata Dery saat ditanya pendapatnya tentang program magang CPNS ini. “terutama dengan pendekatan WOG -Whole of Government- yang memang bertujuan agar ada sinergi antarunit utama untuk pencapaian tujuan organisasi

(Kemendikbud). Ini mampu menekan ego sektoral. karena saat di Biro SDM cakupan kerja luas, sedangkan di unit lain cakupannya unit kerja, saya jadi bisa merasakan menjadi user layanan kepegawaian. Sudut pandang saya jadi lebih luas terkait manajemen SDM.” lanjutnya.

“Program ini sudah cukup baik, hanya perlu perbaikan koordinasi agar unit yang ditempatkan dapat menginvetarisir proyek-proyek yang dapat dikerjakan harian untuk 20 hari kerja, sehingga tidak mengganggu ritme kerja dan juga CPNS yang magang dapat maksimal dalam memberikan kontribusinya,”

demikian usul perbaikan yang disampaikan oleh Dery untuk pelaksanaan program ke depan.

Selanjutnya Dery juga menyampaikan pendapatnya mengenai program habituasi metode pembelajaran, yaitu: “rancangan program habituasi ini sudah bagus. Rancangan program ini menyorot softskill dengan memuat ANEKA dalam setiap aktivitasnya sehingga nantinya dapat menguatkan karakter. Tapi, perubahan kebijakan dan aturan-aturan pelaksanaan latsar sedikit mengganggu penyusunan usul rancangan aktualisasi masing-masing CPNS karena harus memuat rancangan aktivitas sampai dengan dampaknya.”



Pertemuan CPNS magang dari Itjen yang ditempatkan di Biro SDM dengan pejabat penanggung jawab bagian/subbagian

“Selain itu karena CPNS yang mengikuti latsar belum sempat merasakan bekerja di unit asalnya sebelum memulai latsar, sehingga kesulitan dalam memotret permasalahan yang akan dituangkan dalam usul rancangan aktualisasi,” tambahnya.

“Pusdiklat menjembatani permasalahan tersebut dengan mengundang mentor untuk melakukan brainstorming, ini cukup membantu memberikan gambaran unit kerja kita”

kata Dery ketika ditanya bagaimana cara mengatasinya. Terkait sistem pembelajaran, Dery menyampaikan pendapat dan saran terhadap pelaksanaannya.

“CPNS agar diberikan kesempatan 1 sampai 2 minggu untuk bekerja di unit kerja masing-masing sesuai penempatan agar mampu memotret secara jelas permasalahan unit kerjanya. Selain itu juga akan memudahkan penyusunan rancangan program aktualisasi terutama aktivitasnya agar lebih sesuai dan

relevan dengan keadaan di lapangan, dan menentukan dampak yang akan diperoleh unit kerja dengan rancangan program aktualisasi yang diimplementasikan.” saran Dery. ■



# PROGRAM MAGANG BAGI PNS BARU DI LUAR NEGERI

**Sa at ini, kita lakukan proses transformasi dari diklat konvensional jadi diklat human capital management dengan mengembangkan ASN Corporate University. Ini terobosan dalam memfungsikan seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga pembelajaran. Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Liputan 6, 27 Maret 2018)**

Pengembangan kompetensi merupakan investasi utama dalam organisasi modern. Kompetensi sumber daya manusia sebagai aset utama organisasi harus selalu dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan. SDM yang kompeten merupakan syarat utama bagi organisasi pembelajar (*learning organization*) agar mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang sangat dinamis. Dalam konteks ini, pengalaman internasional sangat penting untuk memperluas wawasan pegawai. Oleh karena itu, dirancang program magang bagi pegawai baru di luar negeri.

Pada Tahun 2018 digulirkan program baru untuk meningkatkan kompetensi pegawai, yaitu magang (*secondment*) di luar negeri. Sebelumnya, program magang seperti ini belum pernah dilaksanakan. Program magang ini dirancang sebagai bagian dari paket pengembangan kompetensi pegawai terpadu yang mengombinasikan berbagai metode secara sinergis, antara lain beasiswa pendidikan formal, pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), pelatihan, pembelajaran elektronik (*e-learning*), mentoring,

coaching, dan magang.

Program magang ini menggunakan pendekatan *secondment* yang bermakna bekerja bersama-sama dengan mitra (*to work with*) di unit magang. Program ini berbeda sama sekali dengan magang yang menggunakan pendekatan *apprentice*, yaitu bekerja sambil belajar (*on the job training*). Pendekatan *secondment* menuntut pegawai untuk mampu beradaptasi dengan budaya kerja dan budaya negara penempatan magang secara cepat, serta mampu bekerja sama dengan koleganya.

Sasaran program ini adalah pegawai dari CPNS formasi 2015. Magang akan dilakukan pada SEAMEO (*South East Asian Minister of Education Association*) dan pusat-pusat yang berada di enam negara ASEAN, yaitu Thailand, Singapura, Malaysia, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Ada sembilan pusat SEAMEO yang menjadi lokasi penempatan magang, yaitu:

1. SEAMEO *Secretariat*, Bangkok, Thailand
2. *Community Education Development*, Vientiane, Laos
3. SEAMEO *Regional Centre for Archeology and Fine Arts*

(SPAFA), Bangkok, Thailand

4. *Center for History and Tradition* (CHAT), Yangon, Myanmar
5. *Regional Language Centre* (RELC), Singapura
6. *Regional Centre for Higher Education and Development* RIHED, Bangkok, Thailand
7. *Centre for Education in Science and Mathematics* (RECSAM), Penang, Malaysia
8. *Centre for Special Education* (SEN), Melaka, Malaysia
9. *Regional Training Centre* (RETRAC), Ho Chi Minh City, Vietnam

Para pegawai peserta program magang ini dipilih berdasarkan potensi dan wawancara yang dilakukan secara objektif. Peserta diwawancarai oleh Tim panel terdiri atas SEAMEO Sekretariat, Biro SDM, dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri. Kandidat magang diujakasi sejauh mana motivasinya, kecakapan berbahasa Inggris, kemandirian, keterampilan mengatasi masalah, dan pengetahuan tentang SEAMEO. Dari hasil wawancara disepakati enam belas orang pegawai terpilih untuk mengikuti program magang ini.

Pegawai akan menjalani



Wawancara calon peserta magang luar negeri

magang selama tiga bulan dimulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2018. Pegawai dituntut untuk memahami budaya negara tempatnya magang. Pengalaman bekerja di negara dengan budaya yang berbeda tentu akan membentuk perilaku pegawai menjadi lebih terbuka pola pikirnya dan mampu menerima keanekaragaman. Wawasan pegawai tidak lagi hanya sebatas budaya Indonesia, tetapi juga budaya negara di kawasan Asia Tenggara.

Pegawai juga dituntut untuk berkomunikasi aktif dengan bahasa Inggris karena harus bekerja di institusi internasional. Keterampilan berbahasa Inggris pegawai akan meningkat signifikan setelah mengikuti program magang. Pegawai harus berinteraksi dengan

atasan dan rekan kerja dalam bahasa Inggris. Pegawai juga wajib membaca literatur, menyusun dokumen, dan menulis laporan dalam bahasa Inggris.

Pegawai akan memaknai nilai budaya profesionalisme dari institusi internasional. Profesionalisme yang selama ini dipahami dari bekerja di unit asal tentu akan sangat jauh berbeda dengan nilai profesionalisme yang diakui pada institusi internasional. Pegawai akan menjalani proses habituasi nilai budaya profesionalisme selama magang dan diharapkan setelah magang terus menjadi contoh teladan bagi kolega di tempat kerja asalnya.

Program magang ini diharapkan dapat menghasilkan pegawai bertalenta tinggi, mampu

berbahasa Inggris dengan baik, dan berwawasan internasional. Pegawai juga diharapkan dapat membentuk karakternya menjadi lebih berpikiran terbuka, toleran, dan mengapresiasi keanekaragaman budaya. Bakat kepemimpinan pegawai juga akan lebih terasah dengan penugasan internasional.

Program magang internasional akan dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Para peserta magang diharapkan dapat menyusun sebuah proyek pada akhir masa magangnya. Proyek tersebut akan dipresentasikan kepada atasannya di tempat asal dan diimplementasikan. Pelajaran yang dipetik (*lesson learnt*) selama magang akan menjadi modal besar untuk implementasi proyeknya. ■



# SEAMEO INDONESIA

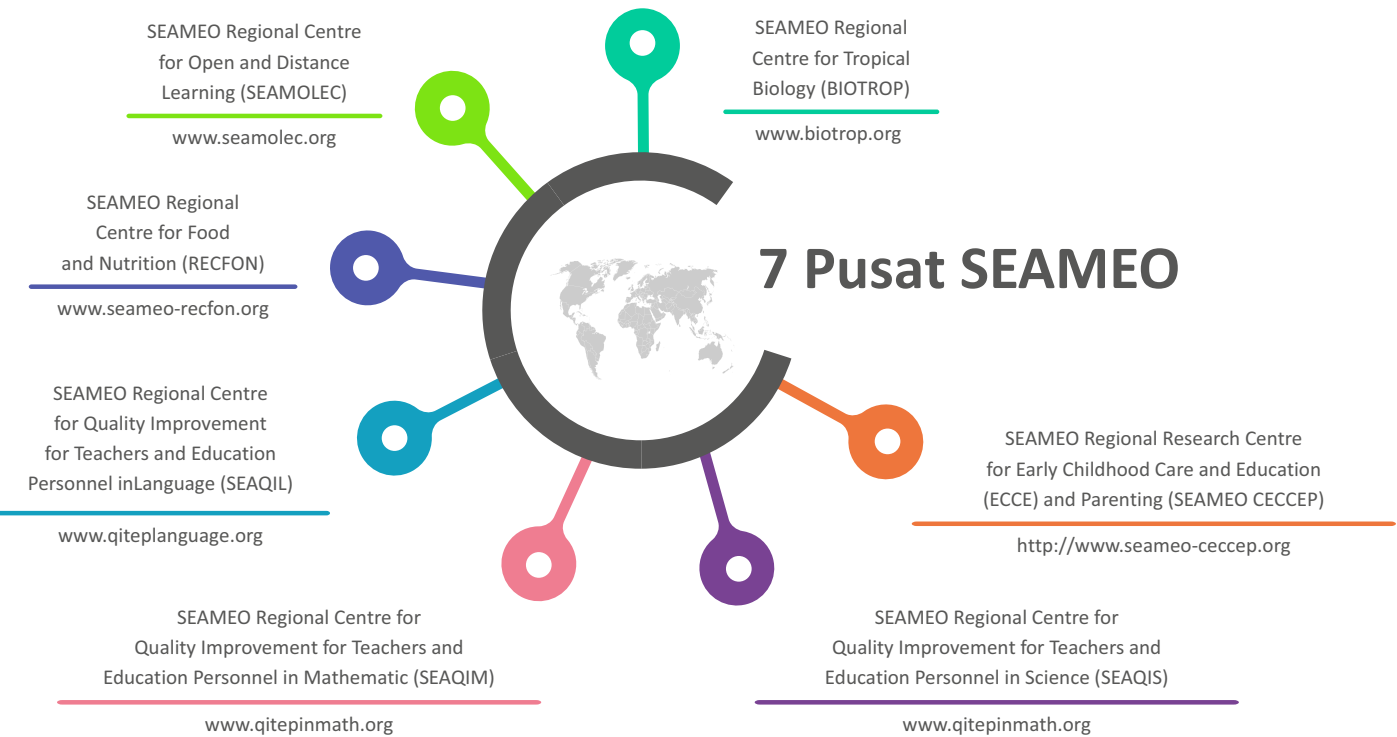
*SEAMEO d apat memperbaiki kualitas hidup manusia dan SEAMEO disediakan tidak hanya sebagai wadah pendidikan, tetapi juga sebagai tempat untuk berbagi ide atau gagasan berdasarkan praktik, dan lain lain. (Prof. Muhadjir Effendy sebagai President SEAMEO Council)*

The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) didirikan pada 30 November 1965 berdasarkan kesepakatan antara Menteri Pendidikan Republik Demokratik Rakyat Laos, Menteri Pendidikan Malaysia, Menteri Pendidikan Singapura, Menteri Pendidikan Thailand, Menteri Pendidikan Vietnam, dan Menteri Pendidikan Indonesia. Tujuan SEAMEO adalah meningkatkan kerja sama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya bagi kesejahteraan

masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Saat ini Presiden SEAMEO Council dijabat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Prof. Muhadjir Effendy, untuk periode Tahun 2017–2019 sesuai dengan kesepakatan pada 49th SEAMEO Council Conference pada tanggal 25 Juli 2017. Presiden SEAMEO Council terpilih akan memimpin sidang pertemuan SEAMEO Council Conference (Chair) selama periode dua Tahun. Tugas lain Presiden SEAMEO Council terpilih adalah melakukan

kunjungan ke-24 Pusat Regional SEAMEO.

Keberadaan SEAMEO Center di Indonesia ditandai dengan adanya *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Memorandum of Agreement (MoA)* antara organisasi SEAMEO dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Pemerintah Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, Indonesia kemudian mendirikan tujuh pusat SEAMEO, yakni:



Selain itu, SEAMEO juga memiliki beberapa program unggulan berupa Pendidikan Terbuka Jarak Jauh Provinsi Jawa Barat dan SEA Digital Class.

## Pendidikan Terbuka Jarak Jauh Provinsi Jawa Barat

SEAMOLEC melakukan kerja sama dengan Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan metode Pendidikan Terbuka Jarak Jauh (PTJJ). Metode tersebut diterapkan untuk sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Bentuk kerja sama SEAMOLEC tersebut SEAMOLEC adalah mendampingi provinsi Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan sistem pendidikan terbuka dan

jarak jauh yang menghasilkan lulusan yang mandiri, memiliki kompetensi keahlian, dan memiliki keterampilan wirausaha.

SEAMOLEC bertugas untuk mengembangkan sistem pembelajaran dan mendampingi pendidik dan tenaga kependidikan Provinsi Jawa Barat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan terbuka dan jarak jauh. SEAMOLEC telah melatih dan mendampingi 90 orang pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SMA dan 96 orang tingkat SMK. Modul yang telah dihasilkan sejumlah berjumlah 222 modul pembelajaran jarak jauh untuk tingkat SMA dan SMK.

## SEA Digital Class

SEA Digital Class (SDC) adalah program kolaborasi antara SEAMOLEC, SEAMEO QITEP in Mathematics, dan SEAMEO

QITEP in Science. Program ini adalah program untuk melakukan optimalisasi potensi peserta didik (*creative thinking, problem solving, problem posing*, dan lainnya) melalui pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kolaborasi guru dan siswa di kawasan Asia Tenggara. Salah satu tahap dalam program SDC adalah dilakukannya tes diagnosis dengan tema “*Adopting 21st Century Curriculum through SEA Digital Class*”. Negara yang berpartisipasi pada tahap ini adalah sepuluh negara anggota SEAMEO, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Timor Leste, Thailand, dan Vietnam. ■

Hasil dari diagnostic test tersebut dapat dilihat melalui: <https://www.qitepinscience.org/wp-content/uploads/2017/09/DIagnostic-Report.pdf>.



# TV EDUKASI VERSI BERGERAK: KOMITMEN KEMENDIKBUD UNTUK KEMUDAHAN AKSES KONTEN PENDIDIKAN

Seiring perkembangan zaman, aplikasi lebih mudah penggunaannya apabila memiliki versi bergerak (*mobile*) yang dapat diakses melalui ponsel pintar. Tuntutan ini yang mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melalui Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom) untuk mengembangkan TV Edukasi versi bergerak. Dengan ini, guru dan siswa tidak perlu lagi kesulitan mengakses tayangan yang sebelumnya harus menggunakan parabola dan TV konvensional untuk menyaksikan konten video TV Edukasi.

Hadirnya TV Edukasi versi bergerak ini dinilai sebagai kabar gembira oleh guru dan orang tua karena anak-anak yang sebelumnya hanya mengakses gawai atau ponsel pintar mereka untuk kebutuhan hiburan melalui kanal video lain, sekarang anak-anak menjadi memiliki alternatif tayangan video yang bersifat lebih edukatif. Selain itu, khususnya untuk guru, proses belajar dan mengajar menggunakan video pembelajaran akan lebih mudah untuk dilakukan.

Video pembelajaran yang disediakan oleh TV Edukasi terdiri atas berbagai macam video, seperti video instruksional, kreativitas, agama, budaya, informasi seputar dunia dan pendidikan. Video-video ini dapat disaksikan baik melalui penyaluran langsung (live



Interface TV Edukasi

streaming) maupun video atas permintaan (video on demand) yang seluruhnya sudah disediakan menjadi satu kesatuan pada fitur aplikasi bergerak TV Edukasi.

Melalui fitur TV penyaluran (streaming), tayangan video merupakan tayangan langsung sesuai dengan yang sedang disiarkan oleh TV Edukasi pada waktu aplikasi diakses, sedangkan video atas permintaan merupakan kumpulan

video yang telah ditayangkan oleh TV Edukasi dan dikelompokkan sesuai dengan kategorinya sehingga dapat diakses sesuai kebutuhan pengguna. Di samping itu, terdapat fitur-fitur pendukung lain seperti radio suara edukasi,



Persentase Isi TV Edukasi

jadwal siaran, ensiklopedia, dan berita edukasi.

Sejak peluncurannya pada Maret 2018, jumlah pengguna yang mengunduh aplikasi TV Edukasi versi bergerak mencapai lebih dari 15 ribu, baik ponsel berbasis Android maupun Apple. Selain itu, jumlah pelanggan TV Edukasi

melalui kanal YouTube berjumlah 4.505 (data per September 2018). Ini merupakan bentuk antusiasme masyarakat yang menyambut baik hadirnya TV Edukasi yang dapat diakses lebih mudah.

Ke depannya, TV Edukasi akan selalu berupaya meningkatkan kualitas konten pembelajaran

demi tujuan kualitas pendidikan yang lebih baik. Hal ini sebagai bentuk kerja nyata dari Kemendikbud untuk mewujudkan prestasi bangsa melalui generasi yang akrab dengan pemanfaatan teknologi. ■



Para siswa menggunakan TV Edukasi sebagai sumber belajar

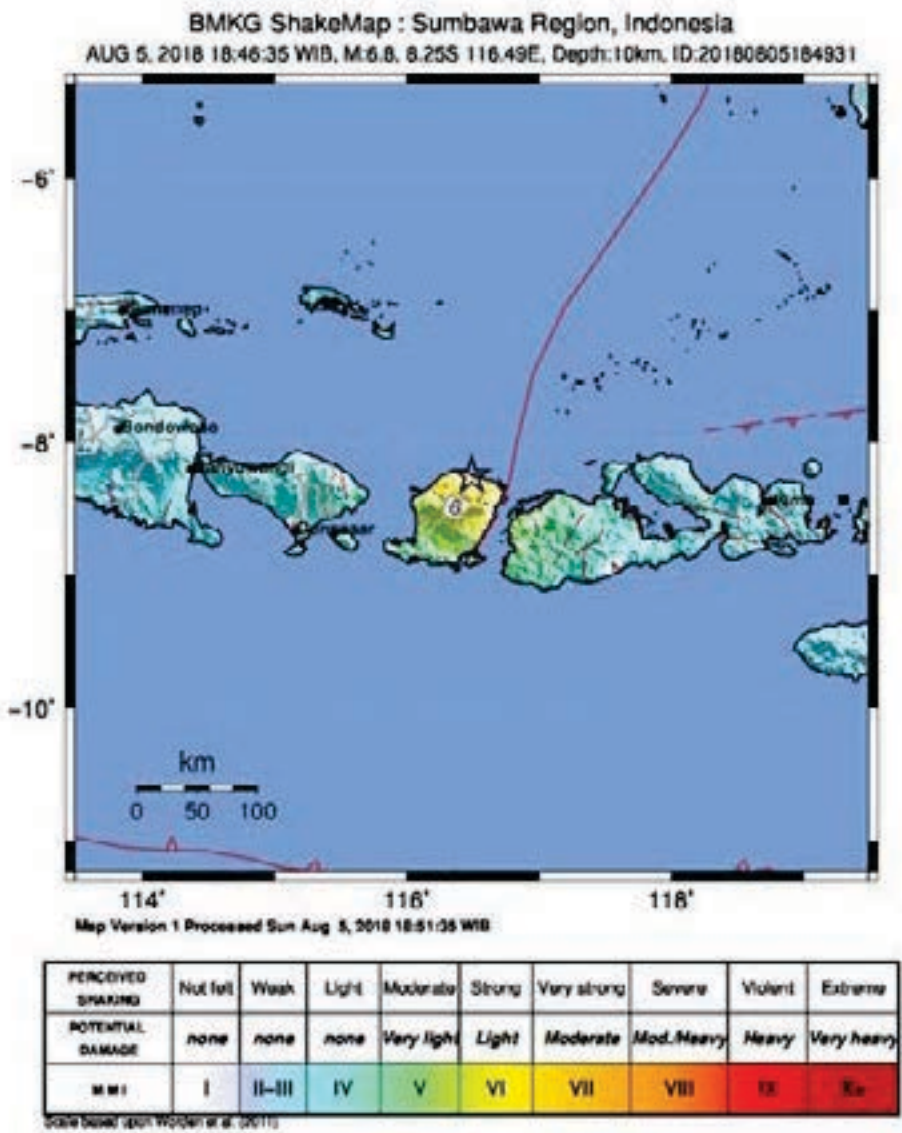


# PENANGANAN GEMPA NUSA TENGGARA BARAT

Indonesia harus terus menghadapi risiko letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir dan tsunami karena posisinya yang berada di Cincin Api Pasifik (wilayah dengan aktivitas tektonik tinggi). Dalam beberapa peristiwa yang terjadi dua puluh Tahun terakhir, Indonesia menjadi judul utama di media dunia karena bencana-bencana alam yang mengerikan dan menyebabkan kematian ratusan ribu manusia dan hewan, serta menghancurkan wilayah daratannya.

Gempa bumi menjadi ancaman bencana alam terbesar di Indonesia karena terjadi tiba-tiba dan bisa menyerang wilayah padat penduduk seperti kota-kota besar. Gempa bumi berkekuatan sekitar 5 skala Richter (SR) terjadi hampir setiap hari di Indonesia dan biasanya tidak atau hanya sedikit menyebabkan kerusakan. Berbeda halnya dengan gempa yang berkekuatan lebih dari 6 SR, sebuah gempa yang dapat menyebabkan banyak kerusakan. Rata-rata, di Indonesia terjadi satu gempa berkekuatan lebih dari 6 SR setiap Tahunnya. Gempa ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur serta lingkungan hidup.

Pada 29 Juli 2018, pukul 06.47 WITA terjadi gempa darat berkekuatan 6,4 moment magnitude (Mw) di Pulau Lombok, Indonesia. Pusat gempa berada di 47 km timur laut Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan



kedalaman 24 km. Guncangan gempa bumi dapat dirasakan di seluruh wilayah Pulau Lombok, Pulau Bali, dan Pulau Sumbawa. Gempa bumi ini berpusat di darat dekat Gunung Rinjani, wilayah Kabupaten Lombok Timur. Jika memperhatikan lokasi dan kedalamannya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal

yang disebabkan aktivitas sesar naik flores (flores back arc thrust). Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa ini dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault). Gempa ini merupakan rangkaian gempa awal sebelum terjadinya gempa bermagnitudo lebih besar yang



Salah satu sekolah terdampak gempa di NTB

mengguncang Lombok pada 5 Agustus 2018.

Pada 5 Agustus 2018, pukul 19:46 WITA, gempa darat berkekuatan 7 Mw melanda Pulau Lombok, Indonesia. Pusat gempa berada di 18 km barat laut Lombok Timur, NTB dengan kedalaman 32 km. Gempa bumi ini merupakan gempa utama dari rangkaian gempa bumi di Pulau Lombok sejak gempa awalan 6,4 Mw pada akhir Juli lalu. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melansir peringatan terjadinya tsunami akibat gempa ini. Pusat gempa bumi ini berada di sekitar wilayah perbatasan Kabupaten Lombok Utara dengan Kabupaten

Lombok Timur. Guncangan gempa bumi ini dilaporkan United States Geological Survey dapat dirasakan di seluruh Pulau Lombok, Pulau Bali, Pulau Sumbawa, Pulau Madura, Pulau Jawa bagian timur, serta sebagian Pulau Sumba dan Pulau Flores. Guncangan terkuat berada di seluruh wilayah Pulau Lombok berupa guncangan VI—VIII modified mercalli intensity (MMI), terutama di Lombok Utara, sedangkan di Pulau Bali dan Pulau Sumbawa bagian barat dirasakan guncangan V—VI MMI. Dengan memperhatikan lokasi dan kedalamannya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal yang disebabkan aktivitas

sesar naik busur belakang flores (flores back arc thrust). Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Salah Satu Sekolah Terdampak Gempa di Nusa Tenggara Barat

Pada tanggal 19 Agustus 2018 terjadi gempa darat berkekuatan 6.5 Mw yang di Lombok Timur, Indonesia. Peristiwa tersebut adalah gempa bumi ketiga yang menerjang Lombok setelah gempa bumi 29 Juli 2018 dan 5 Agustus 2018. Gempa bumi tersebut juga terjadi pada hari yang sama dengan gempa bumi berkekuatan



8.2 Mw yang mengguncang Fiji.

Gempa yang terjadi di NTB juga berdampak pada dunia pendidikan, mulai dari sarana prasarana, peserta didik beserta orang tuanya, hingga guru dan tenaga kependidikan lainnya. Berdasarkan data yang dikompilasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 218.224 peserta didik yang terdampak bencana NTB, 33 di antaranya meninggal dunia, 29 rawat inap, dan 36.902 peserta didik lainnya mengungsi.

Lebih lanjut, terdapat 1.171 satuan pendidikan terdampak di seluruh NTB dengan rincian sebagai berikut:

- Lombok Barat 205
- Lombok Utara 294
- Lombok Tengah 140
- Lombok Timur 204
- Mataram 84
- Sumbawa 166
- Sumbawa Barat 74
- Dompu 4

Dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Lombok, NTB, pada 23 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB untuk memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana.

Melalui Inpres tersebut,

Presiden Jokowi menginstruksikan kepada 19 menteri Kabinet Kerja, panglima TNI, kapolri, jaksa agung, kepala BNPB, kepala BPKP, kepala LKPP, Gubernur NTB, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, dan Wali Kota Mataram untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB.

Kesembilan belas menteri yang mendapat instruksi itu adalah 1. menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan; 2. menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; 3. menteri koordinator bidang perekonomian; 4. menteri koordinator bidang kemaritiman; 5. menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 6. menteri dalam negeri; 7. menteri agama; 8. menteri pendidikan dan kebudayaan; 9. menteri kesehatan; 10. menteri sosial; 11. menteri energi dan sumber daya mineral; 12. menteri komunikasi dan informatika; 13. menteri lingkungan hidup dan kehutanan; 14. menteri pertanian; 15. menteri badan usaha milik negara; 16. menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah; 17. menteri perdagangan; 18. menteri keuangan; serta 19. menteri agraria dan tata ruang/kepala BPN.

Berdasarkan Inpres tersebut, rehabilitasi pascabencana gempa bumi dilakukan melalui: 1. perbaikan lingkungan bencana; 2.

perbaikan prasarana dan sarana umum; 3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; 4. pemulihan sosial psikologis; 5. pelayanan kesehatan; 6. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; 7. pemulihan keamanan dan ketertiban; 8. pemulihan fungsi pemerintahan; serta 9. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Adapun rekonstruksi pascabencana gempa bumi dilakukan melalui: 1. pembangunan kembali prasarana dan sarana; 2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; 3. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; 4. penerapan rancang bangun yang tepat serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; 5. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; 6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; 7. peningkatan fungsi pelayanan publik; serta 8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Inpres tersebut menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi sarana berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, agama, dan penunjang perekonomian agar dapat diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Desember 2018, serta sarana lain diselesaikan paling lambat Desember 2019.

“Dengan dicanangkannya Gerakan Kembali Sekolah ini, untuk mempertegas kembali, apa pun kondisinya, anak-anak NTB tidak boleh berhenti belajar. Tiada hari tanpa belajar,” (Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 9 September 2018)

Guna memulihkan pendidikan yang ada di NTB, Kemendikbud telah merancang Gerakan Kembali ke Sekolah, yaitu suatu gerakan untuk mendorong pelaku pendidikan NTB agar siap kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif. Salah satu upaya yang dilakukan gerakan tersebut adalah dengan menyiapkan bantuan sebesar Rp. 285.785.731.000,00 yang terbagi dalam beberapa bentuk bantuan. Sebagai bentuk penanganan darurat, Kemendikbud membangun kelas darurat yang dibuat dari 133 tenda sesuai standar UNICEF dan 179 terpal yang dibangun secara gotong royong oleh warga sekitar. Hingga saat ini, proses pembangunan tenda darurat masih terus dilakukan.

Kegiatan Trauma Healing di Tenda Kemendikbud

Selain pembangunan infrastruktur pendidikan, terdapat satu hal yang tidak kalah penting untuk dibangun ataupun dipulihkan, yakni mendorong peserta didik, termasuk guru serta tenaga kependidikan untuk kembali bersemangat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, Kemendikbud berupaya sekuat tenaga untuk menyelenggarakan trauma healing kepada seluruh pelaku pendidikan, termasuk peserta didik terdampak di NTB.

Kemendikbud melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan unit pelaksana teknis daerah NTB memberikan pelayanan trauma healing bagi peserta didik dengan mengirim

tenaga-tenaga profesional untuk memulihkan keadaan psikososial peserta didik. Kegiatan trauma healing terpusat di sekolah darurat yang dibangun Kemendikbud. Melalui kegiatan tersebut diharapkan para peserta didik tidak lagi trauma dengan lingkungan sekolah pascabencana. Kegiatan trauma healing beragam, disesuaikan dengan lingkungan tempat trauma healing dilaksanakan. Ragam kegiatan tersebut mulai dari membaca dongeng bersama, bermain permainan edukatif, hingga menonton film-film edukatif.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Membagikan Buku Dongeng kepada Peserta Didik yang Terdampak Bencana di Sumbawa Barat

Lebih lanjut, Kemendikbud juga menyalurkan bantuan senilai Rp. 67.566.000.000,00 kepada guru dan tenaga kependidikan (GTK) terdampak. Bantuan tersebut disalurkan kepada 3.550 GTK PNS dan 3.960 GTK bukan PNS yang disalurkan selama enam bulan sebesar Rp9.000.000,00 persatu orang GTK PNS dan Rp. 12.000.000,00 persatu orang GTK bukan PNS.

Selama kegiatan belajar dan mengajar berlangsung di sekolah darurat, Kemendikbud juga berupaya untuk merehabilitasi ruang kelas terdampak yang ada di 787 sekolah yang tersebar di NTB. Total biaya yang dianggarkan untuk rehabilitasi tersebut sebesar Rp. 202.635.421.796,00.

Pembangunan sekolah-sekolah baru di NTB akan disesuaikan dengan sistem zonasi yang selama ini diterapkan oleh Kemendikbud.

Hal ini berarti sekolah-sekolah baru akan berdiri di wilayah yang memiliki anak-anak usia sekolah sehingga upaya pemerataan pendidikan yang berkualitas pun dapat dilakukan dengan lebih cepat. ■



Tingkatkan Tata Kelola, Hadirkan Layanan Prima  
Mendikbud membagikan buku dongeng bagi peserta didik terdampak bencana di Sumbawa Barat



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyapa anak-anak korban bencana alam gempa di Kabupaten Sumbawa



Tingkatkan Tata Kelola, Hadirkan Layanan Prima

Gempa terjadi pada 28 September 2018 pukul 17:02 WIB, Berkekuatan 7,4 SR pada kedalaman 10 Km



## PENANGANAN GEMPA NUSA PALU, SIGI, DONGGALA, DAN PARIGI MOUTONG

*Ini memang berat, tetapi kerja keras kita untuk membangun kembali Sulteng supaya bisa bangkit kembali, lebih baik lagi,  
Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 6 Oktober 2018*

Pada tanggal 28 September 2018, pukul 18.02 WITA, gempa bumi berkekuatan 7,4 Mw yang diikuti oleh tsunami menerjang Sulawesi Tengah. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut Kota Palu dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa bumi dirasakan di Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten

Mamuju, bahkan hingga Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Makassar. Gempa memicu tsunami hingga ketinggian lima meter di Kota Palu

Beberapa saat setelah puncak gempa terjadi, muncul gejala likuefaksi (hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat beban getaran gempa) yang memakan banyak korban jiwa dan material. Dua tempat yang paling terdampak adalah Kelurahan

Petobo dan Perumnas Balaroa di Kota Palu. Balaroa terletak di tengah-tengah sesar palu-koro. Saat peristiwa likuefaksi, terjadi kenaikan dan penurunan muka tanah. Beberapa bagian amblas hingga lima meter, sedangkan bagian yang lainnya naik hingga dua meter. Di Petobo, ratusan rumah tertimbun lumpur hitam dengan ketinggian 3—5 meter. Setelah gempa terjadi, tanah di daerah itu dengan cepat berubah



Salah satu desa yang mengalami  
likuifasi di Kota Palu

menjadi lumpur yang menghisap bangunan-bangunan di atasnya. Di Balaroa, rumah amblas bagai terhisap ke dalam tanah. Adrin Tohari, peneliti LIPI menyebutkan bahwa di bagian tengah zona sesar palu-koro tersusun endapan sedimen yang berumur muda dan belum terkonsolidasi/mengalami pemadatan. Oleh karena itu, rentan mengalami likuefaksi jika ada gempa besar.

Laporan dan dokumentasi likuefaksi juga muncul dari perbatasan Kabupaten Sigi dengan Kota Palu. Lumpur muncul dari bawah permukaan tanah dan menggeser tanah hingga puluhan meter yang akhirnya menenggelamkan bangunan dan korban hidup-hidup. Menurut data, likuefaksi yang terjadi di Perumnas Balaroa menenggelamkan sekitar 1.747 unit rumah; sementara di Kelurahan Petobo sekitar 744 unit rumah tenggelam. Jumlah korban jiwa belum dapat dikumpulkan hingga 2 Oktober 2018.

Hingga 3 Oktober 2018, tim SAR telah menemukan korban meninggal dunia akibat likuefaksi di Perumnas Balaroa sebanyak 48 orang dan di Petobo sebanyak 36 orang. Di Jono Oge, Kabupaten Sigi, luasan likuefaksi mencapai 202 hektare dan mengakibatkan sebanyak 36 bangunan rusak serta 168 bangunan mungkin rusak. Di Petobo, Palu, luasan likuefaksinya mencapai 180 hektare dan mengakibatkan sebanyak 2.050 bangunan rusak serta 168 bangunan mungkin rusak. Pemerintah telah mengerahkan tujuh alat berat guna membantu proses pencarian korban. Di wilayah Balaroa



luasan likuefaksinya mencapai 47,8 hektare dan mengakibatkan 1.045 bangunan rusak, dikerahkan lima alat berat. Di luar Petobo dan Balaroa terjadi pula kerusakan parah di Desa Tosale, Desa Towale, dan Desa Loli, Kabupaten Donggala. Adapun dalam bidang infrastruktur, daerah Kecamatan

Sigi Biromaru, Sigi, terdapat jalur Palu-Napu yang menjadi akses menuju Poso, terutama Lembah Napu. Di daerah tersebut terlihat dengan jelas bagaimana jalan bergelombang, aspal terbuka menganga hingga kedalaman lebih dari tiga meter, tanah retak, bergelombang serta kebun jagung

dan kelapa yang terseret.

Berdasarkan data tanggal 25 Oktober 2018, bencana tersebut mengakibatkan setidaknya 1.509 satuan pendidikan terdampak dengan rincian sebagai berikut:

Kota/Kab	Ruang Kelas Rusak			Sekolah Terdampak
	R. Berat	R. Sedang	R. Ringan	
Donggala	573	1.237	1.309	635
Parigi Moutong	72	53	182	98
Sigi	244	176	144	398
Palu	562	590	911	378
Total				1.509

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi LPMP Sulawesi Tengah



Bencana tersebut tidak hanya berdampak pada sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga terhadap peserta didik,

kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Bencana tersebut memberikan dampak terhadap 184.876 peserta didik

dan 13.229 guru dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Peserta Didik dan Guru yang terkena dampak gempa di Sulawesi Tengah

Kota/Kab	Peserta didik terdampak			Total Peserta Didik Terdampak (termasuk mengungsi)
	Meninggal	Hilang	Luka Berat	
Donggala	6	-	-	63.174
Parigi Moutong	-	-	-	20.965
Sigi	13	2	4	21.626
Palu	183	171	22	79.111
Total				184.876
Kota/Kab	Guru terdampak			Total Guru Terdampak (termasuk mengungsi)
	Meninggal	Hilang	Luka Berat	
Donggala	2	-	-	4.633
Parigi Moutong	-	-	-	1.434
Sigi	19	1	3	1.638
Palu	27	33	8	5.524
Total				13.229

Selanjutnya, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Kemendikbud memastikan kegiatan belajar mengajar pascagempa di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) akan tetap berjalan. Untuk mempercepat hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menegaskan akan segera memulihkan sarana

prasarana dan fasilitas pendidikan yang terdampak gempa bermagnitudo 7,4 skala Richter tersebut.

Sebagai bentuk penanganan darurat bencana, Kemendikbud mengaktifkan dan mengelola beberapa POS pendidikan, mendistribusikan makanan, air mineral, susu, makanan bayi, obat-obatan, selimut, dan bahan bakar minyak

sebanyak 17 truk yang didistribusikan kepada tenaga kependidikan. Selain itu, Kemendikbud juga membentuk satgas yang berpusat di LPMP Sulteng untuk melakukan pendataan fasilitas pendidikan, peserta didik, dan kebudayaan.





Tenda terstandar UNICEF yang sudah berdiri di Palu

Guna mengefektifkan kembali kegiatan belajar mengajar di lokasi bencana, Kemendikbud mempersiapkan Rp. 246.530.000.000,00. Dana bantuan tersebut digunakan untuk berbagai hal termasuk mendirikan 333 sekolah darurat yang terdiri atas ruang-ruang belajar darurat berupa tenda dan bangunan semipermanen. Bangunan pertama yang didirikan adalah tenda darurat sesuai standar United Nations Children's Fund

(UNICEF) yang berwarna putih disertai ventilasi. Berikutnya adalah bangunan darurat yang terbuat dari kayu atau bambu beratapkan terpal dengan kapasitas tujuh ruang kelas. Ruang-ruang belajar darurat tersebut diprioritaskan untuk ditempatkan di titik-titik dekat lokasi pengungsian, tempat berkumpulnya anak-anak. Terkait pembangunan kembali fasilitas pendidikan, Kemendikbud bekerja sama dengan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun sekolah baru untuk menggantikan sekolah berkategori rusak berat. Namun, pembangunan sekolah tersebut masih menunggu rekomendasi terkait lokasi yang dinyatakan aman.

Penanganan psikososial juga terus dilakukan dengan berbagai lembaga untuk memulihkan kondisi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Sama halnya seperti di



NTB, Kemendikbud mengirim tenaga-tenaga profesional guna menyelenggarakan kegiatan trauma healing. Di sana, tenaga-tenaga tersebut melakukan kegiatan pemutaran film edukatif, membagikan paket buku-buku cerita, dan alat permainan edukatif untuk mengembalikan semangat belajar anak-anak.

Khusus untuk guru terdampak,

Kemendikbud menyiapkan bantuan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 untuk pelatihan guru pascabencana (konseling trauma), Rp. 600.000.000,00 untuk program peningkatan kompetensi dasar, dan Rp. 300.000.000,00 untuk pelatihan guru.

Selain itu, Kemendikbud juga segera menerbitkan peraturan terkait Satuan Pendidikan

Aman Bencana sebagai bagian dari upaya membangun budaya ketahanan bencana sejak dini dan sistematis. Edukasi tentang ketahanan bencana diharapkan dapat dilakukan melalui sekolah-sekolah dengan melibatkan berbagai pihak seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). ■





## PENUTUP

Alhamdulillah, telah sampai akhir perjalanan Tahun 2018 ini. Semoga buku ini lebih dari sekedar wadah informasi dan refleksi atas perjalanan kita seTahun ini, namun juga menjadi inspirasi kita untuk perbaiki kinerja diri demi kemajuan negeri. Terima kasih atas kerja bersama dalam menghadirkan buku ini. Atas segala kekurangan, kami berharap uluran tangan untuk perbaiki bersama.

Selamat melanjutkan ikhtiar untuk bangsa ini, terus bekerja, rajut lebih banyak prestasi.



Daftar Akronim

APK	:	Angka Partisipasi Kasar	Puskurbuk	:	Pusat Kurikulum dan Perbukuan
ASEAN	:	Association of South East Asia Nation	RKB	:	Ruang Kelas Baru
ATM	:	Anjungan Tunai Mandiri	RUU	:	Rancangan Undang-Undang
Bimtek	:	Bimbingan Teknis	SARA	:	Suku, Agama, Ras dan Antargolongan
BOP	:	Bantuan Operasional Pendidikan	SDM	:	Sumber Daya Manusia
CLC	:	Community Learning Centre	SKB	:	Sanggar Kegiatan Belajar
BK	:	Bimbingan Konseling	SKKNI	:	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
BKK	:	Bursa Kerja Khusus	SKL	:	Standar Kompetensi Lulusan
BNSP	:	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	SMALB	:	Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
BSNP	:	Badan Standar Nasional Pendidikan	SQ	:	Spiritual Quotient
DAK	:	Dana Alokasi Khusus	ToT	:	Training of Trainer
Dapodik	:	Data Pokok Pendidikan	TBM	:	Taman Baca Masyarakat
DUDI	:	Dunia Usaha dan Dunia Industri	TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
FFI	:	Festival Film Indonesia	TUK	:	Tempat Uji Kompetensi
FTV	:	Film Televisi	UNBK	:	Ujian Nasional Berbasis Komputer
GGD	:	Guru Garis Depan	UNKP	:	Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil
GLN	:	Gerakan Literasi Nasional	UNESCO	:	United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
HOTS	:	Higher Order Thinking Skills			
KD	:	Kompetensi Dasar	UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
KI	:	Kompetensi Inti	US	:	Ujian Sekolah
KIP	:	Kartu Indonesia Pintar	USB	:	Unit Sekolah Baru
KIS	:	Kartu Indonesia Sehat	USBN	:	Ujian Sekolah Berstandar Nasional
KKG	:	Kelompok Kerja Guru	USO	:	Universal Service Obligation
KKP	:	Kawah Kepemimpinan Pelajar	UU Sisbuk	:	Undang-Undang Sistem Perbukuan
KS	:	Kepala Sekolah	WBTB	:	Warisan Budaya Tak Benda
LKP	:	Lembaga Kursus dan Pelatihan	WHCI	:	World Heritage Camp Indonesia
LPMP	:	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan	WSC	:	World Skill Competition
LPTK	:	Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat			
LSP	:	Lembaga Sertifikasi Profesi			
LSP-P1	:	Lembaga Sertifikasi Profesi – Pihak Pertama			
LSP-P2	:	Lembaga Sertifikasi Profesi – Pihak Kedua			
MGMP	:	Musyawarah Guru Mata Pelajaran			
MKKS	:	Musyawarah Kerja Kepala Sekolah			
NISN	:	Nomor Induk Siswa Nasional			
NPSN	:	Nomor Pokok Sekolah Nasional			
OGN	:	Olimpiade Guru Nasional			
PBSR	:	Pameran Besar Seni Rupa			
PKBM	:	Pusat Kegiatan Belajar Mengajar			
PMR	:	Palang Merah Remaja			
PPG	:	Pendidikan Profesi Guru			
PPDB	:	Penerimaan Peserta Didik Baru			
PPK	:	Penguatan Pendidikan Karakter			
PPPPTK	:	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
PS	:	Pengawas Sekolah			

UCAPAN  
TERIMA KASIH

Kami, PASKA, haturkan banyak terima kasih atas bantuan seluruh pihak, terutama kontributor dari semua unit utama di lingkungan Kemendikbud, para staf ahli dan staf khusus Mendikbud; tentunya buku ini kita selesaikan buku ini karena kerja dan prestasi kita bersama. Buku ini tentunya juga merupakan cerminan dari

#KerjaKitaPrestasiBangsa.

Salam



DI BALIK LAYAR

